



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD

Kab. Wonogiri

Tahun
2025-2029

BAPPERIDA KABUPATEN WONOGIRI
2025



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta ketahanan sumber daya alam lingkungan dan bencana diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang menghasilkan sasaran pokok dan arah kebijakan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum pada semua pihak yang terlibat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 maka diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan

pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025-2026.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Wonogiri.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Rencana Tata Ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan kedalam struktur dan pola ruang wilayah.
20. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

21. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Gambaran Umum Daerah
BAB III	:	Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
BAB IV	:	Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BAB V	:	Penutup

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

Pasal 4

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari :
- a. Visi, Misi dan program Bupati terpilih Tahun 2025; dan
 - b. tujuan, sasaran, Strategi, arah kebijakan pembangunan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan :
- a. RPJMD Provinsi;
 - b. RTRW;
 - c. RPJMD kabupaten/kota sekitar.

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman :

- a. penyusunan RKPD, Renstra dan Renja PD;
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2029.

Pasal 6

RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. terjadi perubahan yang mendasar, dan/atau;
 - d. merugikan kepentingan Daerah dan nasional.
- (2) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra PD.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Perda .

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan capaian sasaran tahunan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat RPJMD Tahun 2025-2029 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 serta mengacu pada Ranwal RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 dan RPJMN.

Pasal 12

Pada saat RPJMD Tahun 2030 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI WONOGIRI,
ttd
SETYO SUKARNO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

ttd

F.X.PRANATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA

TENGAH: (2-141/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

F. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.

NIP. 19740519 199903 2 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu disusun RPJMD selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMN serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat arah dan kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra - PD dan RKPD pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Perda tentang RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Sistematika RPJMD merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemangku kepentingan” adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, representasi Partai Politik, LSM/ ORMAS, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota serta desa/kelurahan, pengusaha/investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 209

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3	Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4	Maksud Dan Tujuan	I-12
1.5	Metode Pelaksanaan.....	I-13
1.6	Sistematika Penulisan Dokumen RPJMD	I-15

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1.	Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-38
2.1.3	Aspek Daya Saing Daerah	II-111
2.1.4	Aspek Pelayanan Umum.....	II-143
2.1.5	Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II-176
2.1.6	Kerjasama Daerah.....	II-182
2.1.7	Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD	
2.1.8	BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemerintah Daerah.....	II-183
2.2.	Gambaran Keuangan Daerah	II-184
2.2.1	Realisasi APBD tahun 2020-2024.....	II-184
2.2.2	Proyeksi Keuangan Tahun 2026-2030	II-193
2.2.3	Alternatif Sumber Pendapatan Lain.....	II-200
2.3.	Permasalahan dan Isu Strategis	II-201
2.3.1	Permasalahan Pembangunan	II-201
2.3.2	Isu-Isu Strategis.....	II-214

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1.	Visi	III-1
3.2.	Misi.....	III-3

3.3.	Tujuan dan Sasaran.....	III-4
3.4.	Strategi dan arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	III-24
3.5.	Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	III-56

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1.	Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	IV-72

BAB V PENUTUP

5.1.	Manajemen Risiko	V-1
5.2.	Pedoman Transisi.....	V-5
5.3.	Kaidah Pelaksanaan.....	V-5

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.	Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Wonogiri.....	II-6
Tabel 2. 2.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Wonogiri 2020-2024...	II-8
Tabel 2. 3.	Perhitungan Proyeksi Daya Dukung Lahan Pangan Beras di Kabupaten Wonogiri Tahun 2029	II-10
Tabel 2. 4.	Ambang Batas Daya Dukung Air Kabupaten Wonogiri....	II-11
Tabel 2. 5.	Proyeksi Neraca Kebutuhan dan Ketersediaan Air di Kabupaten Wonogiri.....	II-13
Tabel 2. 6.	Daya Tampung Air Sungai di Kabupaten Wonogiri	II-16
Tabel 2. 7.	Daya Tampung Air Sungai di Kabupaten Wonogiri	II-17
Tabel 2. 8.	Daya Tampung Air Sungai di Kabupaten Wonogiri	II-18
Tabel 2. 9.	Daya Tampung Air Sungai di Kabupaten Wonogiri	II-19
Tabel 2. 10.	Data Pemakaian tenaga Listrik Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-21
Tabel 2. 11.	Capaian Akses Air Minum di Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2024	II-21
Tabel 2. 12.	Data Capaian Indeks Ketahanan Pangan dan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024.....	II-23
Tabel 2. 13.	Skor PPH Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-23
Tabel 2. 14.	Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024.....	II-26
Tabel 2. 15.	Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024	II-27
Tabel 2. 16.	Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024	II-27
Tabel 2. 17.	Jumlah dan Luas TPS 3R.....	II-28
Tabel 2. 18.	Jumlah dan Tipe TPS Tahun 2024	II-28
Tabel 2. 19.	Jumlah dan Jenis Armada/Alat Berat Pengelolaan Sampah Tahun 2024.....	II-30
Tabel 2. 20.	Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pengolahan IPLT Tahun 2024	II-30
Tabel 2. 21.	Data Sampah Terkelola Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-30
Tabel 2. 22.	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	II-31

Tabel 2. 23.	Perkembangan jumlah emisi (CO2 (TonCO2e) berdasarkan sektor Kabupaten Wonogiri.....	II-33
Tabel 2. 24.	Indeks Risiko Bencana dan Indikator Ketahanan Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2020-2024	II-34
Tabel 2. 25.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-35
Tabel 2. 26.	Proyeksi Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2030	II-36
Tabel 2. 27.	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024	II-38
Tabel 2. 28.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2020-2024.....	II-39
Tabel 2. 29.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	II-40
Tabel 2. 30.	Distribusi Persentase tiap sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024.....	II-40
Tabel 2. 31.	Distribusi Persentase tiap sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024.....	II-41
Tabel 2. 32.	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Wonogiri 2020-2024	II-42
Tabel 2. 33.	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Wonogiri 2020-2024	II-43
Tabel 2. 34.	Perbandingan Rasio Perubahan TPT Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Capaian Nasional Tahun 2020-2024	II-44
Tabel 2. 35.	Perbandingan Rasio Perubahan Tingkat Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-44
Tabel 2. 36.	Perbandingan Rasio Perubahan Rasio Gini Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Capaian Nasional Tahun 2020-2024	II-45
Tabel 2. 37.	PDRB Perkapita (ADHK) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-45
Tabel 2. 38.	PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Wonogiri Tahun	

	2020-2024	II-46
Tabel 2. 39.	Perbandingan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024.....	II-47
Tabel 2. 40.	Perbandingan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten/Kota se Subosukowonosraten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-48
Tabel 2. 41.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya tahun 2020-2024	II-50
Tabel 2. 42.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan rata-rata capaian wilayah Subosukawonosraten, capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	II-51
Tabel 2. 43.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-52
Tabel 2. 44.	Perbandingan Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-53
Tabel 2. 45	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas Yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD tahun 2020-2024	II-53
Tabel 2. 46.	Pemerataan Pendapatan Penduduk Menurut Kriteria Bank Dunia Tahun 2020-2024.....	II-54
Tabel 2. 47.	Indeks Williamson Kabupaten Wonogiri dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-57
Tabel 2. 48.	Indeks Rasio Gini Kabupaten Wonogiri tahun 2020- 2024	II-58
Tabel 2. 49.	Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Wonogiri dengan Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2020-2024.....	II-59
Tabel 2. 50.	Perbandingan Indeks Rasio Gini Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten/Kota se Subosukowonosraten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-202460	
Tabel 2. 51.	Perkembangan IPM Kabupaten Wonogiri Tahun 2020- 2024	II-61
Tabel 2. 52.	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	

	Kabupaten Wonogiri Dengan Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2020-2024	II-62
Tabel 2. 53.	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Daerah Dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Yang Setara (Subosukawonosraten), Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	II-63
Tabel 2. 54.	Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-65
Tabel 2. 55.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah Dengan Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2020-2024.....	II-66
Tabel 2. 56.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Wonogiri Dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Subosukawonosraten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	II-67
Tabel 2. 57.	Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) di Kabupaten Wonogiri dan Nasional Tahun 2020-2024 ⁶⁹	
Tabel 2. 58.	Tingkat Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Daerah Tahun 2020-2024	II-72
Tabel 2. 59.	Perbandingan Perubahan Pencapaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Wonogiri Dengan Capaian Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2020- 2024	II-73
Tabel 2. 60.	Perbandingan Perubahan Pencapaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Wonogiri dengan Capaian Nasional Tahun 2020-2024	II-74
Tabel 2. 61.	Usia Harapan Hidup (AHH) Kabupaten tahun 2020- 2024	II-78
Tabel 2. 62.	Perbandingan UHH dan Pertumbuhan UHH Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten/Kota Sewilayah Subosukowonosraten, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-78
Tabel 2. 63.	Kejadian Gizi Buruk di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-79
Tabel 2. 64.	Kondisi Penyakit Menular Kabupaten Wonogiri 2020- 2024	II-85
Tabel 2. 65.	Kondisi Penyakit Menular Provinsi Jawa Tengah 2020-	

	2024	II-86
Tabel 2. 66.	Kondisi Penyakit Tidak Menular Di Kabupaten Wonogiri	II-87
Tabel 2. 67.	Perkembangan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-88
Tabel 2. 68.	Perbandingan HLS Kabupaten Wonogiri tahun 2020- 2024	II-89
Tabel 2. 69.	Perbandingan Capaian HLS Kabupaten Wonogiri Dengan Rata-Rata Capaian Kabupaten/Kota Subosukowonosraten Tahun 2020-2024	II-89
Tabel 2. 70.	RLS Kabupaten Wonogiri tahun 2020-2024	II-91
Tabel 2. 71.	Perbandingan RLS dan Pertumbuhan RLS Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten / Kota Sewilayah Subosukowonosraten, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-92
Tabel 2. 72.	APK Pendidikan Dasar Kabupaten Wonogiri dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-94
Tabel 2. 73.	APM Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-95
Tabel 2. 74.	Jumlah Sekolah di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020- 2024	II-96
Tabel 2. 75.	Jumlah Penduduk dan Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap 10.000 Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kab,Wonogiri Tahun 2020-2024	II-96
Tabel 2. 76.	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-97
Tabel 2. 77.	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024.....	II-97
Tabel 2. 78.	Angka Kelulusan SD/SMP di Kabupaten Wonogiri	II-98
Tabel 2. 79.	Perkembangan Perpustakaan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-100
Tabel 2. 80.	Jumlah Penduduk Pemanfaat Jamkesmas dan Jamkesda Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-100
Tabel 2. 81.	Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Wonogiri....	II-102
Tabel 2. 82.	Jumlah Organisasi Penghayat dan Upacara Tradisional Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-103
Tabel 2. 83.	Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak Tahun	

	2020-2024	II-104
Tabel 2. 84.	Kecamatan Layak Anak Tahun 2020-2024	II-106
Tabel 2. 85.	Indeks Pembangunan Keluarga 2020-2024	II-106
Tabel 2. 86.	Perkembangan Kepemudaan Kabupaten Wonogiri.....	II-110
Tabel 2. 87.	Jumlah Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2020- 2024	II-111
Tabel 2. 88.	Rasio Ketergantungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-111
Tabel 2. 89.	Perkembangan WIA dan KRENOVA Kabupaten Wonogiri	II-113
Tabel 2. 90.	Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-115
Tabel 2. 91.	Jumlah Pemotongan Ternak Tahun 2020 S/D 2024.....	II-117
Tabel 2. 92.	Jumlah Produksi Daging Tahun 2020 S/D 2024.....	II-117
Tabel 2. 93.	Jumlah Produksi Telur Tahun 2020 S/D 2024.....	II-117
Tabel 2. 94.	Komoditas EBT di Kabupaten Wonogiri	II-118
Tabel 2. 95.	Indeks Sistem Pembangunan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 - 2024	II-124
Tabel 2. 96.	Daftar Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri tahun 2024	II-124
Tabel 2. 97.	Kinerja urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024	II-130
Tabel 2. 98.	Nilai PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Wonogiri 2020-2024.....	II-133
Tabel 2. 99.	Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun.....	II-135
Tabel 2. 100.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Tahun 2020-2024	II-136
Tabel 2. 101.	Capaian Akses Air Minum di Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2024	II-137
Tabel 2. 102.	Panjang dan Ruas Jalan Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024 Sesuai SK.....	II-138
Tabel 2. 103.	Return on Asset BUMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-142
Tabel 2. 104.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024.....	II-142
Tabel 2. 105.	Perkembangan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-144

Tabel 2. 106.	Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi yang diukur dengan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Wonogiri Tahun 2024.....	II-145
Tabel 2. 107.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun 2020-2024	II-145
Tabel 2. 108.	Penghitungan IKM untuk Institusi Pelayanan Kesehatan, Investasi, dan Pelayanan Kependudukan Kabupaten Wonogiri Tahun 2024.....	II-146
Tabel 2. 109.	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Wonogiri 2020-2024	II-147
Tabel 2. 110.	Tingkat Penilaian Persiapan/Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-148
Tabel 2. 111.	Penyelesaian Pelanggaran Perda Kabupaten Wonogiri	II-149
Tabel 2. 112.	Kerawanan di kabupaten Wonogiri per bulan Juli 2024 .	II-150
Tabel 2. 113.	Rasio Jumlah Polisi PP per 10.000 Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024.....	II-152
Tabel 2. 114.	Rasio Jumlah Anggota Satlinmas per 10.000 Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024.....	II-152
Tabel 2. 115.	Rasio Jumlah Personil Damkar Kabupaten Wonogiri.....	II-153
Tabel 2. 116.	Jumlah Tindak Pidana yang Tertangani di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024.....	II-154
Tabel 2. 117.	Indikator Kinerja Kunci.....	II-155
Tabel 2. 118.	Capaian SPM Pendidikan Tahun 2024	II-176
Tabel 2. 119.	Realisasi SPM Kesehatan Tahun 2024.....	II-176
Tabel 2. 120.	Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024	II-178
Tabel 2. 121.	Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024...	II-180
Tabel 2. 122.	Target dan Realisasi SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024	II-180
Tabel 2. 123.	Target dan Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2024.....	II-181
Tabel 2. 124.	Data Kerja Sama Daerah Tahun 2020-2024	II-182
Tabel 2. 125.	Perkembangan Realisasi APBD Tahun 2020-2024	II-185
Tabel 2. 126.	Neraca Daerah Tahun 2020-2024	II-189
Tabel 2. 127.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026-2030	II-198

Tabel 2. 128.	Prioritas Pembangunan daerah dalam RKPD 2025 dengan permasalahan Tahun 2025-2029	II-213
Tabel 2. 129.	Persandingan Isu Strategis Global, Nasional, dan Provinsi.....	II-222
Tabel 3. 1.	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029...	III-7
Tabel 3. 2.	Penyelarasan 35 program Provinsi Jawa Tengah dengan program Kabupaten Wonogiri.....	III-15
Tabel 3. 3.	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026-2030	III-25
Tabel 3. 4.	Rencana Implementasi 7 Program Prioritas Daerah Kabupaten Wonogiri 2026-2030	III-57
Tabel 3. 5.	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029	III-59
Tabel 4 1.	Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri	IV-33
Tabel 4 2.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2030	IV-72
Tabel 4 3.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026-2030.....	IV-74
Tabel 5.1.	Manajemen Risiko	V-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan.....	1-8
Gambar 2. 1.	Peta Wilayah Kabupaten Wonogiri.....	II-1
Gambar 2. 2.	Jarak antar Kecamatan Kabupaten Wonogiri	II-2
Gambar 2. 3.	Peta Daya Dukung Air Berbasis Grid Kabupaten Wonogiri	II-12
Gambar 2. 4.	Perkembangan Jumlah Emisi CO ₂ (TonCO ₂ e) Berdasarkan Sektor Kabupaten Wonogiri	II-33
Gambar 2. 5.	Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Wonogiri dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 ..	II-36
Gambar 2. 6.	Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2024	II-38
Gambar 2. 7.	Grafik Pertumbuhan PDRB per Kapita Harga Konstan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-46
Gambar 2. 8.	Grafik Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Wonogiri dengan Subosukawonosraten Tahun 2024	II-48
Gambar 2. 9.	Grafik Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	II-49
Gambar 2. 10.	Grafik Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran per Kabupaten Wonogiri dengan Nasional Tahun 2024	II-49
Gambar 2. 11.	Grafik Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan rata-rata capaian wilayah Subosukawonosraten Tahun 2020-2024	II-51
Gambar 2. 12.	Grafik Indeks Williamson Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-55
Gambar 2. 13.	Grafik Perbandingan Indeks Williamson Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah 2020-2024	II-57
Gambar 2. 14.	Grafik Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten Wonogiri dengan Subosukawonosraten Tahun 2024	II-63
Gambar 2. 15.	Grafik Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	II-64
Gambar 2. 16.	Grafik Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten Wonogiri dengan Nasional Tahun 2024	II-64

Gambar 2. 17.	Grafik Perbandingan capaian tingkat kemiskinan kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten/Kota se Subosukawonosraten tahun 2020-2024.....	II-67
Gambar 2. 18.	Grafik Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Wonogiri di Bandingkan dengan Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	II-68
Gambar 2. 19.	Grafik Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	II-69
Gambar 2. 20.	Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2024	II-73
Gambar 2. 21.	Grafik Perbandingan Pencapaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Wonogiri dengan Capaian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	II-74
Gambar 2. 22.	Grafik Perbandingan Pencapaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Wonogiri Dengan Capaian Nasional Tahun 2024.....	II-75
Gambar 2. 23.	Grafik Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks P2) Kabupaten Wonogiri dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	II-76
Gambar 2. 24.	Grafik Relevansi Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan(P2) Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024.....	II-77
Gambar 2. 25.	Grafik Target Capaian penurunan Prevalensi Stunting 2020-2024	II-80
Gambar 2. 26.	Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-81
Gambar 2. 27.	Grafik Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-82
Gambar 2. 28.	Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Wonogiri	II-84
Gambar 2. 29.	Grafik Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024.....	II-84
Gambar 2. 30.	Grafik Perbandingan Pertumbuhan HLS Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	II-90
Gambar 2. 31.	Grafik Perbandingan Pertumbuhan HLS Kabupaten	

	Wonogiri dengan Nasional Tahun 2024	II-90
Gambar 2. 32.	Grafik Perbandingan Pertumbuhan RLS Kabupaten Wonogiri dengan Subosukawonosraten Tahun 2024	II-92
Gambar 2. 33.	Grafik Perbandingan Pertumbuhan RLS Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	II-93
Gambar 2. 34.	Grafik Perbandingan Pertumbuhan RLS Kabupaten Wonogiri dengan Nasional Tahun 2024	II-93
Gambar 2. 35.	Grafik Perkembangan APK PAUD Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-94
Gambar 2. 36.	Grafik IPG Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024.....	II-106
Gambar 2. 37.	Grafik IPG Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	II-107
Gambar 2. 38.	Grafik IKG Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024.....	II-108
Gambar 2. 39.	Grafik Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024	II-108
Gambar 2. 40.	Grafik IDG Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	II-109
Gambar 2. 41.	Grafik Perkembangan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2023	II-112
Gambar 2. 42.	Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi	II-121
Gambar 2. 43.	Screenshot Menu Tagging dengan Prioritas Nasional di Aplikasi SIPD RI.....	II-122
Gambar 2. 44.	Grafik Data Inflasi Kabupaten Wonogiri Tahun 2020- 2024	II-139



WONOGIRI SUKSES
SELAMAT DATANG

BAB I **PENDAHULUAN**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Wonogiri memiliki keunggulan geografis dan sumber daya alam yang mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama dalam sektor pertanian dan energi. Terletak di bagian tenggara Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, Kabupaten Wonogiri menjadi titik strategis dalam konektivitas antarwilayah khususnya di Jawa bagian selatan. Keunggulan geografis ini menjadikan Wonogiri sebagai simpul penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, sekaligus mencerminkan makna dari branding daerahnya, "*The Inspiring of Java*".



Branding ini menunjukkan bahwa Kabupaten Wonogiri memiliki semangat dan potensi luar biasa baik dari keindahan alam dan kekayaan budaya serta daya juang masyarakatnya. Potensi sumber daya alamnya mencakup lahan pertanian yang luas, kawasan hutan produksi, serta Waduk Gajah Mungkur yang tidak hanya menjadi sumber irigasi dan perikanan, tetapi juga berperan sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Hal ini memberikan peluang besar untuk pengembangan ekonomi berbasis pertanian modern, ekowisata, industri dan energi terbarukan.

Selain itu, Wonogiri memiliki keunggulan dalam kualitas sumber daya manusia dan budaya kerja yang tangguh. Masyarakat Wonogiri dikenal memiliki karakter pekerja keras dan banyak yang merantau ke luar daerah sebagai tenaga kerja terampil, menunjukkan daya saing tenaga kerja yang cukup baik. Keunggulan ini dapat dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan vokasi, sehingga SDM lokal mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah. Ditambah dengan kekayaan budaya dan tradisi lokal yang kuat, Wonogiri memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif berbasis

budaya dan pariwisata, sekaligus memperkuat jati diri dan kebanggaan masyarakat daerah.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonogiri periode 2025-2030 dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 dengan terpilihnya Setyo Sukarno sebagai Bupati Wonogiri dan Imron Rizkyarno, S.H. sebagai Wakil Bupati yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Dengan hal itu pemerintah Kabupaten Wonogiri menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 paling lambat 6 bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2029 merupakan tahap lanjutan dari RPJMD Tahun 2021-2026, serta merupakan tahap pertama pelaksanaan RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 yang dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan jangka menengah yang menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, serta memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun.

RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 adalah **“Wonogiri Yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan”**, dan mencapai visi tersebut dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 4 misi yaitu :

- 1) MISI 1: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing dan berkelanjutan
- 2) MISI 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Didukung Lingkungan Sosial dan Budaya Masyarakat Maju
- 3) MISI 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- 4) MISI 4: Mewujudkan Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana,

Sebagai landasan hukum utama dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Wonogiri adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur tahapan perencanaan pembangunan mulai dari pusat hingga daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan, salah satunya yaitu dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan

dalam satu dokumen dan disebut RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Secara substansi, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 memperhatikan kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040, dan memperhatikan prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 2053, serta memperhatikan rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Wonogiri

RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Selain berpedoman pada dokumen RPJPD, penyusunan RPJMD Kabupaten Wonogiri juga berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Lebih lanjut, perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri selama lima tahun ke depan juga untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui pendekatan:

1. **Top-down**, yaitu pendekatan yang memperhatikan program- program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi Penyusunan RKPD yang mengacu kepada tiga Dimensi Pembangunan yang tertulis dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
2. **Bottom-up**, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa dan Kecamatan.
3. **Teknokratik**, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diakomodasinya saran dan pendapat dari Akademisi dan praktisi pembangunan.

4. **Politik**, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan yang ditunjukkan diakomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonogiri.
5. **Partisipatif**, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
6. **Holistik-tematik** yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
7. **Integratif**, yaitu menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
8. **Spasial**, mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
9. RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi pada proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, yaitu:
 - a. Kolaborasi Pemangku Kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan Pentahelix – ABCGM (*Academic, Business, Community, Government, and Media*);
 - b. Kolaborasi Pendanaan Pembangunan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Masyarakat/umat, dan CSR;
 - c. Penerapan *Dynamic Government* sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. Sinkronisasi Aplikasi dan Interkoneksi Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 dengan berpedoman kepada sasaran-sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang ada baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

- Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029, melalui tahapan pembahasan Prioritas Pembangunan sampai dengan program dan kegiatan oleh Bapperida Kabupaten Wonogiri, Perangkat Daerah (*desk trilateral meeting*) serta pendapat dari kalangan perguruan tinggi, dunia usaha dan komunitas.
 3. Penetapan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 yang berpijak kepada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029, hasil Pra Musrenbang Nasional dan Musrenbang Nasional, Pra Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Provinsi, Musrenbang Kabupaten serta verifikasi akhir program dan kegiatan prioritas untuk kemudian diterbitkan dalam Peraturan Bupati tentang RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029.

Guna meningkatkan efektivitas dan pendayagunaan sumber daya secara optimal, dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 didukung oleh sistem dan skema proses melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. Untuk fokus prioritas kegiatan disusun berdasarkan kontribusinya terhadap daya ungkit untuk mencapai hasil.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 didasarkan pada peraturan perundang – undangan, sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 192);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 193);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2053;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 206);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;

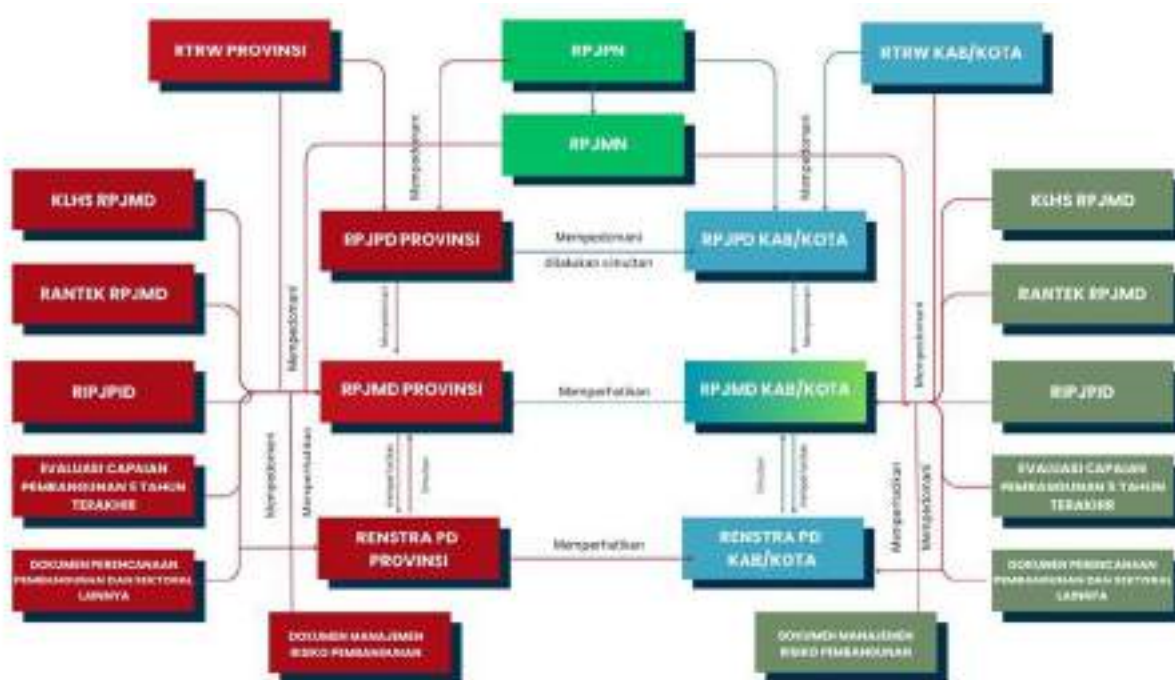
1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029 yang penyusunannya harus memperhatikan Prioritas Nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029

mengacu dan berpedoman kepada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Lebih lanjut, RPJMD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selanjutnya, dokumen RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Gambaran keterkaitan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 dengan dokumen lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Dan berikut ini keselarasan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 dengan dokumen lainnya :

1. RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2045

RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari tahap pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045. Sehingga visi dan misi pembangunan RPJMD mendukung visi dan misi RPJPD. Adapun visi RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 adalah **“WONOGIRI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERKELANJUTAN”** dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat didukung lingkungan sosial dan budaya masyarakat maju.
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
4. Mewujudkan Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana.

RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2045 diharapkan dapat mewujudkan visi misi tersebut dengan arah kebijakan *“Penguatan landasan Wonogiri Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Yang Sejahtera, Maju, Dan Berkelanjutan”*.

2. RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Wonogiri 2025-2029 berpedoman terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka menengah yaitu RPJMN 2025-2029. Sehingga visi dan misi pembangunan RPJMD mendukung visi dan misi RPJMN tahun 2025-2029. Adapun visi RPJMN Tahun 2025-2029 adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** dengan Asta Cita sebagai misi dituangkan dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

- 1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). (PN1)
- 2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. (PN2)
- 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. (PN3)
- 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas. (PN4)
- 5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. (PN5)

- 6) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. (PN6)
- 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. (PN7)
- 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur. (PN8)

3. RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029

Pencapaian sasaran dan target RKP dalam RPJMN merupakan agregat dari pencapaian di daerah, maka secara logis provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewajiban dan peran dalam pencapaian tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 harus memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Lebih lanjut, sama halnya dengan RPJPD Kabupaten dan RPJMN, maka RPJMD Kabupaten Wonogiri secara visi misi juga harus selaras dengan visi misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

Adapun visi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 adalah **“Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”** dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa

Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

4. RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2029 dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD)

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun tiap perangkat daerah untuk periode tahun 2025-2029. yang berisikan penjabaran teknis RPJMD dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, Renstra PD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis; penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah dan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.

5. RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD Kabupaten Wonogiri merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029. RPJMD didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program unggulan Kabupaten Wonogiri dalam 5 tahun sedangkan RKPD harus mengacu dan menyesuaikan dengan arah kebijakan RPJMD agar pembangunan berjalan konsisten, selain itu memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

6. RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Selain memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi serta daerah, RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral. Beberapa dokumen tersebut antara lain:

- 1) Laporan Capaian Sustainable Development Goals (SDG's),
- 2) Laporan Aksi Pangan dan Gizi,
- 3) Laporan Aksi Hak Asasi Manusia,
- 4) Laporan Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca,
- 5) *Grand Design* Reformasi Birokrasi,
- 6) Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Jawa Tengah,
- 7) RAD Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah,
- 8) RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah,
- 9) RAD Pengurangan Resiko Bencana,
- 10) Pedoman Pelaksanaan PUG di Jawa Tengah,
- 11) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD,
- 12) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,
- 13) Aksi Penanganan Konflik Sosial. Selain itu, dalam proses penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

7. RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 dengan RTRW.

Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah merupakan suatu keharusan, dan bahkan dokumen tersebut menjadi salah satu rujukan dan pedoman penting bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan melaksanakan pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 juga memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang merupakan hasil tata ruang wilayah diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap kepentingan ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.

8. RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 dengan RPPLH dan KLHS RPJMD

Dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan yang merupakan visi dari RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2029 perlu adanya jaminan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang serius, konsisten, dan konsekuen. Sehubungan dengan hal tersebut maka dibuat kebijakan yang mampu menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan yaitu dengan perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Wonogiri Tahun 2023-2053. Maka seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPPLH harus menjadi dasar dan dimuat dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan Daerah, bahkan secara fungsional RPPLH sangat bermanfaat dan mendukung penyusunan RTRW dan analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

9. RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Manajemen Risiko

Dokumen manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029. Dengan adanya manajemen risiko yang efektif, kemungkinan terjadinya kegagalan atau hambatan dalam mencapai target RPJMD dapat diminimalisir. Ini berarti manajemen risiko adalah alat untuk "mengamankan" pelaksanaan RPJMD. Hal ini akan memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan mitigasi risiko sejak dini, atau bahkan mengubah strategi jika risiko yang teridentifikasi terlalu tinggi dan sulit dikendalikan.

1.4 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

a. Maksud

Maksud kegiatan penyusunan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan dan memberikan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Wonogiri dengan menggunakan metode dan pendekatan

kerangka pikir secara ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri, dan untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029.

b. Tujuan

Tujuan kegiatan penyusunan teknokratik RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029, yaitu :

- Menjabarkan visi, misi, dan program prioritas ke dalam tujuan sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di kabupaten Wonogiri selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
- Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029;
- Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
- Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
- Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan daerah sekitar (Pemerintah Kabupaten/Kota), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan pemerintah Pusat; serta
- Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan

1.5 Sistematika Penulisan Dokumen RPJMD

RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika Penulisan, Metode Pelaksanaan penyusunan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

II. GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum daerah meliputi gambaran dari aspek

geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, capaian SPM, gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pembangunan lima tahun kedepan, serta menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan

III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya.

IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan dan juga menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan

V. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang pentingnya RPJMD bagi pembangunan daerah Wonogiri lima tahun kedepan

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

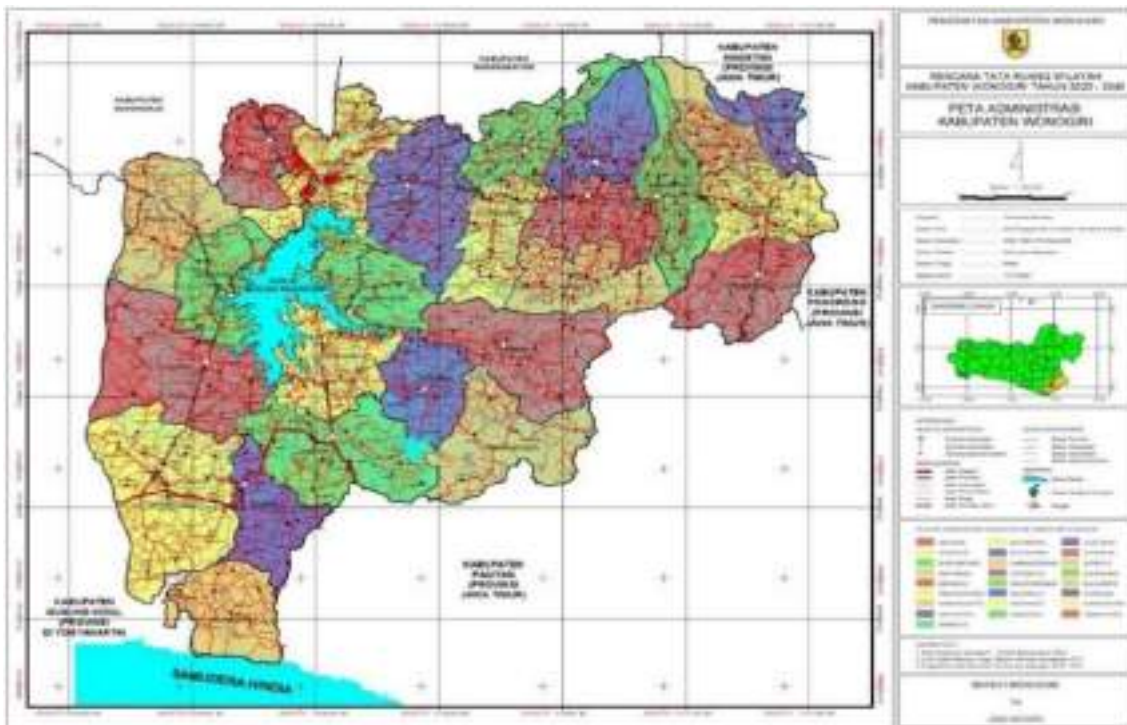
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Wonogiri secara astronomis terletak antara 7^o45' dan 8^o15' Lintang Selatan (LS) dan antara 110^o45' dan 111^o18' Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah 190.432 Ha atau 5,85% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Wonogiri merupakan kabupaten di wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas wilayah administrasi wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar;
- Sebelah Timur : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo (Provinsi Jawa Timur);
- Sebelah Tenggara : Kabupaten Pacitan (Provinsi Jawa Timur);
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia;
- Sebelah Barat : Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)



Sumber: RTRW Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040

Gambar 2. 1. Peta Wilayah Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi 25 kecamatan yang terdiri dari 251 desa dan 43 kelurahan, serta 2.306 dusun/lingkungan. Letak kecamatan

terjauh yaitu Kecamatan Paranggupito dari Ibukota Kabupaten Wonogiri sejauh 68 km, kecamatan terdekat dengan Ibukota Kabupaten Wonogiri adalah Kecamatan Selogiri yaitu sejauh 6 km. Secara rinci jarak antar kecamatan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

0	WONOGIRI																							
6	SELOGIRI																							
8	14	NGADIROJO																						
28	34	20	NGUNTORONADI																					
16	22	36	54	WURYANTORO																				
31	37	39	59	12	MANTARAN																			
26	32	34	54	8	19	EROMOKO																		
39	44	46	35	22	33	12	PRACIMANTORO																	
42	48	34	14	43	54	44	32	BATURETNO																
55	61	47	27	30	41	23	18	13	GIRITONTRO															
68	74	59	39	55	67	45	33	25	12	PARANGGUPITO														
47	52	38	19	38	49	28	16	5	8	18	GIRIMOYO													
54	60	46	26	55	66	45	33	9	21	14	14	BATUWARNO												
65	71	57	37	72	84	64	52	20	34	46	25	11	KARANGTENGAH											
36	42	28	8	52	63	62	37	16	29	41	21	25	36	TIRTOMOYO										
29	35	21	49	15	56	51	61	21	65	77	57	61	70	60	JATISWONO									
20	26	12	30	33	44	39	49	40	53	65	45	49	59	48	12	SIDOHARJO								
24	30	16	34	37	48	43	53	44	57	69	49	52	63	52	16	4	GIRIMARTO							
36	42	28	46	49	60	59	65	56	69	81	64	65	76	64	7	16	20	JATIPURNO						
37	43	29	47	50	61	56	66	57	70	82	64	66	77	65	7	14	29	14	JATIMYO					
46	51	36	56	59	70	65	75	66	79	91	71	75	86	74	14	34	24	34	24	PURWANTORO				
36	42	38	46	49	60	55	65	56	69	81	61	65	76	64	7	14	14	10	14	10	SEGGOWIMO			
53	59	41	63	66	77	72	82	73	86	98	78	82	93	81	25	25	26	7	18	8	18	BALUKERTO		
52	58	44	62	65	76	71	81	72	88	100	77	82	93	80	24	31	37	31	21	7	17	15	KISMANTORO	
53	58	43	63	66	77	72	82	73	86	98	78	82	93	81	21	41	31	41	31	7	14	5	15	PUHPELEM

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri

Gambar 2. 2. Jarak antar Kecamatan Kabupaten Wonogiri

Kecamatan Pracimantoro sebagai kecamatan terluas (7,8% dari total luas wilayah Kabupaten Wonogiri) sedangkan Kecamatan Puhpelem sebagai kecamatan terkecil (1,73% dari total luas wilayah Kabupaten Wonogiri).

Akses jalan yang semakin baik, adanya jalan tol, semakin memperpendek waktu tempuh menuju kota Wonogiri dari Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang dengan jarak lebih kurang 140 km dapat ditempuh hanya 2,5 jam yang sebelumnya 4 jam, dari Bandara Adi Sumarmo lebih kurang 54 km dapat ditempuh 1,5 jam. dari terminal Tirtonadi, Surakarta dengan jarak 40 km dapat ditempuh lebih kurang 1 jam, sedangkan akses ke Jawa Timur bisa melalui Kabupaten Ponorogo dengan jarak 70 km, kabupaten Pacitan dengan jarak 84 km, kabupaten Magetan dengan jarak 74 km ke pusat kota

Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Wonogiri bervariasi, terdiri dari pegunungan, perbukitan, dataran rendah, dan pesisir Pantai. Sebagian besar berupa

perbukitan yang merupakan bagian dari Pegunungan Sewu. Wilayah utara dan barat didominasi oleh dataran tinggi, sedangkan bagian selatan merupakan perbukitan karst dan daerah Pantai, dengan 20% bagian wilayah merupakan perbukitan kapu. Sebagian topografi tidak rata dengan kemiringan lereng rata – rata 30⁰, sehingga terdapat perbedaan antara kawasan yang satu dengan kawasan lainnya yang membuat kondisi sumber daya alam berbeda.

Kecamatan Karangtengah adalah kecamatan yang paling tinggi lokasinya yang berada pada ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan air laut dan yang paling rendah adalah Kecamatan Selogiri yang berada pada ketinggian 106 m di atas permukaan air laut.

Berikut penjelasan secara rinci Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi dalam 4 wilayah topografi, antara lain:

- a. Wilayah dengan topografi datar (kemiringan lereng 0-2%) memiliki luas wilayah 423 hektare. Wilayah dengan topografi datar ini berada di sebagian wilayah Kecamatan Ngadirojo, Sidoharjo, Jatisrono, Jatiroto, Eromoko, Wuryantoro.
- b. Wilayah dengan topografi bergelombang (kemiringan lereng 2-15 %) memiliki luas wilayah 7.865 hektare. Wilayah dengan topografi bergelombang ini berada di semua wilayah Kabupaten Wonogiri.
- c. Wilayah dengan topografi curam (kemiringan lereng 15-40%) memiliki luas wilayah 237 hektare. Wilayah dengan kondisi topografi seperti ini terletak di Kecamatan Giriwoyo, Batuwarno, Karangtengah, Tirtomoyo, Jatiroto, Girimarto, Jatipurno, Slogohimo, Bulukerto, Puhpelem, Purwantoro, dan Kismantoro.
- d. Wilayah dengan topografi sangat curam (kemiringan lereng >40%) memiliki luas wilayah 96 hektare wilayah dengan kondisi topografi seperti ini terletak di Kecamatan Karangtengah, Tirtomoyo, Jatiroto, Jatipurno, Slogohimo, Puhpelem, Purwantoro, dan Kismantoro.

Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Wonogiri yakni singkapan batuan berumur dari oligosen hingga holosen, terdiri atas batuan sedimen, batuan gunung berapi, batuan teribisan, dan endapan permukaan. Struktur geologi yang dijumpai di Kabupaten Wonogiri berupa lipatan sesar dan kekar yang terletak di barat – timur dan barat laut – tenggara. Satuan perbukitan Karst atau batu gamping terletak di bagian barat daya dan selatan Kabupaten Wonogiri, morfologi ini dicirikan dengan lembah dan bukit agak terjal, sempit, berelief

agak kasar, memiliki kemiringan lereng sekitar 15-30%. Pada bagian selatan Kabupaten Wonogiri dicirikan dengan adanya goa dan sungai bawah tanah. Penggunaan lahan di bagian selatan merupakan hutan jati, kebun campuran semak belukar, dan permukiman.

Kabupaten Wonogiri mempunyai kawasan bentang alam Kars, yang berada di wilayah selatan yang meliputi kecamatan Pracimantoro, Giritontro, Giriwoyo, Paranggupito. Kawasan Kars ini termasuk salah satu kawasan *Global Geopark* Gunungsewu yang memiliki potensi dan nilai strategis untuk dikembangkan yaitu : nilai keilmuan, nilai Ekonomi, dan nilai kemanusiaan. Potensi untuk mengembangkan wilayah selatan Kabupaten Wonogiri, sehingga bisa meningkatkan perkembangan ekonomi dan potensi wisata.

Upaya untuk menjaga kelestarian dan meningkatkan perekonomian masyarakat, Kabupaten Wonogiri bersama dengan Kementerian ATR/BPN membuat Kajian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Geopark Gunung Sewu Segmen Wonogiri, yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gunung Sewu Segmen Wonogiri Tahun 2024-2044

Kawasan kars ini terbentuk akibat proses pelarutan CaCo_3 sehingga terbentuk suatu kenampakan yang khas seperti tujuh *geosite* yang ada di Kabupaten Wonogiri di antaranya:

- Pantai Sembukan
- Lembah Sungai Purba Giritontro
- Goa Potro Bunder
- Luweng Sapen
- Goa Tembus
- Goa Sodong
- Goa Mrica

Keberadaan Museum Kars Indonesia yang berada di Desa Gebangharjo Kecamatan Pracimantoro, diharapkan mempunyai nilai tambah *geopark* diantaranya:

- Di kunjungi lebih banyak wisatawan
- Mendongkrak pertumbuhan sosial ekonomi
- Pemanfaatan alam dengan tetap menjaga kelestariannya secara keberlanjutan
- Lebih dikenal secara nasional maupun internasional

sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, perkembangan wisata dan

nilai keilmuan masyarakat sekitar, serta untuk mendukung kawasan *Eco Kars* dan *Global Geopark Gunungsewu*.

Hidrologi

Wilayah Kabupaten Wonogiri merupakan hulu dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Bengawan Solo yang merupakan salah satu sungai terbesar di Provinsi Jawa Tengah, dengan anak sungai yang merupakan Sub DAS Keduang, Wiroko, Solo Hulu, Temon, Kali Alang, Kali Wuryantoro, Ngunggunghan, Kresek, Buyuk dan Walikan. Adapun sungai tersebut mengalir ke Waduk Serbaguna Wonogiri yang merupakan hulu Bengawan Solo kecuali untuk sungai Walikan, alirannya tidak masuk ke Waduk Gajah Mungkur karena berada di bawah waduk.

Selain Waduk Serbaguna Wonogiri juga telah dibangun Bendungan Pidekso yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 Desember tahun 2021. Bendungan Pidekso merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Bidang SDA yang memiliki kapasitas 25 juta meter kubik dengan luas Genangan 232 hektar yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan konservasi lahan juga diharapkan mampu mengairi area irigasi seluas 1500 hektar, dan menjadi salah satu penyedia sumber air baku sebesar 300 liter/detik, di Wilayah Kabupaten Wonogiri. Bendungan Pidekso berada pada desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo dan pada aliran Sub DAS Solo Hulu. Sungai Bengawan Solo mempunyai peran yang sangat vital karena menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Wonogiri, sehingga Daerah Aliran Sungai tersebut mempunyai peran yang sangat vital sebagai keseimbangan ekosistem terpadu.

Untuk urusan irigasi dengan indikator Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kabupaten Wonogiri berada pada level **sedang hingga baik** (60–75%), dengan potensi peningkatan signifikan jika aspek pemeliharaan fisik, dokumentasi, dan partisipasi masyarakat diperkuat. Digitalisasi monitoring dan program strategis seperti P3-TGAI/PASTARI merupakan jalur kuat untuk memperbaiki IKSI ke tingkat tinggi (>80%).

Upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Wonogiri salah satunya melalui Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) yang pertama kali dideklarasikan oleh Presiden RI tanggal 28 April 2005 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 377 Tahun 2005 tentang Pedoman Rencana Kerja Pelaksanaan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air sebagai dasar

hukumnya.

GNKPA bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan siklus hidrologi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui pemberdayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat serta penegakan hukum, melalui kegiatan Sipil Teknis, Vegetatif, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Klimatologi

Wilayah Kabupaten Wonogiri beriklim muson tropis dengan dua musim yang dipengaruhi oleh pergerakan angin muson, yaitu musim hujan yang dipengaruhi angin muson barat yang bersifat basah dan lembap dan musim kemarau yang dipengaruhi angin muson timuran yang bersifat kering dan dingin. Musim kemarau berlangsung pada periode angin muson timur-tenggara di bulan Mei–Oktober dengan puncak musim kemarau adalah bulan Agustus. Musim hujan berlangsung pada periode angin muson barat laut–barat daya di bulan November–April. Curah hujan tahunan di Wonogiri berkisar antara 1.700–2.100 mm per tahun, dengan puncak musim hujan pada tahun 2024 terjadi pada bulan Februari dengan curah hujan bulanannya 450 mm. Dengan tingginya curah hujan pada puncak musim hujan tersebut menyebabkan naiknya elevasi waduk 3,35 meter dari batas normal, sehingga diperlukan langkah untuk mengamankan keamanan Bendungan sesuai SOP Pola Operasi Waduk.

Jumlah hari hujan bervariasi antara 90–150 hari hujan per tahun, dengan puncak hari hujan tertinggi terjadi pada Bulan Februari yaitu sebanyak 21 hari. Pada musim kemarau terjadi 7 hari hujan dan 83 hari hujan pada musim penghujan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 1. Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Wonogiri.

Bulan	Curah dan Hari Hujan									
	Curah Hujan (mm)					Hari Hujan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	377	354	315	197	205	18	17	20	18	19
Februari	437	267	182	450	389	20	19	18	21	19
Maret	342	810	292	234	210	20	23	23	17	15
April	271	248	172	183	175	11	9	13	9	8
Mei	97	96	201	41	25	12	4	12	3	3
Juni	0	323	0	3	2	0	11	0	1	1
Juli	0	0	33	5	2	0	0	2	2	3
Agustus	87	0	136	0	0	2	0	4	0	0
September	20	99	43	0	0	2	8	5	0	0

Bulan	Curah dan Hari Hujan									
	Curah Hujan (mm)					Hari Hujan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Oktober	106	61	350	2	5	8	5	16	1	3
Nopember	282	609	486	63	87	12	27	19	9	8
Desember	286	177	284	129	135	15	18	21	9	10

Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri, 2024.

Suhu udara di wilayah Wonogiri pada tahun 2024 bervariasi berdasarkan elevasi atau ketinggian muka tanah, tetapi suhu udara rata-rata berkisar antara 27°C – 30 °C. Suhu tertinggi mencapai 35,7°C terjadi pada bulan Oktober dan suhu terendah 16,8°C di Bulan September. Berdasarkan data yang dikutip dari website id.weatherspark.com, rata-rata kecepatan angin per jam di Wonogiri mengalami variasi musiman signifikan sepanjang tahun. Masa yang lebih berangin dalam setahun berlangsung selama 4,7 bulan, dari 10 Juni sampai 1 November, dengan kecepatan angin rata-rata lebih dari 6,1 knot. Bulan paling Berangin dalam setahun di Wonogiri adalah Agustus dengan kecepatan angin rata-rata 7,9 knot. Masa angin lebih tenang dalam setahun berlangsung selama 7,3 bulan, dari 1 November sampai 10 Juni Bulan paling tidak berangin dalam setahun di Wonogiri adalah Maret, dengan kecepatan angin rata-rata 4,4 knot.

Penggunaan Lahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020–2040, pengaturan pemanfaatan ruang diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan, termasuk perlindungan terhadap lahan pertanian. Berdasarkan data penggunaan lahan, periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa ketersediaan lahan sawah di Kabupaten Wonogiri tetap berada pada luasan yang sama, yaitu sebesar 42.076 hektare.

Meskipun dalam kurun waktu tersebut terjadi perubahan pada komposisi penggunaan lahan secara keseluruhan, luas lahan sawah tidak mengalami penurunan maupun penambahan. Kondisi ini mencerminkan bahwa alokasi lahan sawah di Wonogiri relatif stabil dan terlindungi dari konversi ke penggunaan non-pertanian. Stabilitas ini turut mendukung upaya mempertahankan potensi produksi pangan dari sektor pertanian sawah pada tingkat yang sama.

Sampai dengan tahun 2024, penggunaan lahan di Kabupaten Wonogiri masih sesuai dengan ketentuan Perda RTRW tersebut, karena belum dilakukan review terhadap Perda RTRW Nomor 2 Tahun 2020. Dengan demikian, arah kebijakan tata

ruang yang ditetapkan pada dokumen RTRW masih menjadi acuan utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Wonogiri.

Tabel 2. 2. Penggunaan Lahan di Kabupaten Wonogiri 2020-2024

No	Penggunaan Lahan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Luas	%	Luas	%	Luas	%	Luas	%	Luas	%
1	Lahan Sawah	42.076	22,10	42.076	22,10	42.076	22,10	42.076	22,10	42.076	22,10
2	Lahan Bukan Sawah										
	a. Tegalan	55.038	28,90	55.038	28,90	55.038	28,90	55.038	28,90	55.038	28,90
	b. Hutan Negara	20.005	10,51	20.005	10,51	20.005	10,51	20.005	10,51	20.005	10,51
	c. Hutan Rakyat	14.887	7,82	14.887	7,82	14.887	7,82	14.887	7,82	14.887	7,82
	d. Lahan Bukan Pertanian	36.940	19,4	36.940	19,4	36.940	19,4	36.940	19,4	36.940	19,4
	e. Lain-lain	15.408	8,09	15.408	8,09	15.408	8,09	15.408	8,09	15.408	8,09
3	Waduk Gajah Mungkur	6.078	3,19	6.078	3,19	6.078	3,19	6.078	3,19	6.078	3,19
	Jumlah	190.432	100	190.432	100	190.432	100	190.432	100	190.432	100

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana menjadi salah satu isu strategis pembangunan Kabupaten Wonogiri. Isu ini tidak terlepas dari kondisi daya dukung dan daya tampung yang saat ini mulai terlampaui. Maka menjadi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri. Keberlanjutan proses pembangunan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestarnya lingkungan hidup akan mengurangi potensi terjadinya bencana.

Kabupaten Wonogiri, yang terletak di bagian tenggara Provinsi Jawa Tengah, memiliki beragam potensi sumber daya alam yang mendukung berbagai sektor pembangunan. Berikut adalah beberapa potensi utama yang dimiliki:

1. **Pertanian dan Perkebunan:** Wilayah Wonogiri dikenal dengan produksi hasil pertanian seperti padi, ketela pohon, dan kacang mete. Selain itu, komoditas perkebunan seperti cengkeh, durian, dan janggolan (cincau) juga menjadi andalan, khususnya di Kecamatan Karang Tengah. Selain itu komoditas unggulan lainnya adalah kopi, yang belakangan berkembang pesat di kabupaten Wonogiri.

2. **Peternakan** : Kabupaten Wonogiri memiliki potensi besar di sektor peternakan, yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian wilayah, khususnya di pedesaan. Komoditas utama seperti sapi potong, kambing, dan ayam pedaging menunjukkan populasi yang signifikan dan terus berkembang. Dukungan geografis berupa lahan pertanian dan padang rumput mendukung ketersediaan pakan alami, sementara inisiatif peternakan terpadu mulai tumbuh di beberapa desa sebagai model ketahanan pangan lokal. Dengan dukungan kelembagaan, penguatan teknologi peternakan, dan peningkatan kapasitas peternak, sektor ini berpeluang menjadi andalan pembangunan ekonomi berbasis wilayah di Wonogiri secara berkelanjutan.
3. **Kehutanan**: Kabupaten ini memiliki hutan rakyat yang tersebar di perbukitan dengan tanaman seperti jati, pinus, sono keling, dan mahoni. Hasil hutan ini mendukung industri mebelair yang berkembang di daerah tersebut.
4. **Perikanan**: Waduk Gajah Mungkur, dengan luas sekitar 88 km², menjadi pusat budidaya ikan air tawar, terutama ikan nila merah. Kegiatan perikanan ini memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian lokal.
5. **Pariwisata Alam**: Topografi yang beragam dengan perbukitan karst dan pantai menjadikan Wonogiri kaya akan destinasi wisata alam. Beberapa objek wisata unggulan meliputi Pantai Sembukan, Pantai Nampu, Air Terjun Kahyangan, Gua Putri Kencana, Kawasan karst, Bukit Cumbri, Watu Cenik, Goa resi, dan lainnya.
6. **Pertambangan**: Formasi geologi Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari batuan sedimen dan vulkanik memberikan potensi pertambangan, termasuk batu mulia yang telah dimanfaatkan sebagai perhiasan oleh pengrajin lokal. Jenis pertambangan yang berpotensi di kabupaten Wonogiri adalah Batu gamping dan andesit di Wonogiri bagian selatan, pertambangan emas di Selogiri,

Dengan berbagai potensi tersebut, Kabupaten Wonogiri memiliki peluang besar untuk pengembangan sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, dan pertambangan yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Daya Dukung Lahan Untuk Pangan (Beras)

Daya dukung lahan yang akan dibahas disini adalah daya dukung lahan pertanian terkait dengan pemenuhan ketersediaan pangan akan komoditas beras yang menjadi kebutuhan pokok penduduk Kabupaten Wonogiri. Penentuan daya dukung lahan untuk pangan tersebut dilakukan dengan membandingkan komponen ketersediaan (supply) dan kebutuhan (demand) akan beras. Lebih lengkapnya formula dapat dilihat dibawah ini.

Keterangan:

DDPb : Daya dukung pangan beras

PrL : Produktiitas lahan (yang ditanam padi) (kg/ha)

LLtp : Luas lahan yang ditanami padi (ha)

A : Indeks konversi dari padi menjadi beras (62,74%)

JP : Jumlah penduduk

Std : Standar kebutuhan beras (kg), digunakan 98 kg/kapita/tahun

(BPS, 2015) Penafsiran berdasarkan formula dayadukung pangan beras adalah sebagai berikut

1. $DDPb > 1$, wilayah mampu menyediakan pangan beras untuk kebutuhan penduduknya secara mandiri
2. $DDPb < 1$, wilayah tidak mampu menyediakan pangan beras untuk kebutuhan penduduknya secara mandiri

Tabel 2. 3. Perhitungan Proyeksi Daya Dukung Lahan Pangan Beras di Kabupaten Wonogiri Tahun 2029

Perhitungan Daya Dukung Pangan Beras Tahun 2029	Jumlah
Ketersediaan Beras tahun 2029	
Jumlah produksi padi (Gabah kering giling/GKG) (ton)	380,000
Indeks Konversi dari gabah (GKG) menjadi beras (%)	0,63
Produksi Padi (GKG) ke beras (ton)	238,412
Kebutuhan beras tahun 2029	
laju pertumbuhan penduduk Kabupaten wonogiri	0,004
Proyeksi Jumlah Penduduk tahun 2029 (jiwa)	1.091.627
Angka konsumsi beras (kg/tahun/perkapita)	124
Jumlah beras dikonsumsi tahun 2029 (ton) = Jumlah penduduk tahun 2029 x angka konsumsi beras	135.361,75
Suplus beras (ton)	
Nilai DDPb (Daya Dukung Pangan untuk beras)	1.76

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Wonogiri, 2025-2029

Proyeksi kebutuhan penduduk akan beras pada tahun 2029 sebesar 135.361,75 ton. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka diketahui bahwa DDPb Kabupaten Wonogiri pada tahun 2029 adalah 1.76 (nilai lebih

besar dari satu), maka daya dukung pangan beras dinyatakan surplus. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Wonogiri pada tahun 2029 masih mampu menyediakan kebutuhan pangan akan beras untuk memenuhi kebutuhan penduduknya secara mandiri. Untuk mewujudkan daya dukung beras surplus sesuai dengan proyeksi diatas tentunya harus diimbangi dengan minimnya alih fungsi lahan pertanian, karena alih fungsi lahan dapat mengurangi luas lahan yang tersedia untuk produksi pangan, yang akan berdampak pada Penurunan Produksi Pangan. Sementara itu, perlunya mewaspadaai fenomena iklim La Nina dan El Nino. Kedua fenomena iklim ini dapat mengganggu musim tanam dan panen. La Nina dapat meningkatkan risiko penyakit tanaman akibat kelembapan tinggi, sementara El Nino dapat memperburuk kondisi kekeringan.

B. Daya Dukung Air

Secara agregat, DDDT Air di Kabupaten Wonogiri diindikasikan belum terlampaui. Kebutuhan air total di Kabupaten Wonogiri adalah 1.487.020.040,04 m³/tahun dengan rincian 1.395.668.196,84 m³/ tahun untuk kebutuhan ekonomi berbasis lahan dan 91.351.843,20 m³/tahun untuk kebutuhan domestik. Sementara itu, ketersediaan total di Kabupaten Wonogiri adalah 5.054.872.255,59 m³/tahun sehingga selisih supply- demand DDDT Air adalah 3.567.852.215,55 m³/tahun.

Daya Dukung Air, khususnya untuk kebutuhan domestik harus memperhatikan kualitas air. Kualitas air yang baik adalah komponen vital dari daya dukung air. Menjaga dan meningkatkan kualitas air melalui praktik pengelolaan yang tepat adalah kunci untuk memastikan bahwa sumber daya air tetap dapat mendukung kehidupan dan kegiatan manusia serta ekosistem secara berkelanjutan.

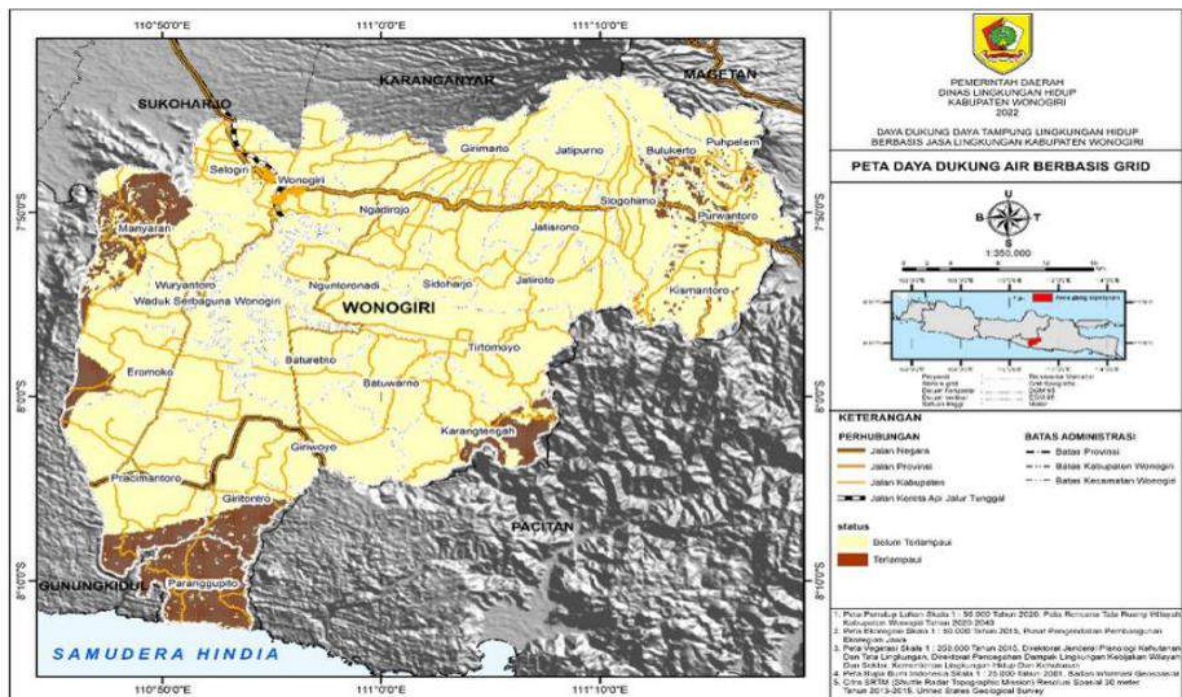
Ambang batas penduduk yaitu jumlah penduduk yang dapat memanfaatkan air di Kabupaten Wonogiri tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. 4. Ambang Batas Daya Dukung Air Kabupaten Wonogiri

Nomor	Kecamatan	Ketersediaan Air	Ambang Batas	Jumlah Penduduk
1	Baturetno	247.451.222,50	309.314,03	47.937
2	Batuwarno	147.158.899,27	183.948,62	17.954
3	Bulukerto	77.209.073,45	96.511,34	34.511
4	Eromoko	331.686.234,70	414.607,79	44.226
5	Girimarto	224.813.625,48	281.017,03	46.826
6	Giritontro	112.831.698,26	141.039,62	20.505
7	Giriwoyo	289.875.607,08	362.344,51	39.201

Nomor	Kecamatan	Ketersediaan Air	Ambang Batas	Jumlah Penduduk
8	Jatipurno	204.277.567,65	255.346,96	38.650
9	Jatiroto	209.171.010,11	261.463,76	42.010
10	Jatisrono	173.835.809,22	217.294,76	64.048
11	Karangtengah	142.049.060,19	177.561,33	23.664
12	Kismantoro	113.299.375,64	141.624,22	40.787
13	Manyaran	94.136.482,25	117.670,60	35.998
14	Ngadirojo	325.008.802,83	406.261,00	60.479
15	Nguntoronadi	189.686.258,86	237.107,82	25.030
16	Paranggupito	34.490.486,47	43.113,11	66.123
17	Pracimantoro	345.940.879,06	432.426,10	21.393
18	Puhpelem	54.508.498,36	68.135,62	17.837
19	Purwantoro	82.844.194,49	103.555,24	56.997
20	Selogiri	147.671.602,80	184.589,50	47.903
21	Sidoharjo	190.276.378,14	237.845,47	43.130
22	Slogohimo	173.837.447,55	217.296,81	53.403
23	Tirtomoyo	222.442.208,31	278.052,76	54.579
24	Wonogiri	284.544.058,31	355.680,07	87.490
25	Wuryantoro	224.232.114,72	280.290,14	17.837

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Wonogiri, 2025-2029



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Wonogiri, 2025-2029

Gambar 2. 3. Peta Daya Dukung Air Berbasis Grid Kabupaten Wonogiri

Secara lebih rinci, DDDT air dengan status terlampaui di Kabupaten Wonogiri berada di Kecamatan Paranggupito. Hal tersebut dikarenakan jumlah ketersediaan air (34.490.486,47 m³/tahun) di Kecamatan Paranggupito lebih rendah dibandingkan dengan jumlah kebutuhan air (58.628.244,35 m³/tahun). Kondisi terlampaui tersebut dipengaruhi oleh karakteristik

ekoregion di Kecamatan tersebut yang tidak mendukung terdapatnya sumber mata air permukaan seperti waduk, embung, atau telaga. Ekoregion dominan di Kecamatan Paranggupito adalah perbukitan solusional karst Gunungsewu batugamping terumbu dan Lembah perbukitan solusional karst Gunungsewu batugamping terumbu. Bentanglahan ini berada di wilayah Gunungsewu. Merupakan wilayah perbukitan yang tersusun oleh batugamping, batuan dolomit, atau gamping dolomitan. Terbentuk karena batuan muda dilarutkan dalam air dan membentuk lubang-lubang. Air mengalir melalui rekahan dengan melakukan proses pelarutan sehingga menghasilkan konfigurasi khas karst sehingga terbentuk bentukan-bentukan karst seperti sungai bawah tanah, luweng, doline, polje, dll. Air di kawasan karst tersimpan didalam tanah dan tertampung dalam gua, luweng atau doline namun sebaliknya kawasan ini sangat rentan kekeringan. Kondisi ekoregion yang tidak mendukung adanya ketersediaan air permukaan tersebut didukung dengan penutup lahan berupa perkebunan/kebun dan tegalan/ladang yang diperhitungkan sebagai kebutuhan ekonomi berbasis lahan.

Tabel 2. 5. Proyeksi Neraca Kebutuhan dan Ketersediaan Air di Kabupaten Wonogiri

Tahun	Jumlah Populasi Penduduk (Jiwa)	m3/tahun					Status
		Kebutuhan Air untuk Ekonomi Berbasis Lahan	Kebutuhan Domestik	Kebutuhan Total	Ketersediaan air	Selisih	
2025	1077787	1.395.668.196,84	91.415.843,20	1.487.084.040,04	5.054.872.255,59	3.567.788.215,55	Belum Terlampaui
2026	1091627	1.395.968.197,84	91.428.643,20	1.487,396,840.04	5,050,472,255.59	3,563,075,415.55	Belum Terlampaui
2027	1098547	1.396.268.197,84	91.441.443,20	1.487,709,640.04	5,046,072,255.59	3,558,362,615.55	Belum Terlampaui
2028	1105467	1.396.568.197,84	91.454.243,20	1.488,022,440.04	5,041,672,255.59	3,553,649,815.55	Belum Terlampaui
2029	1091627	1.396.868.197,84	91.467.043,20	1.488,335,240.04	5,037,272,255.59	3,548,937,015.55	Belum Terlampaui
2030	1112387	1.397.168.196,84	91.479.843,20	1.488.648.040,04	5.032.872.255,59	3.544.224.215,55	Belum Terlampaui

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Wonogiri, 2025-2029

C. Daya Tampung Sungai Kabupaten Wonogiri

Daya tampung sungai adalah kemampuan sungai untuk menampung zat atau energi yang masuk atau dimasukkannya kedalam sungai tersebut. Daya tampung sendiri merupakan batasan yang dapat diterima oleh suatu komponen, apabila kemampuan menampung suatu beban tersebut telah melebihi batasan-batasan dari suatu komponen, maka akan terjadi kerusakan.

Sungai merupakan lingkungan yang paling sering tercemar karena biasanya digunakan sebagai sarana tempat pembuangan limbah, kegiatan mandi dan mencuci, dan juga biasanya digunakan sebagai tempat buang air

besar dan kecil. Hal tersebut dapat mempengaruhi keadaan sungai karena memberikan beban pencemaran yang sangat besar terhadap sungai sehingga dapat melebihi batasan daya tampung sungai yang dapat diterima.

Penetapan daya tampung air sungai merupakan pelaksanaan pengendalian pencemaran air yang menggunakan pendekatan kualitas air. Pendekatan ini bertujuan untuk mengendalikan zat pencemar yang berasal dari berbagai sumber pencemar yang masuk ke dalam badan air dengan mempertimbangkan kondisi intrinsik sumber air dan baku mutu air yang ditetapkan. Daya tampung air sungai dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini:

Daya tampung air sungai: BBMA – BPA

Keterangan:

BBMA = Beban Pencemar Baku Mutu Air

BPA = Beban Pencemar Actual

Berdasarkan hasil perhitungan daya tampung air sungai di Kabupaten Wonogiri, terdapat beberapa parameter kualitas air yang telah melampaui daya tampung sungai dan terdapat parameter kualitas air yang masih berada dibawah daya tampung air sungai. Parameter kualitas air yang belum melampaui daya tampung air sungai antara lain TSS, TDS, Nitrat (NO_3), Ammoniak (NH_3), Nitrit (NO_2) dan total coliform. Hal ini dapat terjadi akibat penambahan beban pencemar yang belum terlalu besar sehingga konsentrasi pada setiap parameter menjadi kecil masih belum melampaui daya tampung air sungai. Selain hal tersebut, keberadaan sumber pencemar yang

ditemukan masih sedikit pada wilayah sekitar titik sampel. Selanjutnya terdapat parameter kualitas air sungai yang telah melampaui daya dukung air sungai, parameter- parameter tersebut antara lain DO (Dissolved oxygen) dan total fosfat. Nilai DO melampaui daya tampung air sungai dapat terjadi akibat terdapatnya sumber pencemar maupun polutan yang masuk ke badan air seperti limbah organik yang berasal petanian maupun industri. Selain itu, dapat juga disebabkan oleh kenaikan suhu karena perubahan iklim dan penggunaan sumberdaya energi. Nilai total fosfat juga telah melampaui daya tampung air sungai, hal ini disebabkan oleh limbah dari kegiatan domestik dan pertanian sehingga mencemari badan air. Limbah industri yang berada disekitar sungai dan juga aktivitas pertambangan yang dapat menghasilkan limbah cair yang mengandung fosfat juga dapat menyebabkan nilai total fosfat juga telah melampaui daya tampung air sungai. Paramater kualitas air yang

telah melampaui daya tampung air sungai harus mengurangi beban pencemar agar dapat memenuhi baku mutu air kelas II.

Hal lain yang terjadi dari hasil perhitungan daya tampung air sungai, diketahui bahwa di dalam beberapa parameter terdapat nilai yang telah melampaui dan belum melampaui daya tampung air sungai seperti BOD, COD, fenol dan fecal coliform. Kejadian ini memungkinkan untuk terjadi karena pada sekitar titik sampel sumber pencemar tidak selalu merata, sehingga jumlah polutan yang masuk ke badan air dapat berbeda. Selain itu, perbedaan debit air pada titik sampel dapat membedakan hasil beban pencemar, peningkatan debit akan mengakibatkan pengenceran dari sumber pencemaran dan meningkatkan laju aliran.

Penambahan beban yang terlalu besar menyebabkan konsentrasi parameter kualitas air sungai di Kabupaten Wonogiri melampaui daya tampung, seperti pada parameter DO setelah dilakukan perhitungan pada salah satu titik sampel maka beban pencemar tersebut harus dikurangi sebesar 180% agar konsentrasi parameter kualitas air memenuhi baku mutu. Penurunan beban TSS dapat dilakukan dengan antara lain menutup melakukan konservasi lahan, pengaturan pengolahan lahan pertanian, pengolahan limbah industri dan lainnya. Adapun penjelasan daya tampung pada sungai-sungai di Kabupaten Wonogiri dijelaskan pada tabel dibawah ini

Tabel 2. 6. Daya Tampung Air Sungai di Kabupaten Wonogiri

Nama Sungai	TDS				TSS				DO				
	Beban pencemar sesuai baku mutu (kg/hari)	Beban pencemar aktual (kg/hari)	Daya Tampung air Sungai	Keterangan	Beban pencemar sesuai baku mutu (kg/hari)	Beban pencemar aktual (kg/hari)	Daya Tampung air Sungai	Keterangan	Beban pencemar sesuai baku mutu (kg/hari)	Beban pencemar aktual (kg/hari)	Daya Tampung Air Sungai	Keterangan	
Sungai keduang hulu	691200	230860,8	460339,2	Dapat Menerima Beban	34560	8294,4	26265,6	Dapat Menerima Beban	2764,8	7741,44	-4976,64	Out Flow	-180%
Sungai Keduang Hilir	864000	107136	756864	Dapat Menerima Beban	43200	12096	31104	Dapat Menerima Beban	3456	13305,6	-9849,6	Out Flow	-285%
Sungai Tirtomoyo Hulu	604800	81043,2	523756,8	Dapat Menerima Beban	30240	7257,6	22982,4	Dapat Menerima Beban	2419,2	4294,08	-1874,88	Out Flow	-78%
Sungai Tirtomoyo Hilir	518400	80870,4	437529,6	Dapat Menerima Beban	25920	8294,4	17625,6	Dapat Menerima Beban	2073,6	12286,08	-10212,48	Out Flow	-493%
Sungai Pakem Hulu	777600	90201,6	687398,4	Dapat Menerima Beban	38880	9331,2	29548,8	Dapat Menerima Beban	3110,4	3888	-777,6	Out Flow	-25%
Sungai Pakem Hilir	604800	76204,8	528595,2	Dapat Menerima Beban	30240	9676,8	20563,2	Dapat Menerima Beban	2419,2	11793,6	-9374,4	Out Flow	-388%
Sungai Wuryantoro Hulu	345600	76032	269568	Dapat Menerima Beban	17280	6566,4	10713,6	Dapat Menerima Beban	1382,4	4596,48	-3214,08	Out Flow	-233%
Sungai Wuryantoro Hilir	432000	147312	284688	Dapat Menerima Beban	21600	9504	12096	Dapat Menerima Beban	1728	25488	-23760	Out Flow	-1365%

Tabel 2. 7. Daya Tampung Air Sungai di Kabupaten Wonogiri

Nama Sungai	BOD					COD					NO3			
	Beban pencemar sesuai baku mutu (kg/hari)	Beban pencemar actual (kg/hari)	Daya Tampung air Sungai	Keterangan		Beban pencem ar sesuai baku mutu (kg/hari)	Beban pencemar aktual (kg/hari)	Daya Tampung air Sungai	Keterangan		Beban pencem ar sesuai baku mutu (kg/hari)	Beban pence mar aktual (kg/har i)	Daya Tampung airSungai	Keterangan
Sungai keduang hulu	2073,6	3870,72	-1797,12	Out Flow	-87%	17280	7741,44	9538,56	Dapat menerima Beban		6912	0,6912	6911,3088	Dapat menerima Beban
Sungai Keduang Hilir	2592	6652,8	-4060,8	Out Flow	-157%	21600	13305,6	8294,4	Dapat menerima Beban		8640	0,864	8639,136	Dapat menerima Beban
Sungai Tirtomoyo Hulu	1814,4	2116,8	-302,4	Out Flow	-17%	15120	4294,08	10825,92	Dapat menerima Beban		6048	0,6048	6047,3952	Dapat menerima Beban
Sungai Tirtomoyo Hilir	1555,2	6117,12	-4561,92	Out Flow	-293%	12960	12286,08	673,92	Dapat menerima Beban		5184	0,5184	5183,4816	Dapat menerima Beban
Sungai Pakem Hulu	2332,8	1944	388,8	Dapat menerima Beban		19440	3888	15552	Dapat menerima Beban		7776	0,7776	7775,2224	Dapat menerima Beban
Sungai Pakem Hilir	1814,4	5866,56	-4052,16	Out Flow	-223%	15120	11793,6	3326,4	Dapat menerima Beban		6048	0,6048	6047,3952	Dapat menerima Beban
Sungai Wuryantor o Hulu	1036,8	2315,52	-1278,72	Out Flow	-123%	8640	4596,48	4043,52	Dapat menerima Beban		3456	0,3456	3455,6544	Dapat menerima Beban
Sungai Wuryantor o Hilir	1296	12744	-11448	Out Flow	-883%	10800	25488	-14688	Out Flow	-136%	4320	0,432	4319,568	Dapat menerima Beban

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Wonogiri, 2025-2029

Tabel 2. 8. Daya Tampung Air Sungai di Kabupaten Wonogiri

Nama Sungai	Ammoniak (NH ₃)				T-P (Total fosfat)					Fenol				
	Beban pencemar sesuai baku mutu (kg/hari)	Beban pencemar aktual (kg/hari)	Daya Tampung air Sungai	Keterangan	Beban pencemar sesuai baku mutu (kg/hari)	Beban pencemar aktual (kg/hari)	Daya Tampung air Sungai	Keterangan		Beban pencemar sesuai baku mutu (kg/hari)	Beban pencemar aktual (kg/hari)	Daya Tampung air Sungai	Keterangan	
Sungai keduang hulu	138,24	20,736	117,504	Dapat menerima Beban	138,24	207,36	-69,12	Out Flow	-50%	3,456	13,824	-10,368	Out Flow	-300%
Sungai Keduang Hilir	172,8	25,92	146,88	Dapat menerima Beban	172,8	345,6	-172,8	Out Flow	-100%	4,32	8,64	-4,32	Out Flow	-100%
Sungai Tirtomoyo Hulu	120,96	18,144	102,816	Dapat menerima Beban	120,96	241,92	-120,96	Out Flow	-100%	3,024	2,4192	0,6048	Dapat menerima Beban	
Sungai Tirtomoyo Hilir	103,68	15,552	88,128	Dapat menerima Beban	103,68	155,52	-51,84	Out Flow	-50%	2,592	2,0736	0,5184	Dapat menerima Beban	
Sungai Pakem Hulu	155,52	23,328	132,192	Dapat menerima Beban	155,52	311,04	-155,52	Out Flow	-100%	3,888	85,536	-81,648	Out Flow	-2100%
Sungai PakemHilir	120,96	18,144	102,816	Dapat menerima Beban	120,96	302,4	-181,44	Out Flow	-150%	3,024	2,4192	0,6048	Dapat menerima Beban	
Sungai Wuryantoro Hulu	69,12	10,368	58,752	Dapat menerima Beban	69,12	138,24	-69,12	Out Flow	-100%	1,728	2,7648	-1,0368	Out Flow	-60%
Sungai Wuryantoro Hilir	86,4	12,96	73,44	Dapat menerima Beban	86,4	172,8	-86,4	Out Flow	-100%	2,16	3,456	-1,296	Out Flow	-60%

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Wonogiri, 2025-2029

Tabel 2. 9. Daya Tampung Air Sungai di Kabupaten Wonogiri

Nama Sungai	Fecal Coliform				Total Coliform				Nitrit (No ₂)			
	Beban pencemar sesuai baku mutu (kg/hari)	Beban pencemar aktual (kg/hari)	Daya Tampung air Sungai	Keterangan	Beban pencemar sesuai baku mutu (kg/hari)	Beban pencemar aktual (kg/hari)	Daya Tampung air Sungai	Keterangan	Beban pencemar sesuai baku mutu (kg/hari)	Beban pencemar aktual (kg/hari)	Daya Tampung air Sungai	Keterangan
Sungai Keduang Hulu	691200	414720	276480	Dapat menerima Beban	3456000	1244160	2211840	Dapat menerima Beban	41,472	2,7648	38,7072	Dapat menerima Beban
Sungai Keduang Hilir	864000	734400	129600	Dapat menerima Beban	4320000	1728000	2592000	Dapat menerima Beban	51,84	8,64	43,2	Dapat menerima Beban
Sungai Tirtomoyo Hulu	604800	302400	302400	Dapat menerima Beban	3024000	967680	2056320	Dapat menerima Beban	36,288	18,144	18,144	Dapat menerima Beban
Sungai Tirtomoyo Hilir	518400	466560	51840	Dapat menerima Beban	2592000	1114560	1477440	Dapat menerima Beban	31,104	1,5552	29,5488	Dapat menerima Beban
Sungai Pakem Hulu	777600	388800	388800	Dapat menerima Beban	3888000	1321920	2566080	Dapat menerima Beban	46,656	0,07776	46,57824	Dapat menerima Beban
Sungai Pakem Hilir	604800	483840	120960	Dapat menerima Beban	3024000	1270080	1753920	Dapat menerima Beban	36,288	6,048	30,24	Dapat menerima Beban
Sungai Wuryantoro Hulu	345600	207360	138240	Dapat menerima Beban	1728000	656640	1071360	Dapat menerima Beban	20,736	0,03456	20,70144	Dapat menerima Beban
Sungai Wuryantoro Hilir	432000	518400	-86400	Out Flow -20%	2160000	1339200	820800	Dapat menerima Beban	25,92	0,432	25,488	Dapat menerima Beban

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Wonogiri, 2025-2029

A. Potensi Penurunan Sumberdaya Alam (Air dan Karst)

Daya dukung air di Kabupaten Wonogiri secara umum sumberdaya air di Kabupaten Wonogiri belum terlampaui dengan ketersediaan total di Kabupaten Wonogiri adalah 5.054.872.255,59 m³/tahun dengan kebutuhan air total di Kabupaten Wonogiri adalah 1.487.020.040,04 m³/tahun. Sumber daya air terbagi dalam 10 sub Das dan 1 (satu) DAS Bengawan serta 11 badan air berupa waduk, telaga dan embung. Namun sumberdaya air terancam oleh masalah kualitas dan kuantitas air, pada kuantitas air terjadi kekeringan air, sedangkan pada kualitas air terjadi penurunan, yaitu IKA (Indeks Kualitas Air) di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2019 hingga 2021, dengan nilai 85,7 menjadi 75,0.

B. Kurangnya Pemerataan Sarana Prasarana

kondisi jalan di Kabupaten Wonogiri didominasi kondisi yang baik dengan panjang 1193,7 km pada tahun 2021. Namun masih terdapat jalan yang ada pada kondisi rusak dengan panjang 142,27 km dan kondisi sangat rusak dengan panjang 20,8 pada tahun 2021. Sehingga, kondisi ini harus bisa segera diperbaiki agar kondisi dan kualitas sarana dan prasarana di Kabupaten Wonogiri bisa merata.

C. Tingginya Tingkat Resiko Bencana dan Dampak Perubahan Iklim

Kabupaten Wonogiri memiliki acaman bencana alam (multi hazard) dengan kategori sedang (IRBI 2022). Berdasarkan hasil review pada dokumen IKPLHD Kabupaten Wonogiri tahun 2022, Pada tahun 2022 kejadian tertinggi kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Wonogiri yaitu banjir sebanyak 218 kasus, disusul tanah longsor 154 kasus, angin kencang 76 kasus, dan kebakaran 8 kasus. Dari seluruh kasus kebencanaan selama tahun 2022, total kerugian kumulatif mencapai Rp 2.736.208.000.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Berdasarkan data pemakaian tenaga listrik di Kabupaten Wonogiri selama periode 2020-2024, terlihat adanya tren peningkatan konsumsi listrik setiap tahunnya. Pada tahun 2020, total pemakaian listrik tercatat sebesar 433.014 kWh, yang kemudian meningkat menjadi 457.079 kWh pada tahun 2021, 468.358 kWh pada tahun 2022, mencapai 492.664 kWh pada tahun 2023, dan tahun 2024 mencapai 512.547 KWH. Dan rasio elektrifikasi di Kabupaten Wonogiri mencapai 99,99%. Peningkatan tahunan

ini mencerminkan adanya pertumbuhan kebutuhan energi listrik di wilayah tersebut, yang kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, dan urbanisasi. Tren ini menunjukkan pentingnya upaya pengelolaan energi yang efisien dan penyediaan infrastruktur listrik yang memadai untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Tabel 2. 10. Data Pemakaian tenaga Listrik Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

NO	TARIF	2020 (MWH)	2021 (MWH)	2022 (MWH)	2023 (MWH)	2024 (MWH)
1	Sosial	14,961	16,091	18,753	21,567	23,769
2	Rumah Tangga	293,459	297,244	293,343	302,324	305,279
3	Bisnis	45,617	50,528	56,114	66,151	72,996
4	Industri	64,803	78,973	85,492	87,632	95,242
5	Pemerintah	14,174	14,243	14,656	14,990	15,262
	TOTAL KWH	433,014	457,079	468,358	492,664	512,547

Sumber: PLN Kabupaten Wonogiri, 2024

Dalam hal ketahanan air, akses air minum memberikan dampak besar bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta produktivitas penduduk.

Tabel 2. 11. Capaian Akses Air Minum di Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Capaian Akses Rumah Tangga Air Minum Layak	88,23	89,82	92,67	93,92
Capaian Akses Rumah Tangga Air Minum Aman	25,94	26,1	26,67	27,61

Sumber: Dispera, 2024

Berdasarkan data capaian akses air minum di Kabupaten Wonogiri selama periode 2021–2024, terlihat adanya peningkatan yang cukup konsisten pada berbagai indikator. Capaian akses rumah tangga terhadap air minum layak menunjukkan tren positif, dari 88,23% pada tahun 2021, meningkat menjadi 89,82% di tahun 2022, 92,67% di tahun 2023, dan mencapai 93,92% pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memperluas layanan air bersih kepada masyarakat secara merata, sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar serta upaya peningkatan kualitas hidup.

Di sisi lain, capaian akses terhadap air minum aman juga mengalami peningkatan meski masih berada pada angka yang cukup rendah dibandingkan dengan akses air minum layak. Pada tahun 2021, capaian akses air minum aman berada di angka 25,94%, kemudian meningkat menjadi 26,10% di tahun 2022, 26,67% di tahun 2023, dan mencapai 26,61% pada tahun 2024. Hal ini

menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan kualitas air yang aman dikonsumsi secara langsung, yang memerlukan intervensi pada sisi pengolahan, pengawasan kualitas, serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

Sementara itu, persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan juga mengalami kemajuan dari 38,13% pada tahun 2021 menjadi 44,37% pada tahun 2024. Ini mencerminkan adanya peningkatan layanan air bersih perpipaan di wilayah perkotaan, meskipun masih terdapat ruang untuk memperluas cakupan layanan agar menjangkau lebih banyak rumah tangga, khususnya di kawasan padat dan wilayah berkembang. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan arah kebijakan yang selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pemenuhan akses air minum layak dan aman bagi seluruh masyarakat.

Dalam hal ketahanan pangan, capaian **Indeks Ketahanan Pangan (IKP)** Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023 adalah **87,79** dan meningkat pada tahun 2024 menjadi **88,91** menempatkannya pada peringkat ke-37 secara nasional dan peringkat ke-6 di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Sragen. IKP merupakan indikator komposit yang mengukur ketahanan pangan suatu wilayah berdasarkan tiga aspek utama:

1. **Ketersediaan Pangan:** Meliputi produksi dan stok pangan di daerah tersebut.
2. **Keterjangkauan Pangan:** Mencakup akses ekonomi dan fisik masyarakat terhadap pangan.
3. **Pemanfaatan Pangan:** Berkaitan dengan pemanfaatan pangan yang baik untuk mencapai status gizi yang optimal.

Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa **Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan** di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023 adalah **10,80%** dan menurun menjadi **10,25%** pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa kondisi semakin membaik.

Tabel 2. 12. Data Capaian Indeks Ketahanan Pangan dan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketahanan Pangan	86,55	88,04	88,15	87,79	88,91
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	15,80	13,68	12,82	10,80	10,25

Sumber : Dinas Pertanian, 2025

Meskipun Kabupaten Wonogiri menunjukkan tingkat ketahanan pangan yang baik, upaya berkelanjutan tetap diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan guna mencapai ketahanan pangan yang lebih optimal. Berikut capaian skor PPH Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 13. Skor PPH Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

No	Kelompok Pangan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi-padian	25.0	25.0	25.0	25	25
2	Umbi-umbian	0.9	1.4	1.4	1.4	1,0
3	Pangan Hewani	17.6	17.6	19.5	19.9	20,7
4	Minyak dan Lemak	5.0	5.0	5.0	5	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	0.7	1.0	0.9	0.9	1,0
6	Kacang-kacangan	8.1	7.7	8.4	9.2	8,6
7	Gula	2.5	2.5	2.5	2.5	2,5
8	Sayur dan Buah	23.5	26.5	30.0	30	29,0
	Skor PPH	83.4	86.6	92.7	93.9	92,8

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri, 2024

Skor PPH Wonogiri tahun 2024 sebesar 92.8, masuk dalam kategori baik (nilai capaian PPH > 90). Secara umum skor PPH konsumsi pangan penduduk di Wonogiri mulai tahun 2020 – 2023 selalu mengalami peningkatan, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,1. Namun demikian sebenarnya capaian skor PPH tahun 2024 sudah bisa dikatakan baik meskipun relatif rendah dari capaian Provinsi Jawa Tengah yakni 93,61 dan Nasional 93,50.

Perkembangan skor PPH konsumsi pangan penduduk Wonogiri pada tahun 2020 – 2024 disetiap kelompok pangan cenderung bersifat dinamis, terjadi pada sebagian besar kelompok pangan kecuali padi-padian, minyak dan lemak, dan gula.

Capaian Skor PPH tahun 2020 – 2024 jika dibandingkan dengan target skor PPH Tahun 2020 – 2024, pada tahun 2020 – 2023 capaian sudah melebihi target yang telah ditetapkan, sementara pada tahun 2024 masih dibawah target yang ditetapkan.

Capaian kualitas konsumsi pangan ideal dicerminkan dari nilai skor PPH 100, semakin tinggi nilai PPH semakin beragam dalam pemenuhan konsumsi pangannya. Konsumsi pangan adalah jenis dan jumlah pangan (baik bentuk asal maupun olahan) yang dikonsumsi seseorang/penduduk dalam waktu tertentu untuk hidup sehat aktif dan produktif. Konsumsi kelompok pangan yang belum memenuhi konsumsi ideal pada kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, buah dan sayur. Langkah yang perlu dilaksanakan untuk mendorong peningkatan skor PPH antara lain :

- Mendorong masyarakat dalam pemanfaatan pangan lokal non beras non terigu melalui sosialisasi dan pelatihan pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal;
- Edukasi dan promosi konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) kepada seluruh masyarakat baik ditingkat produsen maupun konsumen;
- Membangun sinergitas kegiatan Desa/Kelurahan, TP PKK dan OPD teknis dalam mewujudkan ketahanan pangan diwilayahnya melalui rumah pangan B2SA.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Pengelolaan sampah di Kabupaten Wonogiri berupa sampah rumah tangga maupun sampah hasil kegiatan industri, usaha, dan jasa lainnya. Perkiraan timbulan sampah pada tahun 2022 yang dihasilkan di Kabupaten Wonogiri secara keseluruhan berjumlah 126.917,78 ton dari total jumlah penduduk sebesar 915.053 jiwa (penduduk murni). Pengelolaan sampah kedepannya dibutuhkan pengembangan sarana seperti bank sampah, TPST dan lain - lain. Pada tahun 2022, sebesar 36,96% timbulan sampah di Kabupaten Wonogiri berhasil terolah melalui fasilitas pengolahan sampah yang tersedia. Capaian ini

mencerminkan adanya upaya pengelolaan sampah yang mulai terstruktur, meskipun masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kapasitas dan cakupan pengolahan secara menyeluruh.

Di sisi lain, alih fungsi lahan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Wonogiri. Tekanan jumlah penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi menjadi faktor pengaruh terjadinya alih fungsi. Sesuai data Perda RTRW Kabupaten Wonogiri nomor 2 Tahun 2020 lahan sawah seluas 42.076 hektar dan luas tegalan 55.038 hektar, dan sampai dokumen ini disusun belum adanya review terhadap dokumen RTRW tersebut, Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten agar dapat mencegah peningkatan laju alih fungsi lahan. Eksploitasi sumberdaya wilayah yang melampaui dayadukung lingkungan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Permasalahan terkait dengan indeks kualitas lingkungan hidup diantaranya adalah penurunan kualitas air dan udara serta liputan hutan.

Selain itu, problem limbah domestik dan industri serta persampahan juga akan terus terjadi seiring dengan pertambahan jumlah penduduk beserta aktivitas sosial ekonomi. Kualitas air di Kabupaten Wonogiri juga berpotensi untuk semakin menurun akibat dari aktivitas industri dan juga perilaku masyarakat yang belum sadar akan perilaku hidup bersih, ditandai dengan penurunan indeks secara berturut-turut pada tahun 2019 hingga 2021, dengan nilai 85,7 menjadi 75,0.

a) Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Wonogiri dapat ditunjukkan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terdiri dari informasi status mutu air, informasi status mutu udara, persampahan, kerentanan perubahan iklim, dan emisi gas rumah kaca. Kemampuan lahan di Kabupaten Wonogiri diketahui dari hasil overlay peta dengan menggunakan peta sekunder skala 1:250.000. Adapun informasi yang tersedia dan digunakan untuk mengetahui daya dukung lahan meliputi bentuk lahan, hidrogeologi (produktivitas akuifer), satuan batuan, bencana, dan penggunaan lahan. Hasil analisis yang dilakukan dalam pembuatan daya dukung dan daya tampung lahan di Kabupaten Wonogiri maka dapat dibagi menjadi 5 kelas, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran kondisi lingkungan hidup yang menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 2. 14. Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

No	Keterangan	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	IKA	85	77,5	78	75	78,5	80	79	80	79,5	80
2	IKU	85	84,18	84,5	88	85	87,77	85,5	88,33	86	82,76
3	IKTL	41	41,81	42	42,63	42,5	42,63	43	42,63	43,5	42,63
4	IKLH	72	72,4	72,5	73,18	72,6	74,96	72,70	75,19	72,80	76,99

Sumber:Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri, 2024

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) disusun sebagai alat ukur untuk menggambarkan target dan ukuran pencapaian sehingga dapat merefleksikan sejauh mana hubungan pembangunan suatu wilayah terhadap lingkungan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemutakhiran informasi kualitas lingkungan hidup perlu dilakukan secara rutin dan berkala. Secara sederhana, IKLH dapat dijadikan sebagai indikator awal untuk mengidentifikasi dampak implementasi pembangunan di Kabupaten Wonogiri terhadap kondisi lingkungan hidup.

Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 sebesar 72,80. Capaian pada Tahun 2024 sebesar 76,99, dari hasil capaian IKLH tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa kualitas lingkungan hidup Kabupaten Wonogiri tahun 2024 berada pada kategori **BAIK**.

Dalam perhitungan IKLH Kabupaten Wonogiri berbeda dengan KLHK karena penghitungan IKLH untuk Kabupaten dilakukan dengan penghitungan manual belum dengan aplikasi dari KLHK (65,60). Hal ini dilakukan karena selain untuk mensinkronkan dengan Dokumen Perencanaan Kabupaten (RPJPD, RPJMD dan RENSTRA DLH) juga penghitungan IKLH dengan aplikasi dari KLHK diterbitkan setelah Dokumen-dokumen perencanaan daerah seperti disebutkan diatas disahkan/ditetapkan, sehingga jika penghitungan dengan aplikasi diterapkan maka nilai capaian IKLH akan rendah dan dimungkinkan tidak mencapai target rencana yang telah ditetapkan pada RPJMD dan

RENSTRA yang akan berpengaruh pada penilaian atas kinerja Dinas.

b) Persampahan

Jumlah timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Wonogiri baru tersedia dari tahun 2022-2024, adapun datanya sebagai berikut.

Tabel 2. 15. Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024

NO	Uraian	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	Ton	NA	NA	126.917,78	127.999,02	127.166,54

Jumlah timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2024 sebesar **127.166,54** ton/pertahun, capaian pengurangan sampah sebesar **49.988,12** ton/tahun, dan capaian penanganannya sebesar **22.166,45** ton/tahun. Berikut merupakan jumlah timbulan sampah, capaian pengurangan, maupun capaian penanganannya baik dalam ton maupun persentasenya pada tahun 2024

Tabel 2. 16. Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024

NO	KETERANGAN	NILAI (Ton/Tahun)
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	127.166,54
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	49.988,12
	Persentase pengurangan sampah	39,31
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	175,91
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	0,00
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	49.812,21
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	22.166,45
	Persentase penanganan sampah	17,43
a	Pemilahan/Pengumpulan	
b	Pengangkutan*)	
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	
c	Pengolahan	0,00
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	0,00
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0,00
d	Pemrosesan akhir	22.166,45

NO	KETERANGAN	NILAI (Ton/Tahun)
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	22.166,45
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	72.154,57
	Persentase sampah terkelola	56,74
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	55.011,97
	Persentase sampah tidak terkelola	43,26

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wonogiri, 2024

Tabel 2. 17. Jumlah dan Luas TPS 3R

No	Lokasi	Luas
1	TPS 3R Jatipurno	200 m ²
2	TPS 3R Bulukerto	227 m ²
3	TPS 3R Wuryantoro	222,75 m ²
4	TPS 3R Giri Peduli DLH	40 m ²

Dari table diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Wonogiri sampai dengan tahun 2024 memiliki empat TPS 3R dengan total keseluruhan luas 689,75 m² yang berada di Kecamatan Jatipurno, Kecamatan Bulukerto, Kecamatan Wuryantoro dan Kecamatan Wonogiri.

Tabel 2. 18. Jumlah dan Tipe TPS Tahun 2024

No	Nama TPS	Lokasi TPS	Luas		Volume	Ket
			(pxl)	(m ³)		
1	TPS Depo Transfer Bauresan	Bauresan	9,5	5,5	52,25	
2	TPS Depo Transfer Alas Kethu	Alas Kethu	10	4	40	
3	TPS Kanisius	Jl. Durian Kajen	6	4	24	
4	TPS GOR Wonogiri	Gor Wonogiri	6	4	24	
5	TPS Kajen	Kajen	3	2	6	
6	TPS Pokoh Kidul	Pokoh Kidul	6	4	24	
7	TPS Pasar Wonokarto	Wonokarto RT 01/05	3	2,5	7,5	
8	TPS Gerdu	Gerdu Giripurwo	3	2	6	
9	TPS RSUD (Armrol)	RS. Umum Wonogiri	3	2,5	7,5	
10	TPS Pasar Kota Wonogiri	Pasar Kota Wonogiri	6	4	24	
11	TPS Rumah Dinas PBS	Rumah Dinas PBS	6	3	18	
12	TPS Rumah Dinas Bupati	Jl. Ahmad Dahlan, Kajen	3,5	2	7	
13	TPS Ponten	Gerdu I, Giripurwo	2	2	4	
14	TPS Perum Kedungringin	Kedung Ringin	4	3	12	
15	TPS Perum Sarana Alam	Mojooroto	5	3	15	
16	TPS Terminal Krisak Baru	Terminal Krisak	6	4	24	
17	TPS Pasar Krisak	Lingk. Pasar Krisak	2,5	2	5	

No	Nama TPS	Lokasi TPS	Luas		Volume	Ket
			(pxl)		(m ³)	
18	TPS Selogiri	Selogiri	3	2	6	
19	TPS Nambangan	Nangger	3	5	15	
20	TPS Perum Nambangan	Nambangan	3	3	9	
21	TPS Tugu Monumen	Barat Tugu Monumen	3	2	6	
22	TPS Pasar Ngadirojo	Pasar Ngadirojo	6	4	24	
23	TPS Terminal Ngadirojo	Terminal Ngadirojo	6	4	24	
24	TPS Sidoharjo	Pasar Sidoharjo	7	5	35	
25	TPS Jatisrono	Pasar Jatisrono	5	2	10	
26	TPS Slogohimo	Slogohimo	5	3	15	
27	TPS Terminal Purwanto	Terminal Purwanto	4	3	12	
28	TPS Pasar Purwanto	Pasar Induk Purwanto	4,5	2,5	11,25	
29	TPS Pasar Kismantoro	Pasar Kismantoro	3	2,5	7,5	
30	TPS Pasar Bulukerto	Pasar Bulukerto	3	2	6	
31	TPS Nguntoronadi (Armrol)	Kec. Nguntoronadi	3	2,5	7,5	
32	TPS Pasar Tirtomoyo (Armrol)	Pasar Tirtomoyo	3	2,5	7,5	
33	TPS Sendangrejo Baturetno	Semanding, Baturetno	4	2,5	10	
34	TPS Utara Kec. Baturetno	Ds. Talunombo	4	2	8	
35	TPS Induk Janglot Baturetno	Mbelik Watu	10	5	50	
36	TPS Pasar Lama Baturetno	Lingk. Pasar Lama Baturetno	5	3	15	
37	TPS Pasar Baru Baturetno	Lingk. Pasar Baru Baturetno	4,5	2,5	11,25	
38	TPS Patuk Baturetno	Patuk, Baturetno	3	2,5	7,5	
39	TPS Patuk Kidul Baturetno	Patuk Kidul, Baturetno	6	4	24	
40	TPS Pasar Pracimantoro	Lingk. Pasar Pracimantoro	6	4	24	
41	TPS Pasar Eromoko	Lingk. Pasar Eromoko	5	3,5	17,5	
42	TPS Wuryantoro	Lingk. Pasar Wuryantoro	7,5	5	37,5	
43	TPS Pasar Manyaran	Lingk. Pasar Manyaran	4	2,5	10	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wonogiri, 2024

Kemudian dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sampai dengan tahun 2024 Kabupaten Wonogiri memiliki 43 TPS yang tersebar di 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri. TPS yang memiliki volume tampung sampah terbesar berada di TPS Depo Transfer Bauresan sebanyak 52,25 m³ dan TPS Ponten menjadi TPS dengan volume tampungan sampah terkecil, yaitu sebanyak 4 m³. Adapun sampah yang tetampung di TPS kemudian diangkut menggunakan Armada pengangkut sampah dan dilakukan pengelolaan di TPA. Berikut ini merupakan Armada Pengelolaan Sampah yang ada di Kabupaten wonogiri.

Tabel 2. 19. Jumlah dan Jenis Armada/Alat Berat Pengelolaan Sampah Tahun 2024

No	Jenis	Jumlah
1	Dump Truck	14 Unit
2	Armroll	3 Unit
3	Carry Pick Up	7 Unit
4	Motor Roda Tiga	4 Unit
5	Alat Berat	3 Unit

Saat ini Kabupaten Wonogiri sudah memiliki bangunan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Operasional pelayanan IPLT dimulai tahun 2024 seiring dengan telah disahkannya Perda Retribusi (Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Tabel 2. 20. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pengolahan IPLT Tahun 2024

No	Jenis	Jumlah	Luas Lahan	Kapasitas
1	Sarana Pengolahan IPLT	1 Unit	321,5 m ²	10 m ³ /hari
2	Truck Tanki Penyedot Lumpur Tinja	2 Unit	-	4 m ³

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wonogiri, 2024

Sampai dengan tahun 2024, Kabupaten Wonogiri hanya memiliki satu bangunan IPLT yang lokasinya berdekatan dengan TPA Ngadirojo. Untuk mendukung persiapan operasional IPLT, Kabupaten Wonogiri sudah memiliki 2 truk tanki penyedot lumpur tinja dengan kapasitas angkut sebesar 4 m³ per unit. Pada tahun 2024 dilakukan pelayanan penyedotan lumpur tinja di 107 rumah tangga.

Tabel 2. 21. Data Sampah Terkelola Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

Keterangan	2020		2021		2022		2023		2024*	
	Ton / Tahun	%	Ton / Tahun	%	Ton / Tahun	%	Ton / Tahun	%	Ton / Tahun	%
1.Pengurangan Sampah	44.844,98	28,09	46.108,66	28,75	6.929,16	36,98	49.798,46	38,91	9.600,23	39,00
2.Penanganan Sampah	17.905,95	11,21	18.066,22	11,27	18.335,14	14,45	19.178,19	14,98	22.166,45	17,43
3.Sampah Terkelola	61.750,93	39,30	64.174,88	40,02	65.265,30	51,42	68.976,65	53,89	71.766,68	56,44
4.Sampah Tidak Terkelola	96.912,92	60,70	96.194,73	59,98	61.652,55	48,58	9.022,37	46,10	55.399,86	43,56

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

c) *Keanekaragaman Hayati*

Rasio ruang terbuka hijau memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, karena menyediakan habitat alami bagi berbagai spesies flora dan fauna di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di Kabupaten Wonogiri, peningkatan rasio RTH tidak hanya mendukung kualitas lingkungan, tetapi juga memperkuat ekosistem lokal sebagai bagian dari upaya pelestarian biodiversitas. Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Wonogiri menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021–2024.

Tabel 2. 22. Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau	N/A	12%	13,46%	13,47%	13,47%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Pada tahun 2021, rasio RTH tercatat sebesar 12%, kemudian mengalami kenaikan menjadi 13,46% pada tahun 2022 dan menjadi 13,47% pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperluas dan menata ruang terbuka hijau sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Meskipun pertumbuhannya masih relatif lambat, tren positif ini menunjukkan komitmen yang konsisten dalam menjaga keseimbangan ekologis di tengah tekanan pembangunan wilayah.

2.1.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kabupaten Wonogiri menghadapi berbagai tantangan terkait bencana alam dan perubahan iklim. Wilayah ini rentan terhadap bencana seperti tanah longsor, banjir, dan kekeringan. Untuk meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah mengimplementasikan berbagai strategi dan program. Upaya Mitigasi Bencana antara lain :

1. **Penanaman Pohon dan Penghijauan:** Sebagai langkah mitigasi, pemerintah bersama masyarakat melakukan penanaman pohon di area rawan bencana, seperti hutan rakyat dan sepanjang jalan desa. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah erosi tanah yang dapat menyebabkan longsor serta meningkatkan penyerapan air guna mengurangi risiko banjir.

2. Relokasi Daerah Rawan Longsor: Pemerintah mempertimbangkan relokasi penduduk dari daerah rawan longsor ke lokasi yang lebih aman. Meskipun memerlukan biaya besar, langkah ini dianggap penting untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian materiil akibat bencana.
3. Sistem Peringatan Dini: Penerapan teknologi peringatan dini, seperti alat pendeteksi pergerakan tanah, dilakukan untuk memberikan informasi cepat kepada warga mengenai potensi longsor, sehingga tindakan mitigasi dapat segera diambil.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Wonogiri meraih peringkat pertama sebagai Kabupaten Paling Berkelanjutan di Indonesia dalam bidang Energi dan Perubahan Iklim pada ajang Penghargaan UI Green City Metric Ranking. Penghargaan ini mencerminkan komitmen dan upaya nyata pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, Kabupaten Wonogiri masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait kekeringan. Sekitar 75% wilayah di Wonogiri sangat rentan mengalami kekeringan, yang disebabkan oleh faktor geografis dan perubahan iklim. Selain itu, perubahan iklim berdampak pada meningkatnya risiko bencana, sehingga diperlukan strategi adaptasi yang efektif.

Kabupaten Wonogiri telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui berbagai program mitigasi dan adaptasi. Penghargaan yang diterima menjadi bukti nyata dari upaya tersebut. Namun, tantangan seperti kekeringan dan risiko bencana akibat perubahan iklim masih memerlukan perhatian dan strategi berkelanjutan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

A. Perubahan Iklim

Kualitas lingkungan hidup salah satunya juga dipengaruhi oleh perubahan iklim yaitu dengan adanya fenomena pemanasan global dimana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Perkembangan kuantitas/jumlah CO²) yang berpotensi meningkatkan kadar gas rumah kaca di Kabupaten Wonogiri di inventarisasi berdasarkan 5 (lima) sektor meliputi energi, IPPU (*Industrial Process and*

Production Use), Pertanian, Kehutanan, dan limbah. Secara keseluruhan perkembangan jumlah emisi mengalami penurunan dan kenaikan, utamanya pada Sektor Pertanian. Data menunjukkan bahwa emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 sebesar 656,75 Gg, meningkat pada tahun 2021 sebesar 756,08 Gg. Selama periode 2020 – 2023 emisi gas rumah kaca mempunyai tren meningkat dari 656,75 Gg pada tahun 2020 menjadi 1.468,95 Gg pada 2023.

Adapun gambaran perkembangan jumlah emisi dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2. 23. Perkembangan jumlah emisi (CO² (TonCO²e) berdasarkan sektor Kabupaten Wonogiri

No	Sektor	Jumlah Emisi CO ₂ (Gg)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Energi	389,14	447,71	489,46	460,7	0,00
2	IPPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pertanian	886,07	870,50	890,17	880,84	0,00
4	Kehutanan	-634,21	-635,12	-639,23	57,94	0,00
5	Limbah	15,75	73,00	70,09	69,46	0,00
	TOTAL	656,75	756,08	810,49	1468,95	0,00

Sumber: signsmart.menlhk.go.id



Sumber: signsmart.menlhk.go.id

Gambar 2. 4. Perkembangan Jumlah Emisi CO² (TonCO²e) Berdasarkan Sektor Kabupaten Wonogiri

Perubahan iklim disebabkan oleh berbagai faktor dan menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Tren kenaikan suhu dalam kurun waktu panjang menjadi indikasi adanya perubahan iklim. Berdasarkan pengamatan data historis suhu udara rata-rata yang dimiliki yaitu selama periode 1901-2022

menunjukkan suhu udara rata-rata di Kabupaten Wonogiri telah mengalami peningkatan dengan laju sekitar 0,01°C/tahun selama periode historis. Dengan kata lain di Kabupaten Wonogiri telah terjadi peningkatan suhu udara rata-rata lebih kurang sebesar 1°C selama pengamatan 120 tahun terakhir. Terjadinya perubahan iklim berkaitan dengan emisi gas rumah kaca (GRK).

Emisi Gas Rumah Kaca dapat berasal dari penggunaan energi (listrik), kegiatan industri, kegiatan pertanian dan peternakan serta limbah seperti salah satu contoh potensi gas rumah kaca (GRK) dari total timbunan sampah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2020 sebanyak 159.663,85 ton/tahun, dengan menggunakan metode IPCC 2006 (*2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories Chapter 3; Solid Waste Disposal*), maka diperoleh data potensi carbon (C) terdegradasi sebesar 32.992,24 Giga Gram/tahun serta metan (CH₄) sebesar 21.994,84 Giga Gram /tahun. Jumlah emisi Gas Rumah Kaca akan terus bertambah apabila tidak ada penanganan secara serius, oleh karena hal tersebut perlu adanya upaya keberlanjutan untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca seperti dengan memperbesar luasan hutan, mengurangi pemakaian energi berlebih dan kebijakan lainnya.

B. Bencana alam

Kondisi topografis, geologis, hidrologis, dan geografis wilayah Kabupaten Wonogiri menyebabkan adanya kawasan-kawasan yang berpotensi terdampak peristiwa yang mengancam atau mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat yang dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, serta kerugian harta benda dan dampak psikologis. Terdapat beberapa daerah di wilayah Kabupaten Wonogiri yang masuk kawasan rawan bencana.

Kabupaten Wonogiri, yang terletak di wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah, memiliki tingkat risiko bencana yang signifikan. Berikut tabel Indeks Risiko Bencana Kabupaten Wonogiri tahun 2020-2024 yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Tabel 2. 24. Indeks Risiko Bencana dan Indikator Ketahanan Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2020-2024

Nomor	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Resiko Bencana (IRB)	124,77	124,77	108,91	97,24	86,79
2	Indikator Ketahanan Daerah		0,62	0,65	0,67	0,75

Sumber : BPBD Wonogiri, 2024

Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kapasitas penanggulangan bencana di daerah tersebut. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini antara lain peningkatan kapasitas relawan dan berkurangnya jumlah kejadian bencana. Meskipun demikian, Kabupaten Wonogiri tetap menghadapi potensi ancaman bencana, terutama tanah longsor dan banjir, yang sering terjadi selama musim hujan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan relawan, serta penguatan sistem peringatan dini, tetap menjadi prioritas dalam strategi pengurangan risiko bencana di wilayah ini.

2.1.1.7 Kondisi Demografi

Kondisi demografi suatu wilayah digambarkan dari karakteristik penduduk yang dilihat dari jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan komposisi penduduk. Pada tahun 2024, jumlah penduduk di Kabupaten Wonogiri adalah 1.057.495 jiwa (DKB Kemendagri 2024). Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2024 jumlah penduduk laki-laki 528.932 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 528.563 jiwa. Jumlah penduduk tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini didasarkan pada data DKB Kementerian Dalam Negeri, 2024. Jika dilihat dari jumlah penduduk laki dan perempuan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2. 25. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

No	Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024
1	Laki-laki	548.941	535.104	535.603	536.848	528.932
2	Perempuan	547.197	534.988	535.477	535.734	528.563
JUMLAH		1.096.138	1.070.092	1.071.080	1.072.582	1.057.495
Rasio Jenis Kelamin		100,32	100,02	100,02	100,21	100,07

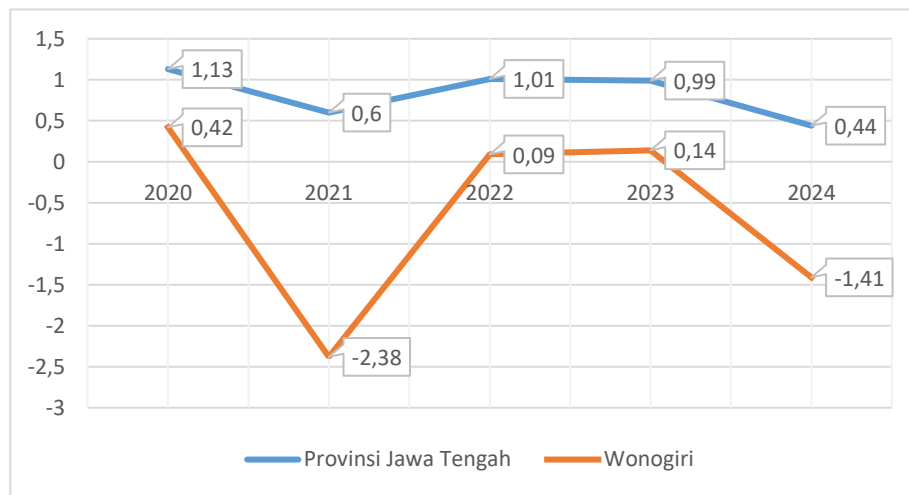
Sumber : Disdukcapil Kabupaten Wonogiri, 2024

Berdasarkan data diatas, rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Wonogiri selama kurun waktu 2020-2024 berada pada kisaran 100,07, artinya terdapat 100,07 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

Jika dilihat dari sisi pertumbuhannya, dalam periode tahun 2020 sampai tahun 2024 rata-rata laju pertumbuhan penduduk adalah -0,44%, angka ini

masih berada di bawah rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 0,99%. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Wonogiri termasuk yang pertumbuhannya paling rendah.

Berikut ini grafik perbandingan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2020-2024.



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Wonogiri, 2024

Gambar 2. 5. Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Wonogiri dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

Jumlah penduduk di kabupaten Wonogiri dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi dan pada tahun 2024 jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Wonogiri, yaitu 88.030 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Batuwarno yaitu 17.686 jiwa.

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Wonogiri yang relatif rendah selama tahun 2020–2024 disebabkan oleh kombinasi antara penurunan angka kelahiran, migrasi keluar yang tinggi, serta struktur demografi yang menua. Meskipun stabil dari sisi pertumbuhan, kondisi ini memerlukan perhatian serius dalam perencanaan jangka panjang, khususnya dalam peningkatan kualitas penduduk, penciptaan lapangan kerja lokal, dan penguatan daya saing ekonomi daerah agar potensi sumber daya manusia tidak terus mengalami "brain drain" ke luar wilayah.

Tabel 2. 26. Proyeksi Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2030

No	Uraian	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laki-laki	539.284	543.243	547.202	551.161	555.120	559.076
2	Perempuan	542.096	546.481	550.866	555.251	559.636	564.018
	Jumlah	1.081.380	1.089.724	1.098.068	1.106.412	1.114.756	1.123.094

Sumber : BPS Kab. Wonogiri, 2024

Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Ketiga komponen tersebut akan menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan.

Kepadatan penduduk dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat persebaran penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk di Kabupaten Wonogiri terus mengalami fluktuasi selama periode tahun 2020 sampai tahun 2024. Pada tahun tahun 2021 kepadatan penduduk mengalami penurunan dari tahun 2020 yaitu dari 594,59 ke 580,46, lalu tahun 2022 kepadatan penduduk mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2021 yaitu dari 580,46 ke 580,99, pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan dari tahun 2022 yaitu 580,99 ke 581,81 dan terakhir tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2023 yaitu 581,81 ke 573,63.

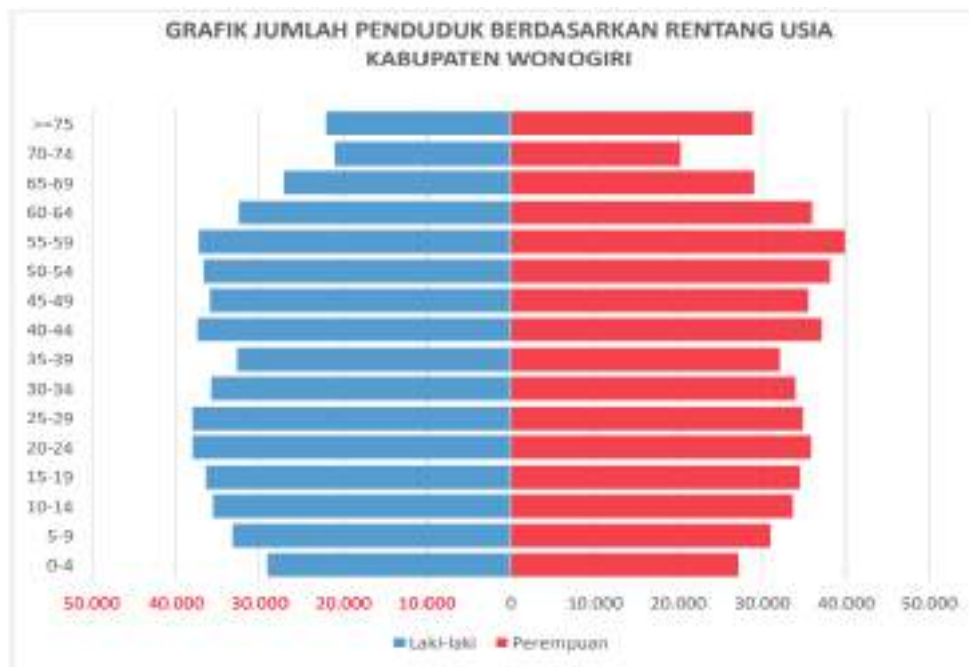
Pengaruh baik kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi adalah pasar konsumen yang besar, ketersediaan tenaga kerja, investasi yang besar, dan pembanguna infrastruktur yang baik. Sedangkan pengaruh negatif adalah tekanan pada infrastruktur dan layanan publik, pengangguran yang tinggi, kesempatan pekerjaan yang terbatas, dan adanya ketimpangan ekonomi dan sosial.

Kepadatan penduduk pada tahun 2024 sebesar 573,63 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Jatisrono, yaitu 1.151,58 jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Karangtengah, yaitu 262,98 jiwa/km².

Hal lain yang menggambarkan karakteristik penduduk adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu, dalam hal ini adalah berdasarkan usia dan jenis kelamin. Berdasarkan piramida penduduk tahun 2024, kelompok usia tertinggi berada pada usia 55-59 tahun diikuti kelompok usia 50-54 tahun sedangkan kelompok usia terendah berada pada 70-74 tahun. Dari piramida penduduk, terlihat bahwa struktur penduduk stasioner, yaitu jumlah penduduk pada semua usia hampir sama kecuali di usia tertua menjadi berkurang, hal ini menandakan jumlah kelahiran dan dan kematian cenderung seimbang. sedangkan komposisi jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan pada semua kelompok usia relatif sama.

Berdasarkan piramida penduduk tahun 2024, dapat dilihat pula bahwa penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak yaitu 719.428

jiwa, daripada penduduk usia non produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) yaitu 338.067 jiwa. Dari penduduk usia produktif dan non produktif diketahui bahwa angka ketergantungan di Kabupaten Wonogiri tahun 2024 adalah 46,99%. Angka ini masih berada pada kategori tinggi karena diatas 41 %.



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Wonogiri, 2024

Gambar 2. 6. Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2024

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah ditunjukkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. PDRB merupakan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan unit ekonomi dalam suatu daerah. PDRB sebagai ukuran kinerja ekonomi makro menggambarkan pencapaian kinerja suatu daerah dalam mengalokasikan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 27. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2020	-1,41
2021	3,35
2022	5,63
2023	4,98
2024	4,93

Sumber: BPS Wonogiri, 2024

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis dari tahun 2019 yaitu sampai diangka -1,41% karena pada saat itu seluruh dunia termasuk Indonesia masuk dalam kondisi yang buruk akibat Covid-19 yang melumpuhkan semua sektor perekonomian. Sementara tahun 2021 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar mencapai 3,35% dan akhirnya pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kabupaten Wonogiri mengalami kenaikan yang luar biasa yaitu 5,63%. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan menjadi 4,98% karena kondisi ekonomi masih fluktuatif, dan capaian Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2024 dengan angka 4,93.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri dari tahun ke tahun masih fluktuatif, karena adanya berbagai kejadian baik di kabupaten Wonogiri, regional, nasional, maupun internasional yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi kabupaten Wonogiri, dan berikut tabel perbandingan realisasi Pertumbuhan Ekonomi terhadap tahun sebelumnya.

Tabel 2. 28. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi	Perubahan PE dengan capaian Tahun Sebelumnya
2020	-1,41	-6,55
2021	3,35	4,76
2022	5,63	2,28
2023	4,98	-0,65
2024	4,93	-0,05

Sumber: BPS Wonogiri, 2024

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar 6,55% menjadi -1,41%, hal itu disebabkan adanya pandemi covid 19. Pada ditahun 2021 Pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik dengan sudah menurunnya pandemi covid 19 yaitu pada angka 3,35%. Selanjutnya pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan capaian pada tahun 2021 yang tumbuh sampai pada angka 5,63%, hal ini disebabkan oleh sudah semakin membaiknya kondisi perekonomian dari Pandemi covid 19. Walaupun akhirnya perekonomian Wonogiri pada tahun 2023 tercatat mengalami penurunan sebesar 0,65% dari tahun 2022 menjadi 4,98%, dan turun lagi di tahun 2024 menjadi 4,93.

Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri -1,41%, lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar -2,65% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar -2,07%. Pertumbuhan minus tahun

2020 disebabkan karena melemahnya seluruh kegiatan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi yang naik signifikan yakni sebesar 3,35 % angka ini lebih tinggi dari angka Provinsi Jawa Tengah. Dilanjutkan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,63% telah melampaui pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan nasional yaitu sebesar 5,31%, hal ini menandakan bahwa pemulihan ekonomi cukup baik di Kabupaten Wonogiri.

Tabel 2. 29. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi		
	Wonogiri	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2020	-1,41	-2,65	-2,07
2021	3,35	3,33	3,70
2022	5,63	5,31	5,31
2023	4,98	4,98	5,05
2024	4,93	4,95	5,03

Sumber : BPS Pusat, Prov. Jawa Tengah dan Kab. Wonogiri 2024

Rata-rata penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021-2024 terletak pada 3 (tiga) sektor paling dominan yang dapat dilihat pada distribusi persentase rata-rata lima tahun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (berdasar 2010) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonogiri, antara lain:

1. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
2. Sektor Industri Pengolahan; dan
3. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor.

Tabel 2. 30. Distribusi Persentase tiap sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,12	29,38	29,11	28,16	27,19
B	Pertambangan dan Penggalian	3,13	3,14	2,80	2,73	2,71
C	Industri Pengolahan	17,55	18,13	18,08	18,61	19,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	7,39	7,67	7,37	7,47	7,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,18	16,39	16,15	15,92	15,84
H	Transportasi dan Pergudangan	4,48	4,63	6,68	7,22	7,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,39	2,39	2,48	2,64	2,79
J	Informasi dan Komunikasi	1,1	1,15	1,07	1,09	1,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,23	3,23	3,14	3,01	2,94
L	Real Estate	0,74	0,73	0,69	0,67	0,66
M,N	Jasa Perusahaan	0,45	0,45	0,45	0,46	0,47

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,88	2,71	2,55	2,46	2,5
P	Jasa Pendidikan	7,1	6,79	6,29	6,33	6,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,2	1,19	1,14	1,14	1,17
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,92	1,88	1,89	1,95	2,01
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri, 2024

*Tahun 2024 menunggu rilis dari BPS Kab. Wonogiri

Dari tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa terdapat beberapa sektor ekonomi yang berpengaruh besar terhadap komposisi nilai PDRB Kabupaten Wonogiri berdasarkan komponen harga berlaku.

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi *leading sector* artinya masih menjadi sektor ekonomi yang paling berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonogiri yakni memiliki kontribusi terbesar diantara sektor-sektor lain yakni sebesar 29,10%.

Sektor yang memiliki kontribusi terbesar setelah Sektor Pertanian adalah Sektor Industri Pengolahan yakni memiliki kontribusi sebesar 18,08%. Kemudian diikuti oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,15%. Ketiga sektor ini masih mendominasi komposisi PDRB dan menjadi sektor basis unggulan di Kabupaten Wonogiri.

Distribusi Persentase tiap sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 31. Distribusi Persentase tiap sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,31	2,27	3,72	-0,27	0,86
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,19	4,23	-4,81	4,48	5,38
C	Industri Pengolahan	2,32	4,83	4,22	7,46	6,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,25	4,11	2,34	4,84	7,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,23	5,19	-1,12	5,71	4,84
F	Konstruksi	-2,78	5,37	-0,93	7,53	5,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,59	4,64	3,35	4,43	4,89
H	Transportasi dan Pergudangan	-34	5,08	50,48	10,91	6,67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2,29	2,88	12,11	15,59	10,93

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
J	Informasi dan Komunikasi	17,63	8,77	2,46	11,74	10,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,42	1,76	1,51	2,49	3,87
L	Real Estate	-0,19	2,46	2,22	5,69	4,87
M,N	Jasa Perusahaan	-4,02	4,55	5,27	8,49	7,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,12	-0,94	1,94	4,26	7,42
P	Jasa Pendidikan	-0,14	-1,35	1,37	7,44	8,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,33	2,97	3,59	6,18	7,63
R,S,T,U	Jasa lainnya	-1,4	1,41	7,34	8,97	7,92
PERTUMBUHAN PDRB		-1,41	3,35	5,63	4,98	4,93

Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri, 2024

Berdasarkan tabel laju pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari laju pertumbuhan PDRB per tahun dari tahun 2020-2024, dengan berhasilnya perbaikan pasca pandemi covid 19, hampir semua sektor mengalami kenaikan atau pertumbuhan positif, dan hanya 2 sektor yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu :

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Transportasi dan Pergudangan

Sektor yang tumbuh cukup signifikan adalah sektor Konstruksi yang sangat terdampak serius akibat pandemi COVID-19, dimana pada tahun 2022 sektor ini mengalami kontraksi atau minus sebesar -0,93 persen, namun pada akhir tahun 2023 dapat bangkit dengan pertumbuhan tercatat sebesar 7,53%.

Tabel 2. 32. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Wonogiri 2020-2024

Sektor PDRB Lapangan Usaha	PDRB Harga Berlaku (miliar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.785,09	8.986,19	9.806,93	10.404,77	10.809,54
Pertambangan dan Penggalan	913,09	960,65	941,98	1.010,09	1.076,58
Industri Pengolahan	5.118,93	5.545,60	6.091,58	6.876,49	7.653,85
Pengadaan Listrik dan Gas	20,99	21,82	22,46	23,92	25,70
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	18,77	19,96	19,76	21,48	24,00
Konstruksi	2.154,73	2.344,74	2.484,64	2.760,74	2.928,81
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	4.719,22	5.011,71	5.441,72	5.880,61	6.298,36
Transportasi dan Pergudangan	1.307,55	1.414,62	2.249,64	2.667,39	2.863,47
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	696,70	732,19	834,25	975,84	1.107,58
Informasi dan Komunikasi	321,48	350,82	360,32	403,62	451,08
Jasa Keuangan dan Asuransi	942,85	988,08	1.057,95	1.112,78	1.169,99
Real Estate	215,67	223,51	231,05	247,03	261,53
Jasa Perusahaan	130,47	138,34	152,27	170,03	186,25

Sektor PDRB Lapangan Usaha	PDRB Harga Berlaku (miliar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	841,23	828,90	859,46	910,44	994,30
Jasa Pendidikan	2.069,72	2.075,96	2.118,03	2.338,05	2.647,41
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	350,59	364,48	384,15	420,91	465,53
Jasa Lainnya	559,44	573,87	636,01	720,86	797,94
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	29.166,53	30.581,45	33.692,20	36.945,55	39.761,92

Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri, 2024

Nilai PDRB terbesar masih didominasi oleh Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sehingga tumbuh cukup positif di tahun 2024. Nilai PDRB berdasarkan Harga Berlaku tercatat sebesar 10,8 Triliyun Rupiah. Diikuti oleh Sektor Industri Pengolahan sebesar 7,6 Triliyun Rupiah, dan kemudian diikuti oleh Sektor Perdagangan Besar, Eceran sebesar 6,3 Triliyun Rupiah, ketiganya ini menjadi sektor basis unggulan Kabupaten Wonogiri.

Tabel 2. 33. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Wonogiri 2020-2024

Sektor PDRB Lapangan Usaha	PDRB Harga Konstan (juta)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.026,73	6.163,67	6.393,15	6.375,72	6.430,61
Pertambangan dan Penggalian	571,62	595,81	567,14	592,53	624,41
Industri Pengolahan	3.431,10	3.596,90	3.748,74	4.028,28	4.289,51
Pengadaan Listrik dan Gas	18,02	18,76	19,20	20,13	21,55
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	15,92	16,74	16,55	17,50	18,35
Konstruksi	1.486,30	1.566,12	1.551,52	1.668,36	1.768,00
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	3.668,91	3.839,21	3.967,66	4.143,36	4.346,06
Transportasi dan Pergudangan	1.070,73	1.125,09	1.694,09	1.878,85	2.004,23
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	527,47	542,65	608,35	703,19	780,07
Informasi dan Komunikasi	343,31	373,41	382,60	427,52	471,81
Jasa Keuangan dan Asuransi	637,21	648,45	658,21	674,60	700,68
Real Estate	173,85	178,12	182,07	192,43	201,80
Jasa Perusahaan	88,10	92,11	96,96	105,19	112,73
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	554,35	549,13	559,78	583,65	626,97
Jasa Pendidikan	1.291,61	1.274,11	1.291,52	1.387,63	1.503,91
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	234,17	241,13	249,79	265,24	285,47
Jasa Lainnya	423,76	429,75	461,31	502,69	542,52
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	20.563,14	21.251,17	22.448,63	23.566,88	24.728,69

Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri, 2024

Sementara untuk nilai PDRB berdasarkan Harga Konstan Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Nilai PDRB berdasarkan Harga Konstan tercatat sebesar 6,37 Triliyun Rupiah. Diikuti oleh Sektor Perdagangan Besar, Eceran sebesar 4,14 Triliyun Rupiah, dan diikuti Sektor Industri Pengolahan sebesar 4,02 Triliyun Rupiah, terdapat juga sektor potensial yang memiliki komposisi PDRB besar yaitu Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 1,87 dan sektor Konstruksi sebesar 1,66 Triliyun Rupiah, serta Sektor Jasa Pendidikan sebesar 1,38 Triliyun Rupiah.

Tabel 2. 34. Perbandingan Rasio Perubahan TPT Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Capaian Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Wonogiri			Jawa Tengah			Nasional		
	TPT	Perubahan TPT	PE	TPT	Perubahan TPT	PE	TPT	Perubahan TPT	PE
2020	4,24	1,78	-1,41	6,48	1,99	-2,65	7,07	1,79	-2,07
2021	2,43	-1,81	3,35	5,95	-0,53	3,33	6,49	-0,58	3,7
2022	1,95	-0,48	5,63	5,57	-0,38	5,31	5,83	-0,66	5,31
2023	1,92	-0,03	4,98	5,13	-0,44	4,97	5,83	-0,51	5,05
2024	2,40	0,48	4,93	4,78	-0,35	4,95	4,82	-0,50	5,03

Sumber : BPS Kab. Wonogiri 2024

Berdasarkan tabel Perbandingan rasio perubahan TPT dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, realisasi TPT mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai 2023, namun pada tahun 2024 mengalami kenaikan karena banyak warga Wonogiri yang terkena PHK besaran di salah satu pabrik textile di Sukoharjo.

Untuk pertumbuhan ekonomi kabupaten Wonogiri dengan Nasional, tahun 2019 sampai 2022 pertumbuhan lebih baik daripada nasional. Pada tahun 2023, pertumbuhan sedikit dibawah Nasional, namun sama dengan pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah. Dan pada tahun 2024 capaian Pertumbuhan Ekonomi kabupaten Wonogiri adalah 4,93.

Tabel 2. 35. Perbandingan Rasio Perubahan Tingkat Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Wonogiri				Jawa Tengah			
	Kemiskinan		Pertumbuhan Ekonomi		Kemiskinan		Pertumbuhan Ekonomi	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2020	10,86	0,61	-1,41	-6,55	10,19	0,97	-2,07	-7,09
2021	11,55	0,69	3,35	4,76	9,71	-0,48	3,7	5,77
2022	10,99	-0,56	5,63	2,28	9,57	-0,14	5,31	1,61
2023	10,94	-0,05	4,98	-0,65	9,36	-0,21	5,05	-0,27
2024	10,71	-0,23	4,93	-0,05	8,57 (Sep)	-0,79 (Sep)	5,03	-0,02

Sumber : BPS Kab. Wonogiri, 2024

Tingkat kemiskinan Kabupaten Wonogiri pada tahun 2020 sampai 2021, mengalami kenaikan diakibatkan pandemi covid 19 dan pasca covid-19. Pemerintah sudah melaksanakan program prioritas untuk menurunkan tingkat kemiskinan, hasil dapat terlihat terjadi tren penurunan sejak tahun 2022 s.d. 2024, hal itu menunjukkan keberhasilan dari program kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan walaupun capaian masih dibawah nasional.

Tabel 2. 36. Perbandingan Rasio Perubahan Rasio Gini Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Capaian Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Wonogiri				Nasional			
	Realisasi Rasio Gini	Perubahan Rasio Gini	Pertumbuhan Ekonomi	Perubahan PE	Realisasi Rasio Gini	Perubahan Rasio Gini	Pertumbuhan Ekonomi	Perubahan PE
2020	0,364	0,027	-1,41	-6,55	0,381	-	-2,07	-7,09
2021	0,356	-0,008	3,35	4,76	0,384	0,003	3,7	5,77
2022	0,348	-0,008	5,63	2,28	0,384	0	5,31	1,61
2023	0,351	0,003	4,98	-0,65	0,388	0,004	5,05	-0,27
2024	0,364	0,013	4,93	0,03	0,379	-0,009	5,03	-0,02

Sumber : Bapperida Wonogiri diolah, 2024

Rasio Gini Kabupaten Wonogiri mengalami tren kenaikan dan tren penurunan. Tren kenaikan terjadi pada tahun 2020 diakibatkan karena pandemi covid 19. Tren penurunan terjadi pada tahun 2023 sampai 2024 dengan adanya program peningkatan di semua sektor khususnya perekonomian.

B. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk selama satu tahun dalam suatu daerah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Berikut Tabel PDRB Perkapita ADHK Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

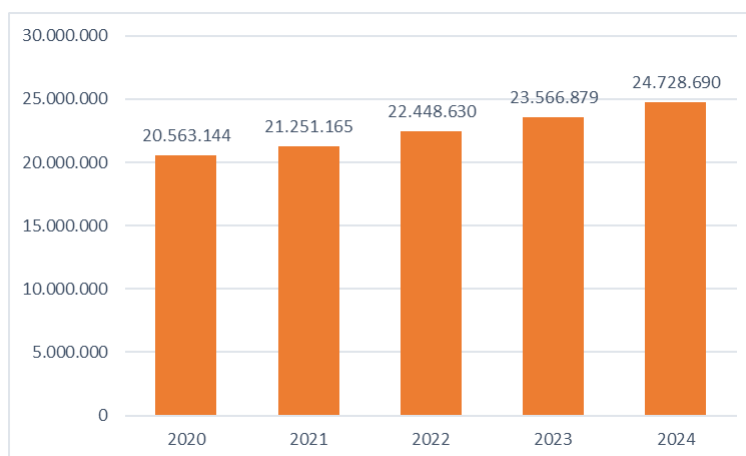
Tabel 2. 37. PDRB Perkapita (ADHK) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB Per Kapita ADHK	Pertumbuhan
2020	20.563.144	-293.065
2021	21.251.165	687.860
2022	22.448.630	1.197.626
2023	23.566.879	1.118.249
2024	24.728.690	1.161.811

Sumber : BPS Kab. Wonogiri diolah, 2024

Pada tahun 2024, PDRB Perkapita Kabupaten Wonogiri atas dasar harga Konstan (ADHK) sebesar Rp 24.728.690 naik dibandingkan PDRB per kapita tahun 2023 sebesar Rp 23.566.879. Beberapa faktor pendorong kenaikan PDRB adalah : Pertumbuhan sektor penyedia Akomodasi dan Makan Minum, Dominasi

sektor pertanian, dan Kontribusi sektor industri pengolahan dan perdagangan. Selain itu tranformasi ekonomi kabupaten Wonogiri dengan pembangunan ekonomi berbasis digital yang mampu mengungkit kenaikan PDRB.



Sumber: BPS Wonogiri, 2024

Gambar 2. 7. Grafik Pertumbuhan PDRB per Kapita Harga Konstan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

Berikut Tabel PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024:

Tabel 2. 38. PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB Per Kapita ADHB	Pertumbuhan
2020	29.166.531	121.614
2021	30.581.453	1.414.922
2022	33.692.198	3.110.745
2023	36.942.649	3.250.451
2024	39.761.920	2.819.271

Sumber : BPS Kab. Wonogiri, 2024

Pada tahun 2024, PDRB Perkapita Kabupaten Wonogiri atas dasar harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp 39.761.920,- naik dibandingkan PDRB per kapita tahun 2023 sebesar Rp 36.942.649,-

PDRB per kapita Kabupaten Wonogiri selama kurun waktu 5 tahun, terus mengalami kenaikan kecuali saat pandemi tahun 2020, tetapi kenaikan ini masih berada dibawah tingkat PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah. Artinya tingkat kemakmuran Kabupaten Wonogiri masih berada dibawah rata-rata tingkat kemakmuran Provinsi Jawa Tengah, meskipun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat setiap tahunnya.

Meningkatnya Pendapatan per kapita menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang baik. Capaian PDRB Per Kapita baik ADHK dan ADHB adalah lebih baik dari target daerah dengan angka ketercapaian diatas 100 persen, yaitu ADHK Rp. 21.235.460,- dengan capaian dari target 103%, ADHB per Kapita Rp. 31.879.520,- dengan capaian 105% dan capaian tersebut lebih baik dari capaian wilayah setara, hal ini patut diapresiasi karena mencerminkan pendapatan per kapita penduduk terus naik, sehingga mendukung progam pemerataan dan penurunan ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Wonogiri.

C. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran perkapita ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*). Rata-rata pengeluaran perkapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Perhitungan paritas daya beli pada metode lama menggunakan 27 komoditas, pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Apabila Indeks Pengeluaran meningkat akan mendorong meningkatnya dua indeks lainnya yaitu Indeks Kesehatan dan Indeks Pendidikan.

Tabel 2. 39. Perbandingan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)
1	2020	9.286
2	2021	9.429
3	2022	9.780
4	2023	10.283
5	2024	10.634

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri, 2024

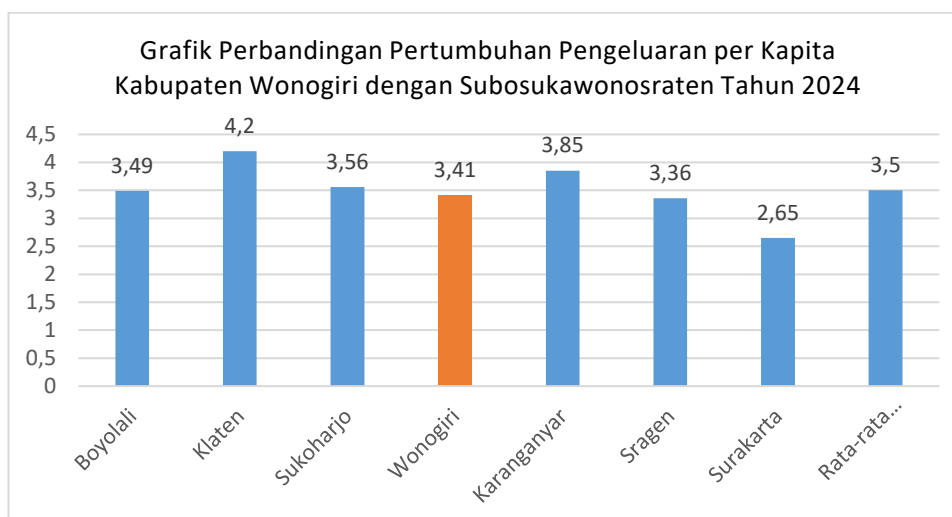
Pengeluaran per Kapita Tahun 2024 sebesar Rp. 10.634 (ribu rupiah), dan tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan pengeluaran per kapita daerah dengan capaian wilayah Subosukawonosraten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Tabel 2. 40. Perbandingan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten/Kota se Subosukowonosraten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Kab / Kota	Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah)					Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Boyolali	12.910	13.031	13.250	13.716	14.195	-1,29	0,94	1,68	3,52	3,49
Klaten	11.921	12.017	12.522	12.968	13.513	-1,27	0,81	4,20	3,56	4,2
Sukoharjo	11.325	11.428	11.841	12.319	12.758	-2,01	0,91	3,61	4,04	3,56
Wonogiri	9.286	9.429	9.780	10.283	10.634	-1,49	1,54	3,72	5,14	3,41
Karanganyar	11.428	11.509	11.798	12.260	12.732	-1,22	0,71	2,51	3,92	3,85
Sragen	12.589	12.679	13.052	13.439	13.890	-1,03	0,71	2,94	2,97	3,36
Surakarta	14.761	14.911	15.463	15.870	16.291	-1,91	1,02	3,70	2,63	2,65
Rata-rata Subosukowonosraten	12.031,43	12.143,43	12.529,43	12.979,29	13.430,43	-1,46	0,95	3,19	3,68	3,5
JAWA TENGAH	10.930	11.034	11.377	11.835	12.276	-1,55	0,95	3,11	4,03	3,7
NASIONAL	11.013	11.156	11.479	11.899	12.341	-2,53	0,94	3,35	3,66	3,71

Sumber : BPS 2024

Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Wonogiri dengan kabupaten/kota se Subosukawonosraten Tahun 2024 dapat di lihat pada grafik berikut ini

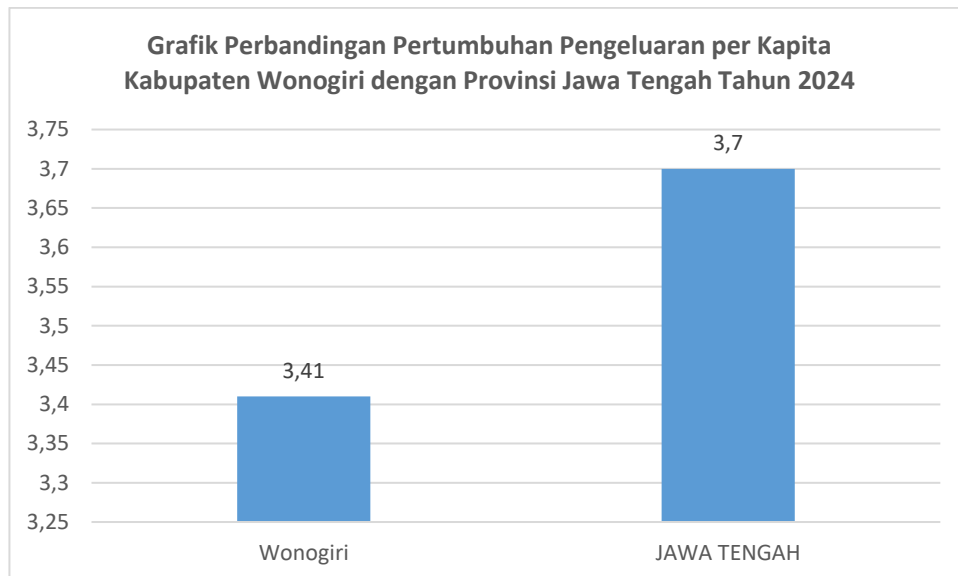


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2024

Gambar 2. 8. Grafik Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Wonogiri dengan Subosukawonosraten Tahun 2024

Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 berada di atas rata-rata kabupaten/kota se wilayah Subosukowonosraten serta berada di urutan ke-5 dari 7 kabupaten / kota se wilayah Subosukowonosraten.

Perbandingan pertumbuhan pengeluaran per kapita Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dapat di lihat pada grafik berikut ini.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2024

Gambar 2. 9. Grafik Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Pertumbuhan pengeluaran per kapita Kabupaten Wonogiri tahun 2024 berada di bawah Jawa Tengah. Dan perbandingan pertumbuhan pengeluaran per kapitan Kaabupaten Wonogiri dengan nasional tahun 2024 adalah seperti grafik berikut ini.



Sumber : BPS 2024

Gambar 2. 10. Grafik Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran per Kabupaten Wonogiri dengan Nasional Tahun 2024

Pertumbuhan Pengeluaran per kapita Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 berada di bawah Nasional.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap pasar kerja. TPT dapat dilihat dari jumlah pengangguran pada tiap tahunnya terhadap jumlah angkatan kerja. TPT menjadi salah satu

indikator tolak ukur kinerja daerah yang dicantumkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 41. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya tahun 2020-2024

NO	Tahun	Realisasi TPT	Perubahan TPT	Kinerja Pcapaian	Keterangan
1	2020	4,24	1,78	100%	Tidak Tercapai
2	2021	2,43	1,84	100%	Tercapai
3	2022	1,95	-0,48	100%	Tercapai
4	2023	1,92	-0,03	100%	Tercapai
5	2024	2,40	0,48	100%	Tercapai

Sumber: Badan Pusat Statistik , 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tahun 2020 capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Wonogiri tidak dapat mencapai target karena terdampak pandemi covid-19 yang menyebabkan jumlah pengangguran meningkat sebagai akibat sebagian besar penduduk Kabupaten Wonogiri kehilangan mata pencaharian dan penurunan penyerapan tenaga kerja. Disamping itu akibat dampak pandemi covid 19 tersebut juga berpengaruh pada perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 dan 2021 lebih dari 0 yang biasanya sebelum tahun 2019 tidak lebih dari 0. Akan tetapi di tahun 2023 TPT Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 1,95% menjadi 1,92%, hal ini juga menunjukkan bahwa ketercapaian target dengan perubahan TPT 0,03%. Dan pada tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka kembali naik menjadi 2,40.

Analisis sebab dan akibat TPT di kabupaten wongiri adalah

1. Tahun 2020 (4,24 %)

Sebab: pandemi covid-19 berdampak pada signifikan terhadap dunia kerja terutama pada sektor informal, perdagangan kecil, dan insutri rumah tangga

Akibat: adanya kenaikan pengangguran dan terjadi PHK Di beberapa perusahaan.

2. Tahun 2021-2023 - Penurunan TPT

Sebab: pemulihan ekonomi nasional dan daerah, pekerja informal kembali bekerja, dan umkm semakin baik.

Akibat:

Terjadi penurunan TPT tahun 2021 - 2023 (2,43 % → 1,92 %)

3. Tahun 2024 - kenaikan menjadi 2,4 %

Sebab: lulusan baru semakin naik baik lulusan perguruan tinggi maupun sekolah menengah, keterbatasan lapangan kerja informal, dan kurangnya keterampilan dalam dunia kerja.

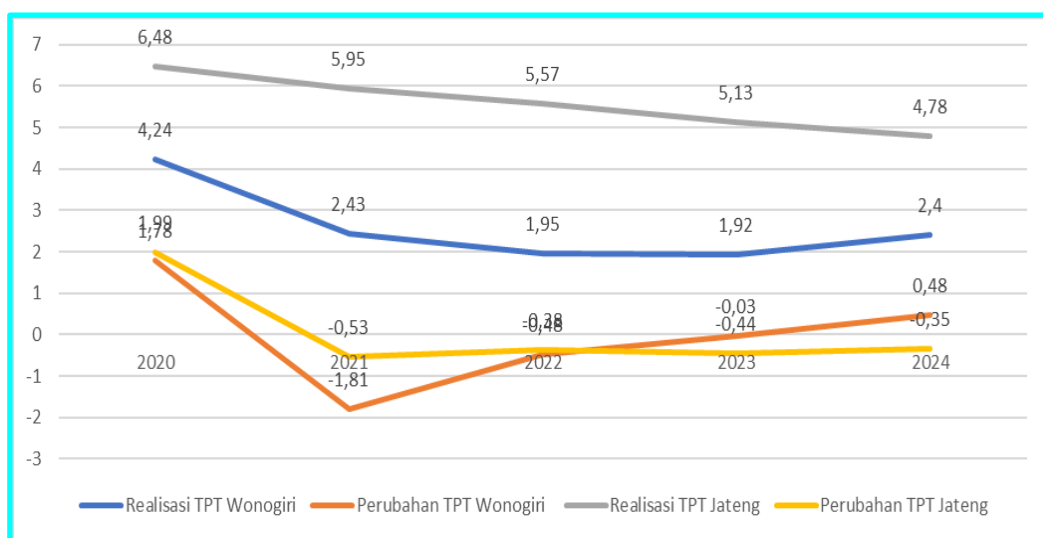
Akibat: angka TPT mengalami kenaikan, namun tahun 2024 masih terendah no 2 se Jawa Tengah

Sedangkan apabila dibandingkan dengan perubahan TPT rata-rata wilayah kabupaten pengembangan se eks-karisidenan Surakarta (Sobosukowonosraten), capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Wonogiri di tahun 2024 masih lebih baik seperti tabel berikut:

Tabel 2. 42. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan rata-rata capaian wilayah Subosukowonosraten, capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Kab / Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)					Pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Surakarta	7,92	7,85	5,83	4,58	4,61	3,76	-0,07	-2,02	-1,25	0,03
Boyolali	5,28	5,09	4,92	4,05	3,16	2,19	-0,19	-0,17	-0,87	-0,89
Sukoharjo	6,93	3,32	2,47	3,40	3,65	3,54	-3,61	-0,85	0,93	0,25
Karanganyar	5,96	5,89	5,70	4,35	3,47	2,84	-0,07	-0,19	-1,35	-0,88
Wonogiri	4,24	2,43	1,95	1,92	2,40	1,69	-1,81	-0,48	-0,03	0,48
Sragen	4,75	4,76	4,69	3,87	3,53	1,43	0,01	-0,07	-0,82	-0,34
Klaten	5,46	5,48	4,31	4,20	3,97	1,92	0,02	-1,17	-0,11	-0,23
Rata-rata Subosukowonosraten	5,79	4,97	4,27	3,77	3,54	2,48	-0,82	-0,71	-0,50	-0,23
JAWA TENGAH	6,48	5,95	5,57	5,13	4,78	1,99	-0,53	-0,38	-0,44	-0,35
NASIONAL	7,07	6,49	5,83	5,32	4,82	1,79	-0,58	-0,66	-0,51	-0,50

Sumber: Badan Pusat Statistik , 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik , 2024

Gambar 2. 11. Grafik Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan rata-rata capaian wilayah Subosukowonosraten Tahun 2020-2024

Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten Wonogiri lebih baik dibandingkan rata-rata wilayah setara atau pengembangan Subosukawonosraten. Bisa dilihat angka TPT lebih rendah walaupun angka perubahannya masih di bawah rata-rata Subosukawonosraten. Hal tersebut terjadi karena penyerapan tenaga kerja sudah lebih baik dengan bertumbuhnya sektor lain.

Selain dengan rata-rata capaian wilayah setara, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Wonogiri telah dibandingkan juga dengan capaian nasional. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan capaian nasional dan Provinsi Jawa Tengah seperti tabel berikut

Tabel 2. 43. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Kab. Wonogiri		Provinsi Jawa Tengah		Nasional	
	Realisasi TPT	Perubahan TPT	Realisasi TPT	Perubahan TPT	Realisasi TPT	Perubahan TPT
2020	4,24	1,78	6,48	1,99	7,07	1,84
2021	2,43	-1,81	5,95	-0,53	6,49	-0,58
2022	1,95	-0,48	5,57	-0,38	5,86	-0,63
2023	1,92	-0,03	5,13	-0,44	5,32	-0,54
2024	2,40	0,48	4,78	-0,35	4,82	-0,50

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) kab. Wonogiri, 2024

Tahun 2020 pandemi menyebabkan peningkatan TPT di semua tingkat. Kabupaten Wonogiri mengalami kenaikan signifikan menjadi 4,24%, namun tetap lebih rendah dibandingkan provinsi (6,48%) dan nasional (7,07%). Dan pada tahun 2021-2023 TPT Kabupaten Wonogiri terus menurun, mencapai 1,92% pada 2023, menunjukkan pemulihan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional walaupun naik kembali pada tahun 2024 menjadi 2,40. Secara keseluruhan, Kabupaten Wonogiri berhasil mempertahankan TPT yang lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional selama periode 2020-2024, dengan penurunan signifikan pasca-pandemi.

Berikut adalah tabel Perbandingan jumlah penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020-2024.

Tabel 2. 44. Perbandingan Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Penganggur	TPT (%)	Capaian dari tahun sebelumnya
1	2020	24.868	4,24	Naik
2	2021	13.932	2,43	Turun
3	2022	11.492	1,95	Turun
4	2023	13.730	1,92	Turun
5	2024	16.195	2,40	Naik

Sumber: Badan Pusat Statistik , 2024

Berdasarkan tabel di atas jumlah pengangguran tahun 2020 berjumlah 24.868 orang, tahun 2021 berjumlah 13.932, tahun 2022 berjumlah 11.492 dan pada tahun 2023 berjumlah 13.730, tapi dengan adanya PHK besar-besaran di salah satu pabrik textile di sukoharjo jumlah penganggur di Wonogiri Kembali naik menjadi 16.195. TPT pada tahun 2020 sebesar 4,24%. Akan tetapi menurun pada tahun 2021 menjadi 2,43% dan sementara di tahun 2022 mengalami penurunan lagi menjadi 1,95% dan di tahun 2023 kembali sedikit turun menjadi 1,92%, dan naik lagi di tahun 2024 menjadi 2,40%.

Tabel 2. 45 Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas Yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD tahun 2020-2024

NO	Tahun	Jumlah Disabilitas	Keterangan
1	2020	NA	
2	2021	NA	
3	2022	5	
4	2023	10	
5	2024	40	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, 2024

Unit Layanan Disabilitas di Kabupaten Wonogiri dibentuk pada tahun 2024, pada tahun 2022-2023 layanan disabilitas di fasilitasi oleh Yayasan Sehati Sukoharjo.

E. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Berdasarkan kriteria Bank Dunia distribusi pendapatan penduduk Jawa Tengah dapat diukur menjadi tiga kelompok pendapatan. Sesuai kriteria Bank Dunia, distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Wonogiri tergolong merata dengan posisi ketimpangan rendah. Pada tahun 2024 menunjukkan angka 18,00% pendapatan dinikmati oleh 40% penduduk berpendapatan rendah, sebesar 35,17% oleh 40% penduduk berpendapatan menengah, dan sebesar 46,83% oleh 20% penduduk berpendapatan tinggi.

Tabel 2. 46. Pemerataan Pendapatan Penduduk Menurut Kriteria Bank Dunia Tahun 2020-2024

Tahun	Kriteria Bank Dunia		
	40% Penduduk Pendapatan Rendah	40% Penduduk Pendapatan Menengah	20% Penduduk Pendapatan Tinggi
2020	NA	NA	NA
2021	19,76	36,44	43,79
2022	19,76	36,44	43,79
2023	19,08	37,78	43,15
2024	18,00	35,17	46,83

Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri, 2024

F. Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan ukuran yang dipergunakan untuk melihat kesenjangan antar daerah. Apabila angka Indeks Williamson semakin mendekati nol, maka menunjukkan kesenjangan yang semakin kecil dan bila angka indeks semakin mendekati satu maka menunjukkan kesenjangan yang semakin besar. Indeks Williamson dapat digunakan sebagai alat analisis mengenai tingkat kesenjangan antar wilayah dan digunakan sebagai bahan perencanaan program pembangunan, Pada tahun 2021 merupakan tahun pemulihan pasca pandemi Covid-19 terjadi, upaya pemulihan turut membuahkan hasil, adapun ketimpangan Kabupaten Wonogiri cenderung menurun, menunjukkan upaya pemerataan ekonomi semakin meningkat, angka proyeksi Indeks Williamson berdasarkan data analisis ekonomi regional 2023 adalah sebesar 0,2407 menunjukkan ketimpangan meningkat dalam kondisi yang wajar.

Perbandingan angka indeks yang menunjukkan ketimpangan wilayah juga lebih baik apabila diperbandingkan dengan angka ketimpangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, upaya ini mesti dijaga dan diikuti dengan program-program pembangunan nyata agar ketimpangan semakin menurun, dan usaha pemerataan ekonomi wilayah semakin baik. Metode penghitungan Indeks

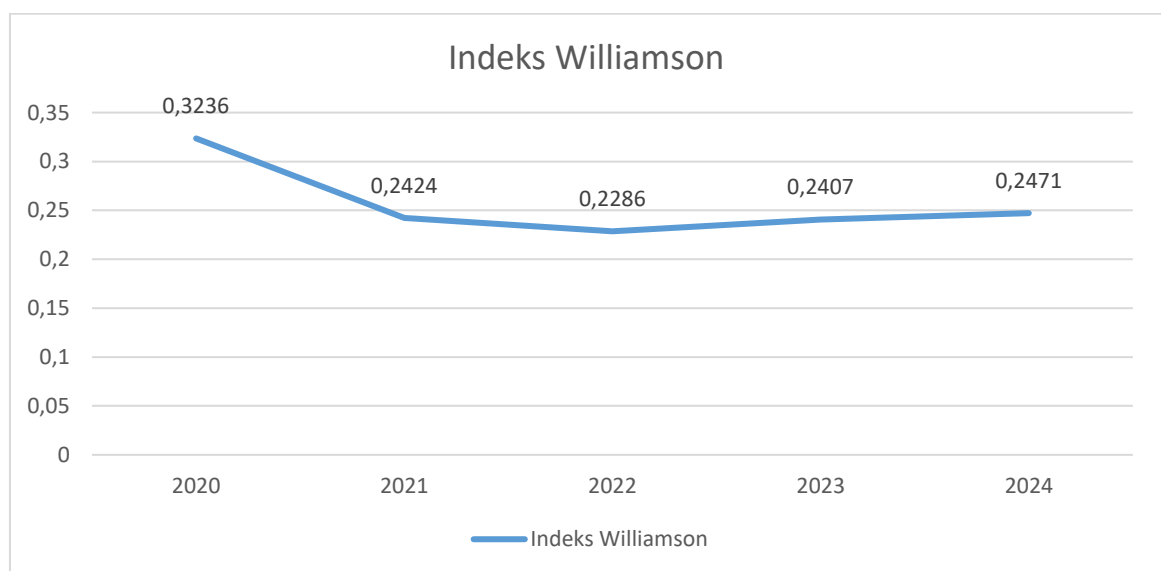
Williamson menggunakan metode Rumus sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 - \frac{F_i}{n}}}{Y}$$

Dengan Komponen perhitungan yaitu :

1. Nilai PDRB perkapita Wilayah Kecamatan (Y_i)
2. Nilai PDRB perkapita Wilayah Kabupaten/Kota (Y)
3. Jumlah Penduduk Wilayah Kecamatan (F_i)
4. Jumlah Penduduk Wilayah Kabupaten/Kota (n)

Perbandingan angka indeks yang menunjukkan ketimpangan wilayah juga lebih baik apabila diperbandingkan dengan angka ketimpangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, upaya ini mesti dijaga dan diikuti dengan program-program pembangunan nyata agar ketimpangan semakin menurun, dan usaha pemerataan ekonomi wilayah semakin baik. Berikut, perkembangan Indeks Williamson di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2020-2024 :



Sumber :Bapperida Kab.Wonogiri data diolah 2024

Gambar 2. 12. Grafik Indeks Williamson Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa, dari tahun 2020-2024 angka Indeks Williamson di Kabupaten Wonogiri terus mengalami penurunan secara positif menandakan ketimpangan wilayah semakin menurun, angka indeks sempat naik menjadi 0,3236 pada tahun 2020 yang juga akibat pengaruh dari pandemi yang terjadi, pada tahun 2021 Indeks Williamson ini membaik yang ditandai turunnya nilai indeks menjadi 0,2424. Kondisi ini juga merupakan efek dari rangkaian program pemulihan ekonomi kabupaten Wonogiri guna mengantisipasi kenaikan angka kemiskinan dan

pengangguran.

Penurunan nilai indeks pada periode tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa trend pemerataan pendapatan juga semakin meningkat. Adapun ketimpangan pendapatan antar wilayah di tahun 2020-2024 ini terutama disebabkan oleh tingginya perbedaan PDRB per kapita terutama di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Wonogiri, Selogiri dan Ngadirojo yang memiliki perbedaan sangat tinggi atau melebihi rata-rata PDRB per kapita kecamatan se-Kabupaten Wonogiri. Berikut merupakan sebab akibat adanya ketimpangan pendapatan antar kecamatan

1. Perbedaan Akses Infrastruktur
 - A. Kecamatan yang dekat dengan pusat kota atau jalur utama transportasi cenderung lebih berkembang karena memiliki akses lebih baik ke pasar, layanan publik, dan investasi swasta.
 - B. Kecamatan di wilayah pegunungan atau perbatasan cenderung tertinggal karena keterbatasan jalan, listrik, dan sinyal komunikasi.
2. Keterbatasan Lapangan Kerja Produktif
 - A. Beberapa kecamatan memiliki industri kecil, perdagangan, atau pariwisata lokal yang menciptakan lapangan kerja dan perputaran ekonomi.
 - B. Kecamatan lain masih mengandalkan pertanian subsisten tanpa nilai tambah yang memadai.
3. Ketimpangan Pendidikan dan Keterampilan
 - A. Wilayah yang memiliki akses terhadap sekolah unggulan atau pusat pelatihan vokasional menghasilkan sumber daya manusia lebih kompetitif
 - B. Sebaliknya, wilayah terpencil mengalami kekurangan tenaga pendidik dan fasilitas belajar yang memadai.

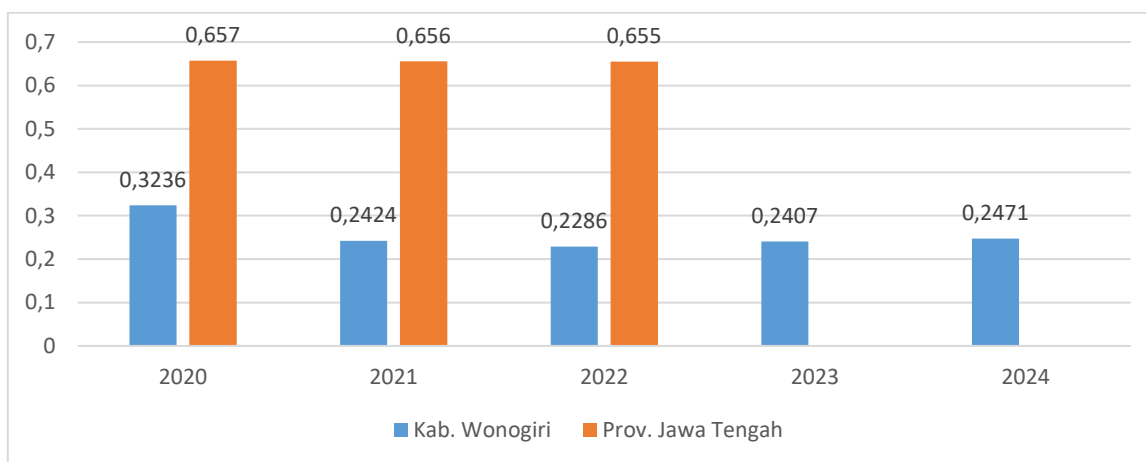
Sedangkan, di sisi lain masih terdapat beberapa kecamatan yang memiliki PDRB perkapita di bawah rata-rata PDRB kecamatan se-Kabupaten Wonogiri, yaitu diantaranya Kecamatan Puhpelem, Jatiroto, Kismantoro, dan Bulukerto. Diperlukan strategi dan upaya khusus untuk meningkatkan pendapatan per kapita wilayah yang tertinggal, sehingga tercapai pemerataan yang baik.

Tabel 2. 47. Indeks Williamson Kabupaten Wonogiri dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Williamson	
	Wonogiri	Jawa Tengah
2020	0,3236	0,6564
2021	0,2424	0,6549
2022	0,2286	0,6525
2023	0,2407	0,6325
2024*	0,2471	NA

Sumber : Bapperida Kab. Wonogiri, RKPDP Provinsi Jawa Tengah 2024

Apabila dilihat pada perbandingan angka tabel Indeks Williamson 2020-2024 menunjukkan bahwa angka Indeks Williamson di Kabupaten Wonogiri cenderung lebih baik dari angka provinsi, hal ini dapat memberikan arti bahwa ketimpangan yang terjadi di Wonogiri cenderung menurun, dan pemerataan ekonomi meningkat.



Sumber : Bapperida Kab. Wonogiri, RKPDP Provinsi Jawa Tengah 2023

Gambar 2. 13. Grafik Perbandingan Indeks Williamson Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah 2020-2024

Dari perbandingan diatas telah diketahui bahwa kondisi pemerataan di wilayah kabupaten wonogiri menunjukkan hasil yang lebih baik , hal ini dapat dianalisa dari rata rata angka indeks williamson kabupaten wonogiri sebesar 0,280 persen dalam lima tahun terakhir yang lebih rendah dari angka provinsi yakni sebesar 0,650. Hal ini perlu didorong dengan penguatan progam pemerataan ekonomi yang berlandaskan asa keadilan sehingga pemerataan ekonomi dan pendapatan semakin meningkat.

G. Indeks Rasio Gini

Dalam rangka memberikan analisis tentang kondisi ketimpangan wilayah maka digunakan metode analisis indeks *Gini Ratio*. Dalam indeks ini akan diketahui tentang kondisi ketimpangan wilayah di Kabupaten Wonogiri.

Sehingga akan diketahui bagaimana kondisi ketimpangan yang terjadi di wilayah Kabupaten Wonogiri dan data yang dianalisis akan berguna untuk menyusun program-program daerah dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan.

Indeks gini akan mengukur pola pengeluaran masyarakat dan menggolongkannya dalam kondisi ketimpangan bertaraf rendah, sedang, dan tinggi. Indeks Gini mengukur ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditunjukkan dengan angka koefisien gini ratio yang berada dalam rentang 0-1 ($0 < \text{koefisien gini} < 1$). Secara umum angka koefisien gini dapat diklasifikasi sebagai berikut :

1. $0,00 - 0,35$ = Pemerataan Tinggi & Ketimpangan Rendah
2. $0,35 - 0,50$ = Pemerataan & Ketimpangan Sedang.
3. $0,50 < \text{gini}$ = Pemertaan Rendah & Ketimpangan Tinggi.

Data yang dianalisis untuk Kabupaten Wonogiri adalah dari 5 tahun terakhir tepatnya dari tahun 2020 sampai tahun 2024.

Tabel 2. 48. Indeks Rasio Gini Kabupaten Wonogiri tahun 2020-2024

No	Tahun	Rasio Gini
1	2020	0,364
2	2021	0,356
3	2022	0,348
4	2023	0,351
5	2024	0,392

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri, 2024

Pada tahun 2020, terdapat peningkatan ketimpangan yang lebih tajam dibandingkan tahun sebelumnya, dengan realisasi Indeks Gini yang mencapai 0,364, jauh melebihi target yang ditetapkan sebesar 0,293. Peningkatan ini mungkin dipengaruhi oleh dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan pendapatan bagi sebagian besar masyarakat, sementara kelompok kaya cenderung tidak terlalu terpengaruh, sehingga memperburuk ketimpangan.

Meskipun ada penurunan ketimpangan dari tahun 2020, realisasi Indeks Gini pada tahun 2021 masih berada di angka 0,356. Angka ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Wonogiri belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, meskipun berbagai upaya untuk mengurangi ketimpangan mungkin telah dilakukan.

Pada tahun 2022, realisasi IRG tercatat sebesar 0,348. Walaupun ada

sedikit penurunan dibandingkan tahun 2021, nilai ini masih menunjukkan tingkat ketimpangan yang cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan ekonomi di Kabupaten Wonogiri tetap menjadi tantangan meskipun tidak ada target yang spesifik ditetapkan pada tahun ini.

Pada tahun 2023, realisasi Indeks Gini tercatat sedikit lebih rendah, yaitu 0,351. Meskipun ada penurunan, angka ini tetap menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Wonogiri masih cukup besar. Meski ada upaya yang dilakukan, angka ini mengindikasikan bahwa pengurangan ketimpangan pendapatan di daerah ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tercapai sepenuhnya.

Tahun 2024, indeks gini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 0,392. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Kabupaten Wonogiri dari tahun ke tahun masih fluktuatif. Masih perlunya usaha keras dalam mengatasi ketimpangan tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun ada penurunan angka Indeks Gini pada beberapa tahun setelah 2020, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Wonogiri masih menunjukkan tingkat yang cukup signifikan. Realisasi angka yang lebih tinggi dari target di sebagian besar tahun menunjukkan tantangan besar dalam mencapai pemerataan ekonomi di daerah ini. Upaya-upaya yang lebih konkret dan efektif perlu dilakukan untuk menurunkan ketimpangan pendapatan, seperti memperkuat program pengentasan kemiskinan, mendorong pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang inklusif.

Tabel 2. 49. Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Wonogiri dengan Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2020-2024

No	Tahun	Rasio Gini		Capaian
		Realisasi	Perubahan	
1	2020	0,364	0,027	Naik
2	2021	0,356	-0,008	Turun
3	2022	0,348	-0,008	Turun
4	2023	0,351	0,003	Naik
5	2024	0,392	0,041	Naik

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri, 2024

Tren Rasio Gini kabupaten Wonogiri fluktuatif, dimulai tahun 2020 adalah 0,364 dan tahun 2021 turun menjadi 0,356 setelah adanya pemulihan pasca covid-19 dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional, lalu ketimpangan gini turun kembali pada 2022 menjadi 0,348, dan pada tahun 2023 naik kembali menjadi 0,351, dan naik lagi di tahun 2024 menjadi 0,364

Apabila dilihat dari kondisi perkembangan gini ratio Kabupaten Wonogiri berada dalam kondisi pemerataan yang tinggi dan ketimpangan yang rendah yakni di bawah rentang koefisien <0,35.

Tabel di bawah ini menunjukkan Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Wonogiri dengan capaian wilayah Subosukawonosraten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Tabel 2. 50. Perbandingan Indeks Rasio Gini Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten/Kota se Subosukowonosraten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Kab / Kota	Indeks Rasio Gini					Pertumbuhan Indeks Rasio Gini				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Surakarta	0,408	0,379	0,419	0,383	0,380	0,037	-0,029	0,04	-0,036	-0,003
Boyolali	0,359	0,364	0,366	0,365	0,339	0,001	0,005	0,002	-0,001	-0,026
Sukoharjo	0,390	0,373	0,368	0,401	0,390	N/A	-0,017	-0,005	0,033	-0,011
Karanganyar	0,359	0,387	0,360	0,389	0,352	0,001	0,028	-0,027	0,029	-0,037
Wonogiri	0,364	0,356	0,348	0,351	0,392	0,027	-0,008	-0,008	0,003	0,041
Sragen	0,339	0,313	0,349	0,336	0,309	-0,023	-0,026	0,036	-0,013	-0,027
Klaten	0,338	0,351	0,364	0,406	0,437	N/A	0,013	0,009	0,042	0,031
Rata-rata Subosukowonosraten	0,365	0,360	0,367	0,376	0,371	N/A	-0,005	0,007	0,009	-0,005
JAWA TENGAH	0,359	0,372	0,374	0,369	0,367	-0,026	0,013	0,002	-0,005	-0,002
NASIONAL	0,385	0,384	0,384	0,388	0,381	0,005	-0,001	0	0,004	-0,007

Sumber : BPS 2024

Dari tabel diatas telah diketahui bahwa kabupaten Wonogiri termasuk daerah dengan ketimpangan yang rendah dibandingkan dengan daerah tetangga atau daerah Subosukawonosraten secara keseluruhan.

Untuk Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2020-2024, Kabupaten Wonogiri memiliki capaian lebih rendah dari capaian nasional dan provinsi pada 2024 yakni naik menjadi 0,392, sedangkan untuk angka tingkat nasional yaitu 0,381, kemudian provinsi Jawa Tengah sebesar 0,367. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketimpangan yang terjadi di kabupaten Wonogiri cenderung lebih tinggi dari provinsi dan tingkat nasional. Masih perlunya usaha yang konsisten untuk telah memberikan dampak kepada aspek penurunan ketimpangan.

Angka rata-rata gini ratio di Wonogiri sebesar 0,337 juga lebih rendah dari rata-rata provinsi sebesar 0,361 dan rata-rata nasional 0,386. Hal ini menandakan kondisi pemerataan yang terjadi di Kabupaten Wonogiri cukup baik, dan perlu didukung dengan strategi progam komprehensif sehingga kondisi ketimpangan benar-benar menurun dan pemerataan dapat terwujud dalam skala yang menyeluruh di kabupaten Wonogiri.

H. Indeks Pembangunan Manusia

Titik berat pembangunan manusia adalah upaya untuk memberdayakan penduduk sehingga memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui akses yang lebih luas untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan keterampilan, serta berpeluang untuk meningkatkan taraf ekonomi yang pada akhirnya mendorong partisipasi dalam melaksanakan pembangunan. Semakin besar nilai tersebut berarti kualitas pembangunan manusia semakin baik. Tingkat keberhasilan pembangunan manusia pada suatu wilayah menurut kriteria UNDP, dikelompokkan menjadi tiga tingkatan sebagai berikut :

- Tingkat pembangunan manusia klasifikasi rendah Capaian IPM berkisar 0 sampai dengan 49
- Tingkat pembangunan manusia klasifikasi menengah Capaian IPM berkisar 50 sampai dengan 79
- Tingkat pembangunan manusia klasifikasi tinggi Capaian IPM berkisar 80 sampai dengan 100

Berikut ini adalah perbandingan pertumbuhan IPM beserta komponen pembentuknya tersebut.

Tabel 2. 51. Perkembangan IPM Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

No	Variabel	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	70,25	70,49	71,04	71,97	72,54
1	Angka Harapan Hidup / AHH	76,16	76,28	76,41	76,56	76,82
2	Harapan Lama Sekolah/ HLS	12,49	12,50	12,51	12,52	12,61
3	Rata-rata Lama Sekolah /RLS	7,33	7,34	7,42	7,67	7,68
4	Pengeluaran Riil per Kapita	9,286	9,429	9.780	10.283	10.630

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2024

Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2024 adalah 76,82 tertinggi selama periode 2020-2024 sedangkan capaian terendahnya terjadi pada Tahun 2020 sebesar 76,16.

Harapan Lama Sekolah (HLS) periode 2020-2024 capaian tertinggi pada Tahun 2024 adalah 12,61, sedangkan Tahun 2020 sebesar 12,49 merupakan capaian terendahnya.

Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tertinggi antara Tahun 2020-2024 yaitu pada Tahun 2024 sebesar 7,68 dan capaian terendahnya pada Tahun 2020 7,33.

Pengeluaran riil per Kapita Tahun 2024 merupakan capaian tertinggi selama periode 2020-2024 yaitu Rp. 10.630,-. Sedangkan capaian terendahnya

pada Tahun 2020 yaitu Rp. 9.286,-.

Capaian IPM beserta komponen pembentuknya yaitu AHH, HLS, RLS, dan Pengeluaran per Kapita pada Tahun 2024 merupakan tertinggi selama periode 2020-2024 yaitu sebesar 72,54. Hal ini menunjukkan peningkatan pembangunan Kabupaten Wonogiri di bidang pendidikan, dan kesehatan, dan ekonomi setelah terjadi Pandemi Covid-19. Sesuai tingkatan perkembangan pembangunan manusia, IPM Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 termasuk dalam tingkatan tinggi.

Status pencapaian IPM dikategorikan: (a) sangat tinggi, apabila IPM ≥ 80 ; (b) Tinggi, apabila IPM antara 70-80; (c) Sedang, apabila IPM antara 60-70; dan (d) Rendah, apabila IPM < 60 .

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonogiri pada tahun tahun 2020 capaian sudah meningkat dari tahun sebelumnya dan sudah masuk dalam kategori tinggi walaupun masih belum mencapai target, dan IPM pada tahun 2021-2022 walaupun belum mencapai target tapi mempunyai tren naik juga, dan pada 2023 dan 2024 capaian sudah semakin meningkat dan sudah mencapai target. IPM Kabupaten Wonogiri selama Tahun 2020-2024 naik dari 70,25 pada Tahun 2020 menjadi 72,54 pada Tahun 2024, capaian tersebut tertinggi sedangkan IPM Tahun 2020 terendah dalam periode 2020-2024.

Berikut tabel Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah dengan capaian tahun sebelumnya

Tabel 2. 52. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonogiri Dengan Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2020-2024

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
		Realisasi	Pertumbuhan IPM
1	2020	70,25	0,39
2	2021	70,49	0,34
3	2022	71,04	0,78
4	2023	71,97	1,31
5	2024	72,54	0,57

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri, 2024

Untuk mengetahui kinerja IPM beserta komponen pembentuknya maka dilakukan dengan membandingkan antara capaian daerah dengan target daerah. Dalam perencanaan daerah RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026 IPM ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah. Untuk itu keberhasilan capaian tiap tahunnya akan dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan ke depan, sehingga keberlanjutan pembangunan IPM di Kabupaten Wonogiri terus menjadi prioritas pembangunan.

Dalam perencanaan daerah Kabupaten Wonogiri IPM beserta komponen

pembentuknya Tahun 2024 ditargetkan 72,52 dan terealisasi 72,54 sehingga capaiannya adalah lebih dari 100%. Selain itu perlu membandingkan capaian dan pertumbuhan IPM Kabupaten Wonogiri dengan rata-rata capaian wilayah setara (Subosukawonosraten), capaian wilayah regional (Provinsi Jawa Tengah), dan capaian nasional.

Berikut perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara (Subosukawonosraten)

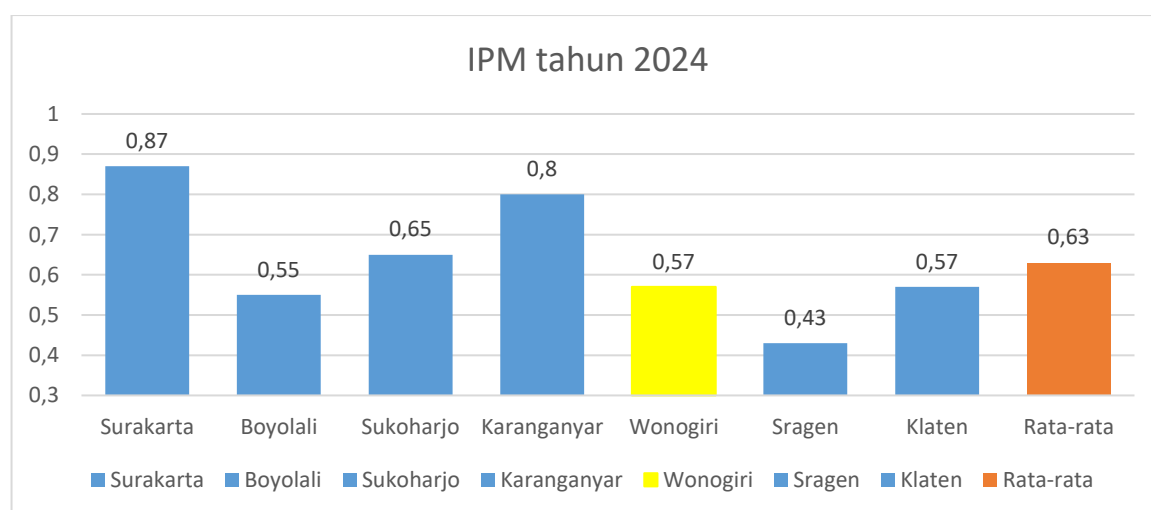
Tabel 2. 53. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Daerah Dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Yang Setara (Subosukawonosraten), Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Kab / Kota	IPM					Pertumbuhan IPM				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Surakarta	82,21	82,62	83,08	83,54	84,41	0,43	0,50	0,56	0,55	0,87
Boyolali	74,25	74,40	74,97	75,41	75,96	0,61	0,20	0,77	0,59	0,55
Sukoharjo	76,98	77,13	77,94	78,65	79,30	0,18	0,19	1,05	0,91	0,65
Karanganyar	75,86	75,99	76,58	77,31	78,11	-0,04	0,17	0,78	0,95	0,80
Wonogiri	70,25	70,49	71,04	71,97	72,54	0,39	0,34	0,78	1,31	0,57
Sragen	73,95	74,08	74,65	75,10	75,53	0,71	0,18	0,77	0,60	0,43
Klaten	75,56	76,12	76,95	77,59	78,16	0,36	0,74	1,09	0,83	0,57
Rata-rata Subosukawonosraten	75,58	75,83	76,46	77,08	77,72	0,38	0,33	0,83	0,82	0,63
Jawa Tengah	71,87	72,16	72,79	73,39	73,87	0,20	0,40	0,87	0,82	0,48
Nasional	71,94	72,29	72,91	74,39	75,02	0,03	0,49	0,86	0,88	0,63

Sumber : BPS 2024

Perbandingan capaian IPM Kabupaten Wonogiri dengan rata-rata capaian wilayah setara (Subosukawonosraten) bahwa pada tahun 2024 capaian IPM Kabupaten Wonogiri masih dibawah rata-rata capaian wilayah Subosukawonosraten.

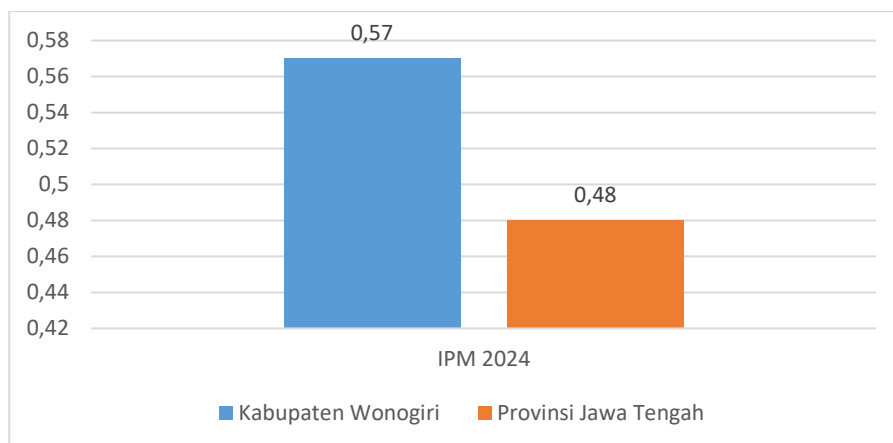
Berikut grafik Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten Wonogiri dengan Subosukawonosraten Tahun 2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2024

Gambar 2. 14. Grafik Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten Wonogiri dengan Subosukawonosraten Tahun 2024

Pertumbuhan IPM Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 berada di urutan 5 dari 7 kabupaten/kota se wilayah Subosukowonosraten. Dan untuk perbandingan pertumbuhan IPM Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini,

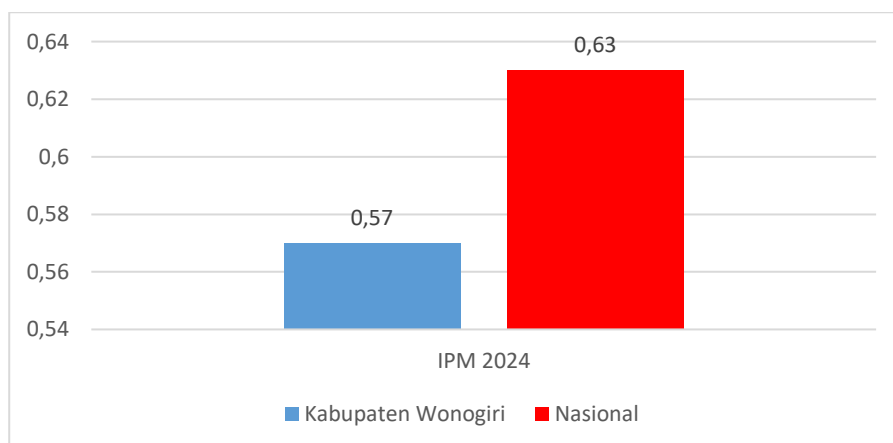


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2023

Gambar 2. 15. Grafik Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sesuai dengan grafik di atas bahwa IPM Kabupaten Wonogiri walaupun capaian masih dibawah capaian provinsi Jawa Tengah, tetapi memiliki angka pertumbuhan IPM yang lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah dengan capaian nasional dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2024

Gambar 2. 16. Grafik Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten Wonogiri dengan Nasional Tahun 2024

Pada grafik diatas pertumbuhan IPM Kabupaten Wonogiri pada tahun 2024 juga masih berada di bawah Nasional. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Wonogiri masih berada di bawah kemajuan Provinsi Jawa Tengah, dan bahkan Nasional pada umumnya.

Sebab akibat pertumbuhan IPM Wonogiri masin rendah dibandingkan

nasional

1. Keterbatasan akses dan mutu pendidikan

Sebab: Keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah terpencil sehingga rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah masih tertinggal dengan provinsi dan nasional.

2. Kualitas Layanan Kesehatan yang belum merata

Sebab: Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata dan rendahnya kesadaran masyarakat atas akses kesehatan mengakibatkan Angka Harapan Hidup masih rendah dibandingkan wilayah lain.

3. Pendapatan dan daya beli masyarakat masih rendah.

Sebab: Ketergantungan pada sektor informal dan pertanian akibatnya pendapatan masyarakat belum bisa tinggi.

I. Tingkat Kemiskinan (Penduduk Miskin)

Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri selama kurun waktu 2019 sampai 2023 mengalami penurunan akan tetapi pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,69% dan kemudian di tahun 2022 mengalami penurunan kembali, untuk tahun 2021, tingkat kemiskinan sebesar 11,55% (110.460 jiwa), kemudian di tahun 2022 sebesar 10,99% (105.190 jiwa) persentase kemiskinan di tahun 2022 ini, mengalami penurunan, kemudian di tahun 2023 tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan menjadi 10,94 % (104.820 jiwa). Jika disandingkan dengan dengan RPJMD tahun 2021-2026 tingkat kemiskinan di tahun 2023 meleset dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri, yang mana di RPJMD Tahun 2023 di targetkan 9,18 % (98.637 jiwa).

Berikut ini tabel Jumlah Pendudukan miskin dan tingkat kemiskinan Kabupaten Wonogiri tahun 2020-2024.

Tabel 2. 54. Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Kemiskinan
1	2020	104.370	10,86
2	2021	110.460	11,55
3	2022	105.190	10,99
4	2023	104.820	10,94
5	2024	102.570	10,71

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwasannya untuk tahun 2020-2024 (Sebelum Pandemi Covid 19) kemiskinan di Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan jumlah penduduk miskin, dimana pada tahun 2019 kemiskinan sempat diangka 10,25% atau (98.280 jiwa) kemudian di tahun 2020-2021 mengalami kenaikan dimana tahun 2020 sebesar 10,86 atau (104.370 jiwa) kemudian naik sebesar 0,69% pada tahun 2021 sebesar 11,55% atau (110.460 jiwa) dan kemudian tahun 2022 mengalami penurunan 0,56% atau (105.190 jiwa) dan mengalami penurunan kembali di tahun 2023 sebesar 10,94% atau 104.820 dan tahun 2024 sebesar 10,71% atau 102.820.

Berikut perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Wonogiri dengan capaian tahun sebelumnya tahun 2019-2024.

Tabel 2. 55. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah Dengan Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Tingkat Kemiskinan	
		Realisasi	Perubahan
1	2020	10,86	0,61
2	2021	11,55	0,69
3	2022	10,99	-0,56
4	2023	10,94	-0,05
5	2024	10,71	-0,23

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri, 2024

Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) di kabupaten Wonogiri dari tahun 2020 cenderung fluktuatif, pada tahun 2020 tingkat kemiskinan kabupaten Wonogiri menurun sampai 2,73%, tetapi pada tahun 2020 dan 2021 meningkat karena adanya pandemi covid 19 yang melumpuhkan hampir semua aspek perekonomian. Dan pada tahun 2022-2023 dengan semakin membaiknya kondisi pasca pandemi covid 19, dan dengan adanya perbaikan di berbagai sektor perekonomian, Tingkat kemiskinan kembali menurun walaupun belum sesuai target.

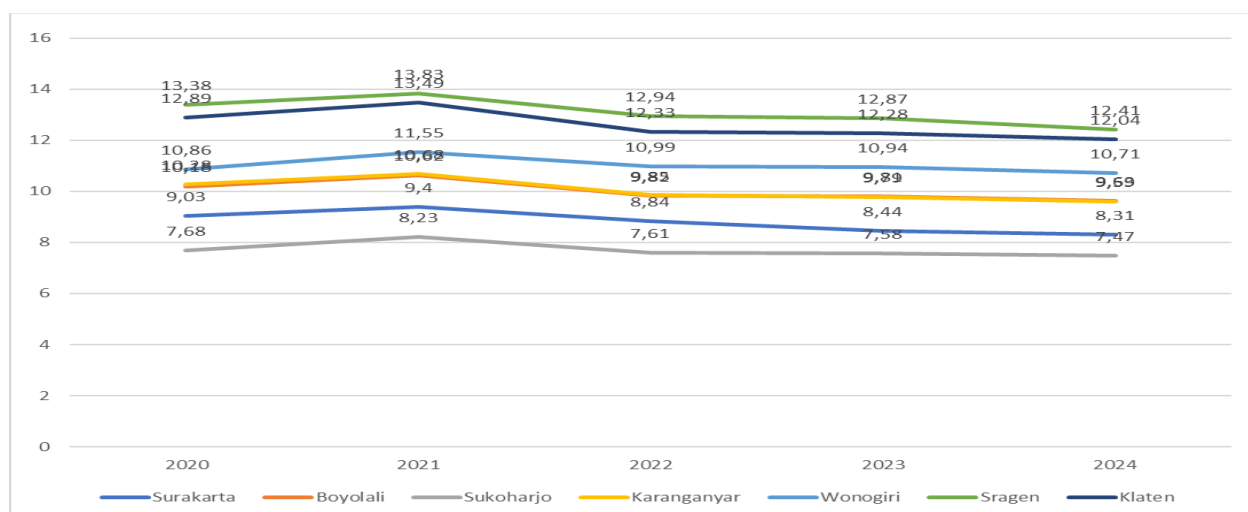
Untuk posisi tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) kabupaten Wonogiri diantara kabupaten/kota setara dapat dilihat pada tabel perbandingan tingkat kemiskinan kabupaten Wonogiri dengan rata-rata capaian wilayah Subosukawonosraten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2020-2024.

Tabel 2. 56. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Wonogiri Dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Subosukawonosraten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (Tingkat Kemiskinan)					Pertumbuhan Tingkat Kemiskinan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Surakarta	9,03	9,40	8,84	8,44	8,31	0,33	0,37	-0,56	-0,40	-0,13
Boyolali	10,18	10,62	9,82	9,81	9,63	0,65	0,44	-0,80	-0,01	-0,18
Sukoharjo	7,68	8,23	7,61	7,58	7,47	0,54	0,55	-0,62	-0,03	-0,11
Karanganyar	10,28	10,68	9,85	9,79	9,59	0,73	0,40	-0,83	-0,06	-0,20
Wonogiri	10,86	11,55	10,99	10,94	10,71	0,61	0,69	-0,56	-0,05	-0,23
Sragen	13,38	13,83	12,94	12,87	12,41	0,59	0,45	-0,89	-0,07	-0,46
Klaten	12,89	13,49	12,33	12,28	12,04	0,61	0,60	-1,16	-0,05	-0,24
Rata-rata Subosukawonosraten	10,61	11,11	10,34	10,24	10,02	0,58	0,50	-0,77	-0,10	-0,22
JAWA TENGAH	11,41	11,79	10,98	10,77	10,47	0,09	0,38	-0,81	-0,21	-0,30
NASIONAL	10,19	9,71	9,54	9,36	9,03	0,78	-0,48	-0,17	-0,18	-0,33

Sumber : BPS masing masing kab/kota se Subosukawonosraten, 2024

Tingkat Kemiskinan (persentase penduduk miskin) di kabupaten Wonogiri pada tahun 2024 masih berada di posisi ke lima dari 7 Kabupaten/kota wilayah pengembangan Subosukawonosraten. Kabupaten Wonogiri selalu berusaha untuk mancapai target menurunkan tingkat kemiskinan dengan program dan kegiatan prioritas. Berikut grafik Perbandingan capaian tingkat kemiskinan kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten/Kota se Subosukawonosraten tahun 2020-2024



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 17. Grafik Perbandingan capaian tingkat kemiskinan kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten/Kota se Subosukawonosraten tahun 2020-2024

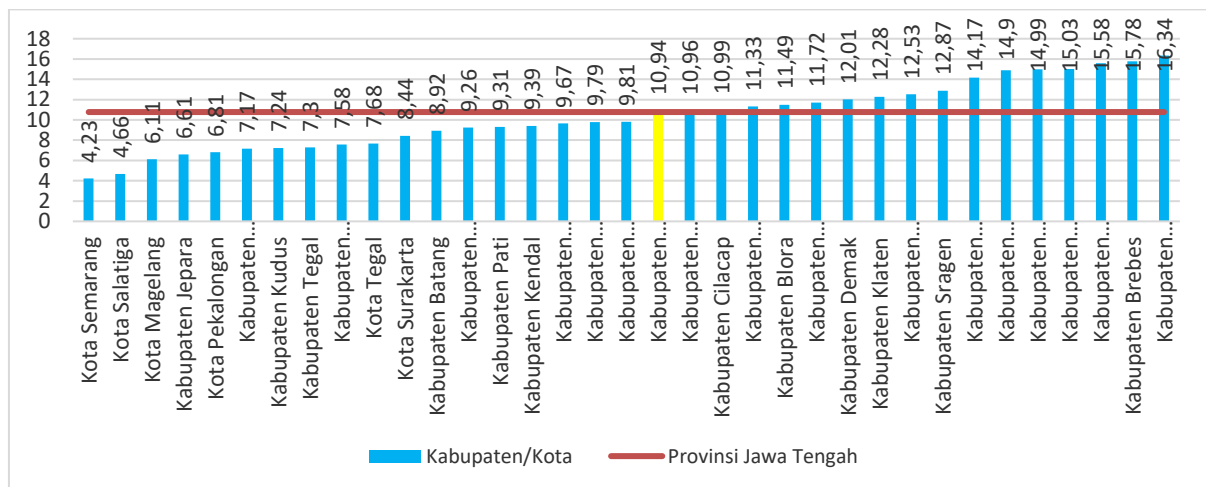
Analisis sebab akibat kemiskinan di Kabupaten wonogiri adalah sebagai berikut:

1. Kenaikan tahun 2021 (11,55 %)
 - a. Sebab: pada pandemi covid-19 berdampak pada perekonomian, terutama pada pekerja informal, umkm, dan sekot pertanian karena ada pembatasan mobilitas masyarakat
 - b. Akibat: peningkatan angka kemiskinan.

2. Penurunan 2022-2024

- a. Sebab: adanya pemulihan ekonomi nasional dan daerah sehingga aktivitas ekonomi masyarakat semakin baik.
- b. Akibat: Tingkat Kemiskinan mengalami penurunan.

Jika dibandingkan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023 memiliki trend menurun, sejalan dengan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Dimana di Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,77% (3.791.500 jiwa) dan Nasional sebesar 9,36% (25.900.000 jiwa) dan Kabupaten Wonogiri, untuk tahun 2023, berada di urutan ke-19 di antara 35 Kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Perbandingan tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonogiri dengan tingkat kemiskinan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah pada tahun 2023 ditunjukkan pada Grafik di bawah ini :

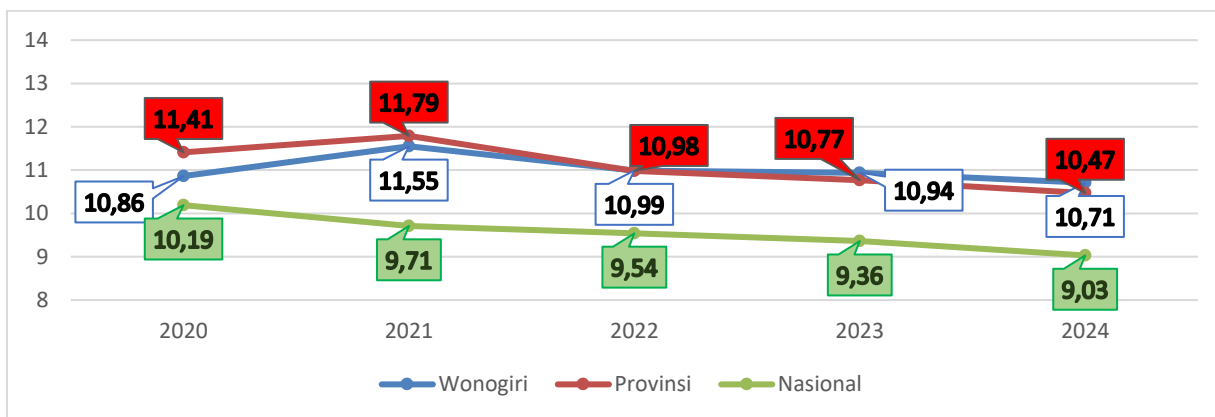


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2. 18. Grafik Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Wonogiri di Bandingkan dengan Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Jika kita lihat dari grafik diatas maka dapat disimpulkan, bahwasannya tahun 2023 persentase penduduk miskin pada 35 Kabupaten di Jawa Tengah semuanya mengalami kenaikan.

Dan untuk grafik perbandingan Tingkat Kemiskinan (persentase penduduk miskin) Kabupaten Wonogiri, jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber: BPS, diolah tahun 2024

Gambar 2. 19. Grafik Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Pada grafik diatas dapat dilihat, bahwasannya pada tahun 2024 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri masih berada di atas Tingkat Kemiskinan Nasional, dan Provinsi Jawa Tengah dengan angka tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonogiri sebesar 10,71 %, Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,47% dan kemiskinan Nasional sebesar 9,03 %, dengan tren perubahan semakin menurun sejak tahun 2022 sampai dengan 2024 atau selama pemulihan pasca covid 19. Walaupun memiliki tren menurun tapi kondisi masih di atas nasional. Dengan kondisi seperti itu dapat disimpulkan bahwa kemiskinan masih menjadi prioritas dan fokus dalam menentukan program dan kegiatan yang tepat pada tahun tahun berikutnya.

Sedangkan perbandingan jumlah penduduk miskin (jiwa) di Kabupaten Wonogiri dengan jumlah penduduk miskin Nasional, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 57. Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) di Kabupaten Wonogiri dan Nasional Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Kabupaten Wonogiri (Jiwa)		Nasional	
		Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Pertumbuhan	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Pertumbuhan
1	2020	104.370	6.090	27.549.690	2.763.820
2	2021	110.460	6.090	26.503.560	-1.046.130
3	2022	105.190	-5.270	26.363.270	-140.290
4	2023	104.820	-370	25.900.000	-463.270
5	2024	102.570	-2.250	25.220.000	-680.000

Sumber : BPS, diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa untuk jumlah penduduk miskin Kabupaten Wonogiri pada tahun 2024 semakin menurun. Penduduk miskin Kabupaten Wonogiri pada tahun 2020 (Sebelum Pandemi Covid 19) dan sesudah

covid 19 pada tahun 2022-2023 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonogiri lebih sedikit dibandingkan dengan Nasional. Dimana penduduk miskin Tahun 2020 di Kabupaten Wonogiri sebesar 104.370 jiwa dan Nasional sebesar 27.549.690 jiwa, tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonogiri sebesar 110.460 jiwa dan Nasional sebesar 26.503.560 jiwa, tahun 2022 sebesar 105.190 Jiwa dan Nasional sebesar 26.363.270 dan kemudian di tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonogiri sebesar 104.820 jiwa dan Nasional sebesar 25.900.000, dan di tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonogiri sebesar 102.570 dan Nasional sebesar 25.220.000.

Pada Tahun 2023 Kabupaten Wonogiri di tetapkan menjadi salah satu lokasi fokus Kemiskinan Ekstrem dari 17 Kabupaten/Kota antara lain : Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemasang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, Wonosobo. Dimana untuk kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Wonogiri terdiri dari 23 Kecamatan Di Wonogiri dan 71 Lokus Desa/Kelurahan di Wonogiri. Dimana untuk kecamatan yang masuk kedalam lokus kemiskinan ekstrem antara lain : Karantengah, Batuwarno, Puhpelem, Jatipurno, Paranggupito, Giritontro, Bulukerto, Jatiroto, Nguntoronadi, Wuryantoro, Girimarto, Jatisrono, Manyaran, Sidoharjo, Eromoko, Giriwoyo, Ngadirojo, Slogohimo, Baturetno, Kismantoro, Tirtomoyo, Purwantoro, dan Pracimantoro. Dimana definisi dari Kemiskinan ekstrem itu adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan

Kemiskinan Ektrem diukur dengan menggunakan “*Absolut Poverty Measure*” yang setara dengan USD 1,9 PPP Perhari (World Bank). Dengan adanya Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Wonogiri, diharapkan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lebih meningkatkan lagi kolaborasi dalam melakukan upaya pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, telah diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE).

Adapun Indikator dari Kemiskinan Ekstrem itu antara lain : Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Listrik, Jamban, Angka Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten

Wonogiri tahun 2023 sebesar 0,32%. Dimana Jika Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah. Dimana Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 1,11%.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri akan mengoptimalkan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam menentukan sasaran program untuk memastikan bahwa program-program intervensi tepat sasaran. Fokus utama diarahkan pada percepatan penyediaan layanan dasar yang berkualitas seperti Pendidikan salah satunya untuk mendukung Program sekolah rakyat dengan penyiapan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik. Selain itu layana dasar kesehatan, perumahan layak, dan akses air bersih, yang menjadi prasyarat penting dalam mengurangi beban hidup masyarakat miskin dan disertai dengan pelaksanaan pemutakhiran data kemiskinan

Selaras dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tahun 2020 tentangTata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Salah satunya dengan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan, strategi ini juga diwujudkan dalam integrasi kebijakan pengentasan kemiskinan ke dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, hingga RKPD tahunan. Pemerintah daerah mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga non-pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat sipil dalam perumusan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Penguatan kelembagaan desa, pengembangan ekonomi lokal melalui UMKM, pemberdayaan keluarga miskin, fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan; penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan menjadi bagian penting dari strategi untuk menciptakan ketahanan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, strategi jangka menengah ini akan diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, dan akses terhadap modal usaha produktif. Kabupaten Wonogiri juga akan memperkuat program perlindungan sosial adaptif, seperti

bantuan sosial yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi, untuk mencegah kemiskinan baru dan mendukung mobilitas sosial masyarakat miskin. Dengan pelaksanaan yang terkoordinasi dan berkelanjutan, strategi ini diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan menghapus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2030, sebagaimana ditargetkan dalam agenda nasional.

J. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Berikut Tingkat perubahan indeks kedalaman kemiskinan kabupaten Wonogiri

Tabel 2. 58. Tingkat Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Daerah Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Perubahan
1	2020	1,08	0,26
2	2021	1,58	0,50
3	2022	1,33	-0,25
4	2023	1,32	-0,01
5	2024*	1,53	0,21

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri, 2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2020 naik sebesar 0,26% menjadi 1,08 dan naik lagi pada tahun 2021 sebesar 0,50% menjadi 1,58%. Dan setelah adanya pemulihan pasca pandemi di tahun 2022 Indeks Kedalaman kemiskinan kembali turun sebesar 0,25% dari tahun sebelumnya yaitu 1,33% dan kembali turun pada tahun 2023 sebesar 1,32%, yaitu turun sebesar 0,01%, tapi pada tahun 2024 naik menjadi 1,53 atau sebesar 0,21%

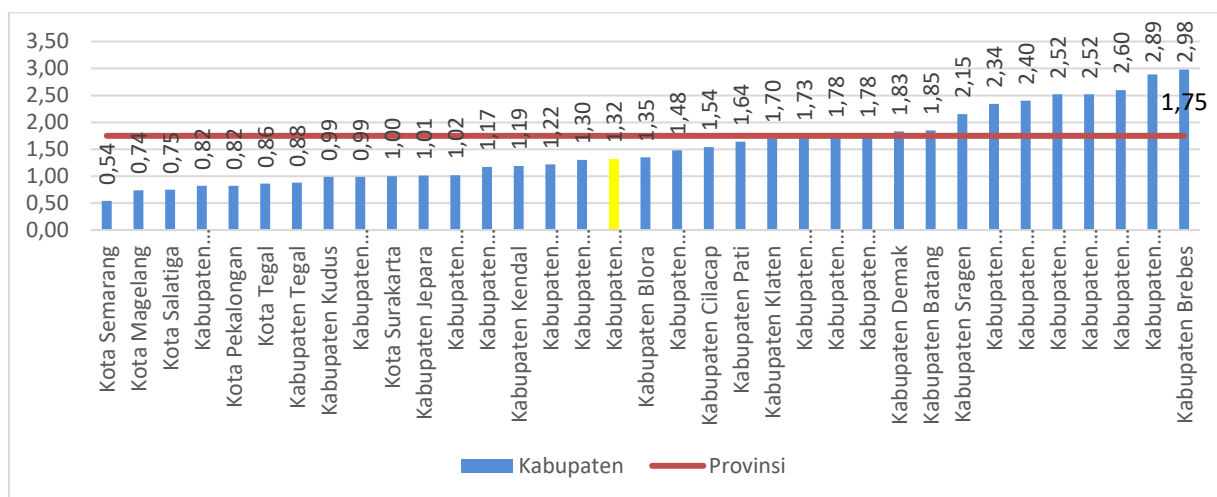
Berikut Perbandingan perubahan pencapaian indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Wonogiri dengan capaian wilayah Subosukawonosraten.

Tabel 2. 59. Perbandingan Perubahan Pencapaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Wonogiri Dengan Capaian Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan(P1)				
		2020	2021	2022	2023	2024*	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Surakarta	1,51	1,83	1,07	1,00	1,14	-0,09	0,32	-0,76	-0,07	0,14
2	Boyolali	1,30	1,76	1,13	1,02	1,56	0,28	0,46	-0,63	-0,11	0,54
3	Sukoharjo	0,97	0,91	0,87	1,17	1,21	0,10	-0,06	-0,04	0,30	0,04
4	Karanganyar	1,56	1,61	1,64	1,22	1,63	0,11	0,05	0,03	-0,42	0,41
5	Wonogiri	1,08	1,58	1,33	1,32	1,52	0,26	0,50	-0,25	-0,01	0,20
6	Sragen	2,17	2,39	2,07	2,15	2,42	-0,14	0,22	-0,32	0,08	0,27
7	Klaten	1,66	1,79	1,86	1,70	1,46	0,20	0,13	0,07	-0,16	-0,24
Persamalah Rata-rata Subosukawonosraten		1,46	1,70	1,42	1,37	1,56	0,10	0,23	-0,27	-0,06	0,19

Sumber : BPS masing masing kab/kota se Subosukawonosraten, 2024

Pada Grafik dibawah ini, ditampilkan perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024



Sumber : BPS, diolah

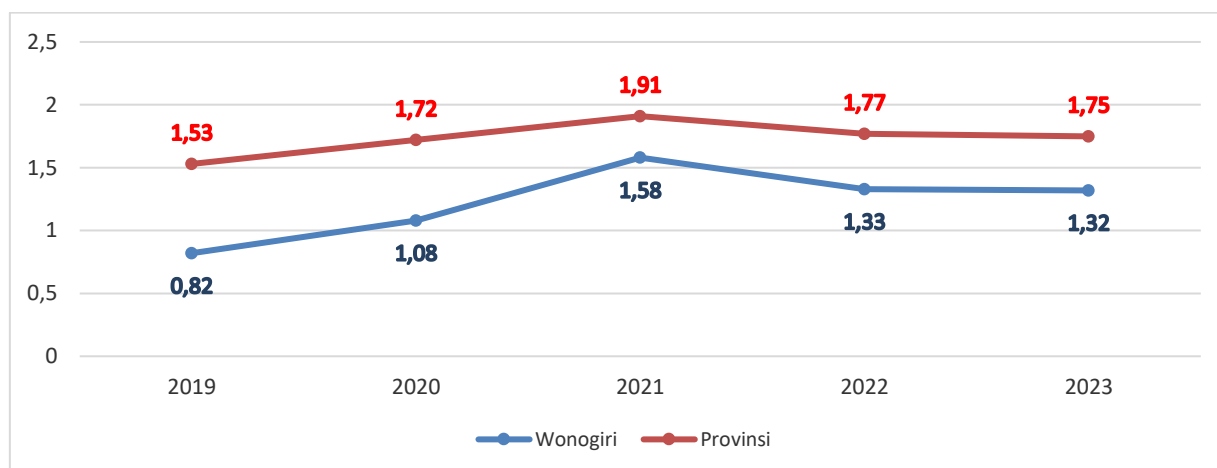
Gambar 2. 20. Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri jika dibandingkan dengan 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah, semuanya mengalami trend penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri memiliki kecenderungan menurun.

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023 tergolong rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Dimana di Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,75% dan Nasional sebesar 1,53 %. Rendahnya Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri jika

dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Wonogiri berada diatas garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023 sebesar 414.901. Masih berada dibawah garis kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023, yakni sebesar 477.580.

Pada Grafik dibawah ini, ditampilkan Perbandingan Pencapaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Wonogiri dengan Capaian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.



Sumber: BPS, diolah

Gambar 2. 21. Grafik Perbandingan Pencapaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Wonogiri dengan Capaian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Dari grafik tersebut diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 hingga tahun 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Wonogiri masih lebih rendah dari pada angka Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri dapat dikatakan berhasil, sehingga Kabupaten Wonogiri tidak termasuk kabupaten prioritas lagi di Provinsi Jawa Tengah dalam hal Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1).

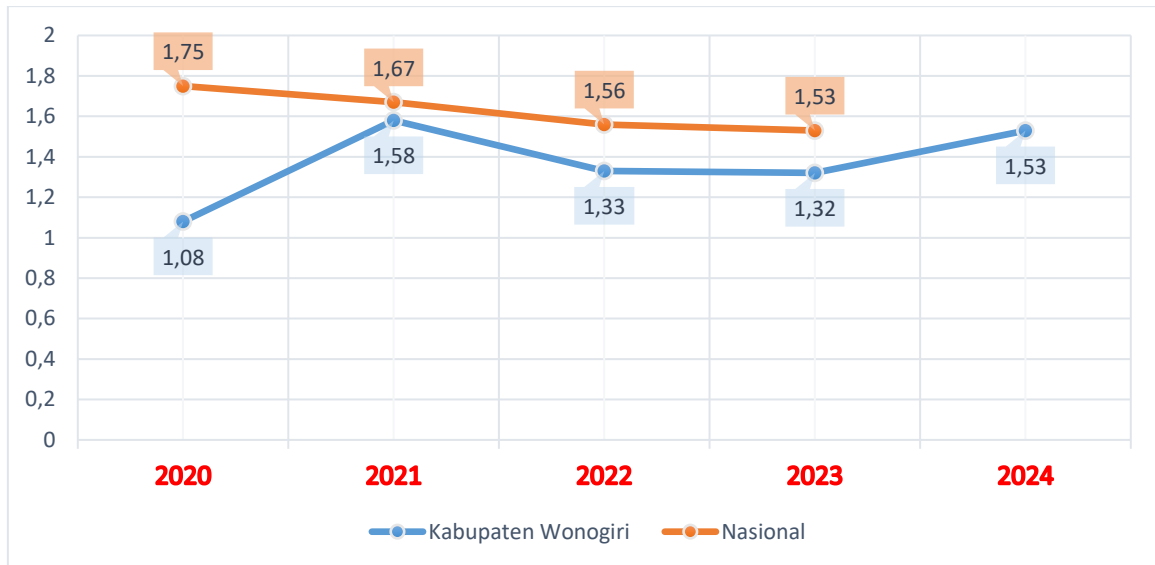
Berikut Perbandingan perubahan pencapaian indeks kedalaman kemiskinan daerah dengan capaian nasional tahun 2020-2024

Tabel 2. 60. Perbandingan Perubahan Pencapaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Wonogiri dengan Capaian Nasional Tahun 2020-2024

No	Tahun	Kabupaten Wonogiri		Nasional	
		Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
1	2020	1,08	0,26	1,75	0,25
2	2021	1,58	0,50	1,67	-0,08
3	2022	1,33	-0,25	1,56	-0,11

No	Tahun	Kabupaten Wonogiri		Nasional	
		Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
4	2023	1,32	-0,01	1,53	-0,03
5	2024	1,53	0,21	1,36	0,15

Sumber : BPS, 2024



Sumber : BPS Pusat, Jawa Tengah , dan BPS Kab. Wonogiri, 2024

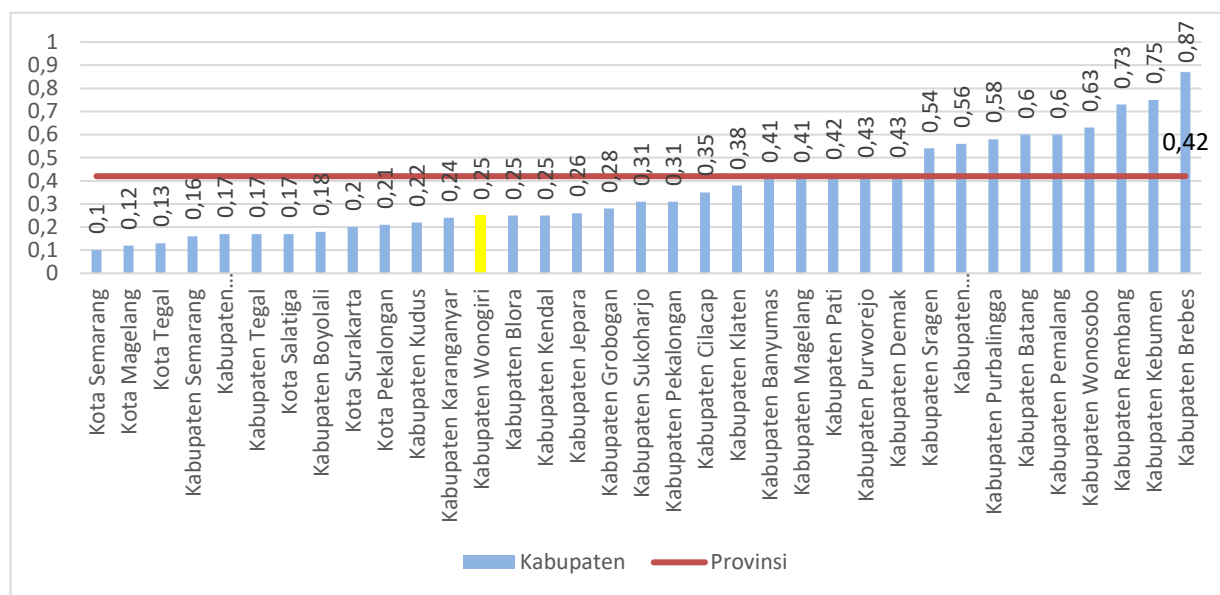
Gambar 2. 22. Grafik Perbandingan Pencapaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Wonogiri Dengan Capaian Nasional Tahun 2024

Pada grafik diatas, maka dapat disimpulkan, bahwasannya untuk indeks kedalaman kemiskinan di kabupaten Wonogiri tahun 2020-2024 masih berada di atas Nasional. Hal ini bisa dikatakan, bahwasannya untuk Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri masih menjadi konsentrasi untuk memperbaiki kondisi tersebut. Dan pada tahun 2023 baik capaian maupun perubahan masih kurang baik jika dibandingkan dengan capaian dan perubahan nasional. Dimana untuk Indeks Kedalaman Kabupaten Wonogiri sebesar 1,32 % dengan perubahan 0,01%, dan capaian Nasional sebesar 1,53% dengan perubahan 0,03%.

K. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan ukuran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin besar ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2023 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Wonogiri sebesar 0,25. Dimana indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Dimana Indeks Keparahan Kemiskinan di

Kabupaten Wonogiri pada tahun 2022 sebesar 0,29%. Dimana Indeks Keparahan kemiskinan Wonogiri jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Wonogiri berada di bawah Indeks Keparahan Provinsi Jawa Tengah, dimana indeks keparahan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,42%. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

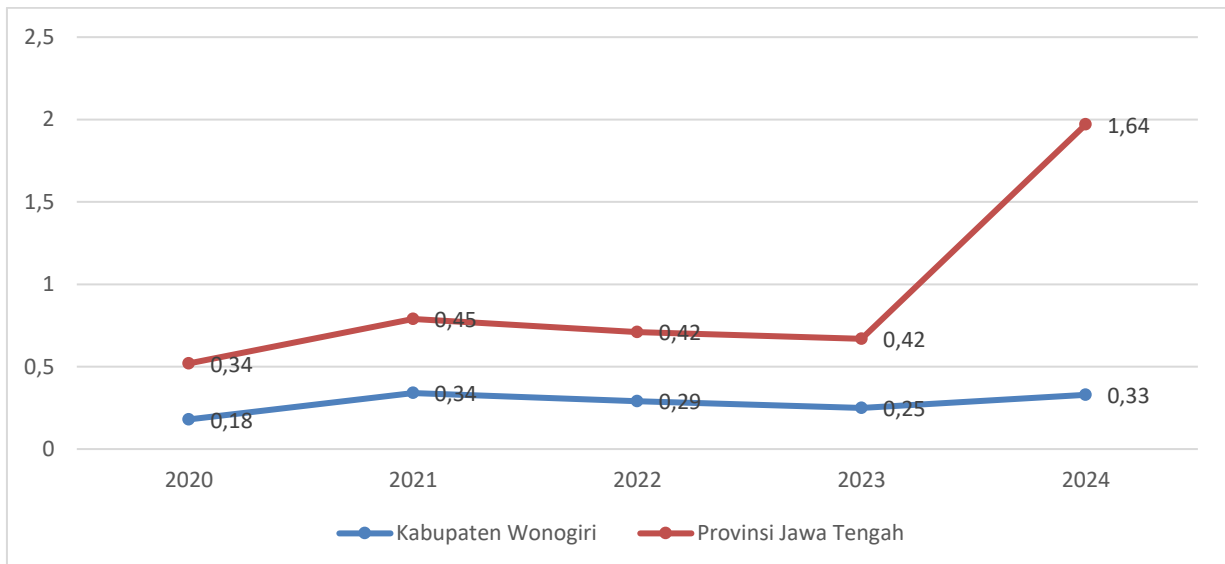


Sumber : BPS Jawa Tengah, diolah

Gambar 2. 23. Grafik Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks P2) Kabupaten Wonogiri dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Pada tahun 2020 indeks keparahan kemiskinan 0,18, ditahun 2021 mengalami kenaikan lagi sebesar 0,34%, kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,29% dan kemudian turun lagi di tahun 2023 sebesar 0,25%.

Relevansi Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023, dapat dilihat pada grafik dibawah ini



Sumber: BPS, diolah

Gambar 2. 24. Grafik Relevansi Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan(P2) Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024

Dari grafik diatas diketahui bahwa Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri memiliki tren yang menurun dalam kurun waktu tahun 2019 – 2023, Indeks keparahan kemiskinan di tahun 2019 mengalami penurunan. Kemudian di tahun 2021 sempat mengalami kenaikan kembali dikarenakan adanya pandemi covid 19, dan turun lagi di tahun 2022.

Diharapkan pada tahun-tahun mendatang Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri tetap bisa lebih rendah dan berada dibawah level Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Pergerakan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Wonogiri sejalan dengan pergerakan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini dikarenakan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Wonogiri sedikit mengalami kenaikan, sama dengan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang memiliki tren kenaikan juga. Dengan demikian, perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri relevan dengan perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

A. Usia Harapan Hidup (AHH)

Usia Harapan Hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan umur yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Wonogiri secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang

semakin panjang.

Dalam perencanaan daerah Usia Harapan Hidup ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah, dan berikut Tabel Usia Harapan Hidup (UHH) daerah tahun 2020-2024

Tabel 2. 61. Usia Harapan Hidup (AHH) Kabupaten tahun 2020-2024

No.	Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)
1	2020	76,16
2	2021	76,28
3	2022	76,41
4	2023	76,56
5	2024	76,82

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri, 2024

Pada tahun 2024, UHH terealisasi 76,82 dan capaiannya lebih 100% artinya telah melebihi target. Berikut Perbandingan capaian UHH Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten/Kota Se Subosukowonosraten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Tabel 2. 62. Perbandingan UHH dan Pertumbuhan UHH Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten/Kota Sewilayah Subosukowonosraten, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Kab / Kota	AHH					Pertumbuhan AHH				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Boyolali	75,95	76,03	76,12	76,23	76,44	0,16	0,11	0,12	0,14	0,55
Klaten	76,78	76,86	76,95	77,07	77,30	0,13	0,10	0,12	0,16	0,57
Sukoharjo	77,65	77,73	77,82	77,86	78,01	0,13	0,10	0,12	0,05	0,65
Wonogiri	76,16	76,28	76,41	76,56	76,84	0,12	0,16	0,17	0,20	0,57
Karanganyar	77,47	77,55	77,64	77,72	77,91	0,12	0,10	0,12	0,10	0,80
Sragen	75,71	75,79	75,87	75,97	76,18	0,12	0,11	0,11	0,13	0,43
Surakarta	77,22	77,32	77,43	77,63	77,91	0,13	0,13	0,14	0,26	0,65
Rata-rata Subosukowonosraten	76,71	76,79	76,89	77,01		0,13	0,12	0,13	0,15	0,63
JAWA TENGAH	74,37	74,47	74,57	74,69	74,91	0,19	0,13	0,13	0,16	0,48
NASIONAL	71,47	71,57	71,85	72,13	74,15	0,18	0,11	0,12	0,39	0,63

Sumber : BPS 2024

B. Kasus Gizi Buruk dan Stunting

Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Wonogiri mengalami trend kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2020-2021. Akan tetapi pada tahun 2022 mulai mengalami penurunan sebanyak 316 balita mengalami kasus gizi buruk dan kembali menurun pada tahun 2023 sebanyak 265 balita. Penurunan ini di indikasikan karena adanya perbaikan upaya pemenuhan dan pengawasan kecukupan gizi seimbang pada balita baik secara kuantitas maupun kualitas. Jika

dibandingkan dengan kasus di wilayah Subosukawonosraten, kasus gizi buruk di Kabupaten Wonogiri tercatat paling tinggi disetiap tahunnya. Sehingga Hal ini menandakan bahwa masih perlu adanya peningkatan program kesehatan dalam menangani kasus gizi buruk, seperti pemberian makanan tambahan (PMT) melalui Posyandu setiap desa dan pemantauan pertumbuhan balita secara intensif. Perkembangan kondisi gizi buruk di Kabupaten Wonogiri tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 63. Kejadian Gizi Buruk di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

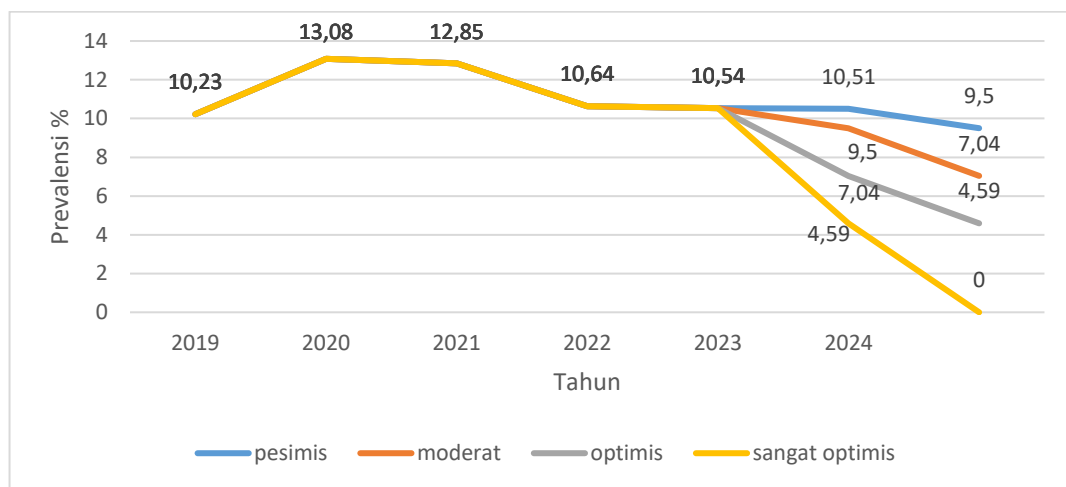
No.	Tahun	Kasus Gizi Buruk
1	2020	78
2	2021	44
3	2022	316
4	2023	265
5	2024	169

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri, 2024

Selain gizi buruk, permasalahan lain yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri adalah adanya Stunting. Stunting adalah Kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya. (kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru nampak setelah anak berusia 2 tahun). Pada tahun 2020 menurut data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) ada 5.135 balita dengan prevalensi 13,08% dan pada tahun 2021 kembali berhasil diturunkan menjadi 4.917 balita dengan prevalensi 12,85% dan kembali menurun pada tahun 2022 dengan jumlah balita stunting sebesar 4.643 balita atau dengan prevalensi 10,64 % serta pada tahun 2023 berdasarkan hasil timbang serentak pada bulan oktober diperoleh jumlah balita stunting sebesar 4.589 balita atau dengan prevalensi 10,54 % . Sedangkan menurut hasil Survey Status Gizi Indonesia pada tahun 2021 prevalensi Stunting Kabupaten Wonogiri mencapai 14 % akan tetapi Kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar 18% dan kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar 19,5 % . Apabila dibandingkan dengan standar WHO sebesar 20%, nasional sebesar 24,4% pada tahun 2021 dan sebesar 21,6 % pada tahun 2022, provinsi Jawa Tengah sebesar 20,9% pada tahun 2021 dan sebesar 20,8 % pada tahun 2022. Dari data tersebut maka angka stunting tahun 2023 di Kabupaten Wonogiri sudah memenuhi masih lebih baik dari pada nasional maupun propinsi Jawa Tengah

Intervensi atas kondisi stunting terdiri dari intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik, memiliki kelompok sasaran 1.000 HPK

(ibu hamil, ibu menyusui, dan anak 0-23 bulan) dan kelompok sasaran usia lainnya (remaja dan WUS serta anak 24 s/d 59 bulan). Sedangkan intervensi sensitif lebih ke arah : (1) penyediaan air minum dan sanitasi; (2) peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; (3) peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak; (4) peningkatan akses pangan bergizi. Dengan melalui intervensi terhadap kasus stunting sebagaimana tersebut diatas maka diharapkan kabupaten Wonogiri dapat mencapai target new zero stunting ditahun 2024 sehingga dapat mencapai target penurunan prevalensi stunting yang lebih cepat guna mendukung target penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Adapun target percepatan penurunan stunting setiap tahunnya tersaji pada grafik berikut :



Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2024 (diolah)

Gambar 2. 25. Grafik Target Capaian penurunan Prevalensi Stunting 2020-2024

Dari grafik diatas juga menunjukkan tren menurun terhadap prevalensi stunting dari tahun ke tahun sehingga hal menjadi modal utama bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri mendukung pencapaian target nasional dan daerah tahun 2024 melalui aktivitas yang konkrit berdasarkan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, utamanya hal-hal sebagai berikut.

- a. Menurunkan kasus kematian ibu, bayi, dan balita melalui. :
 - Meningkatkan pemeriksaan Ibu Hamil;
 - Meningkatkan persalinan ditangani dengan pelayanan Kesehatan;
 - Meningkatkan pemeriksaan perkembangan Bayi, Balita;
 - Kepastian peserta BPJS dengan menerima Peserta Bantuan Iuran (PBI);
 - Meningkatkan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh berbagai kelompok umur;
- b. Memperkuat peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat

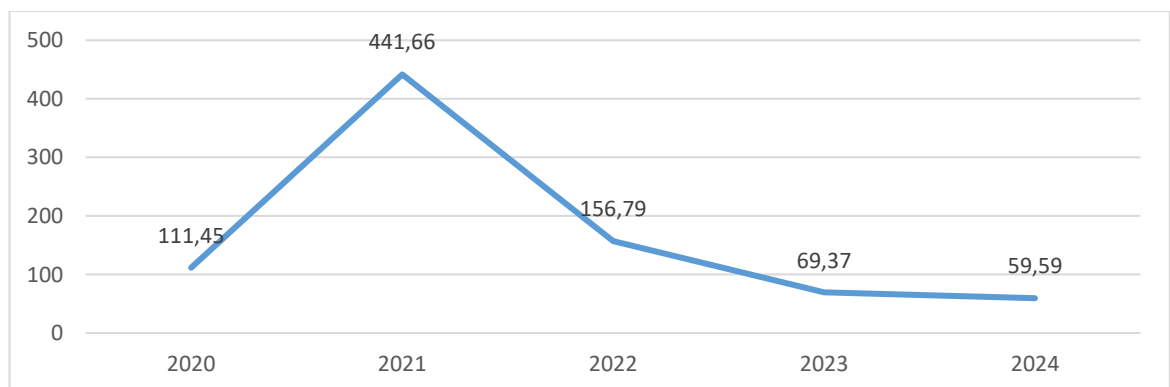
desa hingga kabupaten dalam mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara konvergen hingga tingkat desa/kelurahan untuk mencapai target prevalensi stunting se-Jawa Tengah menjadi 14%.

C. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pembangunan kesehatan, sebab AKI mencerminkan banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lamanya kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Semakin rendah Angka Kematian Ibu (AKI), maka tingkat pembangunan kesehatan yang ada semakin baik.

Angka Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2024 sebesar 59,59 per 100.000 KH, tahun 2024 ini AKI mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yang mana sebelumnya di Tahun 2023 sebesar 69,37 per 100.000 KH. Adanya perbaikan system pelayanan kesehatan bagi ibu mengakibatkan menurunnya Angka Kematian Ibu pada tahun 2024. Kasus kematian ibu yang saat ini masih terjadi akibat pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, gangguan sistem peredaran darah, Kelainan jantung, eklampsia, kanker payudara, hiperemesis dengan gangguan metabolisme, emboli air ketuban dan gangguan metabolisme masih ditemukan. Untuk itu maka diperlukan upaya tindakan preventif untuk menurunkan kasus kematian pada ibu selain perbaikan system pelayanan kesehatan bagi ibu.

Berikut ini Angka Kematian Ibu (AKI) periode tahun 2020-2024 di Kabupaten Wonogiri.



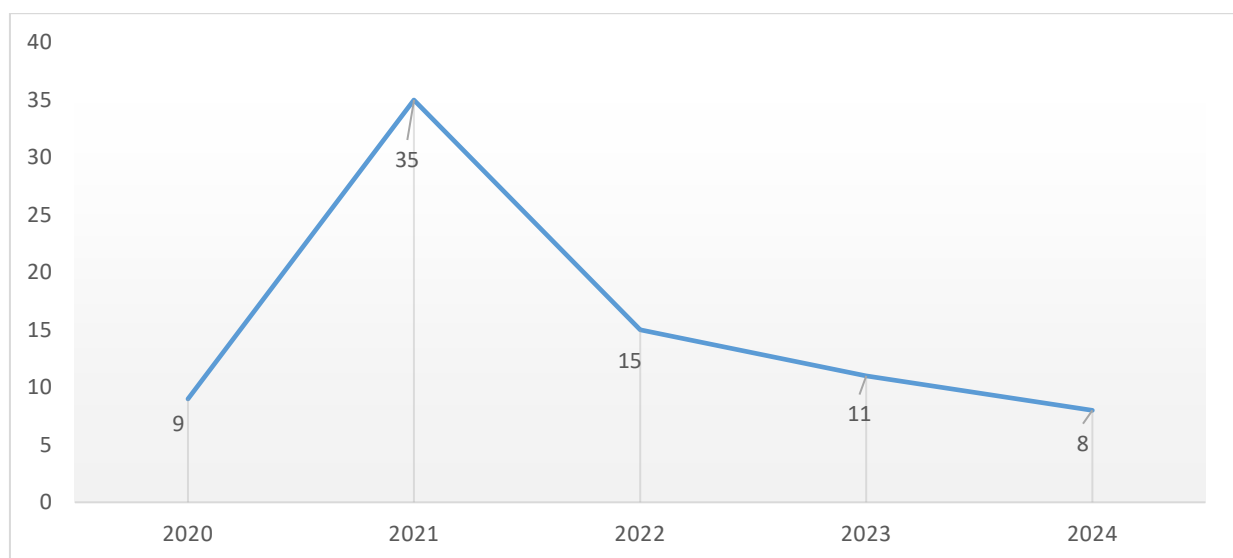
Sumber: Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2023

Gambar 2. 26. Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

Dari grafik di atas terlihat bahwa penurunan angka kematian ibu dari tahun 2021 menunjukkan capaian yang baik tapi walau demikian, masih perlu menjadi prioritas penanganan.

Untuk penanggulangan kematian ibu kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Audit Maternal Perinatal (AMP) dilaksanakan ditingkat Puskesmas, sebanyak 5 Puskesmas;
- IMD Pelaksanaan pada ibu Persalinan
- Kelas Ibu Hamil
- PMT Ibu Kekurangan Energi Kronik (KEK) Anemia
- Pelayanan rujukan lanjutan
- Pertolongan Persalinan dengan 4 tangan
- Pemberian Tablet Tambah darah (FE)
- Pengecekan HB, HIV, Hepatitis (Triple Eliminasi) Peningkatan Ketrampilan Bidan dengan Pelatihan.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Wonorejo, 2025

Gambar 2. 27. Grafik Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Wonorejo Tahun 2020-2024

Berkaitan dengan banyaknya kasus kematian ibu dari tahun ke tahun, terlihat adanya pengaruh signifikan pandemi Covid-19 terhadap peningkatan angka kematian ibu. Pada tahun 2020 tercatat 9 kasus kematian ibu, namun pada tahun 2021 terjadi lonjakan yang sangat tinggi menjadi 35 kasus yang sebagian besar disebabkan oleh komplikasi terkait Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi memberikan dampak besar terhadap

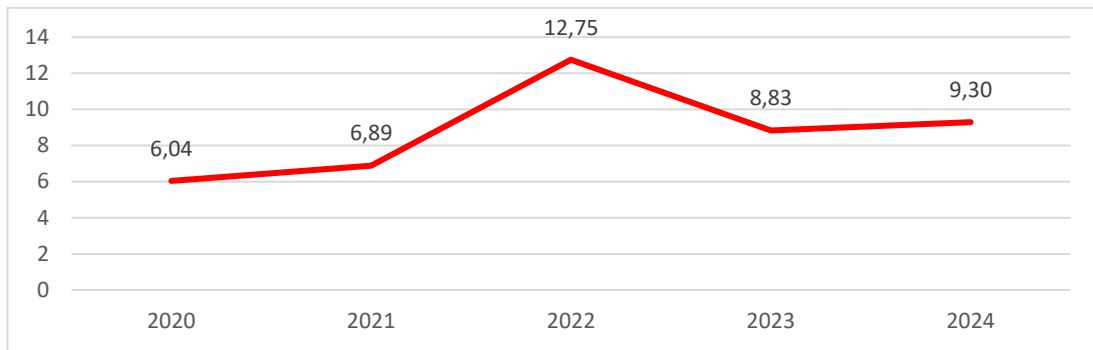
keselamatan ibu melahirkan, baik secara langsung melalui risiko kesehatan maupun secara tidak langsung akibat keterbatasan layanan kesehatan pada masa tersebut.

Memasuki tahun 2022 jumlah kasus mulai menurun menjadi 15 kasus, kemudian berlanjut turun menjadi 11 kasus pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 8 kasus pada tahun 2024. Tren penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam penanganan kesehatan ibu, peningkatan cakupan vaksinasi, serta pemulihan layanan kesehatan pascapandemi. Dengan demikian, meskipun angka kematian ibu sempat melonjak drastis di masa pandemi, namun upaya pemulihan kesehatan dan penguatan layanan maternal berkontribusi terhadap turunnya angka kematian ibu hingga kembali mendekati kondisi sebelum pandemi.

D. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-11 bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu, atau probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Kematian bayi dapat disebabkan berbagai faktor, seperti kekurangan asupan gizi selama di dalam kandungan yang menyebabkan berat badan lahir rendah, kelainan konginetal pada bayi, dan komplikasi kehamilan.

Angka Kematian bayi di Kabupaten Wonogiri mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020-2024 Angka kematian bayi di Kabupaten Wonogiri sempat mengalami penurunan dari 7,57 pada tahun 2019 menjadi 6,04 pada tahun 2020, akan tetapi Kembali meningkat ditahun 2021 menjadi 6,89 dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 12,75 dan kembali menurun menjadi 8,83 per 1.000 kelahiran hidup ditahun 2023, dan meingkat lagi di tahun 2024 yaitu 9,30 kasus. Kasus kematian bayi ini kemungkinan dipicu oleh beberapa faktor yaitu adanya permasalahan pada masa kehamilan ibu, Kurangnya pengetahuan ibu dalam merawat bayi, Penyakit komorbid pada bayi yang menyebabkan bayi asfiksia, Infeksi, BBLR, kelainan jantung, kelainan bawaan, kondisi ekonomi keluarga, dan keterbatasan akses fasilitas kesehatan. Berdasarkan hal tersebut maka upaya menekan kematian bayi juga menjadi prioritas penanganan di tahun berikutnya

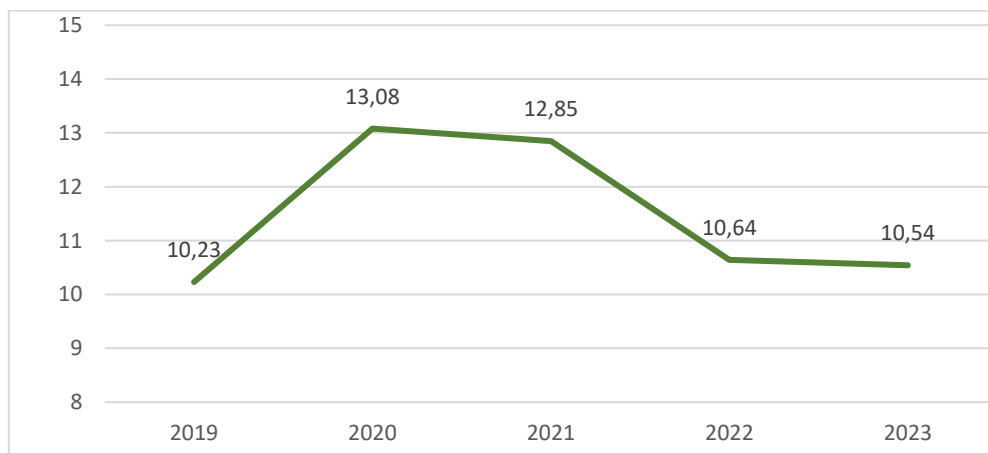


Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2023

Gambar 2. 28. Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

E. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) menggambarkan jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Angka Kematian Balita (AKABA) menunjukkan trend atau angka yang menurun akan tetapi terjadi kenaikan pada tahun 2022 dan Kembali dapat di turunkan pada tahun 2023. Beberapa penyebab kematian pada balita, antara lain asfiksia, berat badan lahir rendah (BBLR), pneumonia, kelainan jantung, diare, infeksi berat, feбри dan faktor lainnya. Berikut ini angka kelahiran balita periode tahun 2020-2024 di Kabupaten Wonogiri.



Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2023

Gambar 2. 29. Grafik Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

Dari data tersebut maka masih diperlukan upaya yang keras untuk menekan terjadinya kasus kematian balita sehingga perlu menjadi program prioritas di bidang Kesehatan

F. Penyakit Menular dan Tidak Menular

Permasalahan kesehatan yang menjadi tantangan Kabupaten Wonogiri adalah penyakit menular dan penyakit tidak menular. perubahan lingkungan, perilaku masyarakat, transisi demografi, teknologi, ekonomi dan sosial budaya berpengaruh pada kedua pola penyakit tersebut. Untuk itu penting dilakukan upaya pengendalian penyakit melalui upaya menurunkan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal. Pengendalian penyakit menular dilakukan terhadap penyakit menular langsung, penyakit menular bersumber binatang, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sedangkan pengendalian penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu

1) Kondisi Penyakit Menular

Demam Berdarah Dengue (DBD), Tuberkulosis (TB), dan HIV/AIDS adalah penyakit menular yang menjadi sasaran program Provinsi Jawa Tengah. Tingkat kesakitan (IR) dan persentase Case Fatality Rate (CFR DBD Kabupaten Wonogiri lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Akan tetapi walaupun sudah terdapat perbaikan CFR dan IR DBD, DBD masih menjadi masalah serius yang harus tetap ditangani.

Untuk penyakit Tuberkulosis, Case Notification Rate (CNR) Tuberculosis pada tahun 2020-2021 dan tahun 2023 mengalami penurunan menurun, dan sempat mengalami peningkatan di tahun 2022 hal ini menandakan bahwa screening terhadap kasus TB di kabupaten Wonogiri semakin baik dan diikuti Persentase tingkat keberhasilan pengobatan untuk penyakit Tuberculosis di Kabupaten Wonogiri dan selalu diatas target dari Provinsi Jawa Tengah.

Untuk kasus HIV/AIDS di Kabupaten Wonogiri mengalami trend meningkat. Berikut tabel kondisi penyakit menular di Kabupaten Wonogiri dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 64. Kondisi Penyakit Menular Kabupaten Wonogiri 2020-2024

Tahun	IR DBD per 100.000 Penduduk	CFR DBD (%)	CNR TB (100.000 penduduk)	SR TB (%)	HIV/AIDS	
					HIV	AIDS
2020	2,81	0	62	91,8	22	39
2021	3,6	10,3	58	89,5	23	27
2022	10,2	2,8	109	88,8	39	29
2023	2,7	0	134	90,0	59	49
2024	46,45	1,53	134	87,7	62	53

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Tabel 2. 65. Kondisi Penyakit Menular Provinsi Jawa Tengah 2020-2024

Tahun	IR DBD per 100.000 Penduduk	CFR DBD (%)	CNR TB (100.000 penduduk)	SR TB (%)	HIV/AIDS	
					HIV	AIDS
2020	16,3	1,9	118	84,5	2.749	1.549
2021	12,8	2,71	116,2	83,5	2708	835
2022	25,99	2,11	113,8	82,9	2163	914
2023	17,86	2,2	249	87	3464	1608
2024	47,53	0,29	241	86	4413	2030

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Dari tabel tersebut diatas maka penanganan Penyakit Menular HIV/AIDS dan Tuberkulosis masih perlu menjadi prioritas kebijakan pembangunan dengan melibatkan lintas sektor. Sebagai landasan dalam pelaksanaan penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS, pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2025 yang ditetapkan dengan Perbup Kab. Wonogiri No. 21 Tahun 2022. Sedangkan Rencana Aksi Daerah penanggulangan Tuberkulosis sesuai dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Wonogiri Tahun 2024-2028 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

A. Maksud:

Rencana Aksi Daerah (Penanggulangan TBC Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 2028 adalah dokumen yang memuat program aksi Daerah Kabupaten Wonogiri, berupa langkah langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Wonogiri, untuk mempercepat pencapaian tujuan eliminasi TBC sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam penanggulangan TBC.

B. Tujuan:

Rencana Aksi Daerah (Penanggulangan TBC Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 2028 bertujuan untuk:

1. memberikan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan komitmen dan kepemimpinan dalam upaya penanggulangan TBC di Kabupaten Wonogiri;
2. memberikan acuan dalam membuat perencanaan dan penganggaran terkait penanggulangan TBC di Kabupaten Wonogiri;
3. memberikan acuan dalam menyusun kebijakan dan regulasi terkait penanggulangan TBC; dan
4. memberikan acuan untuk melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi agar dicapai sinergi dalam upaya

bersama Penanggulangan TBC.

2) *Kondisi Penyakit Tidak Menular (PTM)*

Peningkatan beban akibat penyakit tidak menular sejalan dengan meningkatnya faktor risiko yang meliputi meningkatnya tekanan darah, gula darah, indeks massa tubuh atau obesitas, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan merokok serta alkohol. Peningkatan PTM dapat mengakibatkan penurunan produktivas penduduk karena PTM banyak ditemukan pada usia produktif seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan kanker.

Tabel 2. 66. Kondisi Penyakit Tidak Menular Di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

Tahun	Jenis PTM		
	Diabetes Milletus	Hipertensi	Kanker
2020	17.749	131.889	174
2021	15.296	141.572	169
2022	16.906	273.808	281
2023	17.262	308.600	377
2024	17.749	327.497	552

Sumber : Dinas Kesehatan Kab, Wonogiri, 2024

G. Kesehatan Lingkungan

Perilaku hidup sehat merupakan salah satu perilaku yang penting untuk diterapkan pada masyarakat, terutama menumbuhkan perilaku hidup sehat pada anak usia dini. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat adalah melalui program Sanitasi Total Bersama Masyarakat (STBM). Upaya yang dilakukan dalam STBM mencakup 5 pilar, yaitu pilar-1 bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS), pilar-2 Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), pilar-3 pengelolaan air minum dan makanan dengan baik, pilar-4 pengelolaan sampah rumah tangga dengan baik dan aman, dan pilar-5 pengelolaan limbah cair rumah tangga.

Penggunaan rokok elektronik secara mendasar mengubah kondisi imunologi dan fisiologis paru dan menyebabkan penyakit. Kenaikan pengguna vape atau rokok elektrik dilaporkan terus meningkat di Indonesia. Tahun 2011, prevalensinya yang 'hanya' 0,3 persen. Sementara di 2018, prevalensinya berada di angka 10,9 persen. Menurut Statista Consumer Insights periode Januari hingga Maret 2023, sebanyak 25% masyarakat Indonesia pernah setidaknya menggunakan rokok elektronik satu kali (Swiss 16% - Amerika 15% - Inggris 13%). Alasan menggunakan vape : karena kadar nikotin lebih rendah, ada varian rasa, tertarik dengan trik uap/ asap dan mengikuti trend. Dampak rokok

elektrik dapat dalam mengakibatkan serangan jantung, kerusakan paru (evali), kanker, tekanan darah tinggi, stroke,dll. Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan keluarga di Indonesia. IKS disusun oleh Kementerian Kesehatan RI sebagai bagian dari upaya reformasi layanan kesehatan berbasis keluarga, terutama dalam implementasi program Pendekatan Keluarga oleh Puskesmas.

H. Kesehatan Usia Lanjut

Dalam rangka menanggapi bonus demografi, penduduk usia lanjut (penduduk usia 60 tahun ke atas) lima tahun kedepan yang jumlahnya diperkirakan sebanyak 213.091 jiwa perlu mendapat perhatian yang khusus dalam pelayanan kesehatan per individu dan rujukan agar lansia tetap menjalani aktivitas fisik, menjaga kesehatan, tidak menggantungkan kepada orang lain dalam kehidupan. Perkembangan pelayanan kesehatan untuk usia lanjut di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2020 sebesar 79,03 %, tahun 2021 mencapai 74,2 %, tahun 2022 sebesar 76,85 %, tahun 2023 sebesar 95,00 %, dan tahun 2024 sebesar 96,00%.

Pelayanan kesehatan untuk usia lanjut di Kabupaten Wonogiri untuk setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia terus dilakukan melalui penguatan promosi kesehatan, meningkatkan akses pelayanan kesehatan untuk usia lanjut, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang terlibat dalam upaya kesehatan lanjut usia. Berikut tabel perkembangan pelayanan kesehatan usia lanjut di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 67. Perkembangan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

Tahun	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (%)
2020	79,03
2021	74,20
2022	76,85
2023	95.00
2024	96.00

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Wonogiri (2024)

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

A. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa

mendatang.

Dalam perencanaan daerah Harapan Lama Sekolah (HLS) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah, berikut tabel HLS daerah tahun 2020-2024:

Tabel 2. 68. Perbandingan HLS Kabupaten Wonogiri tahun 2020-2024

No.	Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS)
1	2020	12,49
2	2021	12,50
3	2022	12,51
4	2023	12,52
5	2024	12,61

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri, 2024

HLS Tahun 2024 sebesar 12,61 dari yang ditargetkan 12,82 dengan capaian 97,66%, walaupun capaiannya tinggi tapi belum mencapai target yang ditetapkan.

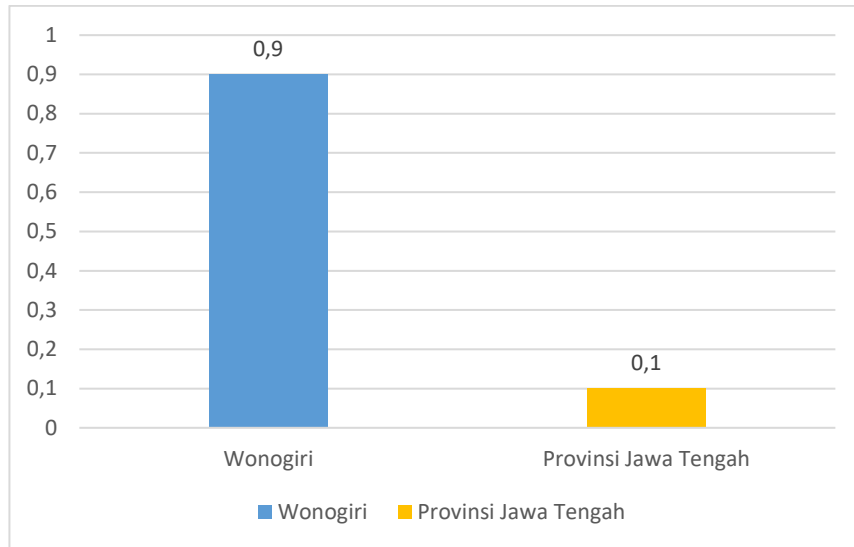
Berikut Perbandingan capaian HLS dan Pertumbuhan HLS Kabupaten Wonogiri dengan Subosukawonosraten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Tabel 2. 69. Perbandingan Capaian HLS Kabupaten Wonogiri Dengan Rata-Rata Capaian Kabupaten/Kota Subosukowonosraten Tahun 2020-2024

Kab / Kota	HLS					Pertumbuhan HLS				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Boyolali	12,56	12,57	12,62	12,66	12,67	1,05	0,08	0,40	0,32	0,08
Klaten	13,25	13,39	13,4	13,41	13,43	0,08	1,06	0,07	0,07	0,03
Sukoharjo	13,83	13,84	13,9	13,91	13,92	0,07	0,07	0,43	0,07	0,01
Wonogiri	12,49	12,5	12,51	12,52	12,61	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
Karanganyar	13,68	13,69	13,7	13,71	13,73	0,07	0,07	0,07	0,07	0,02
Sragen	12,83	12,84	12,91	12,92	12,93	1,10	0,08	0,55	0,08	0,01
Surakarta	14,87	14,88	14,89	14,90	15,07	2,20	0,07	0,07	0,07	0,17
Rata-rata Subosukowonosraten	13,36	13,39	13,42	13,43	13,48	0,66	0,22	0,24	0,11	0,05
JAWA TENGAH	12,7	12,77	12,81	12,85	12,86	0,16	0,55	0,31	0,31	0,01
NASIONAL	12,98	13,08	13,10	13,15	13,21	0,23	0,27	0,25	0,38	0,06

Sumber : BPS 2024

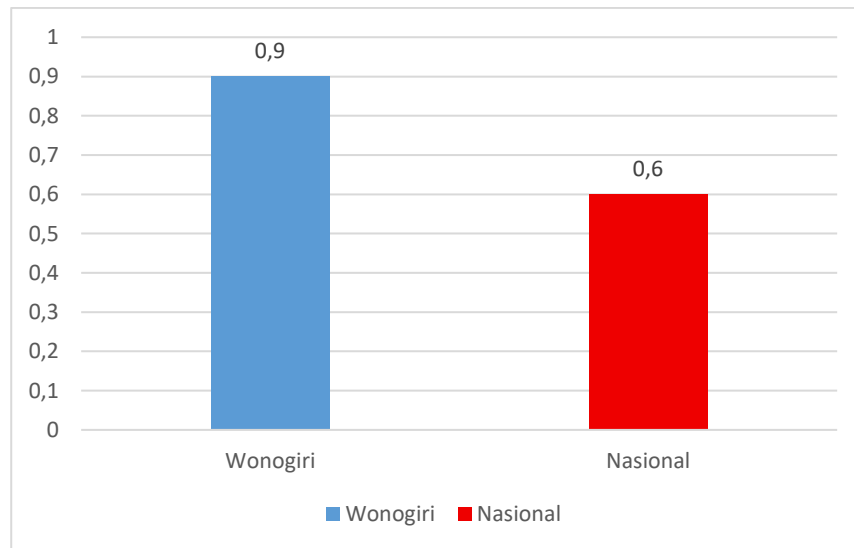
Pertumbuhan HLS Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 berada di bawah rata-rata kabupaten/kota se wilayah Subosukowonosraten. Berikut perbandingan pertumbuhan HLS Kabupaten Wonogiri dengan pertumbuhan HLS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2024

Gambar 2. 30. Grafik Perbandingan Pertumbuhan HLS Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Pertumbuhan HLS Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah. Berikut Perbandingan pertumbuhan HLS Kabupaten Wonogiri dengan pertumbuhan HLS Nasional Tahun 2024



Sumber : BPS, 2024

Gambar 2. 31. Grafik Perbandingan Pertumbuhan HLS Kabupaten Wonogiri dengan Nasional Tahun 2024

Pertumbuhan HLS Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 masih lebih baik dari pertumbuhan Nasional. Ini menunjukkan bahwa pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Wonogiri sudah lebih baik dengan rata-rata se wilayah Subosukowonosraten, Provinsi Jawa Tengah, dan bahkan Nasional pada umumnya.

Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 12,50, Tahun 2022 = 12,51, Tahun 2023 = 12,52 dan Tahun 2024 = 12,61. Untuk HLS Tahun 2024 mengalami kenaikan 0,72% dari Tahun 2023. Pertumbuhan HLS Kabupaten Wonogiri masih sangat rendah dibandingkan dengan capaian di Prov. Jateng dan Nasional, hal tersebut dipengaruhi masih banyaknya Anak Tidak Sekolah (ATS), meskipun program sekolah gratis dicanangkan mulai Tahun 2018 dan seragam gratis dicanangkan mulai Tahun 2020.

Kesadaran masyarakat Wonogiri untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi masih rendah. Hal tersebut karena masih banyak Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Wonogiri yakni sebanyak 10.921 orang meliputi anak Belum Pernah Bersekolah, Drop Out dan Lulus Tidak Melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebagian besar Anak Tidak Sekolah (ATS) direntang usia 15-18 Tahun sebanyak 3.818 orang (lulus SMP tidak melanjutkan ke jenjang SLTA). Sebetulnya ada program Pendidikan non formal atau kesetaraan yang membuka kejar paket A (SD), paket B (SMP) dan paket C (SLTA) yang setara dengan Pendidikan Formal, tetapi angka partisipasinya masih rendah sekitar 22,34% (berdasarkan Rapor Pendidikan). Sehingga permasalahan masih rendahnya angka Harapan Lama Sekolah (HLS) harus dilakukan melalui kolaborasi beberapa OPD meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan dan penambahan jumlah Satuan Pendidikan SLTA Negeri yang lebih memadai.

B. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah diartikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam perhitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Peningkatan kualitas pendidikan menjadi syarat keberhasilan capaian RLS. Berikut tabel RLS Kabupaten Wonogiri tahun 2020-2024 :

Tabel 2. 70. RLS Kabupaten Wonogiri tahun 2020-2024

No.	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
1	2020	7,33
2	2021	7,34
3	2022	7,42
4	2023	7,67
5	2024	7,68

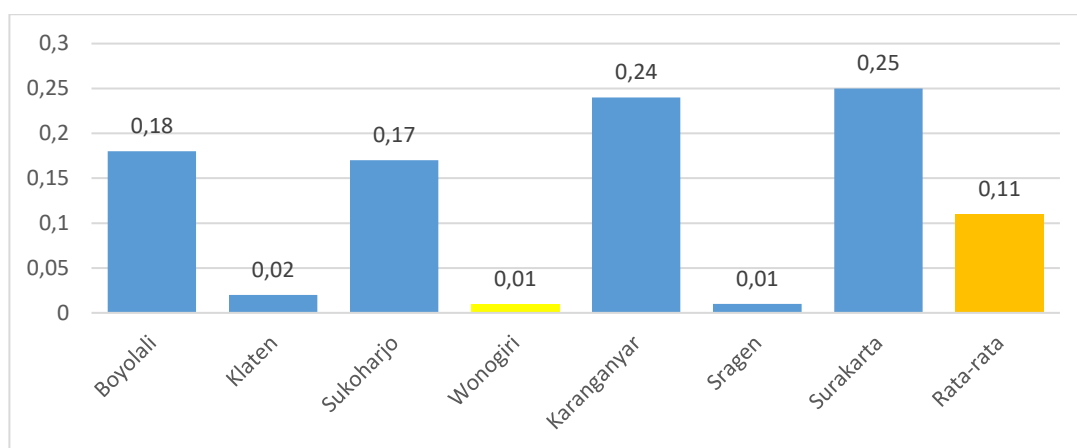
Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri, 2024

Capaian RLS dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan pada tahun 2024 sebesar 100,53% dari target 7,63 realisasi 7,68. Capaian tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan. Berikut tabel perbandingan capaian RLS dan pertumbuhan RLS Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten/Kota Subosukawonosraten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2020-2024

Tabel 2. 71. Perbandingan RLS dan Pertumbuhan RLS Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten / Kota Sewilayah Subosukowonosraten, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Kab / Kota	RLS					Pertumbuhan RLS				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Boyolali	7,84	7,85	8,08	8,09	8,17	3,70	0,13	2,93	0,12	0,18
Klaten	8,58	8,81	9,09	9,27	9,29	3,25	2,68	3,18	1,98	0,02
Sukoharjo	9,34	9,35	9,62	9,84	10,01	2,64	0,11	2,89	2,29	0,17
Wonogiri	7,33	7,34	7,42	7,67	7,68	4,12	0,14	1,09	3,37	0,01
Karanganyar	8,56	8,57	8,79	9,02	9,26	0,47	0,12	2,57	2,62	0,24
Sragen	7,65	7,66	7,79	7,87	7,88	4,22	0,13	1,70	1,03	0,01
Surakarta	10,69	10,9	10,92	11,00	11,25	1,42	1,96	0,18	0,73	0,25
Rata-rata Subosukowonosraten	8,57	8,64	8,82	8,97	9,08	2,83	0,75	2,08	1,70	0,11
JAWA TENGAH	7,69	7,75	7,93	8,01	8,02	2,12	0,78	2,32	1,01	0,01
NASIONAL	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85	1,68	0,62	2,30	0,92	0,08

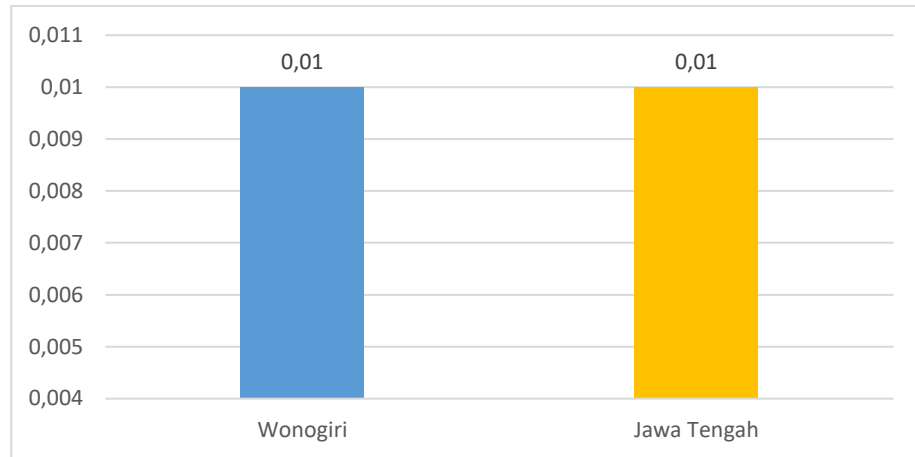
Sumber : BPS 2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2024

Gambar 2. 32. Grafik Perbandingan Pertumbuhan RLS Kabupaten Wonogiri dengan Subosukawonosraten Tahun 2024

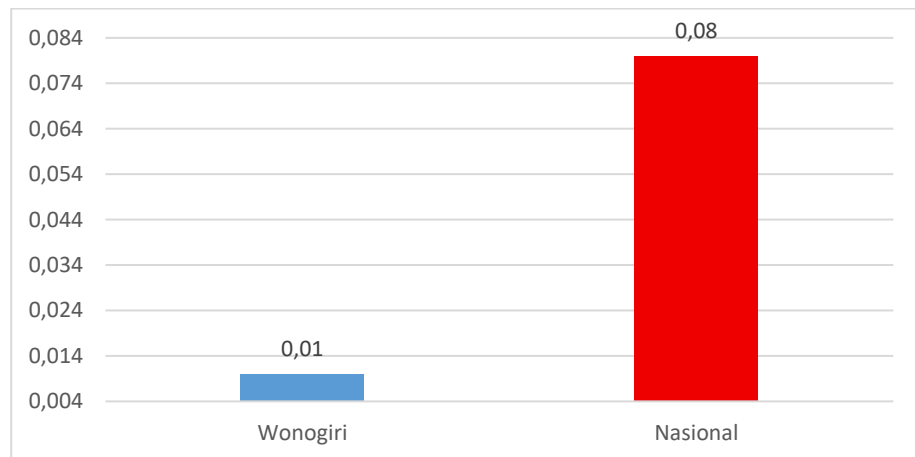
Pertumbuhan RLS Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 berada di bawah RLS rata-rata kabupaten/kota se wilayah subosukawonosraten, dan Nasional, tapi sama dengan capaian Provinsi Jawa Tengah.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2024

Gambar 2. 33. Grafik Perbandingan Pertumbuhan RLS Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Pertumbuhan RLS Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 sama dengan Jawa Tengah dengan capaian 0,001.



Sumber : BPS 2024

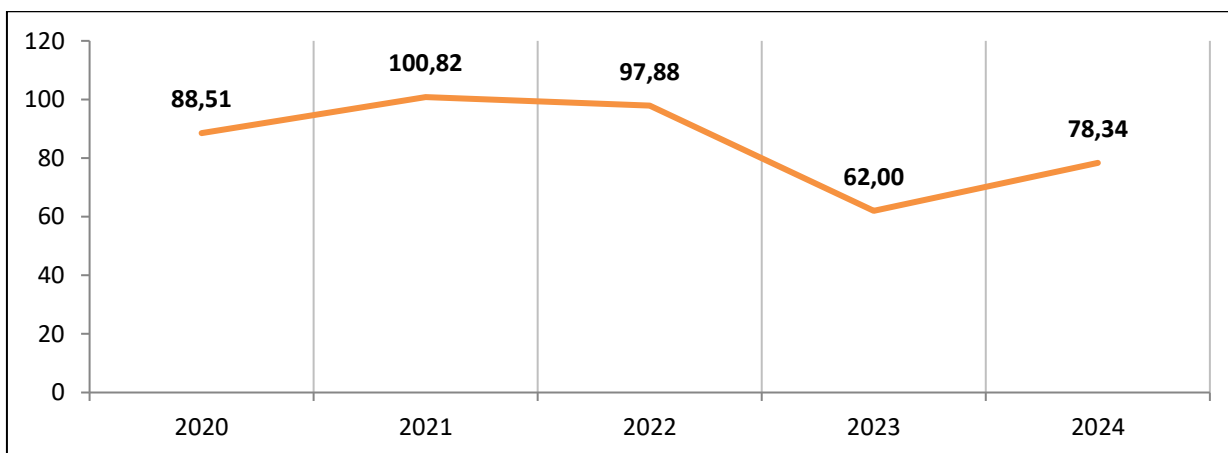
Gambar 2. 34. Grafik Perbandingan Pertumbuhan RLS Kabupaten Wonogiri dengan Nasional Tahun 2024

Pertumbuhan RLS Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 sebesar 0,01 masih dibawah capaian Nasional yaitu 0,08. Ini menunjukkan bahwa pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Wonogiri masih harus ditingkatkan.

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Wonogiri ditahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya menjadi 88,51 dan meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 100,82 sedangkan di tahun 2022 menjadi 97,88 sedangkan data sementara tahun 2023 turun menjadi 62,00%, dan di akhir tahun 2024 adlah 78,34%. Angka Partisipasi Kasar (APK)

PAUD ini di hitung dengan membagi jumlah siswa didik PAUD usia 5-6 tahun terhadap jumlah penduduk usia 5-6 tahun sesuai Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dari capaian APK PAUD ini menandakan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Wonogiri mulai mengalami perbaikan di dua tahun terakhir. Berikut ini grafik perkembangan APK di Kabupaten Wonogiri tahun 2020-2024.



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, 2023

Gambar 2. 35. Grafik Perkembangan APK PAUD Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

b. Pendidikan Dasar

1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Pada tahun 2020 capaian APK untuk SD/MI di Kabupaten Wonogiri mengalami pergerakan yang fluktuatif. Naik di tahun 2019 namun menurun lagi di tahun 2020, 2021 dan di tahun 2022 sedikit naik namun di tahun 2023 kembali turun, terakhir di tahun 2023 tercatat sebesar 103,60. Sedangkan untuk APK SMP/MTs Kabupaten Wonogiri cenderung bergerak naik dalam waktu 2020 dan turun 2021 dan kembali naik lagi di tahun 2022 namun di tahun 2023 kembali turun lagi. Untuk proporsi perbandingan, berikut APK Kabupaten Wonogiri dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024.

Tabel 2. 72. APK Pendidikan Dasar Kabupaten Wonogiri dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	SD/MI		SMP/MTs	
	Jawa Tengah	Kab. Wonogiri	Jawa Tengah	Kab. Wonogiri
2020	106.32	110.30	93.21	96.07
2021	106.40	109.42	94.00	95.24
2022	106,19	109,71	94,05	96,73
2023	105,01	103,60	92,80	90,39
2024	103,86	102.98	90,89	87.09

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023 dan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab Wonogiri, 2023

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Wonogiri untuk SD/MI mengalami penurunan tahun 2020 namun di tahun 2021 dan tahun 2022 kembali mengalami kenaikan namun di tahun 2023 kembali sedikit turun. Berbeda dengan APM SMP/MTs yang dalam kurun waktu 2020-2022 cenderung selalu naik meskipun di tahun 2020 sedikit turun dari tahun sebelumnya namun di tahun 2022 kembali naik cukup signifikan akan tetapi di tahun 2023 kembali turun cukup signifikan, bahkan di 5 tahun terakhir APM SMP/Mts tahun 2022 merupakan APM tertinggi di 6 tahun terakhir. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, APM untuk SD/MI Kabupaten Wonogiri masih berada bawah APM Provinsi Jawa Tengah dan APM untuk SMP/MTs juga berada diatas APM Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa tengah, posisi APM untuk SMP/MTs cenderung termasuk kedalam golongan APM yang tertinggi. Sedangkan untuk APM SD/MI cenderung termasuk kedalam golongan APM yang rendah.

Tabel 2. 73. APM Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

Tahun	SD/MI		SMP/MTs	
	Jawa Tengah	Kab. Wonogiri	Jawa Tengah	Kab. Wonogiri
2020	97.77	96.23	79.84	84.84
2021	98.22	97.56	80.99	85.79
2022	98,39	72.99	81,02	89.72
2023	98,46	98,93	81,56	80,22
2024	98,39	99,31	81,03	79,39

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023 dan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Wonogiri 2024

3) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ini mencerminkan sejauh mana sekolah yang tersedia dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah dalam suatu wilayah. Dihitung berdasarkan per 10.000 penduduk usia sekolah. Pada kurun waktu 2020-2024, rasio di Kabupaten Wonogiri cenderung menunjukkan trend fluktuatif. Pada tahun 2021, rasio untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 1:32, sedangkan rasio untuk SMP/MTs sebesar 1:46 dan di tahun 2022 rasio untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 1:107, sedangkan rasio untuk SMP/MTs sebesar 1:36 namun di tahun 2023 rasio untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 1:106 sedangkan rasio untuk SMP/MTs sebesar 1:43.

Tabel 2. 74. Jumlah Sekolah di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020		2021		2022		2023		2024	
		SD/MI	SMP/MTS	SD/MI	SMP/MTS	SD/MI	SMP/MTS	SD/MI	SMP/MTS	SD/MI	SMP/MTS
1	Pracimantoro	52	10	52	10	52	10	49	8	52	9
2	Paranggupito	17	3	17	3	17	3	17	3	17	3
3	Giritontro	20	4	20	4	20	4	17	3	20	4
4	Giriwoyo	41	8	41	8	41	8	33	5	41	8
5	Batuwarno	19	5	19	3	19	3	18	2	19	3
6	Karangtengah	19	6	19	6	19	6	19	6	19	5
7	Tirtomoyo	43	11	43	11	43	11	40	8	43	11
8	Nguntoronadi	23	2	23	3	23	3	21	2	23	3
9	Baturetno	40	8	41	8	41	8	35	7	40	8
10	Eromoko	40	6	41	6	41	6	39	6	41	6
11	Wuryantoro	28	3	28	3	28	3	25	3	28	3
12	Manyaran	35	4	37	5	37	5	33	4	36	5
13	Selogiri	33	5	32	6	32	6	31	5	32	6
14	Wonogiri	57	13	57	16	57	13	52	11	57	13
15	Ngadirojo	42	7	44	7	44	7	41	5	44	6
16	Sidoharjo	32	3	33	3	33	3	33	3	34	3
17	Jatiroto	32	5	33	5	33	5	32	4	33	5
18	Kismantoro	28	5	29	5	29	5	26	4	29	5
19	Purwantoro	35	4	40	6	40	6	35	4	40	6
20	Bulukerto	25	4	28	5	28	5	26	3	28	5
21	Puhpelem	14	2	14	2	14	2	14	2	14	2
22	Slogohimo	38	6	40	6	40	6	38	5	40	7
23	Jatisrono	38	7	38	7	38	7	37	6	38	8
24	Jatipurno	29	4	30	4	30	4	29	4	30	6
25	Girimarto	33	3	34	3	34	3	33	3	34	3
	JUMLAH	813	141	833	142	833	142	773	116	832	143

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024 Dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri 2024

Tabel 2. 75. Jumlah Penduduk dan Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap 10.000 Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kab, Wonogiri Tahun 2020-2024

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Usia 7 s.d 12 Tahun	86790	62900	77.802	82.057	78.604
2	Jumlah Penduduk Usia 13 s.d 15 Tahun	48390	30282	39.218	43.694	43.466
3	Rasio SD/MI per 10.000 Penduduk Usia 7 s.d 12 Tahun	1 : 93	1:132	1:107	1:106	1:111
4	Rasio SMP/MTs per 10.000 Penduduk Usia 13 s.d 15 Tahun	1: 29	1:46	1:36	1:43	1:37

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020-2024

4) Rasio Guru terhadap Murid

Rasio jumlah guru terhadap jumlah murid menggambarkan kualitas proses pembelajaran disuatu daerah dengan membandingkan ketersediaan tenaga

pendidik dengan jumlah ideal murid untuk satu guru. Di Kabupaten Wonogiri, rasio ketersediaan guru cukup baik, apabila dihitung menghasilkan rata-rata untuk 1 guru mengajar 11-12 murid untuk jenjang SD/MI sedangkan untuk jenjang SMP/MTs rata-rata untuk 1 guru mengajar 13-18 murid. Ketersediaan guru ini mencakup guru PNS dan Guru Non PNS.

Tabel 2. 76. Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

Tahun	SD/MI		Rasio	SMP/MTs		Rasio
	Guru	Murid		Guru	Murid	
2020	5.703	71.619	12	2.510	34.944	13
2021	5.574	66.241	11	2.501	35.658	14
2022	5.635	64.283	11	2.046	35.216	17
2023	5.140	63.246	12	1.994	35.107	18
2024	5.307	62.419	11	1.944	34.477	17

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri, 2020-2024

Keberadaan Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non PNS di Satuan pendidikan dari PAUD hingga SMP di kabupaten Wonogiri baik itu GTT dan PTT saat ini masih harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Menurut data Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten wonogiri jumlah Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non PNS dari tahun 2020 hingga tahun 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 77. Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	JUMLAH PENERIMA GTT				JUMLAH PENERIMA PTT			
		TK	SD	SMP	JUMLAH	TK	SD	SMP	JUMLAH
1	2020	13	2.044	399	2.456	7	765	283	1.055
2	2021	12	1.806	377	2.195	7	747	274	1.028
3	2022	12	244	97	353	7	655	261	923
4	2023	12	10	3	25	7	598	258	863
5	2024	12	8	1	21	7	588	256	851

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wonogiri, 2020-2024

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri mendorong GTT dan PTT penerima Insentif masuk database BKN untuk mengikuti seleksi PPPK Formasi Teknis Tahun 2025 meskipun kuota PPPK lebih sedikit dari jumlah GTT dan PTT

5) Angka Kelulusan

Indikator lain dari kualitas atau keberhasilan pendidikan dalam suatu wilayah adalah angka atau tingkat kelulusan dalam jenjang pendidikan tertentu. Di Kabupaten Wonogiri, persentase untuk jenjang pendidikan SD/MI dan jenjang SMP/MTs tingkat kelulusan dari tahun 2020-2022 mengalami peningkatan bahkan di tiga tahun terakhir tingkat kelulusan jenjang pendidikan SD/MI dan jenjang SMP/MTs 100%.

**Tabel 2. 78. Angka Kelulusan SD/SMP di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2020-2024 (%)**

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	100	100	100	100	100
2	SMP/MTS	100	100	100	100	100

Sumber : Data Dapodik, Kemendikbud, 2024

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bawah kelulusan SD/SMP di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024 dengan tingkat kelulusan 100% atau semua siswa SD/SMP di Kabupaten Wonogiri dinyatakan “LULUS”

C. Perpustakaan

Perpustakaan Umum merupakan perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi koleksi deposit daerah. Hingga saat ini, di Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2020-2024 memiliki 1 unit Perpustakaan Umum. Perpustakaan Umum dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk mendapatkan layanan kebutuhan informasi yang diinginkan. Hal ini terlihat dari tingkat ketermanfaatan perpustakaan yang diukur dengan tingkat kunjungan ke perpustakaan. Tahun 2020 mengalami penurunan dari 52.313 menjadi 6.053 pengunjung, hal tersebut dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan. Pada Tahun 2021 kunjungan offline perpustakaan kembali mengalami penurunan menjadi 1.819, hal ini dikarenakan masih dalam masa Pandemi Covid-19 sehingga layanan perpustakaan tutup dan tidak menyelenggarakan perpustakaan keliling. Namun dengan mulai masa pandemi yang melandai pada Tahun 2022, kunjungan offline mengalami progres peningkatan kembali mencapai 3.906 pengunjung. Pada Tahun 2023 jumlah kunjungan ke perpustakaan dan perpustakaan keliling mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai 6.011 pengunjung.

Dalam rangka upaya meningkatkan gemar membaca masyarakat, pada Tahun 2021, Perpustakaan Umum telah memiliki inovasi baru dalam pelayanan buku digital atau buku elektronik, sehingga ada aktivitas kunjungan online perpustakaan melalui Perpustakaan Digital Wonogiri, yaitu 5.473 pengunjung, Tahun 2022 tingkat kunjungan online mengalami penurunan mencapai 1.518 pengunjung, sedangkan pada tahun 2023, kunjungan online perpustakaan yang mengakses i-wonogiri Kembali mengalami penurunan mencapai 384 pengunjung.

Berdasarkan tabel dibawah, pada Tahun 2020-2024 jumlah perpustakaan desa tidak mengalami perkembangan jumlahnya, akan tetapi dilihat secara kualitas dan kuantitas mengalami perkembangan dari jumlah koleksi buku dan pengelolaan. Pada tahun yang sama 2020-2024, jumlah mobil perpustakaan keliling masih 2 unit yang digunakan dalam rangka optimalisasi pelayanan perpustakaan, untuk mendekatkan dengan pembaca yang mengalami keterbatasan dalam menjangkau Perpustakaan Umum.

Perpustakaan Kabupaten Wonogiri hingga Tahun 2024 telah memiliki koleksi 16.748 judul untuk koleksi buku cetak dan 3.463 judul untuk koleksi perpustakaan keliling serta 721 layanan untuk koleksi perpustakaan digital atau buku digital. Untuk tahun 2024 terjadi penurunan dalam koleksi perpustakaan dibandingkan dengan jumlah koleksi pada Tahun 2022, setelah diadakan kegiatan penyiangan bahan pustaka. Penyiangan koleksi perpustakaan adalah kegiatan mengeluarkan koleksi perpustakaan yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan pemustaka, atau rusak. Kegiatan ini dilakukan secara periodik untuk menjaga agar koleksi perpustakaan tetap berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pemustaka.

Dalam menjalankan fungsi perpustakaan, Sumber Daya Manusia (SDM) pada perpustakaan memegang peranan penting dalam keberhasilan pelayanan perpustakaan, maka dari itu diperlukan SDM yang berkualitas. Perpustakaan Kabupaten Wonogiri saat ini memiliki SDM pustakawan sejumlah 7 orang pustakawan, baik yang melalui formasi CPNS, impassing, penyetaraan ataupun melalui uji kompetensi pustakawan. Dengan adanya pustakawan tersebut diharapkan mampu melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan yang lebih baik.

Tabel 2. 79. Perkembangan Perpustakaan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

No	Uraian Data	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perpustakaan					
	a. Perpustakaan Desa	294	294	294	294	294
	b. Jumlah Perpustakaan Daerah Kab/Kota	1	1	1	1	1
	c. Jumlah Perpustakaan Keliling	2	2	2	2	2
2	Jumlah Koleksi (Judul)					
	a. Perpustakaan Kab/Kota	17.704	18.137	18.352	16.748	1
	b. Perpustakaan Keliling	3.463	3.463	3.463	3.463	3
	c. Buku Digital	0	281	535	721	922
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan					
	a. Perpustakaan Umum & Perpustakaan Keliling	6.053	1.819	3.906	6.011	4.019
	b. Online (iWonogiri)	0	5.473	1.518	384	1.299
4	SDM Pustakawan (fungsi pelayanan)					
	a. Pustakawan yang sudah uji kompetensi	1	1	1	3	3
	b. Pustakawan yang lulus sertifikasi	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri, 2024

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Lebih lanjut, program JKN Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI) dan JKN Non PBI APBN juga sebagai salah satu upaya pemenuhan pembiayaan masyarakat miskin kaitannya dalam penurunan kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran kebutuhan dasarnya.

Tabel 2. 80. Jumlah Penduduk Pemanfaat Jamkesmas dan Jamkesda Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin-Rentan Miskin	Jumlah yang menerima Jamkesmas	%	Jumlah yang menerima Jamkesda	%
2020	333.322	385.691	115,71	91.531	27,46
2021	556.759	394.796	70,91	91.381	16,41
2022	562.521	449.361	79,88	99.727	17,72
2023	541.829	400.105	73,84	93.656	17,28
2024	541.163	423.065	78,03	83.493	15,39

Sumber : DTKS Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa secara umum, persentase jumlah penerima, penduduk miskin dan rentan miskin di Kabupaten Wonogiri masih ada yang belum menerima Jamkesmas dan Jamkesda. Sementara itu, dilihat dari perkembangannya dari tahun 2020-2024 jumlah penerima manfaat Jamkesda di Kabupaten Wonogiri telah mengalami peningkatan. Adapun peningkatan ini disebabkan oleh adanya perbaikan data penduduk miskin penerima manfaat berdasarkan data DTKS.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

A. Beragama maslahat

Salah satu upaya signifikan adalah pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Wonogiri untuk periode 2022–2027. FKUB berperan aktif dalam memfasilitasi dialog antarumat beragama, menyelesaikan potensi konflik, serta mendorong toleransi dan kehidupan sosial yang harmonis.

Selain itu, Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri telah menetapkan tiga desa sebagai rintisan Kampung Moderasi Beragama. Program ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya toleransi dan kerjasama lintas agama di tingkat komunitas.

Contoh nyata dari kerukunan ini terlihat di Desa Wonokerto, Kecamatan Wonogiri, di mana masjid dan gereja berdiri berdekatan dan masyarakatnya hidup rukun serta saling menghormati. Interaksi sosial yang baik dan kerjasama dalam berbagai kegiatan menjadi kunci terciptanya suasana damai di desa tersebut.

Meskipun belum tersedia data kuantitatif resmi mengenai IKUB di Kabupaten Wonogiri, berbagai inisiatif dan program yang telah dilaksanakan menunjukkan komitmen kuat pemerintah dan masyarakat dalam menjaga serta memperkuat kerukunan antarumat beragama.

B. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku, dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi, namun harus tetap berpijak pada nilai leluhur yang terkandung dalam Pancasila, sehingga terwujud karya – karya seni budaya yang memiliki kepribadian. Adapun penjelasan lainnya mengenai kesenian merupakan hasil karya yang mengacu pada nilai keindahan dan mewujudkan dari proses pengendapan makna relasi antar manusia dan manusia dengan lingkungan hidupnya.

**Tabel 2. 81. Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Wonogiri
Tahun 2020-2024**

No	Uraian	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	7	11	12	13
2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	-	-	-	-	-
3	Jumlah seniman	7845	7845	7949	7873	7885
4	Jumlah kelompok kesenian	260	260	263	267	267
5	Jumlah cagar budaya (candi,situs)	81	81	81	81	81
6	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (candi,situs)	3	3	3	3	3
7	Jumlah Museum	1	1	1	1	1
8	Jumlah Pengunjung Museum	906	2048	4342	4109	4251

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, 2024

Berdasarkan Berdasarkan tabel di atas, perkembangan seni dan budaya Kabupaten Wonogiri dapat dilihat dari jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, jumlah seniman, jumlah kelompok kesenian, jumlah cagar budaya (candi, situs), jumlah cagar budaya yang dilestarikan (candi, situs), jumlah museum, dan jumlah pengunjung museum. Dapat dilihat bahwa jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya pada 2020 tidak ada penyelenggaraan festival di karenakan adanya pandemi covid 19 namun di tahun 2021 sudah ada penyelenggaraan festival seni sebanyak 7 penyelenggaraan seni dan budaya dan di tahun 2022 ada penyelenggaraan festival seni sebanyak 11 kali penyelenggaraan. Pada kurun waktu 2020-2024 jumlah seniman dan jumlah kelompok kesenian jumlahnya mengalami peningkatan untuk jumlah seniman ditahun 2020 sebanyak 7845 seniman dan di tahun 2024 menjadi 7885 Seniman, sedangkan untuk kelompok kesenian di tahun 2020 ada 260 kelompok kesenian dan ditahun 2024 meningkat menjadi 267 kelompok kesenian. Jumlah cagar budaya dan jumlah cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2020-2024 tidak mengalami penurunan atau peningkatan. Jumlah museum dari tahun 2020-2024 masih tetap yaitu sebanyak 1 museum. Jumlah pengunjung museum pada tahun 2020 mengalami penurunan sampai dengan angka pengunjung sebanyak 906 orang, dan di tahun 2021 mengalami kenaikan lagi sebanyak 2048 pengunjung dan bahkan di tahun 2023 meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 4109 orang pengunjung, dan pada tahun 2024 sebanyak 4251 pengunjung.

Terdapat 3 situs dan kawasan cagar budaya yang ada di Kabupaten Wonogiri antara lain Tugu Pusaka Selogiri, Prasasti Nglaroh Selogiri, dan penyimpanan senjata Mangkunegaran di Tugu Pusaka Selogiri.

Tabel 2. 82. Jumlah Organisasi Penghayat dan Upacara Tradisional Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

No	Organisasi Penghayat dan Upacara Tradisional	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penghayat (orang)	1040	1030	1030	1047	1047
2	Siswa Penghayat	2	5	5	5	5
3	Organisasi (Unit)	5	5	5	5	5
4	Upacara Tradisional (jenis)	1	1	1	5	5

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri 2024

Organisasi penghayat dan upacara Organisasi penghayat dan upacara tradisional tidak akan terpisahkan dari bagian kebudayaan. Berdasarkan tabel diatas, jumlah penghayat mengalami penurunan pada tahun 2020 sebanyak 1040 orang dan pada tahun 2022 sebanyak 1.030 orang. Jumlah siswa penghayat mengalami peningkatan, pada tahun 2020 sebanyak 2 orang dan pada tahun 2024 sebanyak 5 orang. Jumlah organisasi pada tahun 2020-2024 menunjukkan angka yang sama yaitu, 5 unit. Jumlah upacara tradisional mengalami penurunan dimasa pandemi Covid 19. Pada tahun 2019 sebanyak 3 jenis dan pada tahun 2020 - 2022 turun hanya menjadi 1 jenis upacara tradisional. Sedangkan pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi 5 jenis upacara tradisional, yaitu : Labuhan Ageng di Pantai Sembukan Paranggupito, Ruwatan Massal di Museum Wayang Wuryantoro, Jamasan Pusaka Mangkunegaran di Selogiri dan Bubakan Kecamatan Girimarto, Gumbregan di Pidekso Kecamatan Giriwoyo serta Grebeg Suro di Jatisrono.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan masyarakat Inklusif

A. Perlindungan Perempuan dan Anak

Kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2024 sebanyak 29 kasus, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 40 kasus. Penurunan kasus kekerasan pada perempuan dan anak tersebut, dikarenakan beberapa faktor antara lain dengan adanya sinergisitas dalam program kegiatan lintas sektoral dan lintas OPD terkait perlindungan perempuan dan anak, melalui program/kegiatan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat dan sekolah-sekolah. Disamping itu ada juga kasus-kasus yang terselesaikan melalui mediasi di tingkat bawah, dan kasus-

kasus yang selesai dengan solusi perkawinan anak, sehingga berdampak pada tingginya perkawinan anak di Kabupaten Wonogiri.

Tabel 2. 83. Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	20	35	34	40	29

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri, 2024

Penanganan kasus terhadap perempuan dan anak ditangani Tim P2TP2A Kabupaten Wonogiri dengan dasar/regulasi pembentukan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembentukan P2TP2A dengan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 474.4/264/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Namun dengan terbitnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Pemerintah Daerah harus membentuk UPTD PPA untuk penanganan kasus terhadap perempuan dan anak, sehingga saat ini Pemerintah Kabupaten Wonogiri masih berproses dalam pembentukan UPTD PPA Kabupaten Wonogiri.

Dalam upaya untuk perlindungan anak, juga telah dibentuk Satgas PPA Kabupaten. dengan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 247 Tahun 2016 dan telah dikukuhkan oleh ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 20 Oktober 2016 serta Pelatihan terhadap 100 (setarus) Satgas PPA oleh Kementerian PPPA RI. Kemudian ditindaklanjuti dengan Pembentukan Satgas PPA Kecamatan dan Desa/ kelurahan dengan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 329 tahun 2016.

Pada tahun 2021 Kabupaten Wonogiri telah memperoleh predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan katagori “PRATAMA”. Tahun 2022, 2023 dengan predikat “MADYA”. Kemudian pada evaluasi KLA tahun 2024 untuk hasilnya akan diumumkan pada tahun 2025 saat Peringatan Hari Anak Nasional.

Dalam mendukung kesetaraan dan keadilan gender (KKG) telah melakukan berbagai kegiatan antara lain dengan membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG), Focal Point Gender di setiap Perangkat Daerah, Forum Anak (FA), Gugus Tugas KLA, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

PUSPAGA merupakan tempat konseling permasalahan keluarga dan

konseling bagi calon pengantin (catin) dispensasi kawin yang telah ada sejak tahun 2021. PUSPAGA Kabupaten Wonogiri telah terstandarisasi dengan predikat “MADYA” oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2023, yang juga sebagai lembaga untuk upaya meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan Hak Anak.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menetapkan 3 (tiga) Peraturan Daerah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta dalam upaya untuk pemenuhan hak anak, yaitu :

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
- c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender

Dalam upaya mendukung pemenuhan hak anak , telah dilaksanakan sosialisasi dan advokasi tentang Perlindungan Anak kepada masyarakat, guru/pendidik, tenaga pendidik, maupun kepada siswa/ siswi sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Disamping itu juga telah dilaksanakan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) kepada Kepala Sekolah SD, SMP , guru kelas, guru BK, OPD, Forum Anak (FA), Perangkat Desa/Kel. Satgas Desa/Kel dan Kecamatan, tenaga Kesehatan, lembaga masyarakat / organisasi wanita secara bertahap. Kemudian untuk pemenuhan hak anak di sekolah , telah dilakukan upaya untuk menciptakan Sekolah Ramah Anak dengan memberikan pembekalan sekolah ramah anak kepada sekolah melalui kegiatan sosialisasi sekolah ramah anak.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan keterlibatan Perempuan dalam politik melalui pembentukan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) tahun 2013. Pada tahun 2019-2024 prosentase perempuan dalam legislatif 16%, sedangkan pada tahun 2024-2029 prosentasi perempuan dalam legislative 26%. Walaupun prosentase masih di bawah 30 % namun ada peningkatan 10%.

Untuk prosentase Kecamatan dan Desa/Kel Layak Anak selama 4 (empat) tahun terakhir 2021-2024 sudah mencapai 100 %. Dimana untuk 25 Kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri saat ini sudah memperoleh predikat Kecamatan Layak Anak, begitu juga dengan Desa/Kelurahan sudah 100% memperoleh predikat Desa/Kelurahan Layak Anak .

Tabel 2. 84. Kecamatan Layak Anak Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Kecamatan Layak Anak	-	25	25	25	25
2.	Jumlah Kecamatan	25	25	25	25	25
3.	Persentase (%)	0	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri, 2024

Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) perhitungan mulai tahun 2021. Tahun 2021 nilai IBANGGA Kabupaten Wonogiri sebesar 56,42 kemudian tahun 2022 naik menjadi 57,57. Pada tahun 2023, nilai nya naik menjadi 63,77. Kemudian akhir 2024, nilai Ibangga Kabupaten Wonogiri sebesar 63,39.

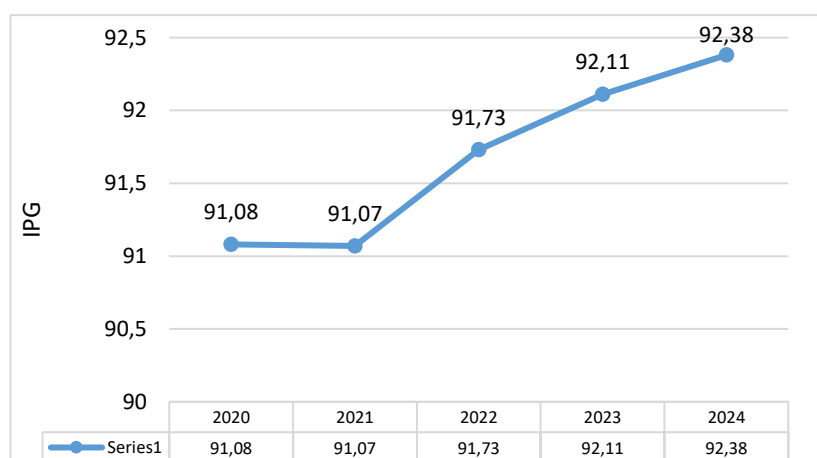
Tabel 2. 85. Indeks Pembangunan Keluarga 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	IBANGGA	N/A	56,43	57,57	62,77	63,39

Sumber: Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri

B. Pembangunan Gender

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan untuk meningkatkan pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dan memiliki hubungan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi kesetaraan gender dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG), yaitu pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan komponen pembentuknya, Berikut Grafik Indeks Pembangunan Gender kabupaten Wonogiri



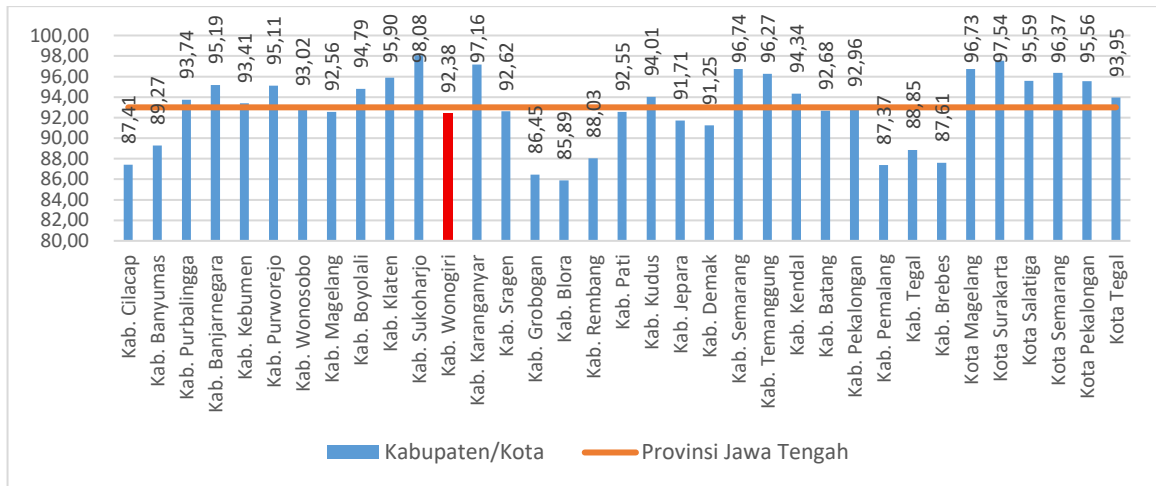
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2. 36. Grafik IPG Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

Hal ini menandakan pembangunan berbasis gender membaik. Setelah pandemi covid-19 tahun 2020-2021 IPG mengalami penurunan, dan mulai tahun 2022 mengalami peningkatan, yang pada 2024 mencapai 92,46 bahkan

merupakan capaian IPG tertinggi periode 2020-2024.

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, IPG Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2024 masih di bawah IPG Provinsi Jawa Tengah. Urutan pertama diduduki oleh Kabupaten Sukoharjo dengan IPG 98,08 dan yang memiliki IPG terendah, yaitu Kabupaten Blora dengan nilai 85,89.



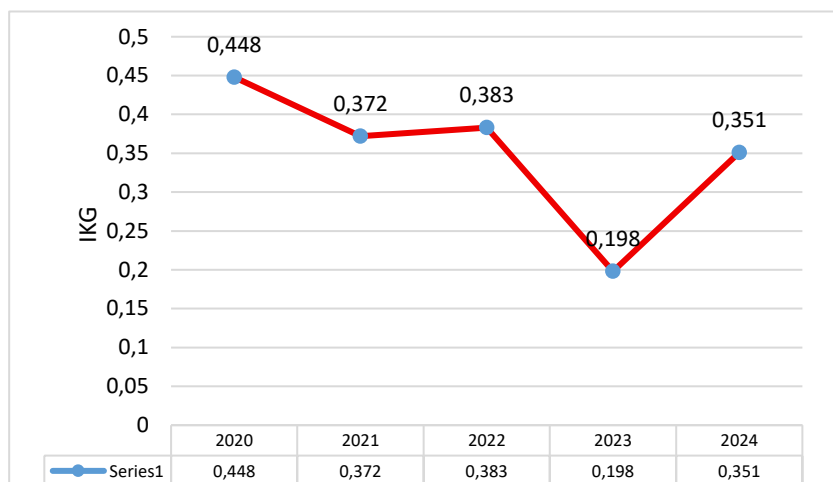
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2. 37. Grafik IPG Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Berdasarkan komponen pembentuk IPG tahun 2024, dapat diketahui bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan adalah 78,84 lebih baik dibandingkan dengan laki-laki 74,95. Harapan Lama Sekolah laki-laki, yaitu 12,56 tahun, sedangkan perempuan 12,61 tahun. Pada Rata-Rata Lama Sekolah laki-laki, yaitu 8,19 tahun, sedangkan perempuan 7,33 tahun.

Pengeluaran per kapita perempuan jauh di bawah laki-laki, yaitu untuk perempuan 9.158 juta rupiah dan laki-laki 13.997 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi perempuan masih rendah dan akses ekonomi perempuan masih rendah sehingga perempuan belum bisa bersaing dengan laki-laki.

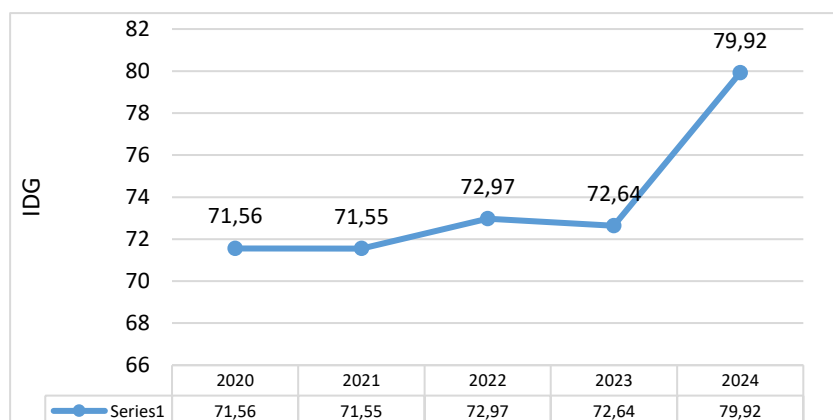
Ketimpangan Gender di Kabupaten Wonogiri masih ada walaupun ada tren menurun, terutama dalam aspek ekonomi dan kepemimpinan, meski terjadi perbaikan di bidang kesehatan dan pendidikan. Dengan tren penurunan IKG di Jawa Tengah dan komitmen Wonogiri dalam pembangunan responsif gender, peluang menuju kesetaraan semakin terbuka, asalkan disertai kebijakan afirmatif dan program yang konsisten. Berikut perkembangan Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Wonogiri



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2. 38. Grafik IKG Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

Pencapaian kesetaraan gender dapat dilaksanakan melalui pemberdayaan perempuan dengan tujuan untuk capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Capaian IDG pada Tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang membaik sebagaimana tersaji pada grafik di bawah ini.

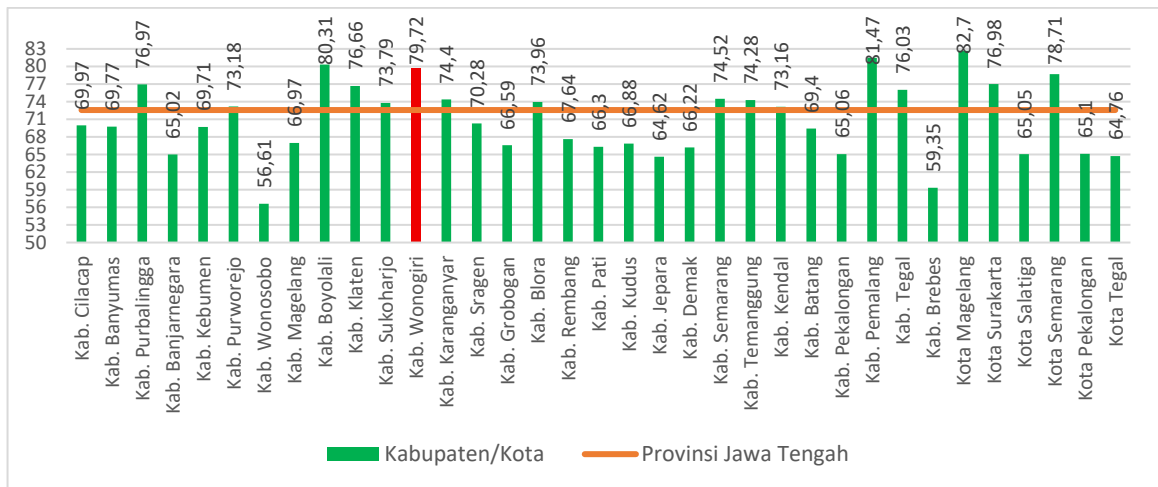


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2. 39. Grafik Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

Capaian IDG pada Tahun 2020-2021 sama seperti IPG juga mengalami penurunan dari sebelumnya karena dampak dari pandemi covid-19. Mulai Tahun 2022 mengalami kenaikan dengan capaian 72,97. Namun IDG Tahun 2023 kembali mengalami penurunan dengan capaian 72,64 atau turun 0,33 point. Dan pada akhirnya pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu mencapai 79,72.

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, IDG Kabupaten Wonogiri pada tahun 2024 berada pada urutan ke 4 dari 35 kab./kota di Provinsi Jawa Tengah. Urutan pertama diduduki oleh Kota Magelang dengan IDG 82,70, dan terendah yakni Kabupaten Wonosobo dengan IDG 56,61.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2. 40. Grafik IDG Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Komponen penyusun IDG menunjukkan bahwa penurunan terjadi pada perempuan sebagai tenaga Profesional dari angka 52,39 menjadi 49,49 serta Sumbangan Pendapatan perempuan dari 38,98 menjadi 38,96. Sedangkan Keterlibatan Perempuan di parlemen tidak mengalami perubahan yaitu 16,00. Hal ini menunjukkan peran perempuan pada berbagai sektor masih lemah karena disebabkan dari berbagai aspek, yaitu pendidikan formal yang masih rendah dan pengetahuan berdemokrasi serta akses ekonomi yang terbatas.

C. Kepemudaan

Pembangunan kepemudaan merupakan salah satu upaya penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia seutuhnya. Hal ini dapat dilakukan melalui Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemimpinan, Kewirausahaan serta Kepeloporan Pemuda, salah satunya dengan pengembangan diri pemuda mandiri dan pengembangan melalui organisasi kepemudaan.

Dalam usaha mendorong perkembangan kepemudaan kearah yang lebih baik dan sesuai target, kabupaten Wonogiri menjalankan beberapa kegiatan yaitu :

1. Kegiatan organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen dan perencanaan program
2. Kegiatan pemuda pelopor
3. Kegiatan Pemuda yang fasilitasi kader kewirausahaan

Dalam proses perkembangan kepemudaan di kabupaten Wonogiri terjadi fluktuasi dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Jumlah

organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 sebanyak 28 OK dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 92 OK. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 75 OK dikarenakan program diklat purna paskibraka duta Pancasila yang pada tahun 2021 difasilitasi oleh BPIP, dan untuk tahun 2022 tidak ada kegiatan sejenis. Selain itu karena adanya pandemi covid-19 yang akhirnya mengakibatkan penurunan jumlah OK, sampai tahun 2024 realisasi menjadi 20 OK.

Peran pemuda juga didukung dengan adanya Program Pemuda Pelopor. Tapi program tersebut hanya berjalan pada tahun 2019 dan itu mengakibatkan adanya jumlah Pemuda Pelopor tidak mengalami perubahan. Hal tersebut dikarenakan berkurangnya bidang – bidang kepeloporan dengan masing – masing bidang mengirimkan peserta.

Capaian pada angka Jumlah pemuda yang difasilitasi kader kewirausahaan pada tahun 2022 mengalami kenaikan karena kegiatan diusulkan kembali paska pandemi Covid-19 untuk diselenggarakan dari APBD. Dan dari kegiatan tersebut terdata pada tahun 2023 hampir 77 pemuda yang difasilitasi oleh kader wirausaha, dan naik signifikan pada tahun 2024 yaitu menjadi 161 pemuda tumbuh menjadi wirausahawan

Tabel 2. 86. Perkembangan Kepemudaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen dan perencanaan program	28	92	75	59	20
2	Jumlah Pemuda Pelopor	0	0	0	0	5
3	Jumlah pemuda yang difasilitasi kader kewirausahaan	-	0	40	77	161
4	Persentase organisasi pemuda yang aktif	75	100	100	100	100

Sumber: *Dispora Kabupaten Wonogiri 2023*

Upaya peningkatan peran serta aktif dan partisipasi pemuda dalam pembangunan lainnya, yaitu melalui fasilitasi kader kewirausahaan sesuai dengan minat, bakat, dan potensi pemuda, serta potensi daerah. Beberapa

kegiatan yang dilakukan dalam pembentukan kader kewirausahaan yaitu pembimbingan, pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan.

Kewirausahaan tersebut merupakan program unggulan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri dengan fokus pada pemuda miskin di daerah wilayah zona merah.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Rasio Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2023, jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas adalah 863.697 jiwa sedangkan total jumlah penduduk adalah 1.051.085 jiwa, maka Rasio Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun keatas dibanding jumlah penduduk tahun 2023 : 82,17%. Berikut tabel jumlah penduduk tahun 2020-2024

Tabel 2. 87. Jumlah Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	904.972	1.049.292	1.057.087	1.074.471	1.057.495

Sumber: BPS Kab. wonogiri, 2024

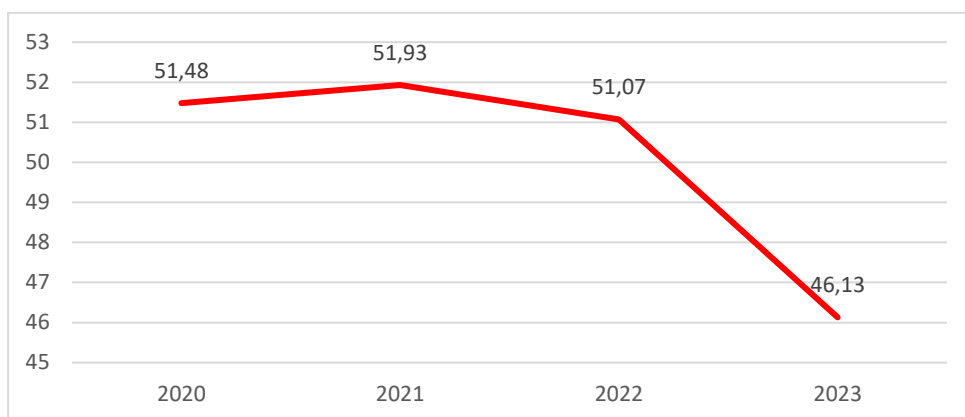
B. Rasio Ketergantungan

Dependency ratio atau rasio ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk produktif dengan penduduk non produktif. Disebut rasio ketergantungan karena penduduk produktif menghasilkan barang dan jasa dari kegiatan ekonomi untuk penduduk non produktif. Semakin tinggi *dependency ratio* menunjukkan bahwa semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai keperluan hidup penduduk non produktif. Lebih lanjut, jika *dependency ratio* semakin rendah menunjukkan bahwa semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai keperluan hidup penduduk non produktif. Berikut ini perkembangan rasio ketergantungan di Kabupaten Wonogiri tahun 2020-2024.

Tabel 2. 88. Rasio Ketergantungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

NO	Tahun	Rasio
1	2020	51,61
2	2021	51,93
3	2022	51,07
4	2023	46,13
5	2024	N/A

Sumber : BPS, 2024



Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri, 2021

Gambar 2. 41. Grafik Perkembangan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2023

Secara keseluruhan, selama kurun waktu 2020-2024 rasio ketergantungan Kabupaten Wonogiri mengalami peningkatan yaitu dari 51,48 (2020) meningkat menjadi 51,93 (2021). Peningkatan ini menandakan bahwa komposisi penduduk non produktif di Wonogiri cenderung terus meningkat sedangkan penduduk produktif menurun. Selain itu, peningkatan rasio ketergantungan ini juga berarti bahwa beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai keperluan hidup penduduk non produktif terus meningkat. Tetapi pada tahun 2022 rasio ketergantungan Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan yang signifikan yakni dari angka 51,93 menjadi 51,07, dan Kembali turun di tahun 2023 menjadi 46,13.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktifitas Ekonomi

A. Dinamika Bisnis

a. Regulasi

Jumlah usaha yang mendapat insentif pajak tahun 2023: 528 Jumlah total usaha tahun 2022: 7.412 Persentase industri yang memanfaatkan kebijakan/regulasi insentif pajak : 3,5%. · keterkaitan antara regulasi insentif pajak untuk mendukung dinamika bisnis adalah regulasi pajak yang terarah, transparan, dan konsisten dapat mendorong dinamika bisnis, menumbuhkan sektor strategis, meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional, serta dalam mendukung Rasio PDRB Industri Pengolahan, Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

b. Kewirausahaan

Berdasarkan data dari Dinas KUKM dan Perindag, IKM tahun 2022 sebesar 9665, IKM tahun 2023 sebesar 9952, Jumlah Industri Besar (IB)

2022: 16 dan jumlah Industri Besar (IB) 2023: 13, sehingga persentase pertumbuhan usaha/ industri besar menurun sebesar 18,75%. Terdapat 51 sertifikat TKDN-IK terbit pada Industri Kecil dan 450 sertifikat halal yang terbit pada sistem manajemen produk hasil industri kecil dan menengah tahun 2023.

B. Kapasitas Inovasi

Demi mendukung pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri, diperlukan penyelenggaraan inovasi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi daerah ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Adapun dalam hal ini, telah diterbitkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah Tahun 2024 sebagai payung hukum pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Wonogiri dalam wadah WIA (*Wonogiri Innovation Awards*) bagi perangkat daerah dan KRENOVA (Kreatifitas dan Inovasi) bagi masyarakat.

Kegiatan WIA (*Wonogiri Innovation Awards*) dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut dari PERMENDAGRI Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pengukuran, Penilaian, dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Inovasi Daerah, yang mana output yang dihasilkan akan diteruskan menjadi data untuk penyelenggaraan Indeks Inovasi Daerah/*Innovative Government Award* (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahun. Lebih lanjut, dalam kurun waktu 2020-2024 pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Wonogiri relatif meningkat baik dalam segi kuantitas maupun kualitasnya. Berikut perkembangan serta capaian inovasi Kabupaten Wonogiri.

**Tabel 2. 89. Perkembangan WIA dan KRENOVA Kabupaten Wonogiri
Tahun 2020-2024**

KATEGORI	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Inovasi WIA	309	607	1.268	1.379	850
Jumlah KRENOVA	27	39	59	52	66
Persentase Perangkat daerah berpredikat inovatif	30%	32%	32%	34%	36%
Peringkat Kemendagri IGA	2 (Predikat Terinovatif)	2 (Predikat Terinovatif)	3 (Predikat Terinovatif)	1 (Predikat Terinovatif)	4 (Predikat Terinovatif)

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Wonogiri, 2025

Berdasarkan data dari tabel diatas bahwa tingkat capaian inovasi di Kabupaten Wonogiri mengalami peningkatan setiap tahun. Terlihat bahwa Persentase Perangkat daerah berpredikat inovatif dari tahun 2020-2024 senantiasa mengalami peningkatan. Implementasi inovasi di Kabupaten Wonogiri diharapkan dapat mendorong pembangunan daerah yang memberikan

manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Wonogiri.

a. Interaksi dan Keberagaman

Implementasi Program Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kab. Wonogiri Sudah ada Roadmap SIDa Terintegrasi dengan RPJMD lengkap dengan rencana aksi dan telah menghasilkan output produk inovasi dan telah terbentuk kluster inovasi. Keberadaan dan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah (PUD) sudah terdapat dalam dokumen RPJMD. Dalam pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah (PUD) telah terjadi kolaborasi ABG yang efektif mendorong dihasilkannya kluster inovasi berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD).

Pada tahun 2023 terdapat sejumlah 44 perjanjian kerjasama/ kesepakatan bersama hasil kolaborasi antara Perguruan tinggi, Lembaga Swasta, Industri, dan Lembaga litbang dalam program pengembangan teknologi dan inovasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023, Kabupaten Wonogiri memperoleh indeks 91,72 dengan predikat sangat inovatif.

b. Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Wonogiri memiliki 5 Perangkat Daerah Kelitbangan dan perguruan tinggi diantaranya BAPPERIDA, Sekolah Tinggi Agama Budha, Sekolah Tinggi Agama Islam Muria Astuti, Sekolah Tinggi Agama Kristen Bina Muda Wirawan Wonogiri, Akademi Keperawatan Giri Satria Husada Wonogiri. Terdapat 64 peneliti dari lembaga litbang dan perguruan tinggi dengan 103 artikel jurnal yang dipublikasikan, sehingga persentase jumlah peneliti di Perguruan Tinggi dan perangkat daerah kelitbangan dibanding hasil penelitian yang dipublikasikan dalam 2 tahun terakhir di Kabupaten Wonogiri adalah 123%. Anggaran penelitian dan pengembangan pada tahun 2021 adalah Rp 557.788.690, total APBD adalah Rp 2.475.192.790.863 sehingga persentase anggaran penelitian dan pengembangan terhadap APBD adalah 0,022%.

c. Komersialisasi

Terdapat 8 perguruan tinggi dan institusi kelitbangan yang telah melakukan komersialisasi produk inovasi. Kondisi Pusat Unggulan Iptek (PUI) dan Techno Park di Kabupaten Wonogiri sudah pada tahap pendirian dan pengelolaan PUI, Posyantek sebagai salah satu pusat unggulan IPTEK di Kabupaten Wonogiri yang menjadi tempat display dan juga menjual hasil

teknologi tepat guna hasil produk inovator di Kabupaten Wonogiri, pengelolaan dan pembinaan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Selain itu juga ada Rumah Kreatif Wonogiri, pengelolaan dilakukan oleh Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri. Hasil inovasi produk juga telah dikomersialisasikan. Dan telah terjalin kerjasama antara akademisi, bisnis dan masyarakat dan pengembangan pusat unggulan Iptek di Kabupaten Wonogiri.

C. Kesiapan Teknologi

a. Telematika

Berdasarkan data dari BPS, Persentase Penduduk di Kabupaten Wonogiri yang menggunakan HP/telepon/Smartphone tahun 2023: 78,14% dan Proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Wonogiri tahun 2023: 66,99%.

b. Teknologi

Terdapat ≥ 70 Produk Inovasi Teknologi yang sudah dikomersialisasikan di Kabupaten Wonogiri.

D. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat dilihat dari penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan TPAK (%). Berikut tabel rincian mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari tahun 2020-2024.

Tabel 2. 90. Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

No	Tahun	Penduduk Usia Kerja	Angkatan Kerja	TPAK (%)
1	2020	780.177	582.733	74,69
2	2021	783.993	573.025	73,09
3	2022	787.488	589.581	74,86
4	2023	856.047	713.252	82,45
5	2024	868.342	675.111	77,75

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja cenderung fluktuatif, sempat naik pada tahun 2020 dan kembali turun di tahun 2021 dan naik lagi di tahun 2022 dan 2023. Namun, di tahun

2024 mengalami penurunan. Hal yang menyebabkan terjadinya penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2024 dikarenakan lapangan kerja yang terbatas, adanya perubahan status penduduk dari kategori angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja, dan tidak sesuainya antara permintaan tenaga kerja dan kebutuhan calon tenaga kerja. Selain itu juga dikarenakan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor industri tekstil dan juga dari pencari kerja yang didominasi oleh generasi Z yang lebih pilih memilih pekerjaan dan terbatasnya softskill yang dimiliki.

E. Produktivitas Sektor Peternakan Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan data jumlah pemotongan ternak, produksi daging, dan produksi telur periode 2020–2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan pada beberapa komoditas. Pemotongan sapi potong cenderung menurun dari 19.036 ekor pada tahun 2020 menjadi 15.913 ekor di tahun 2024, sejalan dengan produksi daging sapi yang juga sedikit menurun dari 3,6 juta kg menjadi 3,34 juta kg. Sebaliknya, ayam ras pedaging menunjukkan peningkatan pesat, terutama pada tahun 2023 dan 2024, dengan jumlah pemotongan melonjak dari 1,56 juta ekor di tahun 2021 menjadi lebih dari 10,49 juta ekor di tahun 2024, yang berdampak pada produksi daging ayam ras pedaging naik drastis hingga mencapai 11,69 juta kg.

Untuk komoditas kambing dan domba, jumlah pemotongan berfluktuasi dengan tren cenderung menurun, yang diikuti dengan penurunan produksi daging. Produksi daging kambing yang semula 1,38 juta kg di tahun 2020 turun menjadi 577 ribu kg di tahun 2024, sedangkan domba dari 391 ribu kg pada tahun 2020 menjadi 220 ribu kg di tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dominasi sumber daging dari ternak ruminansia kecil menuju unggas, khususnya ayam ras pedaging, yang semakin menjadi tulang punggung ketersediaan daging.

Sementara itu, produksi telur menunjukkan dinamika berbeda. Produksi telur ayam petelur cenderung menurun dari 1,7 juta kg pada tahun 2020 menjadi 1,18 juta kg pada tahun 2024. Namun, produksi telur ayam buras mengalami peningkatan signifikan dari 457 ribu kg di tahun 2020 hingga mencapai 1,16 juta kg pada 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 980 ribu kg pada 2024. Produksi telur itik relatif stabil namun menurun tipis dari 207 ribu kg menjadi 170 ribu kg dalam periode lima tahun, sedangkan telur puyuh menunjukkan tren peningkatan dari 29 ribu kg menjadi 36 ribu kg. Hal ini menggambarkan adanya diversifikasi sumber protein hewani dari unggas yang

semakin beragam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tabel 2. 91. Jumlah Pemotongan Ternak Tahun 2020 S/D 2024

No	Komoditas	Satuan	Jumlah Pemotongan Ternak				
			Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
1	Sapi Potong	Ekor	19.036	16.627	15.939	16.205	15.913
2	Kerbau Potong	Ekor	-	-	-	-	-
3	Kuda	Ekor	-	-	-	-	-
4	Kambing	Ekor	72.798	40.212	41.291	30.994	33.948
5	Domba	Ekor	26.073	15.570	18.046	18.458	14.723
6	Babi	Ekor	-	-	-	-	-
7	Ayam Ras Pedaging	Ekor	2.355.598	1.560.317	1.564.020	6.837.728	10.492.250
8	Ayam Buras	Ekor	2.096.924	2.015.737	1.993.140	1.604.617	1.614.209

Tabel 2. 92. Jumlah Produksi Daging Tahun 2020 S/D 2024

No	Komoditas	Satuan	Produksi Daging				
			Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
1	Sapi Potong	kg	3.616.840	3.408.535	3.347.190	3.403.050	3.341.730
2	Kambing	kg	1.383.162	683.604	701.947	526.898	577.116
3	Domba	kg	391.095	233.550	270.690	276.870	220.845
4	Ayam Ras Pedaging	kg	2.625.526	1.248.254	1.251.216	7.621.263	11.694.556
5	Ayam Buras	kg	1.677.539	2.237.468	2.202.385	1.283.694	1.291.367

Tabel 2. 93. Jumlah Produksi Telur Tahun 2020 S/D 2024

No	Komoditas	Satuan	Produksi Telur				
			Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
1	Ayam Petelur	kg	1.706.333	1.545.882	1.915.535	1.342.359	1.183.608
2	Ayam Buras	kg	457.989	1.051.530	1.064.468	1.160.079	980.225
3	Itik	kg	207.696	181.091	181.165	176.896	170.864
4	Puyuh	kg	29.445	27.444	30.446	29.708	36.131

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Kabupaten Wonogiri telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru guna mendorong pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Penerapan Ekonomi Hijau Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Wonogiri tahun 2024, pemerintah daerah menekankan pentingnya sinergi dalam penguatan riset dan inovasi, penerapan ekonomi hijau, pembangunan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.

Salah satu implementasi nyata dari ekonomi hijau di Wonogiri adalah pengelolaan desa wisata dengan konsep ramah lingkungan. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah, dan institusi pendidikan dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan.

Selain itu, upaya konservasi melalui penataan sabuk hijau (green belt) di sekitar Bendungan Wonogiri juga telah dilakukan. Inisiatif ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlanjutan sumber daya air di wilayah tersebut.

Ekonomi hijau tidak terlepas dari pemanfaatan energi hijau yaitu energi yang memanfaatkan sumber dari air, angin dan tenaga surya. Dalam pelaksanaan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru total penggunaan energi listrik di Kabupaten Wonogiri selama tahun 2024 adalah 527.265.920 kWh. Sedangkan ketersediaan sumber energi baru terbarukan di Kabupaten Wonogiri sesuai data Kementerian ESDM adalah sebagai berikut

Tabel 2. 94 Komoditas EBT di Kabupaten Wonogiri

Potensi Angin		Potensi Surya		Potensi Hidro		Potensi Bioenergi									Potensi Panas Bumi					
						Potensi Biomassa Existing Limbah Industri						Potensi Biomassa Existing Produk Utama		Potensi Biomassa Pengembangan	Cadangan				Total Potensi Panas Bumi	
Onshore	Offshore	PLTS	PLTS Terapung	PLTA RoR	PLTA Bendungan	Gu la	Ka yu	Kel ap a Sa wit	Padi	Pulp dan Kerta s	Tapio ka	Samp ah Kota Tekni s	Samp ah Kota Teorit is	Hutan Produk si Kritis	Spekul atif	Hip ote tik	Mu ng kin	Ter du ga	Te rb u kti	
MW	MW	GWp	MW	MW	MW	M W	M W	M W	MW	MW	MW	MW	MW	Ha	MW	M W	M W	M W	M W	MW
753,0	3.347,0	4,0	310,0	3,4	-	-	-	-	-	-	-	2,2	7,3	428,1	-	-	-	-	-	-

Sumber: Kementerian ESDM

Berdasarkan dokumen EBT KABUPATEN WONOGIRI, berikut adalah analisis potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ada di Kabupaten Wonogiri, disajikan berdasarkan jenis sumber energi:

1. Potensi Energi Angin
 - a. Total Potensi: 753,0 MW
 - b. Catatan: Angka ini menunjukkan potensi energi angin cukup besar dan dapat dimanfaatkan melalui pengembangan turbin angin, terutama di daerah dengan kontur tinggi atau perbukitan.
2. Potensi Energi Surya (PLTS)
 - a. Onshore (Darat): 3.347,0 MW
 - b. Offshore (Laut): Tidak tercatat
 - c. PLTS Terapung: 4,0 GWp (Gigawatt peak)
 - d. Catatan: Potensi surya sangat besar, cocok untuk pemanfaatan teknologi panel surya baik di atap (rooftop) maupun pembangkit skala besar, termasuk PLTS terapung di waduk.

3. Potensi Energi Hidro
 - a. PLTA RoR (Run of River): 310,0 MW
 - b. PLTA Bendungan: 3,4 MW
 - c. Catatan: Potensi sungai-sungai di Wonogiri cukup besar untuk pembangkit tipe run of river, meski potensi bendungan masih kecil.
4. Potensi Bioenergi

Terdapat dari beberapa jenis biomassa, baik yang sudah ada maupun yang bisa dikembangkan:

 - a. Biomassa dari Limbah Industri:
 - Pulp dan Kertas: Tidak tersedia
 - Tapioka: Tidak tersedia
 - b. Biomassa dari Produk Utama:
 - Gula: Tidak tersedia
 - Kayu: Tidak tersedia
 - Kelapa Sawit: Tidak tersedia
 - Padi: Tidak tersedia
 - c. Biomassa dari Sampah Kota:
 - Sampah Kota Teknis: 2,2 MW
 - Sampah Kota Teoritis: 7,3 MW
 - d. Biomassa dari Pengembangan:
 - Hutan Produksi Kritis: 428,1 Ha
5. Potensi Energi Panas Bumi (Geothermal)
 - a. Total Potensi: Tidak tercantum angka pasti, tetapi terbagi dalam kategori:
 - Spekulatif, Hipotetik, Mungkin, Terduga, Terbukti
 - b. Catatan: Tidak ada data kuantitatif (dalam MW), namun pengelompokan tersebut menunjukkan klasifikasi tingkat keyakinan terhadap keberadaan sumber panas bumi.

Penerapan Ekonomi Biru: Meskipun Kabupaten Wonogiri tidak memiliki wilayah laut, prinsip ekonomi biru yang menekankan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya perairan tetap relevan, terutama dalam pengelolaan sumber daya air tawar dan pengembangan sektor perikanan darat. Implementasi konsep ini dapat mencakup budidaya perikanan berkelanjutan, konservasi sumber daya air, dan pengembangan ekowisata berbasis perairan.

Penerapan ekonomi biru di Wonogiri sejalan dengan kebijakan nasional yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekologi dan ekonomi

dalam pengelolaan sumber daya perairan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya perairan secara berkelanjutan.

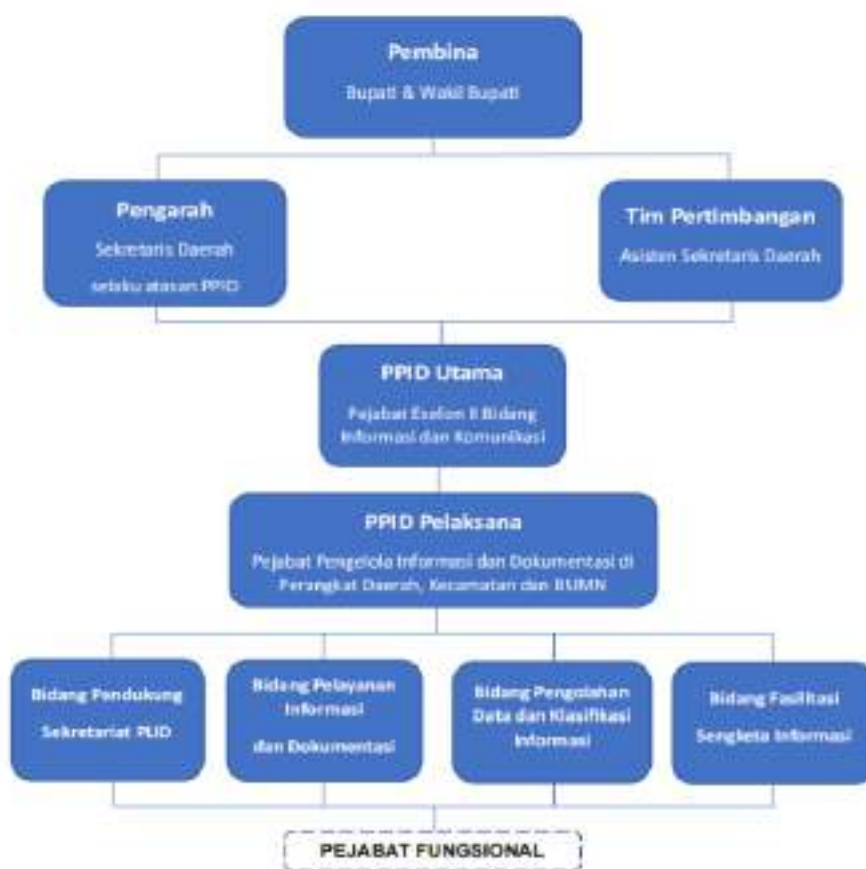
Melalui berbagai inisiatif tersebut, Kabupaten Wonogiri berupaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memadukan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau dan biru.

2.1.3.4 Transformasi Digital Komunikasi dan Informatika

Pemberlakuan Keterbukaan informasi publik adalah sebuah kondisi dimana hak masyarakat atas informasi terpenuhi. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan good governance. Artinya, pemerintahan yang baik sudah seharusnya memberikan jaminan kepada masyarakatnya untuk bebas mendapatkan informasi publik yang sesungguhnya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam menjalankan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah dan mudah. Keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wonogiri dimulai pada tahun 2014 dengan penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di Wonogiri merupakan apresiasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dukungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Wonogiri.

Tahun 2017 susunan PPID Kabupaten Wonogiri mengalami perubahan karena pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri. Perubahan ini ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati Nomor 94 Tahun 2017. Dalam rangka memperlancar pelayanan informasi publik, ditetapkan pula Peraturan Bupati Wonogiri tentang SOP Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Wonogiri yang diatur dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 57 Tahun 2021 yang mengatur tentang proses dan jenis pelayanan informasi, diantaranya pelayanan informasi melalui media dan pelayanan secara langsung dengan menggunakan atribut form permohonan informasi di ruang pelayanan PPID.

Kelembagaan PPID kembali mengalami perubahan seiring dengan terbitnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, selanjutnya dilakukan Penunjukan PPID melalui SK Sekretaris Daerah Nomor 92 Tahun 2022 yang mengubah penyebutan PPID Pembantu menjadi PPID Pelaksana. Berikut adalah struktur Organisasi PPID Kabupaten Wonogiri :



Gambar 2. 42. Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

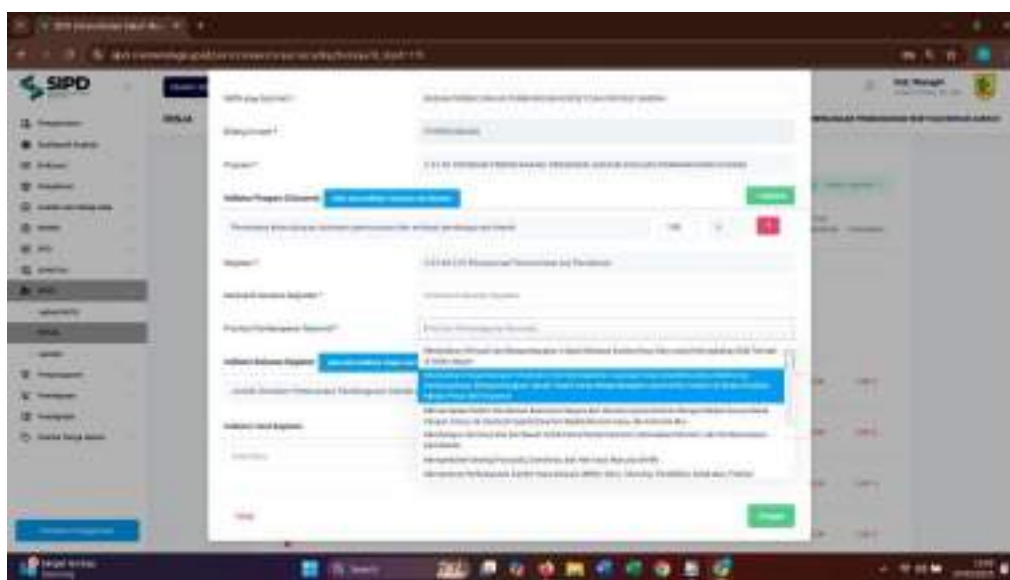
Pada tahun 2024 ada OPD yang melapor kepada PPID. Dan Tingkat laporan OPD kepada PPID adalah sejumlah 53 Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri seluruhnya telah melaporkan DIP dan 52 Perangkat Daerah yang melaporkan LLID, sehingga prosentase Perangkat Daerah yang melapor DIP kepada PPID adalah sebesar 100% dan 98,11 % Perangkat Daerah yang melapor LLID kepada PPID.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri mulai tahun 2020 telah memanfaatkan aplikasi E-Planning atau Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang memfasilitasi Bapperida dan SKPD dalam penyusunan program kerja. E-planning merupakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah) berisi tentang menu-menu RPJMD selama 5 tahunan bersama Rencana Kerja Tahunan (RKPD) yang dimanifestasikan kedalam Renstra dan Renja SKPD yang disertai dengan

laporan-laporan yang digunakan dalam penyusunan dokumen SKPD dan Pemerintah daerah. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien dan terintegrasi. Alamat Sistem informasi tersebut adalah <https://wonogirikab.sipd.kemendagri.go.id/daerah>.

Dalam perencanaan pembangunan, Kabupaten Wonogiri telah menerapkan sistem *e-planning*. Pemerintah kabupaten Wonogiri telah membangun dan menggunakan aplikasi *e-planning* yang berupa open source local dalam penyusunan dokumen perencanaan, dan sejak dirilisnya aplikasi *e-planning* dari Kemendagri yaitu SIPD RI tahun 2021, maka penyusunan perencanaan daerah sudah menggunakan aplikasi SIPD RI Kemendagri.

Dalam aplikasi *e-planning* SIPD RI Kemendagri sudah terintegrasi antara dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah (PD), dokumen RKPD dan dokumen Renja Perangkat Daerah (PD), hal itu bertujuan untuk menjaga keterkaitan dan konsistinsi antar Dokumen Perencanaan. Selain itu pemanfaatan *e-planning* untuk *tagging* Prioritas Nasional (PN), penggunaan aplikasi SIPD RI, bertujuan juga untuk menjaga keterkaitan antara prioritas Kabupaten Wonogiri, dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Nasional, jadi aplikasi SIPD RI sudah dapat dipergunakan untuk *tagging* Prioritas Nasional.



Gambar 2. 43. Screenshot Menu Tagging dengan Prioritas Nasional di Aplikasi SIPD RI

Untuk pengelolaan keuangan Pemerintahan Kabupaten Wonogiri telah menyediakan informasi APBD hingga ke level kegiatan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui website www.wonogirikab.go.id pada

menu "Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala".

Pemerintahan Kabupaten Wonogiri telah membangun sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui website www.wonogirikab.go.id sebagai wujud peningkatan keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Wonogiri seluruhnya telah memiliki website dan telah melakukan updating data di website yang dimiliki. Pembaharuan informasi dan data yang disajikan dalam website setiap Perangkat Daerah perlu dilakukan agar informasi yang disajikan dapat aktual, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dan data yang akurat.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya serta sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah. Pemantauan dan Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 4 (empat) kategori yang menjadi domain dan aspek penilaian penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE dan layanan SPBE. Pemantauan dan Evaluasi SPBE telah dilakukan mulai dari tahun 2018. Hasil dari pemantauan dan evaluasi SPBE Kabupaten Wonogiri dari tahun ke tahun semakin meningkat, berikut capaian Indeks SPBE hasil Pemantauan dan Evaluasi dari Kementerian PANRB tahun 2020-2024 diawali dari tahun 2019 dengan predikat cukup dan pada tahun 2023 dengan predikat sangat baik.

Tabel 2. 95. Indeks Sistem Pembangunan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Nilai	Perdikat
1	2020	2,79	Baik
2	2021	2,80	Baik
3	2022	3,34	Baik
4	2023	3,94	Sangat Baik
5	2024	4,2	Memuaskan

Sumber : Sekda Kab. Wonogiri, 2024

Dalam melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika , utamanya terkait dengan keterbukaan informasi publik, telah banyak layanan yang diwujudkan , seperti yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 96. Daftar Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri tahun 2024

No	Nama Aplikasi	Sifat		Alamat Domain (On Line)	Dimanfaatkan untuk Layanan	Spesifikasi Teknis	Pengelola
		On Lin e	Off Lin e				
1	SITAMPPAN	V		https://sitamppan.wonogirikab.go.id/	Untuk menghitung penerimaan jumlah Tambahan penghasilan ASN	Web Based	Bagian Organisasi SETDA
2	SIKALEM	V		https://sikalem.wonogirikab.go.id/	Untuk mengetahui kebutuhan ASN yang akan mengisi jabatan atau kekosongan dalam Perangkat Daerah	Web Based	Bagian Organisasi SETDA
3	JDIH	V		https://jdih.wonogirikab.go.id/	Sebagai layanan penyebarluasan informasi produk hukum di Kabupaten Wonogiri	Web Based	Bagian Hukum SETDA
4	E-Sakip	V		http://sakup.wonogirikab.go.id/		Web Based	Bagian Organisasi SETDA
5	Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	V		https://lpse.wonogirikab.go.id/eproc4/	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan cara mempercepat proses pengadaan	Web Based	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri

No	Nama Aplikasi	Sifat		Alamat Domain (On Line)	Dimanfaatkan untuk Layanan	Spesifikasi Teknis	Pengelola
		On Line	Off Line				
6	SIPKD BMD (Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah)	V		http://11.12.12.249/SIPKDBMD/	Sistem informasi manajemen aset merupakan sistem manajemen pendataan dan pengelolaan aset yang dibangun secara terintegrasi yang difokuskan pada pendataan dan pengelolaan atas aset. Dengan menggunakan sistem ini seluruh asset yang dimiliki oleh suatu unit kerja/SKPD akan dapat dipantau mengenai lokasi, nilai, mutasi serta kondisinya. Sistem informasi aset dipersiapkan untuk kebutuhan perencanaan, pengadaan, pencatatan, penggunaan dan pengamanan barang milik daerah.	Web Based	BPKD
7	SIMHP (Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan)	V		https://simhp.inspektorat.wonogirikab.go.id/login	Untuk melihat jumlah temuan dan jumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	Web Based	Inspektorat
8	SISWASKE UDES (Sistem Pengawasan Keuangan Desa)		V		Untuk menentukan prioritas pengawasan pemerintah desa	Desktop	Inspektorat
9	Gerakan Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Inovasi Daerah Wonogiri (Gerbang Indah)	V		https://gerbangindah.wonogirikab.go.id/	Gerbang Indah berfungsi sebagai wadah bagi para inovator untuk mendaftarkan inovasinya	Web Based	Bapperida
10	Data Corner Bappeda dan Litbang	V		https://datacornerbappeda.wonogirikab.go.id/	Data Corner berfungsi sebagai aplikasi wadah dokumen - dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan oleh Bapperida, untuk memudahkan masyarakat umum mengunduh dokumen tersebut	Web Based	Bapperida

No	Nama Aplikasi	Sifat		Alamat Domain (On Line)	Dimanfaatkan untuk Layanan	Spesifikasi Teknis	Pengelola
		On Line	Off Line				
11	Go Sambang	V		https://datasektoral.wonogirikab.go.id/	Sebagai katalog data terbuka yang dimaksudkan untuk memberikan data yang mudah dibagikan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pelaksanaan pembangunan.	Web Based	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Metagiri	V		https://metagiri.wonogirikab.go.id/	Sebagai pedoman metadata indikator statistik sektoral di Kabupaten Wonogiri yang dimanfaatkan untuk menghindari duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data, mendukung terwujudnya Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif dan efisien, memperoleh data secara teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat mencegah kesalahan dalam penyampaian data.	Web Based	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Smart PPID	V		https://ppid.wonogirikab.go.id/	Merupakan sarana layanan permohonan Informasi secara online	Web Based	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	Geoportal Kabupaten Wonogiri	V		https://geoportal.wonogirikab.go.id/	Sebagai acuan bagi perencanaan pembangunan daerah berbasis spasial serta mendukung kebijakan Satu Peta.	Web Based	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Portal Wonogiri Smart City	V		https://smartcity.wonogirikab.go.id/	Tujuan Portal Wonogiri Smartcity adalah untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Wonogiri.	Web Based	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Website Wonogirikab	V		https://wonogirikab.go.id/	Tujuan adanya website ini tak lain adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi penting dan meningkatkan pelayanan.	Web Based	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Website CSIRT	V		https://csirt.wonogirikab.go.id/	Sebagai web profile , artikel, layanan, kontak dan informasi dari kegiatan CSIRT (Computer Security Incident Response Team) di Kabupaten Wonogiri	Web Based	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Nama Aplikasi	Sifat		Alamat Domain (On Line)	Dimanfaatkan untuk Layanan	Spesifikasi Teknis	Pengelola
		On Line	Off Line				
18	Helpdesk Diskominfo Wonogiri	V		https://helpdesk.wonogirikab.go.id/	Memper memudahkan diskominfo menyediakan informasi dan bantuan kepada masyarakat maupun OPD. Tujuan Diskominfo menyediakan layanan website helpdesk.wonogirikab.go.id di antaranya untuk memberikan solusi atas permasalahan pelanggan terkait fungsi penyelenggaraan sistem dan jaringan di Kabupaten Wonogiri	Web Based	Dinas Komunikasi dan Informatika
19	Mitra Desa	V		https://mitradesa.wonogirikab.go.id/	Untuk menghimpun data pelaku usaha yang dibutuhkan untuk membuat izin sebelum diinput ke OSS	Web Based	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian)	V		https://bkdwonogirikab.simpeg.id/sec_users/login	Untuk menyajikan data kepegawaian ASN yang up to date yang digunakan untuk keperluan manajemen ASN.	Web Based	BKPSDM
21	METEKU (Sistem manajemen talenta dan kepegawaian unit)	V		https://meteku.bkpsdm.wonogirikab.go.id/	Untuk manajemen kepegawaian antara lain pendataan profil pegawai ASN, kenaikan pangkat, tugas belajar, serta pencantuman ijin gelar akademis secara papperless	Web Based	BKPSDM
22	GETI (Gerbang Elektronik Cuti)	V		https://geti.wonogirikab.go.id/auth	Untuk manajemen pengajuan cuti dengan formulir permohonan cuti secara elektronik	Web Based	BKPSDM
23	AMPYANG (Aplikasi Manajemen Pensiun Yang Akuntabel dan Nyaman bagi Pegawai)	V		https://ampyang.wonogirikab.go.id/login	Untuk manajemen pengurusan Pensiun ASN secara Elektronik	Web Based	BKPSDM
24	HADIRKU	V		https://e-absensi.wonogirikab.go.id/web/	Untuk pencatatan kehadiran seluruh ASN pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri secara elektronik berbasis android	Mobile	BKPSDM
25	JENANG KETAN	V		https://jenangketan.wonogirikab.go.id/	Untuk manajemen e-learning pengembangan Kompetensi ASN	Web Based	BKPSDM
26	AyoKerjo	V		https://ayokerjo.wonogirikab.go.id/	Untuk memfasilitasi masyarakat / pencari kerja melalui kegiatan pelatihan upgrading skill dalam rangka peningkatan daya saing dalam dunia kerja.	Web Based	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
27	SIPOLANGIRI	V		http://sipolangiri.wonogirikab.go.id/v1/	SIPOLANGIRI berfungsi untuk penyediaan informasi dan layanan infrastruktur di Wonogiri	Web Based	DPU

No	Nama Aplikasi	Sifat		Alamat Domain (On Line)	Dimanfaatkan untuk Layanan	Spesifikasi Teknis	Pengelola
		On Line	Off Line				
28	SIPENMARU (Sistem Informasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang)	V		https://sipenmaru.wonogirikab.go.id/	Untuk mempermudah stakeholder dalam menganalisa dan mengambil kebijakan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah terkhusus terkait penataan ruang wilayah	Web Based	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
29	Aplikasi Sistem Terpadu Informasi Kesejahteraan Rakyat (ASTIKA)	V		https://astika.wonogirikab.go.id/	ASTIKA menjadi media untuk menghimpun, mengelola dan menampilkan data serta informasi kesejahteraan sosial .	Web Based	Dinas Sosial
30	TIC (Tourism Information Center)	V		https://tic.wonogirikab.go.id/	memberikan informasi kepariwisataan bagi pengunjung wisata	Web Based	Dispora
31	TELUNJUK SAKTI	V		https://telunjuk.sakti.wonogirikab.go.id/telunjuksakti/	Untuk mengajukan permohonan layanan Administrasi Kependudukan	Mobile	DISDUKCAPIL Kab Wonogiri
32	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)		V		Untuk menginput data administrasi kependudukan	Desktop	DISDUKCAPIL Kab Wonogiri
33	Kadal Sakti	V		https://disdukcapil.wonogirikab.go.id/potensi/kadal-sakti	Untuk pemanfaatan data yang bekerja sama dengan DINSOS, DINKES, dan BPJS	Desktop	DISDUKCAPIL Kab Wonogiri
34	e-Retribusi Pasar (REPA)	V		https://eretribusi.pasar.wonogirikab.go.id/	Pemungutan/penarikan retribusi pasar rakyat secara elektronik	Web Based	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
35	SIMPUS	V		Local host 192.168.1.25	Pelayanan Kesehatan Gratis berfungsi bagi masyarakat untuk meratakan layanan kesehatan sehingga masyarakat akan mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak dan memadai.	Web Based	DINAS KESEHATAN
36	Cinta Mutiara Keluarga	V		https://cmk.wonogirikab.go.id/	Cinta Mutiara Keluarga berfungsi untuk memantau data ibu hamil dan status gizi balita terkait kondisinya dalam rangka menurunkan AKI dan AKB untuk menjadi data penanganan stunting dalam rangka menuju Zero Penambahan Stunting 2024	Mobile	DINAS KESEHATAN

No	Nama Aplikasi	Sifat		Alamat Domain (On Line)	Dimanfaatkan untuk Layanan	Spesifikasi Teknis	Pengelola
		On Line	Off Line				
37	E-Kir (Aplikasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Elektronik)	V		http://www.ekir.wonogirikab.go.id/	Aplikasi berbasis website yang digunakan untuk pelaksanaan Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang mencakup tahap pendaftaran online, pembayaran retribusi non tunai, pengujian kendaraan, pengesahan hasil uji dan pencetakan bukti lulus uji elektronik	Web Based	Dinas Perhubungan
38	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	V		11.12.13.50	SIPKD berfungsi untuk mengelola pelaksanaan dan penatausahaan APBD pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri	Web Based	BPKD
39	E-Pajak	V		https://e-pajak.wonogirikab.go.id/	Aplikasi E-Pajak dan SIMPDRD berfungsi untuk mengelola pajak daerah dan retribusi daerah pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri	Web Based	BPKD
40	Pagar Hijau	V		https://pagarhijau.wonogirikab.go.id/	Dengan adanya sistem aplikasi "PAGAR HIJAU" pelaku usaha nantinya tidak akan terbebani dengan administrasi manual yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha mulai dari checklist mandiri, tindak lanjut monitoring maupun pelaporan, pelaku usaha cukup dengan mengakses PAGAR HIJAU. Sementara bagi OKKPD Kabupaten sendiri diharapkan dapat membantu dalam teknis penilaian maupun pengendalian dokumen pengawasan.	Web Based	Dinas Pertanian
41	i-wonogiri	V		https://play.google.com/store/search?q=iwonogiri&c=apps	Untuk menyajikan data koleksi perpustakaan, data anggota perpustakaan, data kunjungan perpustakaan, data peminjaman buku	Mobile	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
42	Aplikasi Siber Stunting (Sikat Bersih Stunting)	V		https://infostunting.wonogirikab.go.id/	Aplikasi Siber Stunting digunakan untuk mendeteksi dini kondisi anak dalam kategori stunting atau tidak dan melaporkan secara mandiri oleh masyarakat	Mobile	Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri
43	Soediran Online	V		https://pendaftaran.rsudsoediranms.com/	Soediran Online berfungsi untuk pendaftaran online pasien RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso secara elektronik berbasis android	Mobile	RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso

No	Nama Aplikasi	Sifat		Alamat Domain (On Line)	Dimanfaatkan untuk Layanan	Spesifikasi Teknis	Pengelola
		On Line	Off Line				
44	SIPAT GASCAR	V		https://sikomcat.mas.wonogirikab.go.id/	Untuk menerbitkan surat perijinan permohonan	Web Based	Bakesbangol
45	CAT ORMAS	V		https://sikomcat.mas.wonogirikab.go.id/	Untuk menerbitkan surat keterangan terdaftar	Web Based	Bakesbangol

Sumber: Dinas Kominfo Wonogiri, 2024

Kinerja pada urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020-2024 dapat dilihat seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 97. Kinerja urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024

No	Urusan	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Domain dan Sub Domain wonogirikab.go.id	67	91	105	105	105	Website Kabupaten Wonogiri, OPD, Kecamatan + Aplikasi (OPD dan Kecamatan)
2	Jumlah Wifi di area Publik	2	2	3	3	3	titik (Alun-alun, Pendopo Kabupaten Wonogiri, Mal Pelayanan Publik)
3	Terwujudnya Aplikasi interaktif dan integrasi untuk mewujudkan e gov dalam rangka smart city	13	17	25	29	29	SIPD SIPKD LPSE METEKU GETI HADIRKU JENANG KETAN AMPYANG SIKALEM SIMANIS SIPKD ASET SIMHP E-SAKIP SITAMPPAN SP4N LAPOR GO SAMBANG METAGIRI GEOPORTAL JDIH KAB JDIH DPRD TELUNJUK SAKTI E-PAJAK E-KIR ASTIKA CMK MITRA DESA E SAKIP ASTIKA TIC Wonogiri e-KIR
4	Jumlah Jaringan Komunikasi		86	87	87	87	LAN di semua Perangkat Daerah dan sebagian puskesmas dan sekolah + MPP
5	Jumlah surat kabar nasional/lokal	13	13	13	13	13	Solopos, Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka, Jawapos radar solo, www.timlo.net , www.joglosemarnews.com , www.suarabaru.net , www.detik.com , www.kompas.com , www.rmoljateng.com ,

No	Urusan	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
							www.solopos.com , Tribun Jateng, www.tribunsolo.com
6	Jumlah penyiaran radio / tv nasional dan lokal	16	16	24	24	24	TV one, SCTV, Metro TV, MNC, TA TV solo, MTA TV, LPPL RGS Wonogiri, GIS FM, SGP FM, Khalda FM, Suara Sakti FM, Suara Bengawan FM, Radio Gajah Mungkur FM, TA FM, Jimbaran FM, RGM X Channel
7	Presentase pelayanan informasi publik	100%	100%	100%	100%	100%	Kabupaten Wonogiri masuk kategori informatif
8	Presentase tertanganinya pengaduan masyarakat	100%	100%	100%	90%	100%	Aplikasi LAPOR : Semua laporan pengaduan yang masuk, diproses, dan diselesaikan

Sumber: Dinas Kominfo Wonogiri, 2024

Sampai dengan tahun 2024 ada penambahan 3 (tiga) sub domain baru, yaitu untuk Aplikasi khayangan, Website Kelurahan, dan Aplikasi Monitoring Server dan Jaringan Vendor. Ada pula 17 (tujuhbelas) sub domain yang di suspend dikarenakan tidak ada *traffic* dalam sub domain tersebut. Akan tetapi apabila pemilik subdomain menghendaki membuka suspend maka sub domain tersebut dapat digunakan Kembali.

Penambahan wifi di area publik memang belum terealisasi, tetapi direncanakan akan menambah titik wifi publik di kecamatan secara bertahap. Untuk penambahan aplikasi yang mewujudkan *e-gov* dalam rangka *smart city*, pada tahun 2023 ada 3 aplikasi baru yaitu dashboard eksekutif bupati, Aplikasi Go Nyawiji dan Aplikasi Mitra Desa.

Data surat kabar nasional/lokal dan jumlah penyiaran radio / tv nasional dan lokal belum ada perubahan dari tahun 2022, sehingga pada tahun 2024 masih sama. Untuk persentase pelayanan informasi public mencapai 100 % dikarenakan Kabupaten Wonogiri mencapai nilai melebihi dari target yang telah ditentukan.

Untuk tertanganinya pengaduan masyarakat melalui Aplikasi LAPOR SP4N Semua laporan pengaduan yang masuk pada tahun 2024 ada 62 aduan yang masuk, 62 selesai. Proses adalah diawali dengan diterimanya aduan oleh Admin

Kabupaten (Bagian Organisasi Setda Kab. Wonogiri), selanjutnya sudah mendistribusikan kepada Perangkat Daerah terkait melalui pejabat penghubung, sudah direspon dan ditindaklanjuti untuk mendapatkan penyelesaian, dan menunggu usul, saran, masukan dari pelapor dalam masa tunggu 10 hari dari tanggal tindak lanjut terakhir yang diberikan.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Dalam upaya mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Kabupaten Wonogiri terus memperkuat integrasi antara ekonomi domestik dan global. Integrasi ini diwujudkan melalui pengembangan sektor-sektor unggulan daerah, peningkatan daya saing produk lokal, serta perluasan akses pasar baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kabupaten Wonogiri secara strategis mendorong penguatan **ekonomi domestik** melalui dukungan terhadap UMKM, pengembangan pertanian dan industri pengolahan berbasis potensi lokal, serta pembangunan infrastruktur ekonomi dan konektivitas wilayah. Berbagai program pelatihan, kemudahan perizinan, dan digitalisasi usaha turut memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Di sisi lain, keterhubungan dengan **ekonomi global** didorong melalui peningkatan nilai ekspor produk unggulan seperti kerajinan, hasil pertanian olahan, dan tekstil, serta promosi investasi daerah. Wonogiri juga aktif membangun kemitraan dengan pelaku usaha nasional dan internasional, termasuk dalam memanfaatkan teknologi, modal, dan inovasi dari luar daerah untuk memperkuat kapasitas produksi lokal.

Integrasi ini menciptakan **rantai nilai yang lebih luas**, meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi, serta membuka lapangan kerja dan memperbesar kontribusi sektor ekonomi daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan strategi ini, Wonogiri diarahkan tidak hanya menjadi simpul ekonomi lokal, tetapi juga bagian dari ekosistem ekonomi nasional dan global yang produktif, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

Tabel 2. 98. Nilai PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Wonogiri 2020-2024

JENIS PENGELUARAN PDRB	PDRB Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)									
	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	20.608,07	71%	21.645,46	70,78%	23.859,83	70,82%	26.319,43	71,24%	28.414,58	71%
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	622,17	2%	656,11	2,15%	748,19	2,22%	844,36	2,29%	1.003,26	3%
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.224,17	8%	2.256,91	7,38%	2.313,54	6,87%	2.453,68	6,64%	2.585,32	7%
Pembentukan Bruto	6.115,10	21%	6.544,43	21,40%	6.959,74	20,66%	7.575,35	20,50%	8.079,64	20%
Perubahan Inventori	182,33	1%	145,44	0,48%	167,76	0,50%	184,63	0,50%	134,98	0%
Net Ekspor	-586,51	-2%	-666,9	-2,18%	-366,86	-1,09%	-431,9	-1,17%	-455,86	-1%
PDRB	29.165,54	100%	30.581,45	100,00%	33.692,20	100,00%	36.945,55	100,00%	39.761,92	100%

Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri, 2024

*Tahun 2024 menunggu rilis dari BPS Kab. Wonogiri

Berdasarkan nilai PDRB Menurut Pengeluaran Jenis Pengeluaran pada tahun 2024 terbesar adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang memiliki komposisi nilai PDRB sebesar 28,4 Triliyun Rupiah. Ini memberikan gambaran positif bahwa pasca pandemi COVID-19, pengeluaran konsumsi rumah tangga terus tumbuh secara signifikan. Komponen PDRB Pengeluaran yang juga besar adalah dari jenis Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 8,08 Triliyun Rupiah dan diikuti Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 2,58 Triliyun Rupiah. Pada tahun 2020 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Wonogiri sebesar 6,16 Triliyun Rupiah dan pada tahun 2024 naik menjadi 8,08 Triliyun Rupiah, peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas investasi di sektor unggulan daerah—terutama sektor pertanian, perikanan, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan—yang telah ditetapkan sebagai sektor strategis dalam perencanaan pembangunan daerah Wonogiri. Berkaitan dengan ekspor barang dan jasa, pada tahun 2020 sebesar –586,51 triliyun dan pada tahun 2024 meningkat menjadi –455,86, peningkatan ini dipengaruhi oleh mulai pulihnya kontribusi UMKM dan sektor usaha berbasis komoditas pertanian dalam perdagangan luar daerah, yang turut memperbaiki neraca transaksi ekonomi antar daerah.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah salah satu komponen penting dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan pengeluaran, yang mencerminkan investasi jangka panjang dalam aset tetap.

Ekspor Barang dan Jasa adalah aktivitas menjual barang dan/atau jasa dari suatu negara ke luar negeri untuk mendapatkan devisa. Ekspor merupakan komponen utama dalam PDB (Produk Domestik Bruto) berdasarkan pendekatan pengeluaran, khususnya pada bagian permintaan eksternal (ekspor neto).

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata, Kabupaten Wonogiri mendorong sinergi antara kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada kota sebagai motor ekonomi, tetapi juga menjadikan desa sebagai kekuatan ekonomi baru berbasis potensi lokal.

Kawasan perkotaan, khususnya Kecamatan Wonogiri dan sekitarnya, dikembangkan sebagai pusat pelayanan, perdagangan, industri pengolahan, serta pusat administrasi pemerintahan. Ketersediaan infrastruktur dasar, jaringan jalan yang baik, serta konektivitas antar kecamatan menjadikan kawasan ini strategis untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan sektor formal.

Sementara itu, kawasan perdesaan di Wonogiri memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, kehutanan, serta pariwisata berbasis alam dan budaya. Pengelolaan ekonomi desa didorong dengan pengembangan agropolitan dan ekowisata yang didukung oleh peningkatan kualitas SDM, inovasi teknologi, dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat seperti koperasi dan BUMDes.

Program Mitra Desa hasil kerjasama Pemkab Wonogiri dengan perguruan tinggi dan lembaga pengusaha telah menumbuhkan lebih dari 35.000 Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi usaha mikro dan kecil di desa, dengan cakupan legalitas mencapai 295 desa/kelurahan. BUMDes seperti di Desa Bulusulur telah menjadi penggerak ekonomi lokal melalui unit-unit usaha kreatif seperti desa wisata, kerajinan, pengelolaan air bersih, dan pertanian terpadu.

Desa-desa seperti Paranggupito, Conto, Kepuhsari, Karanglor, dan Sumberejo telah diakui sebagai desa wisata unggulan. Mereka menawarkan paket wisata seni budaya, produk kopi khas, atraksi edukasi, dan agrowisata, yang turut meningkatkan PAD desa dan membuka lapangan kerja lokal.

Kolaborasi antara kawasan kota dan desa difasilitasi melalui pembangunan infrastruktur konektivitas, program industrialisasi berbasis hasil pertanian dan perikanan darat, serta pengembangan kawasan strategis dan unggulan. Strategi ini menjadikan setiap wilayah sebagai simpul pertumbuhan yang saling menguatkan. **Indeks Infrastruktur** adalah **indikator gabungan** yang digunakan untuk mengukur **tingkat ketersediaan dan kualitas prasarana dasar** di suatu wilayah, yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan publik. Indeks ini mencerminkan sejauh mana infrastruktur seperti jalan, listrik, air

bersih, sanitasi, internet, dan transportasi tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat secara merata.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah **ukuran kuantitatif** yang menunjukkan tingkat **kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan kualitas infrastruktur** yang disediakan oleh pemerintah atau penyelenggara layanan publik. Indeks ini biasanya diperoleh melalui **survei persepsi masyarakat**, dan menjadi indikator penting dalam **evaluasi kinerja pelayanan publik**.

Dengan memperkuat peran kota dan desa secara seimbang, Kabupaten Wonogiri menempatkan seluruh wilayah sebagai bagian dari ekosistem ekonomi yang produktif, inklusif, dan berdaya saing, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merata di seluruh penjuru daerah.

Pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan merupakan upaya yang digunakan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan, yang meliputi aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya, dan politik melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Untuk memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-undang Desa dapat dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, dan PDPT dengan gambaran sebagai berikut:

Tabel 2. 99. Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2020-2024

Status Desa	Jumlah (desa) s.d. Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sangat tertinggal	0	0	0	0	0
Tertinggal	0	0	0	0	0
Berkembang	162	141	62	32	8
Maju	76	96	152	166	129
Mandiri	13	14	37	53	114
Total Desa	251	251	251	251	251

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Wonogiri, 2024

Peningkatan persentase Desa Mandiri pada tahun 2020 s.d 2024 di Kabupaten Wonogiri adalah Tahun 2020 = 5,18%; tahun 2021= 5,58%, Tahun 2022 = 14,74%, Tahun 2023= 21,12%, Tahun 2024= 45,42%, menunjukkan tingkat perkembangan Desa yang semakin baik. Pada tahun 2020, tidak ada Desa Tertinggal di Kabupaten Wonogiri, sedangkan status Desa Maju, Desa Berkembang dan Desa Mandiri menunjukkan peningkatan dari tahun

sebelumnya. Pada tahun 2021, Jumlah Desa Mandiri bertambah 1 Desa, dari 13 Desa Mandiri di tahun 2020 menjadi 14 Desa Mandiri di tahun 2021. Kondisi dipengaruhi oleh penggunaan Dana Desa yang masih difokuskan untuk pemulihan kondisi sosial masyarakat pasca Covid-19. Kemudian pada tahun 2022 dan 2023 Jumlah Desa Mandiri meningkat cukup signifikan dan melampaui target yang ditentukan, dan pada tahun 2024 jumlah Desa Mandiri semakin meningkat dari 53 Desa di tahun 2023 menjadi 114 Desa seiring dengan pemanfaatan APB Desa yang berimbang untuk kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Ke depan, pengukuran perkembangan desa tidak lagi hanya mengacu pada status IDM, tetapi akan beralih menggunakan **Indeks Desa** sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan. Perubahan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi desa serta menjadi acuan strategis dalam mendorong percepatan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Pendampingan dan Fasilitasi kepada Pemerintah Desa, fokus kepada upaya mendorong Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Desa Maju menjadi Desa Mandiri sesuai dengan hasil pendataan dan rekomendasi IDM di tahun sebelumnya.

Dan data berikut adalah data Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak Terjangkau dan berkelanjutan tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2. 100. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Tahun 2020-2024

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	SATUAN	REALISASI 2020-2024				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	90,58	90,80	91,01	91,22	99,12

Sumber : Dispera Kab. Wonogiri, 2024

Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Kabupaten Wonogiri menunjukkan peningkatan yang stabil dan signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, capaian berada di angka 90,58%, kemudian mengalami kenaikan bertahap menjadi 90,80% di tahun 2021, 91,01% pada 2022, dan 91,22% di tahun 2023. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2024, dengan lonjakan capaian hingga mencapai 99,12%. Tren ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperluas akses perumahan yang layak bagi masyarakat, baik melalui pembangunan unit baru, program perbaikan rumah

tidak layak huni, maupun dukungan kebijakan pembiayaan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2. 101. Capaian Akses Air Minum di Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Capaian Akses Rumah Tangga Air Minum Layak	88,23	89,82	92,67	93,92
Capaian Akses Rumah Tangga Air Minum Aman	25,94	26,1	26,67	27,61
Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	38,13	42,13	43,07	44,37

Sumber: Dispera, 2024

Berdasarkan data capaian akses air minum di Kabupaten Wonogiri selama periode 2021–2024, terlihat adanya peningkatan yang cukup konsisten pada berbagai indikator. Capaian akses rumah tangga terhadap air minum layak menunjukkan tren positif, dari 88,23% pada tahun 2021, meningkat menjadi 89,82% di tahun 2022, 92,67% di tahun 2023, dan mencapai 93,92% pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memperluas layanan air bersih kepada masyarakat secara merata, sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar serta upaya peningkatan kualitas hidup.

Di sisi lain, capaian akses terhadap air minum aman juga mengalami peningkatan meski masih berada pada angka yang cukup rendah dibandingkan dengan akses air minum layak. Pada tahun 2021, capaian akses air minum aman berada di angka 25,94%, kemudian meningkat menjadi 26,10% di tahun 2022, 26,67% di tahun 2023, dan mencapai 2,61% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan kualitas air yang aman dikonsumsi secara langsung, yang memerlukan intervensi pada sisi pengolahan, pengawasan kualitas, serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

Sementara itu, persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan juga mengalami kemajuan dari 38,13% pada tahun 2021 menjadi 44,37% pada tahun 2024. Ini mencerminkan adanya peningkatan layanan air bersih perpipaan di wilayah perkotaan, meskipun masih terdapat ruang untuk memperluas cakupan layanan agar menjangkau lebih banyak rumah tangga, khususnya di kawasan padat dan wilayah berkembang. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan arah kebijakan yang selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pemenuhan akses air minum layak dan aman bagi seluruh masyarakat.

Tabel 2. 102. Panjang dan Ruas Jalan Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024 Sesuai SK

Tahun	Ruas	Panjang (KM)
2020	302	1357,883
2021	323	1433,530
2022	337	1490,234
2023	355	1471,193
2024	364	1561,410

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum kab. Wonogiri, 2024

Data panjang dan jumlah ruas jalan di Kabupaten Wonogiri menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020 jumlah ruas jalan tercatat sebanyak 302 dengan total panjang 1.357,883 km. Jumlah ruas kemudian meningkat menjadi 323 pada tahun 2021 dengan panjang jalan mencapai 1.433,530 km, dan terus bertambah menjadi 337 ruas dan panjang jalan 1.490,234 km pada tahun 2022. Seiring penambahan ruas menjadi 355, panjang jalan juga bertambah signifikan menjadi 1.471,193 km di tahun 2023 dan mencapai 1.561,410 km pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas infrastruktur konektivitas antarwilayah guna mendukung mobilitas, pertumbuhan ekonomi, dan aksesibilitas masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

A. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang secara keseluruhan, peningkatan harga barang satu atau dua saja belum bisa dikatakan sebagai inflasi. Kenaikan harga secara terus-menerus mengakibatkan daya beli masyarakat menurun akibat kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Inflasi Kabupaten Wonogiri per Desember tahun 2024 adalah 1,77.

Penurunan inflasi di Kabupaten Wonogiri sepanjang tahun 2024 disebabkan beberapa faktor utama anatar lain :

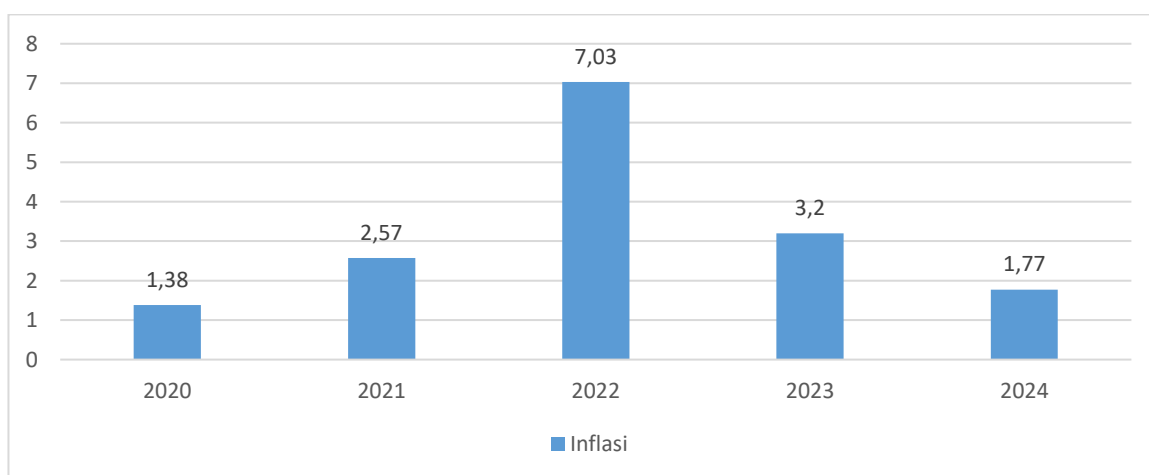
1. Stabilitas harga pangan
2. Efisiensi Distribusi dan Infrastruktur
3. Pengendalian harga Energi dan BBM
4. Kebijakan Pemerintah terkait Moneter dan Fiskal yang efektif
5. Dampak eksternal terkait perang Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan

Dari 11 kelompok pengeluaran konsumsi yang dihitung IHKnya, 9 kelompok pengeluaran mengalami kenaikan yaitu : kelompok makanan, minuman dan tembakau naik 1,95 persen, kelompok pakaian dan alas kaki

naik 0,05 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga naik 0,11 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik 0,02 persen, kelompok kesehatan naik 0,11 persen, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan naik 0,04 persen, kelompok rekreasi, olah raga dan budaya naik 0,04 persen, kelompok penyediaan makanan, minuman/restoran naik 0,12 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik 0,58 persen. Sebaliknya kelompok transportasi turun 0,47 persen. Sedangkan kelompok pendidikan relatif stabil.

Komoditas yang mengalami kenaikan harga sehingga memberikan sumbangan inflasi diantaranya : beras, telur ayam ras, tomat, cabai rawit, tukang bukan mandor, semangka dan bawang merah. Sebaliknya komoditas yang mengalami penurunan harga sehingga memberikan sumbangan deflasi antara lain : tarif angkutan udara, bayam, kangkung, daging sapi, jeruk dan salak.

Berikut ini pertumbuhan inflasi Kabupaten Wonogiri tahun 2020 sampai 2024.



Sumber: BPS Kota Surakarta, 2024 data diolah

Gambar 2. 44. Grafik Data Inflasi Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

Implikasi rasio pajak daerah terhadap PDRB adalah tingkat kemandirian fiskal yang baik, sinyal aktivitas ekonomi yang produktif, dan peningkatan kualitas layanan publik.

B. Stabilitas Ekonomi

Pada tahun 2024, perekonomian Kabupaten Wonogiri menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,93%, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp39,76 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar Rp24,73 triliun.

Analisis sektor ekonomi menunjukkan bahwa terdapat 11 sektor basis yang

menjadi andalan perekonomian Wonogiri, dengan 13 sektor tumbuh relatif cepat dan 11 sektor lainnya berkontribusi positif terhadap pertumbuhan PDRB Jawa Tengah.

Meskipun demikian, tantangan masih dihadapi, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi tingkat kemiskinan, dan menekan angka pengangguran.

Secara keseluruhan, stabilitas ekonomi makro Kabupaten Wonogiri pada tahun 2024 menunjukkan tren positif, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang solid dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan di masa mendatang.

Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri pada tahun 2024 adalah Rp. 2.326.202.395.750,-

Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri pada tahun 2024 adalah Rp. 92.410.000.000,-

C. Pajak dan Retribusi Daerah

Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menetapkan kebijakan pajak daerah tahun 2024 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan ini disusun untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), serta untuk memperluas kewenangan pemungutan pajak daerah.

Berikut adalah ringkasan tarif pajak daerah yang berlaku di Kabupaten Wonogiri mulai 5 Januari 2024:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - NJOP hingga Rp1 miliar: tarif 0,13%
 - NJOP di atas Rp1 miliar: tarif 0,20%
 - Lahan produksi pangan dan ternak: tarif 0,10%
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - Tarif ditetapkan sebesar 5%
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
 - Makanan/minuman, jasa hotel, parkir, kesenian/hiburan: tarif 10%
 - Diskotek, karaoke, bar, klub malam, spa: tarif 40%

- Konsumsi tenaga listrik:
 - Dari sumber lain oleh industri/pertambangan: tarif 3%
 - Listrik yang dihasilkan sendiri: tarif 1,5%
 - Konsumsi lainnya: tarif 9%
4. Pajak Reklame
 - Tarif ditetapkan sebesar 25%
 5. Pajak Air Tanah
 - Tarif ditetapkan sebesar 20%
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Tarif ditetapkan sebesar 20%
 7. Pajak Sarang Burung Walet
 - Tarif ditetapkan sebesar 10%
 8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - Tarif ditetapkan sebesar 66% dari PKB terutang
 9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - Tarif ditetapkan sebesar 66% dari BBNKB terutang

Perlu dicatat bahwa ketentuan mengenai opsen PKB dan BBNKB akan mulai berlaku pada 5 Januari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan hasil laporan BPKD Kabupaten Wonogiri tahun 2024, pajak daerah tahun 2024 adalah Rp 66.345.000.000,- dan PAD Rp 283.766.901.639, maka persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah 23,38 %.

D. RoA BUMD

Perkembangan Return on Asset (RoA) lembaga perbankan di Kabupaten Wonogiri menunjukkan tren yang bervariasi pada periode 2020–2024. PT BPR BKK Wonogiri mencatat pertumbuhan RoA yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat dari 2,07 pada tahun 2020 menjadi 2,79 pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan kinerja keuangan yang semakin efisien dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Sementara itu, PT BPR BKK Jateng Kantor Cabang Wonogiri mengalami fluktuasi cukup signifikan, dimana RoA meningkat dari 3,16 pada tahun 2020 hingga mencapai puncak 4,09 pada tahun 2022, namun kembali menurun hingga 3,10 pada tahun 2024. Pola ini menunjukkan adanya dinamika dalam pengelolaan aset dan profitabilitas bank. Adapun RoA PT BPR Bank Wonogiri cenderung berfluktuasi dengan tren

menurun di pertengahan periode, dari 2,73 pada tahun 2020 turun hingga 1,51 pada tahun 2023, namun kembali mengalami pemulihan pada 2024 sebesar 2,19. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi variasi antarbank, sektor perbankan di Wonogiri masih mampu menjaga tingkat profitabilitas aset dengan kecenderungan perbaikan di tahun terakhir.

Tabel 2. 103. Return on Asset BUMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

BUMD	2020	2021	2022	2023	2024
PT BPR BKK Wonogiri	2,07	2,31	2,71	2,72	2,79
PT BPR BKK Jateng Kc. Wonogiri	3,16	3,32	4,09	3,09	3,1
RoA PT BPR Bank Wonogiri	2,73	2,38	2,5	1,51	2,19

E. Rasio Pajak Terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Wonogiri menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, rasio ini berada di posisi rendah yaitu 0,19%, kemudian meningkat menjadi 0,20% pada 2021 dan terus naik tipis ke 0,21% pada 2022, mencerminkan peningkatan penerimaan pajak daerah seiring pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, pada 2023 rasio pajak masih stagnan di 0,21%, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor penerimaan pajak yang tidak berubah dengan signifikan atau percepatan pertumbuhan PDRB, dan kembali turun pada 2024 menjadi 0,19%, menunjukkan penurunan kontribusi pajak terhadap PDRB, menandakan efektivitas pengelolaan pajak daerah yang kurang optimal serta peran pajak yang perlu ditingkatkan lagi dalam struktur pendapatan daerah. Fenomena ini menegaskan perlunya strategi berkelanjutan untuk mempertahankan rasio pajak yang tinggi dan stabil agar mendukung pembangunan Kabupaten Wonogiri secara lebih merata.

Tabel 2. 104. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	PDRB Wonogiri (Rp)	Rasio (%)
2020	56.734.659.918,00	29.166.530.000.000,00	0,19%
2021	60.798.581.925,00	30.581.450.000.000,00	0,20%
2022	70.068.172.089,00	33.692.200.000.000,00	0,21%
2023	76.531.068.413,00	36.945.550.000.000,00	0,21%
2024	76.956.317.290,00	39.761.920.000.000,00	0,19%

Sumber : BPKD Kabupaten Wonogiri, 2025

F. Total Dana Pihak Ketiga dan Total Kredit

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan penyaluran Kredit/pembiayaan perbankan di Kabupaten Wonogiri periode data tahun 2020 s.d. 2024 sebagai berikut:

BPR (nominal dalam Rupiah)

Indikator	Des 2020	Des 2021	Des 2022	Des 2023	Des 2024	Jumlah
Tabungan	355.162.186.053	404.836.407.703	447.905.127.857	489.366.906.979	528.203.519.014	2.225.474.147.606
Deposito	179.859.575.515	203.609.207.000	213.176.957.000	234.707.317.000	258.623.785.441	1.089.976.841.956
Kredit	559.368.444.977	618.886.489.753	663.312.936.451	719.672.329.011	786.848.424.873	3.348.088.625.065

BPRS (nominal dalam Rupiah)

Indikator	Des 2020	Des 2021	Des 2022	Des 2023	Des 2024	Jumlah
Tabungan	1.893.106.260	2.421.497.825	3.108.269.149	4.232.515.921	4.032.833.763	15.688.222.918
Deposito	771.000.000	1.008.500.000	2.266.100.000	4.065.400.000	5.392.000.000	13.503.000.000
Pembiayaan	28.870.202.555	30.373.138.210	46.071.156.983	53.988.547.461	64.786.077.469	224.089.122.678

Bank Umum (nominal dalam Rupiah)

Indikator	Des 2020	Des 2021	Des 2022	Des 2023	Des 2024	Jumlah
Giro	200.049.386.261	379.718.655.166	387.444.873.016	416.643.722.993	295.047.110.831	1.678.903.748.267
Tabungan	2.797.005.871.945	2.950.206.386.831	3.070.394.601.762	3.042.300.164.567	3.103.329.259.345	14.963.236.284.450
Deposito	639.510.850.897	461.288.272.362	420.227.472.465	468.708.800.769	502.394.380.403	2.492.129.776.896
Kredit	4.293.344.351.456	4.760.859.680.231	5.302.402.963.435	5.655.905.151.446	5.522.008.262.278	25.534.520.408.846

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan Adaptif

A. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri terus berupaya melakukan implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 8 (delapan) area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan

Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Upaya yang sudah dilakukan selama ini dirasa belum maksimal dan masih sangat perlu dilakukan upaya lebih keras lagi untuk dapat memberikan dampak yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Meskipun begitu, upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Wonogiri selama ini mendapat apresiasi Pemerintah Pusat melalui Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diukur dengan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat kesimpulan hasil evaluasi adalah Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri tahun 2024 adalah 87,30 dengan kategori A-

Tabel 2. 105. Perkembangan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks RB	
	Nilai	Kategori
2020	64,75	B
2021	65,06	B
2022	66,58	B
2023	77,81	BB
2024	87,30	A-

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri 2024

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk rincian hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2. 106. Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi yang diukur dengan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Wonogiri Tahun 2024

Komponen	Nilai
RB General	77,52
RB Tematik	9,78
Total Bobot RB General	100
Indeks RB	87,30

Sumber : BPS, 2024

Komitmen pimpinan menjadi salah satu kunci keberhasilan yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Wonogiri. Sebagai bukti komitmen tersebut tertuang dalam Misi ke-2 Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri yaitu “Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten”. Langkah strategis dalam mewujudkan misi tersebut dengan Arah Kebijakan Pembangunan selama 5 (lima) tahun.

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu indikator sasaran reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel untuk memperoleh gambaran atas pencapaian sasaran tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebagai salah satu upaya mereviu berbagai peraturan perundang di tingkat Pemerintah Daerah. IRH merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan indentifikasi dan pemetaan regulasi.

Indeks Integritas Nasional merupakan pemetaan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan seluruh K/L/PD. Berdasarkan hasil ukuran tersebut menjadi dasar untuk menyusun perbaikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi

B. Kompetensi Penyelenggara Pelayanan Publik

Berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagai institusi pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanannya. Untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari perbaikan tersebut, maka dilakukan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Berikut hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang ditetapkan dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun 2020-2024:

Tabel 2. 107. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun 2020-2024

No	Tahun	Nilai IKM
1	2020	82,23
2	2021	83,72

No	Tahun	Nilai IKM
3	2022	84,96
4	2023	85,29
5	2024	87,14

Sumber: Setda Bagian Organisasi, 2024

Pencapaian IKM pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan terutama dari tahun 2021 IKM naik sebanyak 0,33 point, ini berarti pelayanan oleh institusi pelayanan publik di Kabupaten Wonogiri sudah semakin membaik.

Rata-rata IKM yang dicapai pastinya didukung oleh IKM masing-masing Perangkat Daerah sebagai institusi pelayanan publik.

Tabel 2. 108. Penghitungan IKM untuk Institusi Pelayanan Kesehatan, Investasi, dan Pelayanan Kependudukan Kabupaten Wonogiri Tahun 2024

IKM TAHUN 2024			
INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN		INSTITUSI PELAYANAN BIDANG INVESTASI (DINAS PMPTSP)	INSTITUSI PELAYANAN BIDANG KEPENDUDUKAN (DISDUKCAPIL)
RSUD	DINKES		
86,67 (B)	83,77 (B)	91,10 (A)	95,45 (A)

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri 2024

Dari tabel tersebut di atas yaitu Perangkat Daerah sebagai institusi pelayanan publik bidang kesehatan RSUD dr. Soediran M.S. dan Dinas Kesehatan, bidang investasi Dinas PMPTSP, serta bidang kependudukan Disdukcapil memiliki IKM dengan kategori mutu pelayanan baik. Indeks Kepuasan Masyarakat keempat institusi penyelenggara pelayanan publik tersebut paling tinggi adalah Dinas PMPTSP, selanjutnya Disdukcapil, RSUD, dan Dinkes.

Dan dalam usaha melakukan pengukuran kualitas penyelenggaraan pelayanan publik diukur berdasarkan Indeks Pelayanan Publik dalam 6 Aspek pelayanan publik dengan metode sampling. Berikut tabel Indeks Pelayanan Publik tahun 2020-2024:

Tabel 2. 109. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Wonogiri 2020-2024

TAHUN	NILAI	KETERANGAN
2020	4,42	SANGAT BAIK
2021	4,42	SANGAT BAIK
2022	4,45	SANGAT BAIK
2023	3,99	BAIK
2024	4,58	SANGAT BAIK

Sumber: Bagian Organisasi, Setda Kab. Wonogiri

Secara global penilaian kepatuhan merupakan bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penilaian kepatuhan juga menjadi tolok ukur terhadap evaluasi dan penguatan pengawasan internal melalui atasan langsung.

Lembaga Negara pengawas pelayanan publik Ombudsman RI merilis Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) terhadap 25 kementerian, 15 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 416 pemerintah kabupaten.

Skor Survei Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman RI Untuk Kabupaten Wonogiri, pada tahun 2024 mendapatkan nilai sebesar 99,71 masuk zona Hijau, kategori A dengan opini Kualitas Tinggi. Adapun item penilaian meliputi :

1. Dimensi input yang terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan.
2. Dimensi proses terdiri dari variabel standar pelayanan.
3. Dimensi output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi.
4. Dimensi pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan

C. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sejak terbitnya Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengandung konsekuensi semakin banyak sistem atau aplikasi yang diterapkan untuk pelayanan kepada masyarakat, dengan semakin banyaknya sistem/aplikasi yang diterapkan semakin besar pula resiko keamanan informasinya. Dalam Perpres SPBE tersebut mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengamankan sistem elektronik yang dikembangkan.

Untuk bisa melakukan pengamanan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan personil yang memiliki kualifikasi sandi dan Keamanan

Informasi antara lain:

- *Penetration Tester*
- *IT Security Analyst*
- *Threat Hunter*
- *Security Engineer/ IT Security Engineer*
- *Chief Security Officer*
- *Network Security Analyst*
- *Security Auditor/ IT Security Auditor*
- *IT Security Manager*
- *Cyber Defence Forensic.*

Tabel 2. 110. Tingkat Penilaian Persiapan/Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko	0	3	1	4	15
2	Jumlah sistem elektronik	23	23	49	49	54
3	Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi	II+	II+	II+	II+	II+

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri 2023

Pada Tahun 2021 Dinas Kominfo mengajukan permohonan fasilitasi pelaksanaan ITSA (Information Technology Security Assessment) ke BSSN, dan mendapatkan fasilitasi untuk pengujian kerentanan dan penilaian resiko terhadap 3 Aplikasi antara lain Website Pemkab Wonogiri, Absensi Pegawai Online (Hadirku) dan Portal Smart City Kabupaten Wonogiri, Kemudian pada Tahun 2022 melaksanakan Pentest mandiri terhadap Aplikasi www.mitradesa.wonogirikab.go.id atas permintaan dari pemilik Aplikasi yaitu DPMPTSP. Jumlah Sistem Elektronik naik turun karena ada sistem elektronik yang sudah tidak dipergunakan lagi dan ada pengembangan aplikasi baru. Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi, pada tahun 2023 telah dilaksanakan verifikasi hasil penilaian mandiri oleh assesor dari Badan Siber Dan Sandi Negara yang dilaksanakan secara online/daring karena belum memiliki anggaran untuk melakukan verifikasi indeks KAMI secara onsite/luring. Pada tahun 2024 sudah mulai rutin untuk melakukan kegiatan *Vulnerability Assessments* minimal satu kali dalam sebulan terhadap

sistem elektronik yang dimiliki oleh Pemkab Wonogiri seperti meteku, mpp dan tic.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Ketentraman dan Ketertiban, dan Demokrasi Substansial

Gambaran kondisi pembangunan hukum demi terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia melalui Penguatan Lembaga Peradilan, Regulasi Daerah Untuk meningkatkan akses hukum, Harmonisasi dan perencanaan Hukum Daerah, Penegakan Hukum dan Akuntabilitas, dan Partisipasi Publik dalam penegakan hukum.

Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Tramtibumlinmas

Dalam upaya mendukung penciptaan kondusivitas wilayah terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) sesuai dengan tugas dan kewenangannya antara lain melakukan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati. Kinerja Satpol-PP selama kurun waktu Tahun 2020-2024 ditunjukkan dengan persentase penyelesaian pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai berikut :

Tabel 2. 111. Penyelesaian Pelanggaran Perda Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah pelanggaran perda	Jumlah penyelesaian pelanggaran perda	Persentase
1	2020	2.311	2.311	100%
2	2021	3.491	3.490	99,9%
3	2022	9.910	9.910	100%
4	2023	6.634	6.634	100%
5	2024	8.973	8.973	100%

Sumber : Satpol-PP Kabupaten Wonogiri, 2024

Pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati yang terjadi selama Tahun 2024 sebanyak 8.973 kejadian, mengalami kenaikan 2.339 kejadian dibandingkan 2023 atau naik 26,07%, hal ini sebagai akibat adanya kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden serta Pilkada Tahun 2024 sehingga banyak pelanggaran terkait pemasangan atribut Parpol, bahan kampanye dan alat peraga kampanye. Adanya pelanggaran Perda dan Perbup yang terjadi semua dapat tertangani dengan baik dengan capaian kinerja 100% sehingga perlu dipertahankan. Namun demikian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar terkait penyelenggaraan Ketenteraman

dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat dalam hal ini Penegakan Perda Dan Perbup tersebut masih memerlukan tindakan lanjutan, antara lain :

1. Menertibkan PKL dan memberi solusi tempat berjualan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Koordinasi dengan Dinas Sosial serta mengantarkan ODGJ ke RSUD maupun RSJ untuk dilakukan pengobatan;
3. Penertiban pengamen dan anak punk dan berkoordinasi dengan Forkompimcam dalam penanganannya;
4. Edukasi tentang pelarangan peminta sumbangan sampai di tingkat desa/kelurahan;
5. Memberi pembinaan dan mengantar pengemis pulang ke tempat asal;
6. Terkait gelandangan/orang terlantar, berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk ditampung di Panti Pelayanan Esti Tomo;
7. Berkoordinasi dengan guru BK dalam penanganan/pembinaan pelajar yang membolos pada jam sekolah.

Berikut data kerawanan di kabupaten Wonogiri berdasarkan Bidang per bulan Juli 2024.

Tabel 2. 112. Kerawanan di kabupaten Wonogiri per bulan Juli 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH	SKOR KERAWANAN
1	Sosial Budaya		
1.1	Jumlah tempat/Konsentrasi Pekat	5	150
1.2	Jumlah lokasi tempat hiburan (karaoke, diskotik, panti pijat, kafe, dll)	7	150
1.3	Jumlah lokasi sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMK/SMA, PT/Akademi, dll)	1.118	250
1.4	Tempat ibadah (masjid, gereja, pura, vihara, dll)	4.251	250
2	Ekonomi		
2.1	Jumlah Konsentrasi pusat perdagangan (pasar tradisional, pasar modern)	25	250
2.2	Luas Wilayah (jumlah desa/kelurahan)	294	100
2.3	Jumlah Peraturan/perundangan daerah yang diterbitkan (perda, perbup, perwali, SE, dll)	13	100
2.4	Jumlah tempat/konsentrasi PKL	25	250
2.5	Jumlah kawasan industri	5	250
3	Sumber Daya Manusia (SDM)		
3.1	Jumlah kasus pelanggaran (tawuran, perda, dll)	4	100
3.2	Jumlah Pengangguran	13.730	100
3.3	Jumlah Kemiskinan	10.482	100
3.4	Jumlah Anggota SATPOL PP	111	100
3.5	Jumlah Anggota Linmas	8.165	150

NO	INDIKATOR	JUMLAH	SKOR KERAWANAN
4	Sumber Daya Alam (SDA)		
4.1	Jumlah Tempat Wisata	21	250
4.2	Jumlah Kejadian bencana alam dan non-alam	0	100
4.3	Jumlah lokasi penambangan	21	250
5	Politik		
5.1	Jumlah kejadian unjukrasa	0	200
5.2	Jumlah orpol/ormas (politik, keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan, dll)	22	500
5.3	Jumlah desa yang mengadakan pilkades/pemilu	0	100
Total Skor			3.700
Tingkat Potensi Kerawanan			SEDANG

Sumber: Satpol PP Kabupaten Wonogiri, 2024

Kinerja penyelesaian pelanggaran perda/perbup tersebut belum maksimal. Bila mencermati data produk perundang-undangan daerah sebagaimana tercatat pada SJDH Hukum Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Perda dan Perbup yang memuat sanksi, terdapat 37 perda dan 2 Perbup yang mengatur kegiatan masyarakat dan badan hukum yang mengandung/memuat sanksi, namun demikian Satpol PP belum optimal melakukan identifikasi, mengakses data/informasi, dan selanjutnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dan badan hukum agar potensi penegakan perda/perbup dapat berjalan maksimal. Masih lemahnya tingkat koordinasi antara OPD pengampu urusan dengan Satpol PP menjadi salah satu sebabnya. Forum koordinasi dengan OPD pemangku urusan harus diinisiasi dan rutin dilakukan untuk mengoptimalkan penegakan perda dan Perbup, sehingga diharapkan ke depan Satpol PP bersama OPD pengampu urusan memiliki road map (peta jalan) penegakan perda/perbup yang terdigitalisasi ke dalam sistem manajemen dan informasi penegakan perda.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) rasio Satpol-PP di Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan dari 0,62 pada Tahun 2022 menjadi 0,548 pada Tahun 2024. Rasio personil Satpol-PP tersebut dalam menyelenggarakan 22 jenis pelayanan, masih sangat sedikit dibandingkan dengan rasio idealnya antara 2,33 sampai dengan 3,25 dimana dengan jumlah penduduk 1.057.495 orang maka jumlah ideal personil Satpol-PP yaitu antara 251 orang sampai dengan 350 orang.

Berikut perkembangan rasio jumlah Polisi PP per 10.000 penduduk di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 113. Rasio Jumlah Polisi PP per 10.000 Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Polisi PP	Jumlah Penduduk	Rasio
2020	40	1.091.504	0,37
2021	46	1.069.659	0,43
2022	67	1.070.654	0,62
2023	61	1.074.474	0,567
2024	58	1.057.495	0,548

Sumber : Satpol-PP Kabupaten Wonogiri, data yang dikukuhkan, 2024

Upaya mendukung penciptaan kondusivitas wilayah selain penegakan perda dan perbup, perlu adanya pemberdayaan masyarakat sehingga ikut berperan serta menjaga trantibum dan merupakan salah satu upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah personil aparat pengamanan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas. Berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kabupaten Wonogiri, anggota Satlinmas yang dikukuhkan berjumlah 8.165 orang dan sampai dengan tahun 2024 tetap sama dan (belum ada pengukuhan lagi). Rasio Linmas per 10.000 penduduk ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 114. Rasio Jumlah Anggota Satlinmas per 10.000 Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Linmas	Jumlah Penduduk	Rasio
2020	8.165	1.091.504	74,81
2021	8.165	1.069.659	76,33
2022	8.165	1.070.654	76,26
2023	8.165	1.074.474	75,99
2024	8.165	1.057.495	77,21

Sumber : Satpol-PP Kabupaten Wonogiri, 2024

Tingkat rasio anggota Satlinmas per 10.000 penduduk tersebut di atas menunjukkan bahwa di tiap-tiap desa maupun kelurahan di Kabupaten Wonogiri telah memiliki anggota Satlinmas sebagai petugas perlindungan masyarakat meskipun dengan berbagai keterbatasan dan kekurangan baik sarana, prasarana, maupun pelatihan peningkatan SDM Satlinmas, dimana 1 orang satlinmas harus melindungi sekitar 130 penduduk, sehingga jumlah anggota Satlinmas yang ada masih kurang untuk melayani jumlah penduduk yang ada. Bahkan hal ini belum menunjukkan kenyataan di lapangan karena pengukuhan anggota Satlinmas sebanyak 8.165 orang dilaksanakan pada Tahun 2016 dan sampai tahun 2024 sudah 8 tahun belum ada update data

terkait jumlah Satlinmas sebanyak 8.165 yang dikukuhkan tersebut masih tetap sama atau sudah berkurang.

Selain melakukan penyelenggaraan kamtramtibum, Satpol-PP juga mengurus kebakaran. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengurus kebakaran, Satpol-PP didukung oleh personil Damkar. Berikut ini Rasio Jumlah Personil Damkar tahun 2020-2024.

Tabel 2. 115. Rasio Jumlah Personil Damkar Kabupaten Wonogiri

Tahun 2020-2024			
Tahun	Jumlah Petugas DAMKAR	Jumlah Penduduk	Rasio
2020	58	1.091.504	0,53
2021	56	1.069.659	0,52
2022	54	1.070.654	0,50
2023	53	1.074.474	0,49
2024	52	1.057.495	0,49

Sumber : Satpol-PP Kabupaten Wonogiri, 2024

Jumlah Personil Damkar tersebut di atas sama halnya dengan Rasio Satlinmas, bahwa jumlah personil Damkar yang ada belum cukup untuk menyelenggarakan 13 jenis pelayanan. Bahkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 jumlah personil Damkar berkurang seiring dengan adanya personil Damkar yang memasuki masa pensiun. Selain itu kondisi topografi wilayah dengan kondisi jalan naik turun menyebabkan tidak maksimalnya pelayanan response time yang tidak lebih dari 15 menit dapat tertangani di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Upaya yang ditempuh agar pelayanan damkar semakin maksimal yaitu dengan pembentukan Pos Pemadam Kebakaran di wilayah eks Kawedanan Wuryantoro, Jatisrono, dan Purwantoro, melengkapi yang ada saat ini di Damkar Wonogiri dan Pos Baturetno. Selain itu juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

2.1.4.3 Ketahanan Wilayah

Jumlah tindak pidana yang tertangani merupakan salah satu alat untuk mengukur kondusivitas wilayah. Adapun capaian kinerja penyelesaian kasus tindak pidana di Kabupaten Wonogiri selama kurun waktu tahun 2020-2024 adalah sebesar 54,05%. Secara lebih rinci, berikut perkembangan jumlah tindak pidana yang tertangani di Kabupaten Wonogiri.

Tabel 2. 116. Jumlah Tindak Pidana yang Tertangani di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana		Kinerja Penyelesaian Tindak Pidana
		Lapor	Selesai	
1.	2020	147	136	93%
2.	2021	119	104	87%
3.	2022	99	73	73%
4.	2023	148	80	54,05%
5.	2024	138	74	54%

Sumber : Bakesbangpol Kabupaten Wonogiri, 2024

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 2. 117. Indikator Kinerja Kunci

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA KUNCI				OPD	KET
		2021	2022	2023	2024		
1.	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
	PENDIDIKAN						
1.a.1	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	79,550	100,000	83,132	82,09	DINAS P DAN K, DISDUKCAPIL	
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	91,560	72,753	93,284	98,47	DINAS P DAN K, DISDUKCAPIL	
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	84,990	89,007	85,042	101,1	DINAS P DAN K, DISDUKCAPIL	IKK khusus capaian dapat melebihi 100%, maksimal 105%
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100,000	90,829	80,274	95,15	DINAS P DAN K	
	KESEHATAN						
1.b.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,100	1,003	1,015	1,02	DINKES, DISDUKCAPIL	
1.b.2	Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	42,860	92,857	100	100	DINKES	

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA KUNCI				OPD	KET
		2021	2022	2023	2024		
1.b.3	Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100,000	100,000	100	100	DINKES	
1.b.4	Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100,000	100,000	100	100	DINKES	
1.b.5	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,000	100,000	100	100	DINKES	
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	83,180	89,453	90,422	100	DINKES	
1.b.7	Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	61,850	100,000	100	100	DINKES	
1.b.8	Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	69,760	87,681	89,253	100	DINKES / DISDUKCAPIL	
1.b.9	Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	74,200	76,845	95,451	100	DINKES / DISDUKCAPIL	
1.b.10	Presentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35,940	68,601	75,895	100	DINKES	
1.b.11	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	89,130	97,211	98,135	100	DINKES	
1.b.12	Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	87,870	98,427	98,551	100	DINKES	

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA KUNCI				OPD	KET
		2021	2022	2023	2024		
1.b.13	Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	39,430	89,762	100	100	DINKES	
1.b.14	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	83,590	91,664	92,964	100	DINKES	
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kab/Kota	0,00%	100%	Tidak Ada Kawasan Permukiman di Wilayah Sungai	Tidak Ada Kawasan Permukiman di Wilayah Sungai	DISPERA	Tidak Ada Kawasan Permukiman di Wilayah Sungai
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0,00%	100%	Tidak ada Kawasan Permukiman di Sepanjang Pantai	Tidak ada Kawasan Permukiman di Sepanjang Pantai	DISPERA	Tidak ada Kawasan Permukiman di Sepanjang Pantai
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,20%	81,07%	81,64	82,36	DPU	

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA KUNCI				OPD	KET
		2021	2022	2023	2024		
1.c.4	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	86,40%	86,96%	85,93	87,37	DPU	
1.c.5	Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	94,97%	95,33%	94,91	95,02	DPU	
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	100	100	100	100	DPMPPTSP	
1.c.7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	88,15%	88,54%	88,82	89,2	DPU	
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100	100	100	100	PBJ	
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	100	100	DPU	
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN						
1.d.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	100	DISPERA	
1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	100	100	100	DISPERA	

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA KUNCI				OPD	KET
		2021	2022	2023	2024		
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	25,49	32,68	44,59	54,36	DISPERA	
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	5,21	2,04	0,75	0,0	DISPERA	
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,57	99,44	100	100	DISPERA	
	TRANTIBUMLINMAS						
1.e.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	SATPOL PP	
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	SATPOL PP	
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1069659 jiwa	100%	100	100	BPBD	
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	898198 jiwa	100	100	100	BPBD	
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	BPBD	
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	SATPOL PP	

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA KUNCI				OPD	KET
		2021	2022	2023	2024		
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10,450	10,260	10,2	10,17	SATPOL PP	
	SOSIAL						
1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	86,230	100	100	100	DINSOS	
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	DINSOS	
	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
	TENAGA KERJA						
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	38,460	61,538	70	77,78	DISNAKER	
2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,290	4,687	3,61	40,14	DISNAKER	
2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	367794624 5,080	3837,004	3265,503	83.345.770 .138,19	DISNAKER	
2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	12,590	15,060	16,27	18,5	DISNAKER	

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA KUNCI				OPD	KET
		2021	2022	2023	2024		
2.a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	60,930	64,312	71,17	78,72	DISNAKER	
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	4,350	1,967	1,61	9,12	Dinas PPKB dan P3A dan BAPPERIDA	
2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,02%	100%	100	100	Dinas PPKB dan P3A, DISDUKCAPIL	
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	6,540	7,099	2,05	1,47	Dinas PPKB dan P3A dan DISDUKCAPIL	
	PANGAN						
2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	626,730	136,194	98,743	79,64	DISPERTAN DAN PANGAN	<p>1. Alasan tidak tercapai : sesuai perbadan CPP (cadangan pangan pemerintah) Nomor 03 tahun 2025 bahwa pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten boleh dilakukan bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah</p> <p>2. Alasan capaian tahun sebelumnya lebih tinggi : dikarenakan perhitungan cadangan pangan pemerintah</p>

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA KUNCI				OPD	KET
		2021	2022	2023	2024		
							masih mengikutsertakan cadangan pangan masyarakat sedangkan tahun 2024 murni cadangan pangan pemerintah yang dikelola pemerintah kabupaten wonogiri 3. Kenapa rumus tidak bisa dihitung : karena permintaan format meminta data cadangan pangan kecamatan dan desa sedangkan menurut perbadan yang baru cadangan pangan hanya dapat dihitung pada level prov dan kab
	PERTANAHAN						
2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	100	100	100	DISPERA DAN KPP	
2.i.2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	98,890	100	100	100	DISPERA DAN KPP	
2.i.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100	100	100	21,99	DINAS PMPTSP/DISPERA	
2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	bukan kewenangan	bukan kewenangan	bukan kewenangan	bukan kewenangan	DISPERADAN KPP	
2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100	100	100	100	DISPERA DAN KPP	

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA KUNCI				OPD	KET
		2021	2022	2023	2024		
2.i.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	100	100	0	DISPERA DAN KPP dengan BPN	Tidak ada sengketa
	LINGKUNGAN HIDUP						
2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	73,180	74,960	75,19	76,99	Dinas LH	
2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	39,820	51,356	53,09	56,74	Dinas LH	
2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100	100	100	42,86	Dinas LH	
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
2.k.1.1	Perekaman KTP elektronik	99,22	99,308	99,56	99,79	DISDUKCAPIL	
2.k.1.2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	83,380	82,375	86,49	94,73	DISDUKCAPIL	
2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	95,180	97,526	98,5	99,79	DISDUKCAPIL	
2.k.1.4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	59,260	100	100	100	DISDUKCAPIL	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
2.l.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	100	100	100	100	PMD	sudah tidak ada desa tertinggal (sesuai PEDUM diisi 1/1 capaian 100)

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA KUNCI				OPD	KET
		2021	2022	2023	2024		
2.1.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	5,58%	14,74%	21,12%	45,42%	PMD	
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB						
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,621	1,79	1,79	1,79	DINAS PPKB dan P3A	
2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,410	79,160	79,398	81,17	DINAS PPKB dan P3A	
2.m.3	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,890	6,817	6,72	5,93	DINAS PPKB dan P3A	
	PERHUBUNGAN						
2.n.1	Rasio konektivitas Kabupaten	0,837	0,837	0,837	0,72	DISHUB	1. karena format baru trayek provinsi masuk pada perhitungan LPPD 2024 2. karena pada tahun 2024 ada update data yaitu 7 trayek angkutan perdesaan sudah tidak terlayani (rincian dapat dilihat pada Lampiran 1)
2.n.2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,259	0,260	0,26	0,091	DISHUB	
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA KUNCI				OPD	KET
		2021	2022	2023	2024		
2.o.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100	KOMINFO, ORGANISASI	
2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	100	KOMINFO	
2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	81,390	100	100	100	KOMINFO, DISDUKCAPIL	
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA KUNCI				OPD	KET
		2021	2022	2023	2024		
2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	25,750	48,539	57,054	46,34	DINAS KUKM DAN PERINDAG	<p>Alasan penurunan koperasi berkualitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya koperasi gapoktan yang memiliki masalah keuangan (kredit macet) sehingga kegiatan koperasi dinonaktifkan dan beberapa koperasi gapoktan yang sudah melaksanakan RAT tidak melaporkan hasil Laporan Pertanggungjawabannya ke Dinas 2. Beberapa koperasi pailit, salah satunya disebabkan oleh manajemen kurang baik 3. Persaingan dengan suku bunga bank konvensional (KUR) 4. Beberapa koperasi membatasi pinjaman anggota terkait dengan kemampuan bayar, karena banyak anggota yg sudah memiliki hutang di bank lain
2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	100	100	72,88	100	DINAS KUKM DAN PERINDAG	
PENANAMAN MODAL							
2.q	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota	123,610	210,393	21,081	21,2	DPMPSTP	

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA KUNCI				OPD	KET
		2021	2022	2023	2024		
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						
2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,220	5,244	7,21	8,7	DISPORA, DPMPPTSP, DISDUKCAPIL	
2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	77,500	89,697	89,635	89,76	DISPORA, DINSOS, KESBANGPOL, DISDUKCAPIL	
2.r.3	Peningkatan prestasi olahraga	15 medali	14 medali	19 medali	11	DISPORA	
	STATISTIK						
2.s.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	KOMINFO, ORGANISASI	
2.s.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	KOMINFO, ORGANISASI	
	PERSANDIAN						
2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	45,1	57,7	56,27	72,56	KOMINFO	penilaian dr provinsi, tahun kemarin penilaian mandiri
	KEBUDAYAAN						
2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	100	100	100	DINAS P DAN K	

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA KUNCI				OPD	KET
		2021	2022	2023	2024		
	PERPUSTAKAAN						
2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	2,200	68,800	68,84	78,2	DINAS KEARSIPAN	
2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	50,500	54,786	65,72	45,57	DINAS KEARSIPAN	
	KEARSIPAN						
2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	61,320	67,910	83,97	98,29	DINAS KEARSIPAN	
2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	33,33	50,00	50	50	DINAS KEARSIPAN	
3.	URUSAN PILIHAN						
	KELAUTAN DAN PERIKANAN						

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA KUNCI				OPD	KET
		2021	2022	2023	2024		
3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	10.346,26 ton	10.997,96 ton	11.015,18 ton	11.104,23 ton	DISLAKPERNAK	
	PARIWISATA						
3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	tidak ada kunjungan	11900,000	2,5	4,065	DISPORA	
3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	91,920	417,748	294,484	7,45	DISPORA	
3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	13,760	13,92	13,994	15,17	DISPORA	
3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,877	2,530	2,642	2,79	DISPORA	
3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,119	1,692	2,001	2,51	DISPORA	
	PERTANIAN						
3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	578,380	594,638	591,381	585,24	DISPERTAN DAN PANGAN	
3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0,000	47500	100	-16,48	DISPERTAN DAN PANGAN/DISLAK PERNAK	
3.d	KEHUTANAN	100	100	100	100		tidak ada taman hutan raya maka bukan kewenangan Pemda (di

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA KUNCI				OPD	KET
		2021	2022	2023	2024		
							PEDUM capaian diisi 100)
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100	100	0	0	DPMPPTSP	Tidak ada sumber panas bumi di Kabupaten Wonogiri
	PERDAGANGAN						
3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100	100	100	100	DINAS KUKM DAN PERINDAG	
3.f.2	Persentase Kinerja realisasi Pupuk	89,99	50,99	46,84	50,47	DINAS KUKM DAN PERINDAG	
3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	34,870	5,273	30,55	26,72	DINAS PERDAGANGAN KUKM	karena sudah banyak yang tidak menggunakan alat ukur, takar, timbang
	PERINDUSTRIAN						
3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	2,240	0,499	2,99	4,50	DISNAKERIN	

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA KUNCI				OPD	KET
		2021	2022	2023	2024		
3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	(RPIK Dalam Proses Penyusunan)	100%	100%	100	DISNAKERIN	
3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	39,20	15,20	28,42	44,44	DISNAKERIN	
3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	100,000	100	0	DISNAKERIN	tidak ada yang mengajukan perluasan
3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	NIHIL	Belum ada kawasan Industri di Kab. Wonogiri	Belum ada kawasan Industri di Kab. Wonogiri	Belum ada kawasan Industri di Kab. Wonogiri	DISNAKERIN	
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	75%	75%	75%	100	DISNAKERIN	menunggu konfirmasi provinsi

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA KUNCI				OPD	KET
		2021	2022	2023	2024		
3.h	TRANSMIGRASI	100	100	Wonogiri hanya sebagai daerah pengirim	100	DISNAKERIN	Wonogiri hanya sebagai daerah pengirim
4.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	PERENCANAAN DAN KEUANGAN						
4.a.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	11,620	11,958	10,801	8,97	BPKD	
4.a.2	Rasio PAD	10,480	14,714	11,48	12,51	BPKD	
4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3	Level 3	INSPEKTORAT	
4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2.9	Level 2.9	Level 3	Level 3	INSPEKTORAT	
4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum expenditures)	81	81,148	79,939	70,46	BPKD	
4.a.6	Opini Laporan Keuangan	2012-2014 = WDP; 2015-2020 = WTP	2012 - 2014 = WDP 2015 - 2021 = WTP	2012-2014= WDP 2015-2022= WTP	2014= WDP 2015-2023=WTP	BPKD	

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA KUNCI				OPD	KET
		2021	2022	2023	2024		
	PENGADAAN						
4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	100,000	0	0	BAGIAN PBJ	tidak ada kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama Tahun 2024
4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	42,720	31,884	33,451	50,90	BAGIAN PBJ	
4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	79,870	32,629	25,834	42,59	BAGIAN PBJ	
4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	1513,920	361,818	11,322	14,10	BAGIAN PBJ	
	KEPEGAWAIAN						
4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	124,640	58,093	59,75	62,45	BKD	
4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15,150	17,333	16,09	15,58	BKD	minimnya minat PNS diangkat dalam jabatan fungsional dan penyederhanaan birokrasi

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA KUNCI				OPD	KET
		2021	2022	2023	2024		
4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	97,010	77,169	100	100	BKD	
MANAJEMEN KEUANGAN							
4.d.1	Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	10,130	10,8	10,683	7,38	BPKD	
4.d.2	Revenue Mobilization : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	15,140	13,580	8,213	28,48	BPKD	ketidakkonsistenan pembilang dan penyebut (pembilang menggunakan APBD perubahan terakhir, penyebut menggunakan APBD penetapan)
4.d.3	Manajemen Aset	YA	YA	YA	YA	BPKD	
4.d.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	12,500	13,067	13,287	6,62	BPKD	
TRANSPARASI DAN PARTISIPASI PUBLIK							
4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	100	100	90.46	93,72	DISKOMINFO	

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA KUNCI				OPD	KET
		2021	2022	2023	2024		
4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100	100	100	100	DISKOMINFO	

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.1.5.1 SPM Bidang Pendidikan

Rata-rata Indeks Pencapaian SPM dari 3 kewenangan SPM Bidang Pendidikan, pada tahun 2024 berdasarkan jenis dan mutu layanan adalah 100%.

Tabel 2. 118. Capaian SPM Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi				
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot (%)	Indeks Pencapaian (%)
1	Pendidikan Dasar, dengan rincian layanan:	100	100	100	100	100
	Berdasarkan jenis layanan	125751	125751	100	80	80
	Berdasarkan mutu layanan			100	20	20
2	Pendidikan Kesetaraan	100	100	100	100	100
	Berdasarkan jenis layanan	2585	2585	100	80	80
	berdasarkan jenis layanan			100	20	20
3	Pendidikan Anak Usia Dini	100	100	100	100	100
	Berdasarkan jenis layanan	20486	20485	100	80	80
	Berdasarkan mutu layanan			100	20	20

Sumber : Dinas P Dan K, 2024

2.1.5.2 SPM Bidang Kesehatan

Rata-rata Indeks Pencapaian SPM dari 12 kewenangan SPM Bidang Kesehatan tahun 2024 berdasarkan jenis dan mutu layanan adalah 100%.

Tabel 2. 119. Realisasi SPM Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi				
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot (%)	Indeks Pencapaian (%)
1.	Kesehatan ibu hamil, dengan rincian layanan :	100	100	100	100	100
	a. berdasarkan jenis layanan	7.977	7977	100	80	80
	b. berdasarkan mutu layanan	20%	20%	100	20	20
2	Kesehatan ibu bersalin, dengan rincian layanan :	100	100	100	100	100
	a. berdasarkan jenis layanan	7.977	7977	100	80	80
	b. berdasarkan mutu layanan	20	20	100	20	20

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi				
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot (%)	Indeks Pencapaian (%)
3.	Kesehatan bayi baru lahir, dengan rincian layanan :	100	100	100	100	100
	a. berdasarkan jenis layanan	7.898	7.898	100	80	80
	b. berdasarkan mutu layanan	20	20	100	20	20
4.	Kesehatan balita, dengan rincian layanan :	100	100	100	100	100
	a. berdasarkan jenis layanan	42.204	42.204	100	80	100
	b. berdasarkan mutu layanan	20	20	100	20	20
5.	Kesehatan pada usia pendidikan dasar, dengan rincian layanan :	100	100	100	100	100
	a. berdasarkan jenis layanan	111.163	111.163	100	80	80
	b. berdasarkan mutu layanan	20	20	100	20	20
6.	Kesehatan usia produktif, dengan rincian layanan :	100	100	100	100	100
	a. berdasarkan jenis layanan	645.471	645.471	100	80	100
	b. berdasarkan mutu layanan	20	20	100	20	20
7.	Kesehatan usia lanjut, dengan rincian layanan :	100	100	100	100	100
	a. berdasarkan jenis layanan	179.359	179.359	100	80	100
	b. berdasarkan mutu layanan	20	20	100	20	20
8.	Kesehatan penderita hipertensi, dengan rincian layanan :	100	100	100	100	100
	a. berdasarkan jenis layanan	327.497	327.497	100	80	100
	b. berdasarkan mutu layanan	20	20	100	20	20
9.	Kesehatan penderita diabetes melitus, dengan rincian layanan :	100	100	100	100	100
	a. berdasarkan jenis layanan	17.751	17.751	100	80	100
	b. berdasarkan mutu layanan	20	20	100	20	20
10	Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, dengan rincian layanan :	100	100	100	100	100
	a. berdasarkan jenis layanan	2.004	2.004	100	80	100
	b. berdasarkan mutu layanan	20	20	100	20	20
11	Kesehatan orang terduga tuberkulosis,	100	100	100	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi				
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot (%)	Indeks Pencapaian (%)
	dengan rincian layanan :					
	a. berdasarkan jenis layanan	13.566	13.566	100	80	100
	b. berdasarkan mutu layanan	20	20	100	20	20
12	Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), dengan rincian layanan :	100	100	100	100	100
	a. berdasarkan jenis layanan	10.829	10.829	100	80	100
	b. berdasarkan mutu layanan	20	20	100	20	20

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, 2024

2.1.5.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum

Rata-rata Indeks Pencapaian SPM dari 2 kewenangan SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2024 berdasarkan jenis dan mutu layanan adalah 100%.

Tabel 2. 120. Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi				
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot (%)	Indeks Pencapaian (%)
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dengan rincian layanan :	100	100	100	100	100
	a. berdasarkan jenis layanan	4824	4824	100	80	80
	b. berdasarkan mutu layanan			100	20	20
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, dengan rincian layanan :	100	100	100	100	100
	a. berdasarkan jenis layanan	2892	2892	100	80	80
	b. berdasarkan mutu layanan			100	20	20

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2024

2.1.5.4 SPM Bidang Perumahan Rakyat

Rata-rata Indeks Pencapaian SPM dari 2 kewenangan SPM Urusan Perumahan Rakyat berdasarkan jenis dan mutu layanan adalah 100%. Berikut merupakan upaya untuk mencapai SPM Perumahan:

1. SPM 1 :

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Tahun 2024. Target rehabilitasi rumah korban bencana adalah sejumlah 30 unit dan dapat tercapai 30 unit (100 %) dengan rincian sebagai berikut :

- a. 28 unit : memperbaiki/rehabilitasi rumah secara swadaya dan bantuan dana tanggap darurat desa dengan dibantu gotong royong warga sekitar.
- b. 2 unit : memperoleh bantuan dari dana APBD Kabupaten Wonogiri sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per unit. Penerima Bantuan diverifikasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan dan memenuhi syarat untuk mendapat bantuan dari APBD kabupaten Wonogiri. Keberhasilan capaian tidak luput dari kolaborasi antar unit organisasi perangkat daerah yaitu dengan BPBD yang memberikan data awal rumah korban bencana, perangkat desa yang membantu pada saat perencanaan, pelaksanaan dan laporan serta warga sekitar yang membantu/bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak akibat bencana.

2. SPM 2:

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. Target relokasi pada tahun 2024 sejumlah 2 (dua) unit rumah dan dapat tercapai 100% atau 2 unit. Sasaran relokasi pada tahun 2024 adalah keluarga yang rumahnya terletak di daerah rawan bencana. Bantuan merupakan program relokasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berupa bantuan sosial dengan metode Rumah Sistem Panel Instan atau *RUSPIN* . Dengan adanya bantuan dari Disperakim Provinsi Jawa Tengah, fasilitasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri, pihak desa dan semangat gotong royong Masyarakat kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dapat terealisasi 100%.

Tabel 2. 121. Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi				
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot (%)	Indeks Pencapaian (%)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota, dengan rincian layanan :	100	100	100	100	100
	a. berdasarkan jenis layanan	30	30	100	80	80
	b. berdasarkan mutu layanan			100	20	20
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota, dengan rincian layanan :	100	100	100	100	100
	a. berdasarkan jenis layanan	2	2	100	80	80
	b. berdasarkan mutu layanan			100	20	20

Sumber : Dispera dan KPP Kabupaten Wonogiri, 2024

2.1.5.5 SPM Bidang Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Secara keseluruhan capaian SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pada semua jenis pelayanan dasar sudah mencapai target yang ditetapkan, yaitu 100%.

Tabel 2. 122. Target dan Realisasi SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	275 orang	275 orang	100
2	Pelayanan informasi rawan bencana	164.405 orang	164.405 orang	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	330	330	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	484	484	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	75	75	100

Sumber : Satpol-PP dan BPBD Kabupaten Wonogiri, 2024

2.1.5.6 SPM Bidang Sosial

Dalam hal peningkatan penanganan PPKS, salah satu upaya dilaksanakan melalui penerapan penyelenggaraan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang

Sosial, yang merupakan wujud pelayanan Dasar terhadap PPKS di Kabupaten Wonogiri yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri bersinergi dengan OPD terkait dan mitra Sosial.

Salah satu wujud capaian penyelenggaraan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Wonogiri pada tahun terakhir dapat diketahui melalui table berikut:

Tabel 2. 123. Target dan Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi				
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot (%)	Indeks Pencapaian (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial, dengan rincian layanan :	100	100	100	100	100
	a. berdasarkan jenis layanan	109	109	100	80	80
	b. berdasarkan mutu layanan			100	20	20
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial, dengan rincian layanan :	100	100	100	100	100
	a. berdasarkan jenis layanan	58	58	100	80	80
	b. berdasarkan mutu layanan			100	20	20
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial, dengan rincian layanan :	100	100	100	100	100
	a. berdasarkan jenis layanan	90	90	100	80	100
	b. berdasarkan mutu layanan			100	20	20
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, dengan rincian layanan :	100	100	100	100	100
	a. berdasarkan jenis layanan	9	9	100	80	80
	b. berdasarkan mutu layanan			100	20	20
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota, dengan rincian layanan :	100	100	100	100	100
	a. berdasarkan jenis layanan	4013	4013	100	80	80
	b. berdasarkan mutu layanan			100	20	20

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, tahun 2024

Rata-rata Indeks Pencapaian SPM dari 5 kewenangan SPM Urusan Sosial berdasarkan jenis dan mutu layanan adalah 100%.

2.1.6 Kerjasama Daerah

Adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 telah ditandatangani total 23 naskah kerja sama KSDD dan KSDP sejumlah 232, sebagai berikut :

Tabel 2. 124. Data Kerja Sama Daerah Tahun 2020-2024

No	Bentuk Kerjasama	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD)	3	3	3	10	12
2	Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK)	50	50	50	42	44

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri, 2024

Pada Tahun 2023 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan daerah lain yaitu kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Pacitan, Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Pawonsari) meliputi 7 kerja sama, Kerja Sama dengan Pemerintahan Daerah se Solo Raya (Suboskawonsraten) meliputi 2 kerja sama dan Kerja sama dengan Karismapawirogo sebanyak 1 kerja sama.

Sedangkan kerja sama dengan pihak ketiga meliputi kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pemerintah non departemen lainnya.

Jalinan kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga harus benar-benar memberi manfaat bagi para pihak pada bidang-bidang yang menjadi kesepakatan bersama, serta tetap menjaga semangat kebersamaan yang dinamis dan adaptif demi semakin meningkatnya kemajuan bersama.

Langkah untuk mengoptimalkan kerjasama yang dilakukan dan hasil-hasil yang dicapai, adalah dengan mengidentifikasi permasalahan utama sebagai penghambat dan perlu ditetapkan satu solusi terbaik, untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik yang berupa tata ruang maupun infrastruktur.

Integrasi program dari para pihak menjadi satu upaya yang nyata untuk mengatasi persoalan yang timbul Perlu juga dibangun kesadaran dan partisipasi dari masyarakat dengan pemberdayaan yang optimal, diharapkan berbagai aktifitas akan meningkat, yang berimbas positif bagi para pihak.

2.1.7 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten Wonogiri

2.1.7.1 Rencana Pembangunan Infrastruktur dari dana APBN

- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pidekso
- Pembangunan Daerah Irigasi Pidekso
- Pembangunan Kawasan Wisata Waduk Serbaguna Wonogiri
- Pengembangan Kawasan Gunung Sewu Unesco Global Geopark
- Pengembangan Commuterline Solo-Wonogiri
- Pembangunan Sekolah Rakyat

2.1.7.2 Rencana Pembangunan Infrastruktur dari dana APBD Provin

- Pembangunan sub terminal Agrobisnis
- Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri
- Pengembangan Bus Trans Jateng
- Pembangunan RSUD Tipe D Baturetno

2.1.8 BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemerintah Daerah

Ada Ada 5 (lima) BUMD di Pemerintah Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :

1. PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda);
2. PT. BPR Bank Wonogiri (Perseroda);
3. PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Cab. Wonogiri;
4. Perumda Air Minum Giri Tirta Sari;
5. PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) (Yang merupakan hasil konsolidasi dari 3 BUMD) yaitu:

PD. Percetakan Giri Tunggal, PD. Jasa Medika Giri Husada dan PD. Perbengkelan Surya.

Dari keenam BUMD tersebut tiga diantaranya merupakan BUMD yang sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri yaitu :

1. PT. BPR Bank Wonogiri (Perseroda);
2. Perumda Air Minum Giri Tirta Sari;
3. PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda).

Saat ini seluruh BUMD di Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah melakukan perubahan badan hukum. Pada Tahun 2022 telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha Menjadi

Perusahaan Perseroan Daerah. Dan dari tahun ke tahun BUMD telah memberikan deviden sebagai PAD bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

2.2.1 Realisasi APBD tahun 2020-2024

APBD Kabupaten Wonogiri periode 2020-2024, ditandai dengan peningkatan pendapatan dan belanja daerah sampai dengan realisasi tahun 2024, dan dipengaruhi oleh gejolak ekonomi yang terjadi pada tahun 2020 dimana terjadinya pandemi yang berdampak kepada ekonomi dan mempengaruhi kondisi pendapatan asli daerah. Realisasi Pendapatan daerah meningkat sebesar 10,28% dari Rp. 2.273.678.538.635 pada tahun 2020 menjadi Rp2.507.485.910.024 pada tahun 2023. Dengan kondisi capaian terhadap target mencapai 107%.

Belanja daerah meningkat sebesar 9,39% dari Rp 2.262.812.452.301 tahun 2020 menjadi Rp. 2.475.192.790.863 pada realisasi 2023. Dengan kondisi capaian belanja terhadap target adalah 102%. Dan rata rata capaian pada periode ini adalah 101,47%.

Tabel 2. 125. Perkembangan Realisasi APBD Tahun 2020-2024

No.Rek	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	230.501.783.422	209.572.712.714	293.020.148.253	266.021.140.521	283.766.901.639
4.1.01	Pajak Daerah	49.002.000.000	54.650.000.000	60.820.000.000	69.195.000.000	66.345.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	14.404.004.300	14.892.171.450	13.154.275.750	11.923.493.400	186.999.871.835
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.993.035.330	17.333.624.464	19.730.883.691	20.381.797.642	20.539.654.954
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	149.102.743.792	122.696.916.800	199.314.988.812	164.520.849.479	9.882.374.850
4.2	PENDAPATAN TRANSFER		1.937.389.462.121	1.944.665.788.286	2.223.957.881.142	2.198.327.078.521
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.760.704.528.449	1.772.575.019.286	1.992.031.143.142	1.996.694.445.521
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah		176.684.933.672	172.090.769.000	231.926.738.000	201.632.633.000
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.456.503.775.000				
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.112.606.000				
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.084.170.043.000				
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	342.221.126.000				
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	564.220.497.000	136.750.828.656	1.067.000.000	1.500.000.000	
4.3.01	Pendapatan Hibah	113.155.300.000	136.750.828.656	1.067.000.000	1.500.000.000	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	128.663.692.000				
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	38.503.148.000				
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	59.217.000.000				
4.3.6	Pendapatan lain - lain	224.681.357.000				
	Jumlah Pendapatan	2.251.226.055.422	2.283.713.003.491	2.238.752.936.539	2.491.479.021.663	2.482.093.980.160
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI		1.728.196.526.221	1.787.872.879.235	1.903.196.454.055	2.039.333.027.625
5.1.01	Belanja Pegawai		1.222.343.750.752	1.269.522.479.482	1.346.239.890.355	1.393.121.290.668
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		474.913.051.749	483.065.316.953	486.337.186.200	577.823.058.949
5.1.04	Belanja Subsidi		50.000.000	50.000.000	550.000.000	550.000.000

No.Rek	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.05	Belanja Hibah		29.762.223.720	33.538.582.800	68.513.377.500	66.756.678.008
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial		1.127.500.000	1.696.500.000	1.556.000.000	1.082.000.000
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
5.1.1	Belanja Pegawai	1.142.408.320.775				
5.1.3	Belanja Subsidi	50.000.000				
5.1.4	Belanja Hibah	57.382.821.700				
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.430.000.000				
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	7.942.879.000				
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	352.375.313.000				
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	56.062.995.358				
5.2	BELANJA MODAL		392.831.728.955	325.267.960.579	396.618.022.747	302.270.227.655
5.2.01	Belanja Modal Tanah		1.087.425.000	0	1.219.920.000	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		66.834.129.551	80.662.124.171	87.667.316.946	69.286.227.305
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		90.209.934.915	42.629.690.537	75.840.884.168	76.791.242.294
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		226.485.422.777	193.957.476.907	221.594.132.884	147.339.591.746
5.2.05	Belanja Modal Aset Tatap Lainnya		8.214.816.712	8.018.668.964	10.241.516.199	8.835.166.310
5.2	BELANJA LANGSUNG	848.041.851.728				
5.2.1	Belanja Pegawai	169.697.358.510				
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	371.573.718.379				
5.2.3	Belanja Modal	306.770.774.839				
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		27.155.263.305	2.781.404.571	8.399.218.651	8.399.218.651
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		27.155.263.305	2.781.404.571	8.399.218.651	8.399.218.651
5.4	BELANJA TRANSFER		367.360.248.500	356.054.471.575	413.576.912.930	414.658.212.110
5.4.01	Belanja Bagi Hasil		7.229.398.000	7.397.427.575	8.128.141.680	7.821.650.110
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan		360.130.850.500	348.657.044.000	405.448.771.250	406.836.562.000
	Jumlah Belanja	2.475.694.181.561	2.515.543.766.981	2.471.976.715.960	2.721.790.608.383	2.764.660.686.041

No.Rek	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Total Surplus/(Defisit)	-224.468.126.139	-231.830.763.490	-233.223.779.421	-230.311.586.720	-282.566.705.881
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	226.968.126.139	235.330.763.490	237.884.968.274	252.273.586.720	283.066.705.881
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	226.968.126.139	235.330.763.490	237.884.968.274	252.273.586.720	283.066.705.881
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000	3.500.000.000	4.661.188.853	21.962.000.000	500.000.000
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000	3.500.000.000	4.661.188.853	1.500.000.000	500.000.000
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				20.462.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000	3.500.000.000	4.661.188.853	21.962.000.000	500.000.000
	Pembiayaan Netto	224.468.126.139	231.830.763.490	233.223.779.421	230.311.586.720	282.566.705.881
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenan	0	0	0	0	0
	TOTAL APBD	2.475.694.181.561	2.515.543.766.981	2.471.976.715.960	2.721.790.608.383	2.764.660.686.041

Sumber: BPKD telah diaudit BPK

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan terutama berasal dari SILPA APBD Tahun sebelumnya, dimana penggunaan SILPA untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan program, setiap tahunnya cukup besar, meskipun fluktuatif dari Rp. 226.964.677.156 tahun 2020, menjadi Rp. 252.273.586.720 pada realisasi tahun 2023. Sumber lain dari penerimaan pembiayaan ini berasal dari investasi non permanen, pengembalian dana bergulir pemberdayaan ekonomi.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dalam periode 2015-2019 digunakan untuk penyertaan modal bagi BUMD, yang nilainya juga fluktuatif tergantung dari kewajiban pemenuhan modal pemerintah dan kondisi keuangan daerah. Penyertaan Modal pemerintah realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 2.500.000.000, turun menjadi Rp. 1.500.000.000 pada realisasi tahun 2023.

c. Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto, yang merupakan selisish antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan juga menunjukkan nilai yang fluktuasi. Realisasi Pada tahun 2020 Pembiayaa Netto sebesar Rp. 224.464.677.156, menjadi Rp. 250.773.586.720 pada realisasi tahun 2023.

Tabel 2. 126. Neraca Daerah Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET	3.821.069.295.194	3.911.948.544.252	3.963.260.372.900	4.101.411.948.020	3.944.193.230.937
1.1.	Aset Lancar	334.385.541.117	303.689.841.938	326.804.296.244	342.081.869.725	232.035.233.375
1.1.1.	Kas	235.338.363.490	237.896.308.677	252.315.879.914	283.070.199.734	168.147.992.957
1.1.2.	Piutang	68.270.050.494	56.374.658.834	45.319.836.191	40.863.703.378	37.100.798.686
1.1.3.	Penyisihan Piutang	-22.581.046.248	-22.712.763.969	-18.126.957.626	-17.502.709.156	-17.669.475.427
1.1.34.	Persediaan	53.358.173.381	32.131.638.396	47.295.537.765	35.650.675.769	44.455.917.159
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	172.148.728.547	190.026.561.897	200.023.258.267	205.552.753.897	210.585.853.279
1.2.1.	Investasi Non Permanen	1.957.606.000	-	0	0	0
1.2.1.	Investasi Permanen	170.191.122.547	190.026.561.897	200.023.258.267	205.552.753.897	210.585.853.279
1.3.	Aset Tetap	3.302.706.512.991	3.407.570.958.811	3.420.830.312.851	3.486.023.138.417	3.437.893.696.481
1.3.1.	Tanah	1.140.828.259.989	1.163.562.012.688	1.176.152.583.785	1.184.108.779.392	1.198.338.931.981
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	652.533.397.400	753.068.165.264	836.822.547.917	882.373.706.810	946.449.681.944
1.3.2.	Gedung dan Bangunan	1.177.126.446.160	1.240.530.531.211	1.289.897.025.556	1.381.787.705.179	1.448.062.678.054
1.3.3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.076.444.233.703	2.301.482.181.529	2.489.965.749.007	2.725.897.558.355	2.868.048.866.034
1.3.4.	Aset Tetap Lainnya	257.664.449.294	276.415.289.651	283.712.576.686	282.140.738.126	290.288.244.341
1.3.5.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	574.826.000	859.168.500	718.341.500	812.136.500	718.341.500
1.3.6.	Akumulasi Penyusutan	-	-2,32835E+12	-2.656.438.511.600,11	-	-
		2.002.465.099.556			2.971.097.485.945	3.314.013.047.373
1.4.	Aset Lainnya	11.828.512.539	10.661.181.606	15.602.505.537	67.754.185.981	63.678.447.802

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.4.1.	Tagihan Penjualan Angsuran	-		-	-	0
1.4.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah	160.635.881	152.235.881	140.235.881	166.513.479	166.513.479
1.4.3	Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah Lainnya	-	-	-	-	0
1.4.4.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	0
1.4.5.	Aset Tak Berwujud	6.932.544.428	7.078.607.578	7.381.854.808	5.539.482.154	5.588.658.054
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-4.005.439.899	-5.169.477.112	-6.050.122.591	-4.733.854.606	-5.238.296.102
1.4.6.	Aset Lain-lain	30.796.623.093	29.305.209.020	36.703.590.549	135.692.512.496	124.183.921.233
	Akumulasi Aset Lain-lain	-22.055.850.964	-20.705.393.761	-22.573.053.110	-68.910.467.542	-61.022.348.862
	JUMLAH ASET DAERAH	3.821.069.295.193	3.911.948.544.252	3.963.260.372.900	4.101.411.948.020	3.944.193.230.937
2	KEWAJIBAN					
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	29.383.744.144	32.890.783.259	24.528.832.342	28.950.721.645	14.244.235.495
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	392.491	32.293.194	3.493.853	8.741.354
2.1.2.	Utang Pajak				-	0
2.1.4	Utang Belanja	27.638.251.386	30.864.438.927	21.695.866.593	26.207.338.244	11.255.157.120
2.1.5.	Pendapatan diterima dimuka	1.737.892.758	2.015.003.929	2.790.672.555	2.739.889.548	2.980.337.021
2.1.6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.600.000	10.947.912	10.000.000	-	0
3	EKUITAS	3.791.685.551.050	3.879.057.760.993	3.938.731.540.558	4.072.461.226.375	3.929.948.995.442

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
3.1	EKUITAS	3.791.685.551.050	3.879.057.760.993	3.938.731.540.558	4.072.461.226.375	3.929.948.995.442
3.1.1	Ekuitas	3.791.685.551.050	3.879.057.760.993	3.938.731.540.558	4.072.461.226.375	3.929.948.995.442
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.821.069.295.194	3.911.948.544.252	3.963.260.372.900	4.101.411.948.020	3.944.193.230.937

Neraca Daerah Kabupaten Wonogiri (2020–2024) terdiri dari :

1. Aset Daerah

Secara umum, total aset daerah Kabupaten Wonogiri mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Tahun 2020: Rp 3,82 triliun
- b. Tahun 2023: Rp 4,10 triliun (puncak tertinggi)
- c. Tahun 2024: Rp 3,94 triliun (turun 3,83% dari 2023)

Penurunan pada tahun 2024 terutama disebabkan oleh menurunnya aset lancar, khususnya kas dan piutang, serta depresiasi dari aset tetap.

a. Aset Lancar

- Menurun signifikan dari Rp 342 miliar (2023) menjadi Rp 232 miliar (2024).
- Komponen kas, yang sempat naik ke Rp 283 miliar di 2023, turun drastis menjadi Rp 168 miliar di 2024.
- Piutang daerah terus menurun sejak 2020, mencerminkan peningkatan efisiensi penagihan atau penurunan aktivitas kredit.

b. Investasi Jangka Panjang

- Stabil meningkat dari Rp 172 miliar (2020) menjadi Rp 210,6 miliar (2024), menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan investasi daerah, meski seluruhnya kini bersifat permanen.

c. Aset Tetap

- Naik dari Rp 3,30 triliun (2020) menjadi Rp 3,44 triliun (2024).
- Aset tanah, bangunan, jalan dan mesin mengalami pertumbuhan positif setiap tahun, menandakan ekspansi dan pembangunan infrastruktur daerah.
- Namun, terjadi akumulasi penyusutan yang cukup besar: dari Rp 2,00 triliun (2020) menjadi Rp 3,31 triliun (2024), menekan nilai buku aset tetap.

d. Aset Lainnya

- Fluktuatif, dengan lonjakan besar di 2023 akibat kenaikan nilai aset lain-lain (mencapai Rp 135 miliar), kemungkinan berasal dari pengakuan ulang atau revaluasi aset non-produktif.
- Aset tak berwujud relatif kecil dan stagnan.

2. Kewajiban Daerah

Total kewajiban jangka pendek menurun tajam dari Rp 28,9 miliar (2023) menjadi Rp 14,2 miliar (2024), mencerminkan kinerja pembayaran utang jangka pendek yang baik.

- a. Utang belanja berkurang drastis dari Rp 26,2 miliar ke Rp 11,2 miliar.
- b. Pendapatan diterima dimuka meningkat ke Rp 2,98 miliar, menunjukkan potensi pengakuan pendapatan di tahun-tahun berikutnya.
- c. Tidak ada kewajiban jangka panjang yang tercatat secara eksplisit, mengindikasikan profil risiko fiskal yang relatif aman.

3. Ekuitas Daerah

Ekuitas terus bertumbuh dari Rp 3,79 triliun (2020) menjadi Rp 4,07 triliun (2023), namun sedikit menurun di 2024 menjadi Rp 3,93 triliun, sejalan dengan penurunan aset. Penurunan ekuitas di 2024 bersumber dari penurunan kas dan piutang, serta depresiasi yang meningkat. Meski begitu, ekuitas tetap mendominasi struktur neraca (lebih dari 99%), menunjukkan kestabilan keuangan daerah dalam jangka panjang.

2.2.2 Proyeksi Keuangan Tahun 2026-2030

Berdasarkan data perkembangan realisasi pendapatan dari setiap komponen pendapatan pada APBD kabupaten Wonogiri periode 2020-2024, dipetakan berbagai permasalahan, kendala dan hambatan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, sehingga dalam periode RPJMD 2025-2029, kebijakan yang dilaksanakan dalam upaya optimalisasi pendapatan adalah melakukan penataan internal dan membangun koordinasi dengan pihak external, utamanya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, karena sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari dana transfer.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam tahun 2025-2029 tersebut adalah :

1. Pajak Daerah.

- a. Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah.
 - 1) Melakukan perluasan pembayaran pajak melalui bank (multikanal) dan tempat lainnya.
 - 2) Melakukan pelayanan pajak dalam rangka mempermudah pembayaran pajak daerah (jemput bola).
- b. Peningkatan Law Enforcement.

- 1) Memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.
 - 2) Meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait dalam hal penagihan piutang pajak daerah.
- c. Intensifikasi Pajak Daerah.
- 1) Persiapan pelaksanaan online terhadap 4 (empat) jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan **Pajak Parkir**.
 - 2) Membangun sistem informasi pajak daerah terkonsolidasi.
 - 3) Melakukan pemutakhiran data subjek dan objek PBB-P2.
 - 4) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi dan percepatan penerimaan DBH pajak daerah utamanya pendapatan opsen pajak kendaraan bermotor baik dari penagihan maupun penanganan piutang.
 - 5) Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan Stakeholder yang terkait dengan penentuan potensi pajak daerah.
 - 6) Membangun sistem terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri, BPN, PPAT, dan Bank dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB secara online.
 - 7) Meningkatkan kerjasama dengan DJP dalam rangka pertukaran data dan informasi terkait perpajakan.
 - 8) Peningkatan kualitas pelayanan seluruh jenis pajak daerah.
 - 9) Pemasangan alat fiscal elektronik untuk Pajak Restoran, guna meningkatkan akurasi perhitungan terhadap obyek pajak.
- d. Ekstensifikasi Pajak Daerah.
- 1) Melakukan perluasan basis Pajak Daerah.
 - 2) Reklasifikasi aktifitas tempat wisata dan rekreasi keluarga yang dikelola oleh swasta dan BUMD menjadi klasifikasi jenis hiburan sehingga dapat dijadikan sebagai objek pajak hiburan.
 - 3) Menyesuaikan tarif kelas jalan sebagai dasar pengenaan pajak reklame.
 - 4) Optimalisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendorong pengalihan penyelenggaraan jenis reklame papan menjadi jenis reklame LED.
 - 5) Mendorong kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Parkir.
 - 6) Penyesuaian NJOP PBB pada zona komersial mendekati harga pasar.
 - 7) Pengenaan pajak restoran terhadap jenis usaha restoran.

2. Retribusi Daerah.
 - a. Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah.
 - 1) Penerapan e-Retribusi dalam pemungutan retribusi daerah.
 - 2) Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi.
 - 3) Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, sebagian pelayanan Retribusi Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan melalui Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).
 - b. Peningkatan Law Enforcement.
 - 1) Membuat perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan Bank dalam rangka pembayaran retribusi daerah.
 - c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah.
 - 1) Melakukan penyesuaian tarif beberapa jenis retribusi Daerah.
 - 2) Melakukan pembaharuan sistem pelayanan dan pembayaran Retribusi.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
 - a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
 - b. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
 - c. Memperkuat struktur permodalan BUMD melalui penyertaan modal.
 - d. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga.
 - e. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
4. Kebijakan Dana Perimbangan.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan pemenuhan berbagai persyaratan atas usulan dana perimbangan, guna meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan, baik melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak DAK, serta perolehan DAU dan pecukupan data teknis usulan kepada pemerintah pusat
5. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari hibah, dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan otonomi

khusus dan bantuan keuangan dari provinsi.

Dengan mendasarkan pada permasalahan utama pembangunan daerah, serta prioritas utama pembangunnn daerah, maka kebijakan belanja daerah tahun 2025-2029 adalah :

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN, Belanja Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
2. Belanja daerah dialokasikan untuk memenuhi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan non pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
3. Fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana terutama dengan selalu memberikan pemahaman berkelanjutan PHBS.
4. Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak diantaranya pada sektor ketenagakerjaan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan optimalisasi pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial.
5. Pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha utamanya UMKM dan IKM yang terdampak, dengan program program stimulus sesuai kewenangan daerah.
6. Penyediaan Dana Belanja Tak Terduga yang mencukupi, untuk antisipasi terjadinya bencana dan kejadian lain berdampak besar.
7. Memenuhi alokasi belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, sedangkan *mandatory* untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi dan belanja belanja penunjang lainnya.
8. Mengakomodir masukan usulan pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam forum musyawarah dan koordinasi dibidang perencanaan;
9. Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). P2DD adalah singkatan dari Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Satgas P2DD dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021. Tujuan pembentukan Satgas P2DD adalah untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi di daerah, terutama dalam hal

elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Berikut adalah beberapa poin penting tentang Satgas P2DD:

Tujuan:

- a. Mendorong implementasi ETPD.
- b. Meningkatkan transparansi dan tata kelola keuangan daerah.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan publik.
- d. Mendukung keuangan inklusif.
- e. Mempercepat pemulihan ekonomi daerah dan nasiol

Landasan:

Keppres Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Kegiatan:

- Menginisiasi langkah nyata untuk mempercepat ETPD.
- Mendorong penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk transaksi belanja pemerintah daerah. Mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat.

Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dan belanja daerah tersebut di atas, maka proyeksi pendapatan dan belanja daerah periode 2025-2030 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 127. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026-2030

No.Rek	Uraian	BASELINE Tahun 2025 (Rp)	PROYEKSI				
			Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2027 (Rp)	Tahun 2028 (Rp)	Tahun 2029 (Rp)	Tahun 2030 (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	333.752.057.047	348.824.997.030	361.619.457.056	392.671.779.442	432.558.010.059	453.886.369.693
4.1.01	Pajak Daerah	124.920.000.000	126.785.000.000	128.750.000.000	130.725.000.000	132.720.000.000	134.695.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	182.605.061.322	194.665.124.605	203.021.577.955	229.638.503.955	264.235.940.955	281.936.782.455
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.539.654.954	22.450.804.380	24.458.418.950	27.309.784.242	30.065.121.953	32.175.501.993
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.687.340.771	4.924.068.045	5.389.460.151	4.998.491.245	5.536.947.151	5.079.085.245
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.047.801.100.000	1.445.512.252.000	1.445.512.252.000	1.445.512.252.000	1.445.512.252.000	1.445.512.252.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.948.901.100.000	1.353.170.033.000	1.353.170.033.000	1.353.170.033.000	1.353.170.033.000	1.353.170.033.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	98.900.000.000	92.342.219.000	92.342.219.000	92.342.219.000	92.342.219.000	92.342.219.000
	Jumlah Pendapatan	2.381.553.157.047	1.794.337.249.030	1.807.131.709.056	1.838.184.031.442	1.878.070.262.059	1.899.398.621.693
5	BELANJA DAERAH						
5.1	BELANJA OPERASI	1.935.394.012.845	1.521.816.081.463	1.561.331.405.369	1.584.963.227.021	1.654.067.685.107	1.679.654.232.355
5.1.01	Belanja Pegawai	1.362.409.116.292	1.158.497.363.658	1.181.591.082.634	1.205.222.904.286	1.229.327.362.372	1.253.913.909.620
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	532.440.344.753	357.636.432.205	357.558.037.135	357.558.037.135	357.558.037.135	357.558.037.135
5.1.04	Belanja Subsidi	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	39.373.551.800	4.511.285.600	21.011.285.600	21.011.285.600	61.011.285.600	62.011.285.600
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	621.000.000	621.000.000	621.000.000	621.000.000	5.621.000.000	5.621.000.000
5.2	BELANJA MODAL	152.424.524.145	80.030.653.375	80.030.653.375	95.030.653.375	90.030.653.375	90.030.653.375
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.518.300.000	1.518.300.000	1.518.300.000	1.518.300.000	1.518.300.000	1518300000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.039.612.883	41.478.940.143	41.478.940.143	41.478.940.143	41.478.940.143	41.478.940.143
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.296.264.592	10.720.145.252	10.720.145.252	25.720.145.252	20.720.145.252	20.720.145.252
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	64.791.473.260	26.194.850.260	26.194.850.260	26.194.850.260	26.194.850.260	26.194.850.260
5.2.05	Belanja Modal Aset Tatap Lainnya	2.773.873.410	113.417.720	113.417.720	113.417.720	113.417.720	113.417.720
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

No.Rek	Uraian	BASELINE Tahun 2025 (Rp)	PROYEKSI				
			Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2027 (Rp)	Tahun 2028 (Rp)	Tahun 2029 (Rp)	Tahun 2030 (Rp)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.869.058.980	6.869.058.980	6.869.058.980	6.869.058.980	6.869.058.980	6.869.058.980
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.869.058.980	6.869.058.980	6.869.058.980	6.869.058.980	6.869.058.980	6.869.058.980
5.4	BELANJA TRANSFER	384.526.112.540	372.414.650.740	372.414.650.740	372.414.650.740	372.414.650.740	372.414.650.740
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.714.531.240	13714531240	13714531240	13.714.531.240	13.714.531.240	13.714.531.240
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	370.811.581.300	250.053.184.000	250.053.184.000	250.053.184.000	250.053.184.000	250.053.184.000
	ADD		108.646.935.500	108.646.935.500	108.646.935.500	108.646.935.500	108.646.935.500
	Jumlah Belanja	2.479.213.708.510	1.981.130.444.558	2.020.645.768.464	2.059.277.590.116	2.123.382.048.202	2.148.968.595.450
	Total Surplus/(Defisit)	-97.660.551.463	-186.793.195.528	-213.514.059.408	-221.093.558.674	-245.311.786.143	-249.569.973.757
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	98.160.551.463	88.000.000.000	88.000.000.000	109.600.000.000	102.400.000.000	68.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	98.160.551.463	88.000.000.000	88.000.000.000	88.000.000.000	88.000.000.000	88.000.000.000
6.1.0	Pencairan Dana Cadangan				21.600.000.000	14.400.000.000	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000	12.700.000.000	12.700.000.000	12.700.000.000	700.000.000	700.000.000
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000
6.2.0	Pembentukan dana cadangan		12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000	12.700.000.000	12.700.000.000	12.700.000.000	700.000.000	700.000.000
	Pembiayaan Netto	97.660.551.463	75.300.000.000	75.300.000.000	96.900.000.000	101.700.000.000	67.300.000.000
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenan	0	0	0	0	0	0
	TOTAL APBD	2.479.213.708.510	1.981.130.444.558	2.020.645.768.464	2.059.277.590.116	2.123.382.048.202	2.148.968.595.450

Sumber: BPKD Kabupaten Wonogiri

2.2.3 Alternatif Sumber Pendapatan Lain

Alternatif pembiayaan daerah meliputi pinjaman, kerjasama dengan sektor swasta (*Public Private Partnership/PPP*), dan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah yang belum dioptimalkan. Berikut adalah rincian alternatif pembiayaan daerah:

1. Pinjaman Daerah

Pemerintah daerah dapat mengajukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank dan non-bank, serta lembaga keuangan lain yang sah. Pinjaman daerah dapat berupa pinjaman jangka pendek, menengah, atau panjang. Sumber pinjaman daerah juga dapat berasal dari penerusan pinjaman dalam negeri atau luar negeri melalui pemerintah pusat, sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.

2. Kerjasama Sektor Swasta (Public Private Partnership/PPP)

Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan proyek publik lainnya. PPP dapat melibatkan berbagai skema, seperti BOT (Build-Operate-Transfer), BOOT (Build-Own-Operate-Transfer), dan skema lainnya. Melalui PPP, pemerintah dapat mengurangi beban anggaran APBD dan memanfaatkan keahlian serta modal dari sektor swasta.

Salah satu bentuk kerja sama Kabupaten Wonogiri dengan sektor swasta dan mitra internasional diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT Djarum serta kemitraan dengan IUWASH, sebuah program USAID di Indonesia. Kolaborasi ini berfokus pada penyediaan sambungan air bersih melalui PDAM, peningkatan akses air minum layak, serta perbaikan sanitasi aman yang diiringi dengan perubahan perilaku hygiene masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat Wonogiri secara berkelanjutan.

3. Pemanfaatan Sumber Pendapatan Daerah yang Belum Dioptimalkan

Pemerintah daerah dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak daerah, retribusi daerah, pengembangan pariwisata, dan pengelolaan aset daerah. Peningkatan PAD dapat memberikan sumber pembiayaan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Pengelolaan aset daerah yang lebih efisien juga dapat memberikan pendapatan tambahan.

4. *Pembiayaan Kreatif lainnya:*

Selain skema di atas, pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan berbagai pembiayaan kreatif lainnya, seperti Land Capture Value (LVC) yang memanfaatkan peningkatan nilai tanah akibat pembangunan perkotaan, dan pembiayaan berbasis aset (*asset-based financing*).

Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan dana kelolaan, pasar modal, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Pemanfaatan berbagai alternatif pembiayaan daerah sangat penting untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi keterbatasan anggaran APBD. Dengan pembiayaan yang tepat dan inovatif, pemerintah daerah dapat mencapai target pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Gambaran kondisi Kabupaten Wonogiri yang telah diuraikan menunjukkan fakta bahwa masih ada persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan. Permasalahan pembangunan daerah juga tidak terlepas dari pengaruh global, regional, dan nasional, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi global, serta berbagai kebijakan di tataran global dan nasional. Kondisi lingkungan global, regional, dan nasional yang semakin dinamis dan *unpredictable* dalam jangka menengah akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri lima tahun kedepan.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan merupakan kesenjangan atau gap yang terjadi antara kinerja yang dicapai saat ini dengan rencana atau standar yang ada, serta apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dengan kondisi riil yang terjadi saat ini. Gap yang terjadi dipengaruhi faktor penyebab, baik faktor yang mendorong keberhasilan maupun kegagalan, yang harus dilakukan analisis dalam rangka menyusun perencanaan selanjutnya.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pembangunan daerah makro yang sifatnya lintas sektor dan yang akan diintervensi melalui *cross cutting strategy*. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis gambaran umum daerah Kabupaten Wonogiri yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum, serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2021-2026. Permasalahan

pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri yang masih relevan dalam lima tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut.

2.3.1.1. ASPEK GEOGRAFI : Belum Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana

Tuntutan kebutuhan akan sumber daya alam semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitasnya. Ketersediaan sumber daya alam bersifat tetap, bahkan semakin menurun akibat eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan. Kondisi ini yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Wonogiri semakin menurun, ditunjukkan dengan terlampauinya daya dukung daya tampung air dan pangan.

Beberapa tekanan lingkungan seperti perubahan tata guna lahan, peningkatan produksi sampah, keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah, dan pencemaran lingkungan. Tekanan lingkungan hidup di Kabupaten Wonogiri ditunjukkan melalui indikator indeks kualitas lingkungan hidup. Permasalahan tersebut dikarenakan adanya perubahan tutupan lahan, masih rendahnya pengawasan dan pemantauan terhadap industri penghasil limbah, masih rendahnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah, serta masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan limbah.

Dampak perubahan iklim juga semakin dirasakan di Kabupaten Wonogiri, terutama ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara dan anomaly cuaca yang tidak dapat diprediksi. Perubahan iklim terjadi sebagai dampak dari meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) akibat aktivitas ekonomi dan penduduk yang belum diimbangi dengan upaya untuk menurunkan emisi GRK. Salah satunya adalah belum optimalnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi.

Permasalahan lain terkait dengan kualitas lingkungan hidup adalah masih rendahnya luasan tutupan lahan di Kabupaten Wonogiri yang dipengaruhi oleh masih adanya lahan kritis yang perlu direhabilitasi serta masih rendahnya penambahan industri pengolah hasil hutan yang memperoleh sertifikasi verifikasi legalitas kayu. Rendahnya luasan tutupan lahan juga mempengaruhi ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penurunan kualitas air akibat adanya pencemaran air akibat kegiatan masyarakat seperti kegiatan industri, kegiatan domestik dan pertanian sehingga kandungan bahan-bahan pencemar mudah untuk masuk dan

mencemari badan air tersebut. Sedangkan penurunan kuantitas air yang terjadi diakibatkan oleh keadaan geografis berupa karakteristik hidrologi pada kawasan karst dan minimnya curah hujan serta kegiatan masyarakat di daerah hulu DAS yang eksploitatif terhadap hutan.

Permasalahan sumber daya air tidak hanya terkait ketersediaan air, namun lebih luas permasalahannya adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air disebabkan kurangnya sarana tampungan air baku dan rusaknya jaringan irigasi untuk pertanian.

Selain permasalahan sumber daya air permukaan sebagaimana digambarkan sebelumnya, di Kabupaten Wonogiri juga terjadi peningkatan pemanfaatan air tanah yang berpotensi menyebabkan terjadinya penurunan lahan. Untuk itu pengendalian dan pengawasan harus tetap dilaksanakan untuk semakin menurunkan laju pengambilan air tanah utamanya pada wilayah cekungan air tanah (CAT) kritis.

Penurunan kualitas lahan juga terjadi di Kabupaten Wonogiri sebagai akibat belum optimalnya produktivitas pertambangan dan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Potensi pertambangan di Kabupaten Wonogiri memiliki sebaran komoditas yang beragam dan cukup melimpah. Potensi mineral bukan logam dan batuan harus dipetakan dengan detail berdasarkan depositnya dan perlu mendasari aspek tata ruang karena rangkaian aktivitas pertambangan sering bersinggungan dengan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan, antara lain, berkurangnya vegetasi hutan, tumbuhan, dan lapisan tanah. Hal ini sudah terlihat wilayah sub DAS Wiroko yang ditandai dengan banjir Apabila terjadi hujan yang lebat. Perlu dorongan untuk melaksanakan pertambangan dengan baik (*good mining practice*) agar dapat mewujudkan keseimbangan antara nilai ekonomis dan nilai lingkungan.

Kondisi tersebut akhirnya berdampak pada terjadinya bencana yang juga tidak dapat diprediksi, apalagi Kabupaten Wonogiri sebagai daerah dengan tingkat risiko bencana sedang. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, masih terbatasnya jumlah pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system/EWS*) di wilayah rawan bencana, masih kurangnya edukasi pada masyarakat tentang penanggulangan bencana, masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kedaruratan bencana, serta dalam perhitungan kebutuhan pascabencana dan rehabilitasi rekonstruksi bencana. Semua permasalahan terkait penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta penyelenggaraan penanggulangan

bencana dipengaruhi oleh kebijakan dan penerapan tata ruang. Namun, permasalahan yang terjadi justru adalah belum optimalnya ketersediaan rencana tata ruang serta implementasi pemanfaatan ruang dan tertib ruang yang juga belum optimal.

2.3.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT : Belum Optimalnya

Kualitas Hidup Masyarakat

Kualitas hidup masyarakat dapat digambarkan dengan kondisi sosial kesejahteraan masyarakat, dan daya saing sumber daya manusia. Kondisi kesejahteraan masyarakat dapat diindikasikan dengan angka kemiskinan. Cukup tingginya kemiskinan di Kabupaten Wonogiri masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Kabupaten Wonogiri masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan provinsi dan angka nasional. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan periode 5 tahun sebelumnya, akan tetapi belum memenuhi target RPJMD saat ini.

Di sisi lain, rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cukup besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa bukan hanya jumlah absolut penduduk miskin yang menjadi permasalahan utama di Kabupaten Wonogiri, tetapi juga ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk miskin.

Selain melihat karakteristik umum, kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi, tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga dari permasalahan sumber daya manusia seperti rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan penduduk miskin yang disebabkan belum optimalnya akses layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kondisi kemiskinan juga ditandai dengan permasalahan penyediaan rumah yang layak huni, layanan air minum, dan sanitasi layak termasuk di dalamnya aman serta masih adanya kawasan permukiman kumuh yang sebagian besar merupakan kawasan tempat tinggal penduduk miskin.

Permasalahan infrastruktur dasar serta permasalahan aksesibilitas di daerah dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi masih menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan kondisi geografis, setiap wilayah memiliki karakteristik yang ditentukan oleh letak geografis, kondisi topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan hingga tingkat kerawanan

terhadap bencana. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap karakteristik potensi sumber daya alam yang menjadi salah satu modal dalam kegiatan perekonomian masyarakat

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan mengingat peran sumber daya manusia sebagai motor penggerak serta bagian dari proses dan tujuan pembangunan, Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri selama ini dilakukan dengan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan kecukupan ekonomi masyarakat sehingga tercapai manusia Kabupaten Wonogiri yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Namun demikian kualitas hidup sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri masih belum optimal yang disebabkan karena belum optimalnya penyediaan layanan kebutuhan dasar masyarakat secara merata dan inklusif, terutama kualitas akses pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pangan.

Keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia (SDM) salah satunya diukur dari nilai IPM. Isu yang terkait dalam keberhasilan pembangunan SDM adalah peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan dan ketrampilan, menciptakan manusia yang sehat dan produktif serta menciptakan peluang kerja dan usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan IPM Kabupaten Wonogiri selama 10 Tahun dari tahun 2013-2022 mengalami kenaikan, walaupun dalam rentang waktu 10 tahun tersebut juga mengalami penurunan. Meskipun mengalami kenaikan, dibandingkan dengan SUBOSUKAWONOSRATEN, Wonogiri menempati IPM terendah

IPM Kabupaten Wonogiri berada dibawah nilai IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini menunjukkan daya saing SDM Kabupaten Wonogiri masih relatif lebih rendah. Kualitas sumberdaya manusia terbagi menjadi 3 faktor yaitu Pengetahuan, Ketrampilan, dan Kemampuan. Kurangnya sarana dan prasarana pelatihan, program pelatihan, pendapatan masyarakat yang rendah, angka harapan lama sekolah masih memerlukan peningkatan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya serta dan derajat kesehatan menjadi permasalahan dalam pengembangan kualitas SDM.

Harapan lama sekolah di kabupaten Wonogiri masih berada dibawah propinsi dan masih di bawah nasional disebabkan masih belum optimalnya perluasan akses dan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Wonogiri, yang ditandai, antara lain, masih rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, adanya

kesenjangan layanan pendidikan, serta masih kurangnya mutu pendidikan.

Kualitas sumber daya manusia juga terkait dengan derajat kesehatan masyarakat yang diukur dengan angka harapan hidup. Untuk angka harapan hidup Wonogiri menempati posisi lebih tinggi dibandingkan propinsi dan Nasional. Namun demikian, kualitas angka harapan hidup Kabupaten Wonogiri ini dipengaruhi kualitas kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan penguatan sistem kesehatan. Kabupaten Wonogiri masih menghadapi beberapa permasalahan sekaligus tantangan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, yaitu masih tingginya penemuan penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa, masih ditemukannya kasus kematian ibu, bayi, dan anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang juga berkaitan dengan masih rendahnya kualitas kesehatan reproduksi, kepesertaan program keluarga berencana (KB), dan masih tingginya perkawinan usia anak, masih rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan warga lanjut usia (lansia), masih tingginya angka *stunting* dan gizi buruk, belum semua fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan melayani sembilan prioritas layanan unggulan, dan keterbatasan prasarana dan sarana di rumah sakit.

Jaminan perlindungan sosial yang merata dan inklusif saat ini juga masih belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain belum optimalnya sistem jaminan sosial dengan efektif dan tepat sasaran, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial secara inklusif baik secara sosial dan ekonomi terutama untuk kelompok anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya, kapasitas sumber daya manusia untuk memiliki kemampuan menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat usaha kesejahteraan sosial, serta tata kelola dan kelembagaan data untuk penentuan sasaran penerima manfaat, termasuk tata kelola perencanaan dan pembiayaan untuk perlindungan sosial.

Salah satu kondisi yang menggambarkan kualitas hidup masyarakat adalah akses pangan secara mandiri untuk seluruh masyarakat. Namun saat ini akses pangan untuk masyarakat masih belum optimal yang disebabkan antara lain belum optimalnya pemenuhan hak dasar atas pangan secara berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, beragam, seimbang, dan aman, diversifikasi dan hilirisasi pangan lokal, penjaminan akses pangan dan gizi untuk seluruh masyarakat, sistem rantai pasok pangan, dan jaminan kualitas produk pangan, riset dan inovasi serta teknologi pangan, pengendalian harga bahan pangan, serta peran

serta masyarakat untuk penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan.

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di berbagai wilayah, termasuk di daerah seperti Kabupaten Wonogiri dan sekitarnya, telah menimbulkan tekanan besar terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kebutuhan akan permukiman, fasilitas umum, serta ruang ekonomi mendorong terjadinya perubahan pola pemanfaatan lahan dan peningkatan produksi limbah yang belum diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai.

1. Alih Fungsi Lahan yang Tidak Terkendali

Salah satu permasalahan paling nyata adalah alih fungsi lahan produktif, terutama lahan pertanian dan kawasan hijau, menjadi area permukiman, kawasan industri, dan bangunan komersial. Fenomena ini mengakibatkan:

- a. Penurunan kualitas tata ruang ekologis, mengganggu keseimbangan hidrologi dan memperbesar risiko banjir atau kekeringan.
- b. Kehilangan cadangan pangan lokal, karena sawah dan kebun produktif menyusut drastis,
- c. Menurunnya keanekaragaman hayati akibat rusaknya habitat alami.

Alih fungsi ini seringkali dilakukan tanpa perencanaan yang komprehensif dan tanpa analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang ketat, sehingga mengancam keberlanjutan ekosistem lokal.

2. Limbah Domestik dan Industri yang Tidak Terkelola

Peningkatan jumlah penduduk berdampak langsung pada peningkatan volume limbah rumah tangga (domestik). Dalam banyak kasus sistem pengelolaan sampah dan air limbah masih minim, terutama di kawasan padat penduduk dan perdesaan. Sebagian besar limbah domestik langsung dibuang ke sungai atau saluran air, menyebabkan pencemaran air, bau tidak sedap, dan gangguan kesehatan masyarakat. Selain itu, tumbuhnya sentra industri kecil dan menengah (seperti pengolahan makanan, tekstil, dan logam) belum sepenuhnya disertai dengan unit pengolahan limbah cair maupun padat yang memadai. Hal ini mengakibatkan: 1. Pencemaran tanah dan air, karena limbah industri mengandung logam berat, senyawa kimia berbahaya, dan zat toksik lainnya; 2. Potensi konflik sosial antara pelaku industri dan warga terdampak.

2.3.1.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

1. Belum Optimalnya Produktivitas Daerah

Perekonomian Kabupaten Wonogiri masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Selama sepuluh tahun terakhir mengalami fluktuatif (naik turun) yang terjadi pada tahun 2013 – 2022, pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 2020 pada masa covid 19 namun demikian lebih tinggi dibanding Jawa Tengah dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional, akan tetapi bila dibandingkan dengan SUBOSUKAWONOSRATEN berada diposisi terendah setelah kabupaten Sukoharjo, sehingga perlu adanya upaya peningkatan. Secara detail laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri menunjukkan trend meningkat pada tahun 2017-2018, terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018, bahkan lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Namun pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan dari 5,41 menjadi 5,14, sementara pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan sebesar 5,40%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi -1,41%, lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar -2,65%. Pertumbuhan minus tahun 2020 disebabkan karena melemahnya seluruh kegiatan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi yang naik signifikan yakni sebesar 3,35 % angka ini lebih tinggi dari angka Provinsi Jawa Tengah.

Perekonomian Kabupaten Wonogiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, pertumbuhan sektor-sektor unggulan (pertanian dalam arti luas termasuk pangan, industri pengolahan, perdagangan, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pariwisata), kemudahan investasi, infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan distribusi barang jasa, serta wilayah yang kondusif. Tantangan ke depan adalah mewujudkan perekonomian daerah dengan produktivitas tinggi dengan tetap menerapkan ekonomi hijau. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan antarmasyarakat dan antarwilayah.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan perekonomian daerah masih dijumpai berbagai permasalahan yang perlu ditangani, terutama terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi perekonomian daerah. Permasalahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

2. Belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan

Pertumbuhan ekonomi di kabupaten Wonogiri dipengaruhi 3 sektor dominan yaitu:

1. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
2. Sektor Industri Pengolahan; dan
3. Sektor Perdagangan.

Sehingga permasalahan yang terjadi dalam upaya peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan di Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:

a. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Salah satu sektor yang menjadi unggulan perekonomian Kabupaten Wonogiri adalah sektor pertanian. Pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian dinilai belum optimal yang disebabkan belum optimalnya produksi dan produktivitas sektor pertanian sehingga belum memberikan nilai tambah tinggi. Hal ini memberikan dampak pada tingkat kesejahteraan petani yang dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir kondisinya fluktuatif. Beberapa hal yang menjadi penyebab permasalahan tersebut antara lain belum optimalnya modernisasi dalam pembangunan sektor pertanian berbasis riset, teknologi, dan inovasi baik di sisi hulu maupun hilir, pengembangan pertanian terintegrasi (hulu hilir) dan berkelanjutan, pengelolaan pertanian mandiri, upaya menjamin biaya produksi pertanian tidak lebih besar dari pendapatan yang diterima oleh para petani/nelayan, pengembangan pertanian berbasis korporasi, penguatan sistem distribusi produk pertanian, peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku sektor pertanian, dan regenerasi pelaku sektor pertanian.

b. Sektor industri pengolahan

Sektor lain yang menjadi sektor unggulan Kabupaten Wonogiri adalah sektor industri pengolahan. Beberapa permasalahan dan tantangan yang memengaruhi kinerja sektor industri pengolahan antara lain belum optimalnya produksi dan produktivitas industri, terutama industri kecil dan menengah, rendahnya nilai tambah produk industri, serta masih rendahnya kapasitas pelaku industri, terutama industri kecil dan menengah. Faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut antara lain belum optimalnya kapasitas industri kecil dan menengah untuk mampu memiliki nilai tambah tinggi, pengembangan industri berbasis teknologi, riset dan inovasi, dan ramah

lingkungan, kapasitas industri berbahan baku lokal, integrasi rantai pasok antarindustri, kapasitas dan kompetensi pelaku usaha industri pengolahan agar lebih produktif, inovatif, dan kreatif, serta digitalisasi industri pengolahan.

Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh belum optimalnya ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri, infrastruktur pendukung industri pengolahan ramah lingkungan, iklim usaha yang sehat dan iklim kemitraan yang mendorong produktivitas industri pengolahan, serta kawasan peruntukan industri baru.

c. Sektor perdagangan

Sektor perdagangan juga menjadi salah satu sektor yang berkontribusi cukup besar pada perekonomian daerah Kabupaten Wonogiri. Namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan dan tantangan yang dapat mempengaruhi kontribusi sektor perdagangan ini, antara lain belum optimalnya ekspor unggulan daerah, pengurangan ketergantungan impor, standarisasi produk-produk unggulan daerah sehingga mampu bersaing di pasar global dan nasional, pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat, kapasitas dan kompetensi pelaku sektor perdagangan, iklim kemitraan pasar produk unggulan daerah, serta sistem distribusi produk perdagangan.

Dilihat dari laju pertumbuhan PDRB 10 tahun terakhir ada 3 sektor yang laju pertumbuhannya melebihi 3 sektor yang dominan yaitu: Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Jasa Perusahaan. Walaupun belum menggantikan, akan tetapi dapat mendukung ke 3 sektor dominan saat ini.

3. Rendahnya Daya Saing SDM

Peningkatan sumberdaya manusia adalah kunci pengentasan dan atau penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonogiri. Penguatan kesehatan masyarakat diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan akan menjadikan angkatan kerja memiliki daya saing tinggi, baik untuk membuka peluang kerja dan usaha di Kabupaten Wonogiri maupun menjadi pelaku migran ke luar daerah.

Kemiskinan di perkotaan umumnya lebih diakibatkan oleh tidak seimbangannya antara pendapatan yang diperoleh melalui upah kerja dengan standar hidup dan garis kemiskinan. Selain itu, ketiadaan pemilikan aset, upah kerja dan jaringan modal sosial rendah menjadi penyebab, disamping

masih adanya penduduk yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Sedangkan untuk kemiskinan di pedesaan lebih banyak ditentukan oleh terbatasnya sumberdaya dan aset yang dimiliki serta hasil nilai produksi yang rendah (hasil pertanian), yang menyebabkan pendapatan rendah. Peluang usaha dan kesempatan kerja di Kabupaten Wonogiri relatif rendah, menyebabkan masyarakat memilih untuk menjadi pelaku migran untuk mengurangi tekanan penduduk dan perangkap kemiskinan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami naik turun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Di tahun 2013 mengalami kenaikan, di 2 tahun terakhir mengalami penurunan sehingga di tahun 2022 Wonogiri menempati TPT terendah se Jawa Tengah. Namun demikian dengan TPT terendah tidak menjadikan kemiskinan di kabupaten Wonogiri rendah dan pendapatan perkapita menjadi tinggi.

Pembangunan ketenagakerjaan yang berdaya saing mencakup kualitas tenaga kerja yang unggul, tingkat produktivitas tenaga kerja yang tinggi, kesempatan kerja yang terbuka luas, hingga adanya perlindungan tenaga kerja. Beberapa faktor penyebab rendahnya daya saing tenaga kerja antara lain belum optimalnya pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, yang disertai dengan penguatan regulasi tentang vokasi, keahlian dan kompetensi digital, riset dan inovasi, sistem perlindungan tenaga kerja, iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja yang inklusif termasuk penerapan upah minimum yang berkeadilan, serta informasi pasar kerja dalam jangkauan luas berbasis digital yang terintegrasi dengan dunia usaha dunia industri.

4. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian daerah

Ketersediaan infrastruktur menjadi satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, terutama dalam hal kelancaran distribusi barang dan jasa. Salah satu permasalahan yang masih dijumpai dalam penyediaan infrastruktur adalah masih adanya jalan yang belum memenuhi standar jalan kolektor dan masih terdapat ruas jalan yang kondisinya rusak.

Kualitas pelayanan transportasi juga masih perlu ditingkatkan terutama dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan keselamatan dan kelancaran perjalanan transportasi, peningkatan kualitas layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan, dan peningkatan pelayanan di simpul

transportasi serta integrasi antarmoda. Salah satu akar masalah sektor transportasi adalah pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri yang perlu dikendalikan. Hal lain yang masih perlu di kembangkan terkait peningkatan kelembagaan pengelolaan transportasi dan sistem logistik yang lebih efisien serta inklusivitas layanan transportasi yang lebih berpihak kepada kelompok rentan.

Permasalahan lainnya dalam penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air yang disebabkan masih kurangnya sarana tampungan air baku. Terlebih di wilayah Wonogiri bagian Selatan yang merupakan kawasan karst sehingga sangat berpotensi kekurangan air baku atau kekeringan. Air baku selain dimanfaatkan untuk penyediaan air minum juga dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi utamanya kebutuhan industri dan kebutuhan kawasan prioritas (pengembangan pariwisata).

Masih rendahnya konsumsi listrik per kapita juga masih menjadi salah satu permasalahan. Tingkat konsumsi listrik erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan. Potensi konsumsi listrik Kabupaten Wonogiri masih harus terus didorong dan ditingkatkan, juga mendorong pemanfaatan listrik untuk kegiatan produktif. Tingkat availability listrik di Kabupaten Wonogiri ditunjukkan dengan rasio ketersediaan daya listrik.

Pemenuhan sarana prasarana yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat juga masih perlu didorong untuk ditingkatkan seperti pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, serta penyediaan sarana air minum aman dan sanitasi layak bagi masyarakat.

Karakteristik geografis Kabupaten Wonogiri mengakibatkan berbagai macam potensi kebencanaan harus senantiasa diantisipasi (mitigasi). Beberapa potensi bencana diantaranya gempa dan tsunami khususnya di zona selatan, longsor, banjir, kekeringan, puting beliung, serta kebakaran. Selain itu bencana non alam, seperti Pandemi COVID19 dan bahaya wabah lainnya saat ini menjadi perhatian serius

2.3.1.4. ASPEK PELAYANAN UMUM: Kurang Optimalnya Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi ditujukan untuk memampukan pemerintah dalam berkeaja dengan kerangka yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat memperbaiki kualitas kebijakan dan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan

publik termasuk memenuhi harapan dari masyarakat. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Wonogiri dinilai cukup baik, meningkat dari tahun ke tahun, namun masih dijumpai tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan ke depan. Hal tersebut antara lain kelembagaan instansi publik yang masih terfragmentasi sehingga muncul ego sektoral, belum optimalnya transformasi digital tata kelola pemerintahan, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan dinamis, serta kapasitas sumber daya aparatur. Permasalahan lainnya adalah terkait dengan pola kolaborasi dimana pemerintah belum mampu menjadi kolaborator bagi seluruh pihak dalam mencapai tujuan bersama, yang artinya pemerintah belum mampu mengoptimalkan kerja sama antardaerah untuk menciptakan kesejahteraan seluruh daerah dengan merata.

Permasalahan Daerah yang Terkait dengan prioritas Pembangunan daerah

Berikut adalah tabel hasil identifikasi permasalahan Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan prioritas Pembangunan daerah tahun 2025-2029

Tabel 2. 128. Prioritas Pembangunan daerah dalam RKPD 2025 dengan permasalahan Tahun 2025-2029

Prioritas Pembangunan Tahun 2025-2029	Permasalahan Daerah Tahun 2025-2029
1. Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Baru	a. Pertumbuhan ekonomi yang belum maksimal; b. Pertumbuhan Ekonomi yang belum Optimal c. Pertumbuhan investasi yang belum optimal; d. Belum optimalnya pencapaian PDRB Per Kapita Daerah;
2. Membangun Ekonomi Kreatif	a. Pertumbuhan ekonomi yang belum maksimal; b. Digitalisasi produk UMKM yang belum optimal;
3. Membangun Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Berorientasi Kebutuhan Masyarakat	a. Kurangnya kesediaan sarana prasarana pendidikan; b. Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Wonogiri; c. Masih adanya kasus gizi buruk di Kabupaten Wonogiri; d. Masih adanya Angka Kematian Ibu (AKI); e. Masih adanya Angka Kematian Bayi (AKB)
4. Menurunkan Angka Kemiskinan Dan Pengangguran	a. Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri terjadi akibat potensi ekonomi dan besarnya jumlah penduduk yang tidak sebanding. Jumlah penduduk yang tinggi dengan kesempatan kerja di Kabupaten Wonogiri relatif rendah meningkatkan angka pengangguran di Kabupaten Wonogiri.

Prioritas Pembangunan Tahun 2025-2029	Permasalahan Daerah Tahun 2025-2029
	<ul style="list-style-type: none"> b. Masih banyaknya jumlah penganggur di Kabupaten Wonogiri; c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) belum optimal; d. Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); e. Tingginya angka inflasi; f. Masih tingginya Indeks Gini/ ketimpangan;
5. Penguatan Birokrasi Yang Dinamis	<ul style="list-style-type: none"> a. Indeks Reformasi Birokrasi perlu ditingkatkan; b. Indeks Kepuasan Masyarakat perlu ditingkatkan; c. Indeks Pelayanan Publik perlu ditingkatkan; d. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditingkatkan.
6. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Unggul Berbasis Riset Dan Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya implementasi inovasi daerah berbasis riset dan inovasi daerah
7. Peningkatan Sumber Daya Alam Yang Lestari	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya sarana pengelolaan sampah; b. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk air minum perpipaan dan air minum aman; c. Desa Mandiri perlu ditingkatkan; d. Swasembada pangan di daerah belum tercapai; e. Belum optimalnya Desa Tangguh Bencana.

2.3.2 Isu-Isu Strategis

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri dalam lima tahun mendatang yaitu sebagai berikut.

Isu strategis daerah Kabupaten Wonogiri diidentifikasi dengan mempertimbangkan pada permasalahan, lingkungan strategis (global, nasional, maupun daerah), dan potensi yang dimiliki Kabupaten Wonogiri yang relevan dan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan. Isu strategis daerah Kabupaten Wonogiri lima tahun ke depan sebagai berikut:

2.3.2.1 Kualitas Hidup Masyarakat

Kualitas hidup masyarakat salah satunya dapat dinilai dari kualitas sumber daya manusianya. Isu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aspek krusial dalam pembangunan suatu negara. Kualitas SDM mencakup pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan kesejahteraan individu, yang semuanya berkontribusi pada kemampuan mereka untuk berpartisipasi

dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Meningkatkan kualitas SDM memerlukan investasi dalam pendidikan yang berkualitas, akses yang merata ke layanan kesehatan, pelatihan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja, serta upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Kualitas SDM yang baik membantu menciptakan masyarakat yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, pemecahan isu-isu terkait kualitas SDM harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan. Salah satu indikator untuk mengukur kualitas SDM yaitu dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia beserta indikator penyusunnya.

2.3.2.2 Daya Saing Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh tingkat produktivitas sektor-sektor ekonomi yang belum optimal, serta belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai sumber produksi ekonomi daerah. Oleh karena itu, isu ke depan adalah bagaimana memperkuat perekonomian daerah Kabupaten Wonogiri. Peningkatan daya saing ekonomi dilakukan dengan mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah antara lain sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Peningkatan daya saing ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global.

Peningkatan daya saing ekonomi tersebut dilakukan dengan menerapkan ekonomi hijau. Hal ini juga dilakukan mengingat posisi kabupaten Wonogiri yang berada di hulu Sungai Bengawan Solo. Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau (*green investment*), infrastruktur hijau, dan pekerjaan yang ramah lingkungan (*green jobs*) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Peningkatan daya saing ekonomi akan tercapai juga apabila didukung dengan kondisi lingkungan wilayah yang kondusif yang akan menjamin lancar dan amannya semua pihak dalam proses pembangunan ekonomi Kabupaten Wonogiri.

Isu strategis lainnya adalah penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah dalam hal kelancaran perjalanan, distribusi barang dan jasa, serta dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Penyediaan infrastruktur juga diperuntukkan bagi masyarakat (termasuk untuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus) untuk mendukung aktivitas masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan infrastruktur tersebut tetap berprinsip pada infrastruktur yang lebih ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan, serta berpedoman pada rencana tata ruang. Selain dari sisi penyediaan infrastruktur, pertumbuhan jumlah kendaraan juga menjadi isu yang cukup penting untuk dikendalikan.

2.3.2.3 Tingginya angka kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu daerah saat ini. Sejalan dengan amanat SDGs, kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (zero poverty). Permasalahan kemiskinan di kabupaten Wonogiri dapat dilihat dari perspektif data kemiskinan dan penyebab kemiskinan.

Data kemiskinan Kabupaten Wonogiri fluktuatif, dan adanya pandemi covid 19 yang pada tahun 2021 mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk miskin di Wonogiri. Pada periode 2020-2024 selalu terjadi kenaikan standar atau angka Garis Kemiskinan Kabupaten Wonogiri. Akhir tahun 2024 tercatat penduduk miskin Kabupaten Wonogiri sebesar 10,71%. Persentase kemiskinan mengalami peningkatan diakibatkan oleh beberapa hal salah satunya adalah banyaknya jumlah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran).

Pada periode 2020-2024 selalu terjadi kenaikan standar atau angka Garis Kemiskinan Kabupaten Wonogiri. Naiknya standar kemiskinan tersebut menunjukkan naiknya standar kehidupan. Akibat perubahan kenaikan standar kemiskinan tersebut, secara absolut jumlah penduduk miskin juga mengalami fluktuasi. Akhir tahun 2024 tercatat penduduk miskin Kabupaten Wonogiri sebesar 10,71%.

Selain itu, RPJMD akan memiliki baseline data kemiskinan yang cukup besar yang membutuhkan upaya penanggulangan atau penurunan kemiskinan di akhir RPJMD secara signifikan, ditengah kesulitan ekonomi dan keuangan daerah. Berdasarkan faktor penyebab kemiskinan di

Kabupaten Wonogiri dalam dipilah menjadi dua yaitu kemiskinan di perkotaan dan kemiskinan di pedesaan. Kemiskinan di perkotaan umumnya lebih diakibatkan tidak seimbangnya antara pendapatan yang diperoleh melalui upah kerja dengan standar hidup dan garis kemiskinan. Selain itu, ketiadaan pemilikan aset, upah kerja dan jaringan modal sosial rendah menjadi penyebab, disamping masih adanya penduduk yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Sedangkan untuk kemiskinan di pedesaan lebih banyak ditentukan oleh terbatasnya sumberdaya dan aset yang dimiliki serta hasil nilai produksi yang rendah (hasil pertanian), yang menyebabkan pendapatan rendah. Peluang usaha dan kesempatan kerja di Kabupaten Wonogiri relatif rendah, menyebabkan masyarakat memilih untuk menjadi pelaku migran untuk mengurangi tekanan penduduk dan perangkap kemiskinan.

Fenomena kemiskinan senantiasa ada. Peningkatan sumberdaya manusia adalah kunci pengentasan dan atau penanggulangan kemiskinan manusia Kabupaten Wonogiri. Penguatan kesehatan masyarakat diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan ketrampilan akan menjadikan angkatan kerja memiliki daya saing tinggi, baik untuk membuka peluang kerja dan usaha di Kabupaten Wonogiri maupun menjadi pelaku migran ke luar daerah.

2.3.2.4 Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan

Aspek pelayanan dan kepegawaian merupakan salah satu pilar penting dalam bidang pemerintahan. Isu strategis yang tidak bisa diabaikan adalah isu pelayanan dan tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif dan akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Pelayanan dan tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dan kolaboratif, didukung dengan pemanfaatan teknologi dan sumber daya aparatur yang semakin berintegritas, dan mendukung pada pembangunan demokrasi substansial. Pelayanan dan tata kelola pemerintahan akan menjadi kerangka pengarusutamaan transformasi di Kabupaten Wonogiri dalam pembangunan dua puluh tahun ke depan.

2.3.2.5 Pengelolaan Kualitas Lingkungan yang Kurang Optimal

Isu bencana hidrometeorologis merupakan ancaman serius bagi

keamanan dan kesejahteraan manusia serta lingkungan. Bencana seperti banjir, badai, topan, dan kekeringan sering kali disebabkan oleh faktor-faktor cuaca dan iklim yang ekstrem. Perubahan iklim semakin memperparah situasi ini dengan meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologis. Kondisi fisik wilayah yang dipengaruhi oleh aspek topografis, geologis, hidrologis, dan geografis, menyebabkan Kabupaten Wonogiri memiliki potensi risiko bencana hidrometeorologis. Berdasarkan data dari Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2022, Kabupaten Wonogiri memiliki acaman bencana alam (multi hazard) dengan kategori sedang.

2.3.2.6 Pemerataan Pembangunan

Kondisi geografis dengan cakupan wilayah yang sangat luas serta sistem permukiman yang terpencar mengakibatkan Kabupaten Wonogiri memiliki kendala aksesibilitas (keterjangkauan) wilayah, khususnya desa dan perdesaan. Sedangkan aksesibilitas merupakan syarat penting dalam pembangunan wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan dan jembatan serta infrastruktur produksi lain, seperti drainase, bendungan, jaringan irigasi, air bersih, sarana ekonomi pasar, bahkan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan masih harus dilengkapi.

Peningkatan kualitas infrastruktur khususnya jalan sebagai penunjang pengembangan wilayah terus dimaskimalkan, walaupun masih banyak kondisi infrastruktur yang rusak dan butuh perbaikan. Dalam era telekomunikasi dan informasi, keberadaan sarana dan prasarana jaringan telepon dan internet adalah sangat penting, dan hal itu juga masih menjadi permasalahan Kabupaten Wonogiri, karena belum meratanya sarana dan prasarana tersebut, masih ada daerah yang belum terjangkau fasilitas internet, atau kalau ada kondisi masih belum maksimal.

Peningkatan kualitas infrastruktur khususnya jalan sebagai penunjang pengembangan wilayah terus dimaskimalkan, walaupun masih banyak kondisi infrastruktur yang rusak dan butuh perbaikan. Dalam era telekomunikasi dan informasi, keberadaan sarana dan prasarana jaringan telepon dan internet adalah sangat penting, dan hal itu juga masih menjadi permasalahan Kabupaten Wonogiri, karena belum meratanya sarana dan prasarana tersebut, masih ada daerah yang belum terjangkau fasilitas internet, atau kalau ada kondisi masih belum maksimal.

2.3.2.7 Kesenjangan Wilayah (Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah)

Pemerataan hasil-hasil pembangunan menjadi tujuan penring dalam pembangunan wilayah Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan produksi (PDRB) dan PDRB per kapita, terdapat kesenjangan antara wilayah dizona selatan dengan di bagian tengah dan utara. Kenaikan ketimpangan pendapatan antar wilayah di tahun 2020-2024 terutama disebabkan karena tingginya perbedaan PDRB perkapita, terutama di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Wonogiri, Kecamatan Selogiri dan kecamatan Ngadirojo, yang memiliki perbedaan sangat tinggi atau melebihi rata-rata PDRB Perkapita kecamatan se Kabupaten Wonogiri. Disisi lain terdapat beberapa kecamatan, seperti kecamatan Jatiroto, Kismantoro dan Bulukerto, yang memiliki PDRB perkapita berada jauh dibawah rata-rata PDRB Kecamatan se Kabupaten Wonogiri. Indeks williamson berdasarkan data analisis ekonomi ketimpangan menurun. Angka ketimpangan ini dikatagorikan ketimpangan pendapatan yang rendah antar kecamatan di kabupaten Wonogiri.

Perbedaan perkembangan wilayah diakibatkan oleh faktor produktivitas wilayah dan posisi geografis suatu wilayah. Wilayah dengan tingkat perekonomian rendah memiliki ciri wilayah perbukitan karst, lereng pegunungan dengan produktivitas lahan dan air yang rendah, tingkat kemiskinan tinggi dan keterjangkauan atau aksesibilitas rendah serta jauh dari pusat pust pertumbuhan. Secara geografis berada dizona selatan dan sebagian kecil dibagian utara. Sebaliknya daerah engan perkembangan tinggi berada di zona tengah, dengan posisi geografis yang strategis, tingkat aksesibilitas tinggi, berada dikoridor jalur transportasi antar kota, berdekatan dengan pusat pusat pertumbuhan, serta secara topografi memiliki zona dataran yang lebih luas sehingga potensi sumberdaya lahan dan air relatif lebih tinggi.

Pembangunan infrastruktur wilayah, seperti jalan dan jembatan, sistem transportasi serta sarana dan prasarana perekonomian khususnya penciptaan pusat pusat produksi menjadi strategi penting dalam pemerataan pembangunan atau mengurangi ketimpangan wilayah di Kabupaten Wonogiri. Sebaliknya untuk pengembangan wilayah tertinggal dilakukan dengan potensi Pengembangan produksi dengan komoditas unggulan perdesaan, dengan didukung oleh sistem infrastruktur transportasi yang memadai.

2.3.2.8 Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang paling vital di Kabupaten Wonogiri adalah sumber daya air. Sebagian wilayah Kabupaten Wonogiri merupakan hulu dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Solo, sehingga pengelolaan lingkungan di wilayah hulu menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan fungsi DAS. Penataan lingkungan harus dilakukan secara kolaboratif bersama masyarakat, terutama dalam mengurangi kegiatan ekonomi yang bersifat eksploitatif terhadap hutan dan ekosistem sekitar. Upaya ini juga perlu diiringi dengan peningkatan keberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan yang ramah lingkungan.

Sumber daya air khususnya untuk peningkatan produktifitas pertanian masih menjadi masalah utama, pembangunan sumur pantek untuk irigasi dengan pemanfaatan air dalam harus benar-benar memperhatikan potensi bahaya yang ditimbulkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air.

Kabupaten Wonogiri memiliki karakter geografis yang kompleks dengan tingkat kerentanan terhadap berbagai bencana alam, seperti gempa bumi dan potensi tsunami di wilayah selatan, banjir di dataran rendah, genangan air di kawasan perkotaan dan ibu kota kecamatan, longsor di wilayah perbukitan, serta kebakaran dan kekeringan yang melanda hampir seluruh wilayah. Selain itu, tekanan terhadap sumber daya air juga semakin tinggi. Penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku diakibatkan oleh terganggunya kawasan tangkapan air (catchment area), serta meningkatnya aktivitas masyarakat yang tidak ramah lingkungan di sekitar badan air. Hal ini menjadi ancaman serius terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Wilayah Wonogiri juga memiliki kawasan karst yang luas, terutama di Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu, yang merupakan ekosistem unik dan rentan terhadap kerusakan. Kawasan ini tidak hanya penting sebagai penyangga ketersediaan air tanah di musim kemarau, tetapi juga sebagai habitat keanekaragaman hayati yang khas. Oleh karena itu, perlindungan Kawasan Karst Gunung Sewu dari aktivitas perusakan lingkungan, seperti penambangan liar, pembangunan tanpa kajian lingkungan, dan alih fungsi lahan, harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan perlindungan lingkungan.

Selain itu, kondisi lahan kritis yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Wonogiri mengancam terjadinya degradasi lahan, memperbesar

risiko bencana seperti longsor dan banjir, serta mengancam kelestarian keanekaragaman hayati lokal. Rehabilitasi lahan kritis menjadi langkah penting yang harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan melalui kegiatan penghijauan, agroforestry, dan konservasi tanah dan air.

Sumber daya hutan juga memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas lingkungan. Namun, tekanan terhadap kawasan hutan masih cukup tinggi akibat pemanfaatan berlebih oleh masyarakat, pencurian kayu, kebakaran hutan, serta konflik antara masyarakat dan satwa liar. Pengelolaan hutan negara pun masih menghadapi tantangan dalam memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan.

Kabupaten Wonogiri juga memiliki potensi sumber daya tambang dan mineral yang tinggi secara ekonomi. Namun, penambangan liar dan tidak berizin (PETI) seringkali merusak lingkungan. Implementasi prinsip penambangan berwawasan lingkungan harus diperkuat, dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan ilegal perlu ditingkatkan dengan melibatkan penegak hukum secara aktif. Tantangan lain adalah berpindahnya kewenangan perizinan tambang dari kabupaten/kota ke provinsi, yang menyebabkan lemahnya kontrol di tingkat lokal.

Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Wonogiri tergolong masih baik dibandingkan daerah lain, berkat tingginya tutupan hutan serta rendahnya tingkat pencemaran udara dan air. Namun demikian, tantangan lingkungan lainnya adalah meningkatnya jumlah timbulan sampah seiring pertumbuhan penduduk. Cakupan pelayanan persampahan secara keseluruhan masih berada di bawah 72 persen, meskipun pelayanan di kawasan perkotaan sudah mencapai sekitar 93 persen. Dari empat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada, sebagian besar telah melampaui usia pakainya dan 90 persen di antaranya masih menggunakan sistem controlled landfill, sementara sisanya masih menggunakan sistem open dumping. Kondisi ini memerlukan perhatian serius, termasuk peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah dan kampanye perubahan perilaku masyarakat.

Secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Wonogiri harus diarahkan pada pendekatan yang berkelanjutan, adaptif, dan partisipatif, selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Upaya perlindungan ekosistem karst, pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, serta rehabilitasi lahan kritis harus menjadi fokus utama

dalam agenda pembangunan lingkungan ke depan.

Tabel 2. 129. Persandingan Isu Strategis Global, Nasional, dan Provinsi.

ASPEK	PERMASALAHAN POKOK	ISU KLHS WONOGIRI	ISU NASIONAL	ISU PROVINSI JATENG	ISU STRATEGIS WONOGIRI
ASPEK GEOGRAFI	Belum Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana	Tingginya tingkat resiko bencana dan dampak perubahan iklim		5. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Pengelolaan Kualitas Lingkungan yang Kurang Optimal
		Potensi penurunan sumberdaya alam (Air dan Karst)			Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam
		Pengelolaan Kualitas Lingkungan yang Kurang Optimal			
		Peningkatan Alih Fungsi Lahan Hijau Dan Pertanian			
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Belum Optimalnya Kualitas Hidup Masyarakat	Tingginya Angka Kemiskinan	1. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	2. Penurunan tingkat kemiskinan	Tingginya angka kemiskinan
		Kesenjangan Sosial		7. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat	
		Ketimpangan Gender			
		Resiko Kerawanan Sosial			
ASPEK DAYA SAING	Rendahnya daya saing SDM	Derajat Kesehatan Masyarakat Belum Optimal	5. Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia	6. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Kualitas Hidup Masyarakat
	Belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan	Kerawanan Ketahanan Pangan	3. Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif	1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Daya Saing Ekonomi

ASPEK	PERMASALAHAN POKOK	ISU KLHS WONOGIRI	ISU NASIONAL	ISU PROVINSI JATENG	ISU STRATEGIS WONOGIRI
				3. Ketahanan pangan yang berkelanjutan	
	Belum Optimalnya Produktivitas Daerah		2. Rendahnya Produktivitas		
	Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian daerah	Kurangnya Pemerataan Sarana Prasarana		4. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pemerataan Pembangunan
					Kesenjangan Wilayah (Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah)
ASPEK PELAYANAN UMUM	Kurang Optimalnya Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan	Kurang Optimalnya Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan	4. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	8. Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan
		Rendahnya Pendapatan Asli Daerah			

2.3.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Penyusunan RPJMD Kabupaten Wonogiri dilakukan dengan memperhatikan prinsip dan arah kebijakan nasional serta komitmen global, salah satunya adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). SDGs merupakan agenda pembangunan global yang terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan lebih dari 200 indikator yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kerangka perencanaan daerah, RPJMD Kabupaten Wonogiri telah mengintegrasikan tujuan dan indikator SDGs secara sistematis ke dalam rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, hingga program prioritas pembangunan daerah. Proses integrasi ini dilakukan melalui penyelarasan indikator makro daerah dan indikator kinerja perangkat daerah dengan indikator yang termuat dalam SDGs, sehingga pembangunan di Kabupaten Wonogiri dapat berkontribusi langsung terhadap pencapaian target nasional SDGs.

Fokus utama RPJMD mencakup isu-isu strategis seperti pengurangan kemiskinan (SDG 1), peningkatan kualitas pendidikan (SDG 4), pelayanan kesehatan (SDG 3), ketahanan pangan (SDG 2), pembangunan infrastruktur dan pemukiman layak (SDG 9 & SDG 11), serta penguatan kelembagaan dan tata kelola yang baik (SDG 16). Pendekatan kewilayahan dan inklusif yang diterapkan juga sejalan dengan prinsip "no one left behind" yang menjadi dasar pelaksanaan SDGs.

TPB/SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan kehidupan sosial, kualitas lingkungan hidup dan menjamin keadilan serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjangan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Wonogiri tidak hanya menjadi dokumen perencanaan lima tahunan, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk mengarahkan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan global secara berkelanjutan.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNANDAERAH



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025–2029 merupakan kerangka strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Wonogiri memiliki sumber daya alamnya yang melimpah. Kekayaan alam yang melimpah ini dapat dikelola melalui pengelolaan sektor pertanian, kehutanan, maupun perikanan sehingga dapat memberikan landasan kuat dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan konteks ini, visi dan misi RPJMD diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Kabupaten Wonogiri dalam menyejahterakan masyarakat. Upaya pencapaian visi dan misi pembangunan ditindaklanjuti dengan perumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Tujuan dan sasaran pembangunan memiliki peran krusial dalam mengoperasionalkan visi dan misi ke dalam program pembangunan yang konkret. Penyusunan tujuan yang spesifik dan terukur akan memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan, sekaligus memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan

Bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta ketahanan sumber daya alam lingkungan dan bencana

3.1. VISI

Visi merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, dimana visi mengenai pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Wonogiri, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah:

“WONOGIRI YANG BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”

Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Wonogiri dijelaskan sebagai berikut.

1. **Berdaya Saing**, Terwujudnya Kabupaten Wonogiri yang berdaya saing secara ekonomi melalui penguatan sektor ekonomi unggulan yang produktif dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi diikuti dengan peningkatan kualitas manusia Wonogiri yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan daya saing. Kondisi ekonomi yang meningkat dan mampu bersaing dengan wilayah sekitar juga didukung dengan peningkatan kualitas, kapasitas dan pemerataan infrastruktur, konektivitas antar wilayah yang terpadu, handal, aman, nyaman, terjangkau, dan merata guna meningkatkan mobilitas warga, kelancaran distribusi barang dan jasa, mengurangi ketimpangan antar wilayah,
2. **Maju**, pokok visi ini memiliki arti bahwa pembangunan ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Wonogiri sebagai wilayah dengan segenap potensi sumber daya alam, sumber daya manusia berprestasi, menuju modernisasi berbasis riset, pemanfaatan teknologi dan kreativitas.
3. **Sejahtera**, Wonogiri Sejahtera dapat digambarkan melalui pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan akses pelayanan publik yang memadai disertai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. **Berkelanjutan**, Seiring dengan Wonogiri melaksanakan pembangunan berkelanjutan maka akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendapatkan lingkungan dan permukiman yang layak dan nyaman, bebas pencemaran dan polusi, serta kondisi alam yang semakin terjaga kelestariannya dengan baik. Pembangunan di Wonogiri yang berkelanjutan juga mempertimbangkan risiko bencana dan menyiapkan mitigasi dari dampak yang ditimbulkan mengingat Wonogiri memiliki potensi dan jenis bencana alam yang beragam karena kondisi geografis.

3.2. MISI

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memerhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) **MISI 1: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing dan berkelanjutan**, Pembangunan ekonomi di tunjukkan dengan proses secara terus menerus untuk mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah yang didukung dengan pembangunan infrastruktur dalam hal distribusi barang dan jasa, serta upaya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, terutama dengan penyediaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dan sesuai dengan standar, peningkatan kelancaran serta keselamatan perjalanan dan transportasi, didukung juga dengan peningkatan kualitas, jaringan transportasi dan pelayanan transportasi umum.
- 2) **MISI 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Didukung Lingkungan Sosial dan Budaya Masyarakat Maju**, Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan ketahanan pangan, perumahan layak, kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, menyediakan jaminan sosial masyarakat dan jaminan keamanan, menciptakan kondisi lingkungan sosial yang kondusif, memberikan ruang yang cukup dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan masyarakat.
- 3) **MISI 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**, pengelolaan birokrasi pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif melalui peningkatan kualitas ASN dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
- 4) **MISI 4: Mewujudkan Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana**, misi ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan serta peningkatan ketahanan bencana daerah.

3.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan melalui arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan sasaran pembangunan RKPD). Perumusan tujuan dan sasaran dari visi, pokok visi, dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI yang ingin diwujudkan dalam lima tahun kedepan adalah **“MEWUJUDKAN WONOGIRI YANG BERDAYASAING, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”**. Kabupaten Wonogiri yang berdaya saing secara ekonomi melalui penguatan sektor ekonomi unggulan yang produktif dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi diikuti dengan peningkatan kualitas manusia Wonogiri yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan daya saing. Kondisi ekonomi yang meningkat dan mampu bersaing dengan wilayah sekitar juga didukung dengan peningkatan kualitas, kapasitas dan pemerataan infrastruktur, konektivitas antar wilayah yang terpadu, handal, aman, nyaman, terjangkau, dan merata guna meningkatkan mobilitas warga, kelancaran distribusi barang dan jasa, mengurangi ketimpangan antar wilayah. Kabupaten Wonogiri yang Maju artinya bahwa pembangunan ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Wonogiri sebagai wilayah dengan segenap potensi sumber daya alam, sumber daya manusia berprestasi, menuju modernisasi berbasis riset, pemanfaatan teknologi dan kreativitas. Kabupaten Wonogiri yang Sejahtera dapat digambarkan melalui pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan akses pelayanan publik yang memadai disertai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan Kabupaten Wonogiri yang Berkelanjutan adalah melaksanakan pembangunan berkelanjutan maka akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendapatkan lingkungan dan permukiman yang layak dan nyaman, bebas pencemaran dan polusi, serta kondisi alam yang semakin terjaga kelestariannya dengan baik. Pembangunan di Wonogiri yang berkelanjutan juga mempertimbangkan risiko bencana dan menyiapkan mitigasi dari dampak yang ditimbulkan mengingat Wonogiri memiliki potensi dan jenis bencana alam yang beragam karena kondisi geografis.

Dan dalam mencapai Tujuan pembangunan tersebut, telah ditetapkan sasaran Pembangunan Kabupaten Wonogiri tahun 2026-2029 yang akan diwujudkan sebagai berikut :

Sasaran 1. Terwujudnya ekonomi yang berdayasaing, dan berkelanjutan

Sasaran ini adalah upaya untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang kuat, inklusif, dan berorientasi pada potensi unggulan lokal sehingga mampu menghadapi tantangan global. *Berdaya saing* menggambarkan kemampuan daerah dalam menghasilkan produk dan jasa yang kompetitif baik di tingkat nasional maupun internasional, sementara *berkelanjutan* menunjukkan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Maksud dari sasaran ini adalah memperkuat fondasi ekonomi Kabupaten Wonogiri melalui optimalisasi sektor unggulan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja agar mampu bersaing di era digital dan globalisasi. Selain itu, sasaran ini menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan sumber daya alam dan sosial sebagai bagian dari pembangunan ekonomi hijau dan inklusif.

Sasaran 2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien, Akuntabel, dan Adaptif

Sasaran ini dimaknai sebagai upaya untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mampu bekerja secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya secara tepat guna (efektif) dan hemat biaya (efisien). Pemerintahan juga dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, sehingga tercipta transparansi dan kepercayaan publik yang tinggi.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, responsif, serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam menghadapi tantangan era digitalisasi, dinamika sosial, dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang maju, produktif, dan berkualitas

Sasaran ini mengandung arti bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada aspek fisik dan infrastruktur semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas manusia sebagai penggerak utama pembangunan. Sumber daya manusia yang maju tercermin dalam kemampuan beradaptasi dengan

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan global. Produktif berarti memiliki daya cipta dan kontribusi nyata bagi ekonomi dan sosial daerah. Berkualitas mencakup aspek pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan integritas moral.

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Wonogiri yang cerdas, sehat, berdaya saing, dan mampu memanfaatkan potensi lokal maupun peluang global secara optimal. Pembangunan SDM diarahkan untuk memperkuat kapasitas individu dan kolektif dalam mendukung tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Sasaran 4. Terwujudnya harmoni manusia dan lingkungan melalui peningkatan kewaspadaan serta mitigasi bencana

Sasaran ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas manusia dan kelestarian lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling mendukung. Kehidupan yang harmonis dengan lingkungan menjadi kunci utama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan tahan terhadap risiko bencana.

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan memelihara lingkungan, sekaligus memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana alam maupun non-alam. Pemerintah daerah berperan aktif dalam membangun sistem kewaspadaan dini, memperluas edukasi publik tentang mitigasi bencana, serta mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam setiap kebijakan pembangunan.

Tabel 3. 1. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029

VISI: “WONOGIRI YANG BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”.													
POKOK VISI	MISI	RPJMD			TARGET PEMBANGUNAN								
		TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2024 (BASELINE)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
BERDAYA SAING	MISI 1: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing dan berkelanjutan	Mewujudkan Wonogiri Yang Berdayasaing, Maju, Sejahtera, Dan Berkelanjutan		Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten/ Kota**	Juta Rp	39,76	40,61	41,59	43,67	45,85	48,14	50,55	
				Terwujudnya ekonomi yang berdayasaing, dan berkelanjutan.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,93	5,00-6,40	5,36-6,00	6,50-7,25	6,90-7,75	7,40-8,24	8,00-8,60
				Kontribusi PDRB Kabupaten Wonogiri Terhadap Provinsi Jawa Tengah	Persen	2,19	2,19	2,19	2,2	2,2	2,2	2,21	
				Tingkat Pengangguran Terbuka**	Angka	2,4	2,4	2,36	2,32	2,24	2,08	1,92	
MAJU	MISI 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Mewujudkan Wonogiri Yang Berdayasaing, Maju, Sejahtera, Dan Berkelanjutan		Indeks Reformasi Birokrasi*	Indeks	87,3	88	88,5	89	89,5	90	90,5	
				Terwujudnya Tata Kelola	Nilai SAKIP	Angka	77,69	78,69	79,69	80,69	81,5	82	82,5

**VISI:
“WONOGIRI YANG BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”.**

POKOK VISI	MISI	RPJMD			TARGET PEMBANGUNAN							
		TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2024 (BASELINE)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Adaptif	Indeks Integritas Nasional**	Angka	75,89	77	78	79	80	81	82
				Indeks Pelayanan Publik*	Angka	3,99*	4,08	4,13	4,17	4,22	4,26	4,31
SEJAHTERA	MISI 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Didukung Lingkungan Sosial dan Budaya Masyarakat Maju	Mewujudkan Wonogiri Yang Berdayasaing, Maju, Sejahtera, Dan Berkelanjutan		Tingkat Kemiskinan*	Persen	10,71	9,72	9,25-9,18	9,17-8,78	8,78-8,30	8,30-7,83	7,83-7,36
			Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang maju, produktif, dan berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,54	73,08	73,99	74,14	74,68	75,21	75,75
BERKELANJUTAN	MISI 4: Mewujudkan Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana	Mewujudkan Wonogiri Yang Berdayasaing, Maju, Sejahtera, Dan Berkelanjutan		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca*	TonCO2eq	192.526,04	2.008.609,00	2.542.532,97	3.076.456,94	3.610.380,90	4.144.304,87	4.678.228,84
			Terwujudnya harmoni manusia dan lingkungan melalui peningkatan kewaspadaan serta mitigasi bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**	Angka	65,60	75,65	75,82	76,00	76,17	76,34	76,51
				Indeks Risiko Bencana**	Angka	97,71*	95,27	94,05	92,83	91,61	90,39	89,17

Memahami bahwa Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki indikator tujuan dan sasaran jangka menengah yang harus didukung oleh pencapaian kinerja perangkat daerah. Maka hal ini menjadi elemen krusial dalam mencapai target pembangunan yang terintegrasi dan efektif. RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang menjadi pedoman utama bagi seluruh sektor pembangunan di tingkat daerah. Indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD diturunkan secara spesifik ke dalam rencana pembangunan perangkat daerah agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Hal ini menciptakan kesinambungan antara kebijakan strategis daerah dan implementasinya di tingkat teknis melalui program, kegiatan, dan subkegiatan yang terukur. Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap sasaran perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Indikator kinerja di tingkat perangkat daerah harus selaras dengan indikator RPJMD agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berjalan terarah dan terukur.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan selama lima tahun ke depan. Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam RPJMD menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Strategi yang matang memungkinkan identifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, sementara arah kebijakan menjadi panduan normatif yang memastikan seluruh program pembangunan selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai sinergi antar-sektor, efisiensi alokasi sumber daya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Perencanaan strategis yang dilakukan bertujuan untuk mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja selama lima tahun yang akan datang. Pengimplementasian tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana dalam melaksanakan transformasi reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan pelayanan kepada masyarakat.

PENYELARASAN PROGRAM PROVINSI JAWA TENGAH DAN KABUPATEN WONOGIRI

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri menjadi krusial. Penyelarasan program kerja antara kedua tingkat pemerintahan ini ditujukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan, optimalisasi anggaran, serta tercapainya sasaran strategis pembangunan daerah. Berikut dukungan kabupaten Wonogiri terhadap program prioritas Provinsi Jawa Tengah

- a. Dukungan Kabupaten Wonogiri terhadap beberapa program Nasional dan Provinsi seperti Penyediaan 3 Juta Rumah.

Program 3 Juta Rumah adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan tiga juta unit rumah layak huni per tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat miskin yang belum memiliki hunian memadai. Program ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan perumahan yang signifikan di Indonesia, dengan target 15 juta unit dalam lima tahun. Program ini ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat yang kesulitan mengakses hunian yang layak karena keterbatasan pendapatan. Penyediaan rumah yang layak adalah kebutuhan pokok, dan program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Kabupaten Wonogiri mendukung program Nasional dan Jawa Tengah dalam penyediaan 3 juta rumah, penyediaan 1 KK 1 Rumah Layak Huni melalui kontribusi Kabupaten/ Kota sebesar 30% dan Desa 20%

- b. Dukungan Kabupaten Wonogiri terhadap prioritas Provinsi Jawa Tengah di bidang pendidikan :

- 1) *Wajib Belajar (Wajar 13 tahun)*

Pemerintah Kabupaten Wonogiri berkomitmen penuh dalam mendukung kebijakan nasional Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun, sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagaimana diarahkan oleh pemerintah pusat, peran utama pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Wajar 13 Tahun adalah memastikan pemenuhan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan usia dini dan pendidikan nonformal. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menyiapkan

generasi muda sejak dini agar memiliki kesiapan belajar, keterampilan hidup, dan karakter yang kuat. Kabupaten Wonogiri secara konsisten telah memperluas cakupan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terintegrasi dengan program pengasuhan dan gizi anak, serta memperkuat lembaga pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, penyediaan sarana prasarana yang memadai, dan penguatan kemitraan dengan masyarakat menjadi bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan. Melalui kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, Pemerintah Kabupaten Wonogiri menargetkan tidak hanya peningkatan angka partisipasi pendidikan, tetapi juga tercapainya kualitas pembelajaran yang merata dan berkeadilan, terutama bagi kelompok rentan dan daerah dengan akses terbatas. Dengan komitmen ini, Kabupaten Wonogiri siap menjadi bagian penting dalam keberhasilan pelaksanaan Wajar 13 Tahun di tingkat nasional, demi mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan.

2) Penguatan pendidikan karakter dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan/potensi lokal.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri berkomitmen untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kuat, berakhlak mulia, dan cinta terhadap budaya serta lingkungannya. Sebagai wujud dari komitmen ini, Kabupaten Wonogiri secara aktif mendukung penguatan pendidikan karakter dan pengembangan kurikulum adaptif yang berbasis pada kearifan serta potensi lokal. Kebijakan ini menjadi bagian penting dari upaya membumikan nilai-nilai luhur Pancasila melalui dunia pendidikan, sekaligus mendorong pembelajaran yang kontekstual, relevan, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Nilai-nilai seperti gotong royong, kejujuran, kerja keras, cinta tanah air, serta kepedulian sosial terus ditanamkan melalui pendekatan pembelajaran yang interaktif dan partisipatif. Selain itu, kurikulum di satuan pendidikan didorong untuk mengadopsi dan mengintegrasikan potensi lokal Wonogiri—seperti seni budaya tradisional, pertanian, UMKM, serta sumber daya alam—dalam proses pembelajaran. Hal ini tidak hanya memperkaya materi ajar, tetapi juga memperkuat identitas lokal dan membekali peserta didik dengan keterampilan hidup berbasis lingkungan dan sosial budaya setempat. Dengan penguatan ini, diharapkan pendidikan

di Kabupaten Wonogiri mampu mencetak generasi yang berdaya saing global namun tetap membumi, mencintai budaya lokal, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerahnya.

3) *Dukungan vokasional melalui identifikasi dan pemetaan potensi lokal daerah*

Pemerintah Kabupaten Wonogiri terus berupaya meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan potensi wilayah melalui dukungan terhadap pendidikan vokasional. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah identifikasi dan pemetaan potensi lokal daerah, guna menjadi dasar pengembangan program pendidikan vokasi yang tepat sasaran dan berdaya guna. Wonogiri memiliki beragam potensi lokal di bidang pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, serta kerajinan dan pariwisata. Melalui proses pemetaan yang partisipatif dan berbasis data, pemerintah daerah mendorong satuan pendidikan vokasi seperti SMK dan lembaga kursus untuk menyelaraskan kurikulum dan kompetensi keahlian dengan kekuatan ekonomi lokal tersebut.

Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan daya serap lulusan terhadap dunia kerja, tetapi juga mencetak wirausahawan muda yang mampu mengelola dan mengembangkan potensi daerahnya secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) di tingkat lokal terus diperkuat untuk memberikan pengalaman praktik kerja nyata bagi peserta didik. Dengan dukungan ini, Kabupaten Wonogiri berharap dapat menciptakan ekosistem pendidikan vokasional yang adaptif, inovatif, dan berbasis potensi riil daerah, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- c. Memperkuat kebijakan dan program energi terbarukan (EBT) sebagaimana prioritas Gubernur Jawa Tengah dengan menitikberatkan pentingnya transisi menuju “ekonomi hijau” dan pengembangan EBT dan program perangkat daerah.

1) Sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi karbon, Pemerintah Kabupaten Wonogiri mendukung penuh implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap pada berbagai sektor, termasuk bangunan publik, rumah tangga, dan industri. Pemanfaatan energi surya merupakan langkah strategis dalam

diversifikasi sumber energi sekaligus mendorong efisiensi penggunaan energi listrik. Kabupaten Wonogiri, yang memiliki potensi sinar matahari cukup tinggi sepanjang tahun, menjadi wilayah yang ideal untuk pengembangan energi terbarukan berbasis surya. Dukungan ini diwujudkan melalui sosialisasi manfaat PLTS atap kepada masyarakat, penyusunan regulasi pendukung di tingkat daerah, serta kerja sama dengan pihak swasta dan instansi terkait untuk pengadaan dan pemasangan instalasi solar panel. Bangunan milik pemerintah, seperti sekolah, puskesmas, dan kantor pelayanan publik, diarahkan menjadi contoh awal penerapan PLTS atap secara bertahap. Di sektor rumah tangga dan industri kecil, pemanfaatan PLTS atap juga didorong guna menekan biaya listrik, meningkatkan ketahanan energi lokal, dan membuka peluang baru dalam pengembangan usaha berbasis teknologi ramah lingkungan. Melalui implementasi PLTS atap, Kabupaten Wonogiri berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta memperkuat transisi menuju energi hijau yang inklusif dan berkeadilan.

2) Pengembangan EBT atau sumber energi alternatif, terutama untuk sektor rumah tangga dan UMKM.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung transisi energi bersih melalui pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) atau sumber energi alternatif, khususnya untuk sektor rumah tangga dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti sinar matahari, biomassa, dan air. Wonogiri memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi ramah lingkungan sebagai solusi atas keterbatasan akses energi di beberapa wilayah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Dukungan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- Penyediaan dan pemanfaatan PLTS skala kecil bagi rumah tangga di daerah terpencil.
- Pemanfaatan biogas dan biomassa untuk kebutuhan energi rumah tangga dan produksi usaha mikro.
- Fasilitasi pelatihan dan pendampingan teknis bagi pelaku UMKM dalam penggunaan teknologi hemat energi dan ramah lingkungan.
- Kolaborasi dengan pemerintah pusat, LSM, dan sektor swasta untuk pengembangan pilot project energi alternatif.

Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong kemandirian energi dan menurunkan biaya operasional rumah tangga dan UMKM, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi pengurangan emisi dan pelestarian lingkungan. Dengan mendorong pemanfaatan EBT secara lebih luas, Kabupaten Wonogiri berharap dapat menciptakan masa depan energi yang bersih, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat.

- 3) Skema kolaborasi dengan pemerintah provinsi, BUMN/BUMD/BLUD Sektor ESDM, maupun swasta.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyadari bahwa tantangan pembangunan sektor energi memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, Pemkab Wonogiri secara aktif mendukung skema kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi, BUMN/BUMD/BLUD sektor ESDM, serta mitra swasta dalam rangka percepatan pengembangan energi yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan. Kolaborasi ini ditujukan untuk memperkuat sinergi program-program strategis di bidang Energi Baru dan Terbarukan (EBT), elektrifikasi pedesaan, penguatan infrastruktur energi, hingga pemberdayaan masyarakat melalui akses energi yang terjangkau dan andal.

Dukungan pemerintah kabupaten mencakup:

- Penyediaan data dan pemetaan potensi energi daerah untuk menjadi acuan pengembangan proyek bersama.
- Fasilitasi regulasi dan perizinan di tingkat daerah guna mempercepat implementasi program.
- Pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan dan pembukaan lapangan kerja di sektor energi terbarukan.
- Kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dan penerapan teknologi ramah lingkungan di bidang energi, khususnya untuk rumah tangga dan UMKM.

Melalui skema kolaborasi yang terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Wonogiri berharap tercipta ekosistem energi yang kuat, inklusif, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Tabel 3. 2 Penyeragaman 35 program Provinsi Jawa Tengah dengan program Kabupaten Wonogiri

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	<p>Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</p> <p>Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</p> <p>Sub kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan</p>
2	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	<p>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/kota, Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</p>
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK & KPK	<p>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis, Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum</p>

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota
4	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Sub Keg : Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
6	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	NA (SMA/SMK kewenangan Provinsi)
7	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	<p>Program : Rehabilitasi Sosial</p> <p>Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</p> <p>Sub kegiatan : Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya</p> <p>Tahun 2025 tidak ada kegiatan yang mendukung Rumah Perlindungan Anak dan Perempuan</p>
8	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
9	BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota
10	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	<p>Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Sub Kegiatan : 1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 2. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan</p> <p>Program : Penanganan Bencana , Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan : 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA), 2. Peningkatan Kapasitas Taruna Siaga Bencana</p>
11	Cek Kesehatan Gratis	<p>1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Peningkatan Pelayanan BLUD</p>
12	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
13	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	<p>Kegiatan : Penataan Organisasi Sub Kegiatan : 1. Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</p>

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota
14	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	<p>Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Keterangan : Dinas PPKB dan P3A mengurus tentang Korban Kekerasan Perempuan dan Anak dalam pendampingan proses Hukum</p> <p>Program : Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p>Kegiatan : Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</p> <p>Subkegiatan : Penjangkauan Anak-Anak Terlantar</p> <p>1.) kegiatan ; Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar; sub kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi ; 2.)kegiatan ; Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; sub kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</p>

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota
15	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	Program : Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
16	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Program :Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan :1. Pemeliharaan Anak Terlantar Subkegiatan :1. Penjangkauan Anak Terlantar Kegiatan :1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan :1. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, 2. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
17	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
18	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Program: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kegiatan: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usaha (Hanya Pendampingan P-IRT)

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota
19	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	PROGRAM: PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER KEGIATAN: PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Sub Kegiatan : Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
20	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	<p>Program : Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</p> <p>Program : Penanganan Bencana; Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan : Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana</p>
21	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya	<p>Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama Dalam Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</p>
22	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Belum Ada Program

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota
23	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
24	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Program : PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Sub kegiatan : Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
25	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	N/A
26	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	Program : PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI), Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH
27	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
28	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
29	Peningkatan operasional kader Posyandu	Belum Ada Program

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota
30	Peningkatan kualitas hidup lansia	<p>A. Program : 1. Rehabilitasi Sosial Kegiatan : 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Subkegiatan : 1. Penyedia Permakanaan 2. Penyediaan Sandang ; 3. Penyediaan Alat Bantu 4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 5. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</p> <p>B. Program : 1. Penanganan Bencana Kegiatan : 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Subkegiatan : 1. Penyediaan Makanan; 2. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan</p>
31	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	<p>Program : PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</p>

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota
32	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	<p>Program : PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</p> <p>Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Usaha Kecil Sub kegiatan :Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</p>
33	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	<p>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</p> <p>Kegiatan ; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga 2. Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
34	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
35	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	<p>Kegiatan: Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>Sub kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)</p> <hr/> <p>Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</p> <p>Sub Kegiatan: Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</p>

3.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Strategi memegang peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan. Strategi yang dirancang dengan jelas dapat menjadi upaya dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah yang terfokus dan memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, strategi dirancang untuk menjembatani antara misi yang bersifat jangka panjang dengan kebijakan dan program konkret yang dapat diimplementasikan, sehingga setiap langkah pembangunan berjalan terarah dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat

Arah kebijakan dirumuskan dalam rangka mencapai strategi pembangunan, juga sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan ini disusun berdasarkan misi dan mempertimbangkan potensi, tantangan, dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Fokus utama arah kebijakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam mewujudkan strategi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Wonogiri, dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut.

Tabel 3. 3. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026-2030

Tujuan/Sasaran	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Tujuan: Mewujudkan Wonogiri Yang Berdayasaing, Maju, Sejahtera, Dan Berkelanjutan	Tema Pembangunan : Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar berbasis kewilayahan untuk mendukung ketahanan pangan	Tema Pembangunan : Pengembangan SDM yang Unggul berlandaskan Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Sarana Prasarana Memadai dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan ekonomi kreatif	Tema Pembangunan : Peningkatan tata kelola pemerintahan menuju kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan modern, serta pemantapan perekonomian masyarakat melalui optimalisasi potensi desa	Tema Pembangunan : Penguatan daya saing sumber pertumbuhan ekonomi baru berbasis hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) unggulan dan SDM berkarakter	Tema Pembangunan : Perwujudan Wonogiri yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan
Sasaran 1. Terwujudnya ekonomi yang berdayasaing, dan berkelanjutan.	Strategi 1. Percepatan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di daerah, penguatan ekonomi kreatif, dan inisiasi penerapan ekonomi yang berdaya saing berbasis pemerataan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi daerah	Strategi 1. Pengembangan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di daerah, penguatan ekonomi kreatif, dan inisiasi penerapan ekonomi yang berdaya saing	Strategi 1. Peningkatan tata kelola kelembagaan pendukung capaian investasi guna pengembangan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di daerah, penguatan ekonomi kreatif, dan inisiasi penerapan ekonomi yang berdaya saing	Strategi 1. Penguatan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di daerah, penguatan ekonomi kreatif, serta inisiasi penerapan ekonomi yang berdaya saing dan ramah lingkungan	Strategi 1. Perwujudan optimalisasi produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di daerah, penguatan ekonomi kreatif, inisiasi penerapan ekonomi yang berdaya saing
	Arah Kebijakan: a) Penguatan koperasi tani, dan UMKM berbasis pangan lokal untuk memperluas rantai nilai pertanian. b) Pembangunan dan rehabilitasi irigasi, jalan usaha tani, serta embung desa untuk mendukung produktivitas lahan c) Penguatan Infrastruktur Pertanian d) Pengembangan kawasan sentra produksi terpadu yang	Arah Kebijakan: a) Mendorong sertifikasi kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pertanian modern. b) Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata (jalan akses, sanitasi, transportasi, dan jaringan internet). c) Revitalisasi pusat ekonomi kreatif desa dan fasilitas pendukung UMKM.	Arah Kebijakan: a) Meningkatkan kemandirian desa dengan peningkatan produktivitas ekonomi b) Penguatan kreatifitas desa c) Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan dengan membentuk klaster industri hilirisasi yang melibatkan UMKM, koperasi, BUMDes, serta pelaku usaha swasta.	Arah Kebijakan: a) Meningkatkan kemandirian desa dengan peningkatan produktivitas ekonomi b) Penguatan kreatifitas desa c) Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan dengan membentuk klaster industri hilirisasi yang melibatkan UMKM, koperasi, BUMDes, serta pelaku usaha swasta.	Arah Kebijakan: a) Penguatan Industri Pengolahan Sumber Daya Alam unggulan dengan Mendorong berdirinya industri kecil, menengah, dan besar yang mengolah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan menjadi produk bernilai tambah. b) Menyediakan insentif bagi pelaku usaha yang mengembangkan

Tujuan/Sasaran	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
	dilengkapi dengan infrastruktur logistik, energi, dan digital	<ul style="list-style-type: none"> d) Penguatan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata e) Fasilitasi promosi wisata dan produk lokal melalui platform digital. f) Mendorong terbentuknya klaster ekonomi kreatif berbasis potensi lokal (kuliner, kerajinan, seni budaya). 	<ul style="list-style-type: none"> d) Menjalin kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan komunitas lokal. e) Penguatan Regulasi dan Perlindungan Produk Lokal/daerah yang mendukung perlindungan produk hilirisasi dari persaingan tidak sehat. 	<ul style="list-style-type: none"> hilirisasi, seperti kemudahan perizinan dan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah. c) Peningkatan Infrastruktur Pendukung Hilirisasi, membangun dan memperbaiki akses jalan produksi, jaringan listrik, air baku, serta fasilitas logistik yang menunjang distribusi hasil produksi. d) Mengembangkan sentra industri dan kawasan ekonomi berbasis komoditas unggulan Wonogiri. e) Mendorong kemitraan antara petani/peternak dengan investor melalui pola inti-plasma atau contract farming. f) Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi yang tepat guna untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. g) Mengembangkan ekosistem digital marketing dan e-commerce untuk memperluas pasar produk hilirisasi lokal. h) Meningkatkan promosi dan branding produk unggulan Wonogiri di 	<ul style="list-style-type: none"> dan standardisasi mutu produk. d) Perwujudan platform e-commerce lokal untuk memasarkan produk unggulan Wonogiri e) Peningkatan jalan produksi, pasar modern berbasis desa, serta pusat distribusi logistik f) Pemantapan akses listrik dan internet merata sampai tingkat desa untuk menunjang produktivitas ekonomi. g) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Petani dan Nelayan h) Penguatan dalam Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan i) Peningkatan penggunaan energi terbarukan (PLTS, mikrohidro) di sektor industri dan rumah tangga. j) Penguatan Kelembagaan koperasi sebagai wadah kolektif UMKM. k) Penguatan Brand dan Promosi Produk Lokal untuk meningkatkan konsumsi produk lokal.

Tujuan/Sasaran	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
				tingkat nasional maupun internasional. i) Mengembangkan ekosistem inovasi desa berbasis digital dan ramah lingkungan.	
Sasaran 2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Adaptif	Strategi 2 Percepatan pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur publik dalam rangka implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan	Strategi 2 Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan	Strategi 2 Peningkatan Implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan	Strategi 2 Penguatan implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan berbasis IT guna integrasi program pemberdayaan perekonomian dan keberlanjutan	Strategi 2 Perwujudan Implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan
	Arah Kebijakan: a) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi berbasis aplikasi bagi kemudahan pelayanan masyarakat b) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan publik, termasuk gedung layanan terpadu, fasilitas administrasi, dan sarana pendukung pelayanan masyarakat c) Penetapan standar sarana dan prasarana pelayanan publik yang adaptif terhadap perubahan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan tuntutan kualitas layanan	Arah Kebijakan: a) Mengembangkan jaringan kemitraan dan Inovasi b) penguatan pelayanan publik yang cepat, tepat, berbasis digital, serta keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat (open government) c) Peningkatan profesionalitas ASN berbasis fungsi dan kinerja d) Peningkatan kapasitas SDM pengelola layanan publik e) Penguatan kompetensi digital ASN, kompetensi ASN di bidang perencanaan, penganggaran, dan evaluasi berbasis	Arah Kebijakan: a) Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintah daerah b) Reformasi birokrasi berbasis digital (e-government) untuk mempercepat pelayanan publik. c) Optimalisasi sinergi antar Perangkat Daerah dalam peningkatan perekonomian masyarakat d) Peningkatan tata kelola data dan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif. e) Penguatan BUMDes dan Pemberdayaan Ekonomi Desa	Arah Kebijakan: a) penguatan manajemen sumber daya aparatur agar lebih efektif dan efisien, termasuk akselerasi peningkatan kualifikasi dan kompetensi ASN b) penguatan kolaborasi dan kerja sama antardaerah, antara daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka perwujudan cita-cita pembangunan daerah c) Optimalisasi keterbukaan data dan kemudahan akses informasi regulasi investasi untuk mendorong transparansi dan kepastian hukum	Arah Kebijakan: a) Perwujudan kualitas pelayanan masyarakat yang terpadu dan efektif b) Perwujudan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan kompeten c) Perwujudan digitalisasi pelayanan publik d) Penguatan kelembagaan pemerintah yang profesional dan efisien e) Perwujudan kualitas perencanaan berorientasi pada data, riset dan manajemen risiko f) Penguatan regulasi daerah yang responsive dan berpihak pada

Tujuan/Sasaran	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
		evidence-based policy, serta manajerial	f) Peningkatan Kerjasama antar desa dan pihak lainnya. g) Mendorong budaya kerja kolaboratif lintas perangkat daerah guna mempercepat penyelesaian program dan pelayanan kepada masyarakat	d) Kolaborasi digital antara pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas lokal untuk mempercepat inovasi dan pengembangan ekonomi berkelanjutan	g) Perwujudan pemerintahan yang akuntabel dengan penguatan integritas aparatur, efisiensi birokrasi, dan pengawanan berbasis teknologi h) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang adaptif melalui inovasi digital, transparansi, dan partisipasi masyarakat i) Penguatan pemerintahah yang adaptif, responsif, efisien, dan berkelanjutan.
Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang maju, produktif, dan berkualitas	Strategi 3.1. Percepatan layanan Pendidikan untuk semua dan upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas Arah Kebijakan: a) pemerataan akses layanan pendidikan yang diarahkan untuk pencegahan putus sekolah dan penanganan anak tidak sekolah termasuk penguatan sekolah inklusi b) Peningkatan pembangunan sarana	Strategi 3.1. pengembangan layanan Pendidikan untuk semua dan upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas Arah Kebijakan: a) Pemenuhan kelengkapan fasilitas penunjang pembelajaran seperti laboratorium, perpustakaan, ruang keterampilan, dan sarana olahraga b) Mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah, serta optimalisasi pendidikan non formal	Strategi 3.1. Peningkatan tata kelola kelembagaan pendidikan dalam rangka optimalisasi layanan Pendidikan untuk semua Arah Kebijakan: a) peningkatan digitalisasi pendidikan, dengan mendorong metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi b) Penguatan kapasitas manajemen sekolah dan madrasah melalui pelatihan kepala sekolah, pengawas, dan	Strategi 3.1. Penguatan layanan Pendidikan untuk semua menuju SDM unggul dan berdaya saing Arah Kebijakan: a) Peningkatan Kapasitas SDM dengan memberikan pelatihan vokasi dan sertifikasi bagi tenaga kerja lokal di sektor pengolahan hasil Sumber Daya Alam b) Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk inovasi produk	Strategi 3.1. Perwujudan layanan Pendidikan untuk semua berbasis pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas Arah Kebijakan: a) Perwujudan pemerataan akses pendidikan berkualitas b) Perwujudan pendidikan vokasi dan keterampilan kerja berbasis kebutuhan industri lokal; c) Perwujudan Pemuda yang produktif melalui program pemberdayaan

Tujuan/Sasaran	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
	<p>prasarana olahraga yang berstandar nasional dan pembinaan atlet daerah</p> <p>c) Pengembangan infrastruktur digital pendidikan yang terintegrasi</p> <p>d) Pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan sarana pendidikan nonformal</p> <p>e) Akselerasi pembangunan infrastruktur pendidikan dengan program peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan</p>	<p>c) Revitalisasi sarana dan prasarana Pendidikan serta peningkatan digitalisasi Pendidikan</p> <p>d) Meningkatkan sekolah unggulan dan sekolah inklusif khususnya Tingkat sekolah dasar</p> <p>e) Menyelenggarakan pelatihan vokasi, literasi digital, dan kewirausahaan</p> <p>f) Peningkatan pelatihan berkelanjutan (continuous professional development) bagi guru untuk penguasaan kurikulum, pembelajaran berbasis digital, dan inovasi pembelajaran.</p>	<p>tenaga kependidikan dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi berbasis data</p> <p>c) Optimalisasi peran dinas pendidikan, komite sekolah, dan forum masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan mutu pendidikan</p>	<p>berbasis Sumber Daya Alam unggulan</p> <p>c) Penguatan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan literasi digital tenaga kerja masa depan</p> <p>d) Integrasi pendidikan karakter, nilai budaya lokal, dan norma agama ke dalam kurikulum formal dan nonformal</p> <p>e) Penguatan kolaborasi dengan tokoh adat, pemuka agama, dan komunitas budaya untuk terlibat aktif dalam pembinaan karakter generasi muda</p>	<p>d) Penguatan karakter dan ketahanan sosial melalui pengembangan program pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, serta nilai budaya dan kearifan lokal.</p>
	Strategi 3.2. Percepatan kesehatan untuk semua dengan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang berkualitas pelayanan prima serta penguatan promotif dan preventif bagi masyarakat	Strategi 3.2. Pengembangan kesehatan untuk semua dengan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang berkualitas pelayanan prima serta penguatan promotif dan preventif bagi masyarakat	Strategi 3.2. Peningkatan kualitas layanan dan tata kelola kesehatan	Strategi 3.2. Penguatan kualitas layanan kesehatan untuk semua	Strategi 3.2. Perwujudan kesehatan untuk semua menuju Wonogiri sejahtera
	<p>Arah Kebijakan:</p> <p>a) Peningkatan kualitas dan kemudahan akses layanan kesehatan dan perluasan keterjangkauan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah</p>	<p>Arah Kebijakan:</p> <p>a) peningkatan kualitas, kapasitas, kompetensi, dan ketersediaan tenaga Kesehatan</p> <p>b) perluasan upaya promotif dan preventif dalam upaya</p>	<p>Arah Kebijakan:</p> <p>a) Penguatan dan pemerataan pelayanan dan prasarana sarana kesehatan, didukung dengan inovasi pelayanan Kesehatan</p>	<p>Arah Kebijakan:</p> <p>a) penanggulangan permasalahan gizi makro dan gizi mikro, percepatan penuntasan permasalahan stunting dan kelebihan gizi</p>	<p>Arah Kebijakan:</p> <p>a) Perwujudan kesehatan masyarakat yang berkualitas dengan memperluas layanan kesehatan preventif dan promotif;</p>

Tujuan/Sasaran	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
	<p>b) Pemenuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga kesehatan yang profesional</p> <p>c) Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan</p>	<p>peningkatan kesehatan masyarakat antara lain dengan pembudayaan perilaku hidup sehat, penyehatan lingkungan didukung dengan prasarana sarana antara lain konektivitas transportasi, ruang terbuka, fasilitas aktivitas fisik dan olahraga, akses air minum layak dan aman, sanitasi layak, serta permukiman sehat</p>	<p>b) Pemantapan tata kelola kelembagaan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi</p> <p>c) Penguatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan modernisasi fasilitas kesehatan secara berkala</p> <p>d) Integrasi pembangunan infrastruktur kesehatan dengan program peningkatan kapasitas SDM kesehatan, termasuk pelatihan tenaga medis dan paramedis</p>	<p>b) Pembangunan fasilitas kesehatan ramah disabilitas dan ramah anak dengan desain inklusif dan aksesibilitas yang memadai</p>	<p>b) Peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan angka stunting dan kematian ibu melahirkan.</p> <p>c) Perwujudan sistem layanan kesehatan berbasis digital agar masyarakat mudah mengakses informasi dan pelayanan medis.</p> <p>d) Perwujudan ketahanan kesehatan masyarakat melalui pengendalian penyakit menular dan penguatan layanan kesehatan lingkungan.</p>
	<p>Strategi 3.3. Percepatan pemenuhan sarana dan prasarana serta fasilitasi pembangunan kualitas keluarga yang sejahtera berbasis norma budaya yang berlaku dan inklusi sosial yang berkeadilan</p>	<p>Strategi 3.3. Pengembangan Pembangunan kualitas keluarga yang sejahtera berbasis norma budaya yang berlaku dan inklusi sosial yang berkeadilan</p>	<p>Strategi 3.3. Peningkatan pembangunan kualitas keluarga yang sejahtera berbasis norma budaya yang berlaku dan inklusi sosial yang berkeadilan</p>	<p>Strategi 3.3. Penguatan kualitas keluarga yang sejahtera berbasis norma budaya yang berlaku dan inklusi sosial yang berkeadilan guna peningkatan ekonomi rumah tangga</p>	<p>Strategi 3.3. Perwujudan Pembangunan kualitas keluarga yang sejahtera berbasis norma budaya yang berlaku dan inklusi sosial yang berkeadilan</p>
	<p>Arah Kebijakan:</p> <p>a) Pengembangan sarana prasarana ramah keluarga dan inklusif yang memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, lansia, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas</p>	<p>Arah Kebijakan:</p> <p>a) Fasilitasi layanan terpadu keluarga sejahtera berbasis digital</p> <p>b) Peningkatan pendidikan karakter anak dan remaja berbasis norma agama, adat istiadat, dan budaya lokal</p>	<p>Arah Kebijakan:</p> <p>a) Penguatan tata kelola pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kesejahteraan dan kualitas keluarga</p> <p>b) Integrasi antara indikator kesejahteraan keluarga dalam</p>	<p>Arah Kebijakan:</p> <p>a) Penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga adat, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan kualitas keluarga</p>	<p>Arah Kebijakan:</p> <p>a) Perwujudan keluarga sejahtera dan bahagia</p> <p>b) Perwujudan partisipasi aktif lembaga adat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat dalam perumusan dan pengawasan kebijakan keluarga</p>

Tujuan/Sasaran	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
	<p>sesuai norma budaya setempat</p> <p>b) Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pelayanan dasar keluarga seperti sekolah, puskesmas, rumah sakit, posyandu, sarana air bersih, sanitasi layak, dan perumahan sehat</p>	<p>c) Penguatan identitas keluarga dan mencegah degradasi moral</p> <p>d) Pengembangan kader masyarakat (kader PKK, kader posyandu, penyuluh keluarga) dengan pelatihan teknis dan soft skills yang relevan untuk pemberdayaan keluarga</p>	<p>dokumen perencanaan pembangunan daerah</p> <p>c) Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah dan kader masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan keluarga</p> <p>d) Pengembangan sistem layanan terpadu keluarga (one stop service) berbasis IT untuk akses bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan informasi peluang ekonomi.</p>	<p>b) Peningkatan akses permodalan, keterampilan ekonomi produktif, dan literasi keuangan keluarga</p> <p>c) Pemberdayaan kelompok usaha keluarga</p>	<p>c) Perwujudan usaha berbasis rumah tangga ramah lingkungan</p>
	Strategi 3.4. Percepatan pengentasan kemiskinan yang terstruktur dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat	Strategi 3.4. Pengembangan pengentasan kemiskinan yang terstruktur	Strategi 3.4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan program perlindungan sosial guna pengentasan kemiskinan yang terstruktur	Strategi 3.4. Penguatan pengentasan kemiskinan yang terstruktur berbasis pemberdayaan perekonomian kaum marjinal	Strategi 3.4. Perwujudan pengentasan kemiskinan yang terstruktur
	<p>Arah Kebijakan:</p> <p>a) Digitalisasi sistem distribusi pangan, informasi harga, dan pemetaan lahan produktif berbasis kewilayahan</p> <p>b) Pemerataan infrastruktur dasar di seluruh wilayah, terutama desa tertinggal dan kantong kemiskinan</p> <p>c) Penguatan perlindungan sosial masyarakat dengan</p>	<p>Arah Kebijakan:</p> <p>a) Mengembangkan ekosistem inovasi desa berbasis digital dan ramah lingkungan.</p> <p>b) Pemantapan perlindungan sosial masyarakat dengan basis data tunggal yang integratif.</p> <p>c) Penguatan perlindungan, pemberdayaan dan peningkatan kemandirian perempuan</p>	<p>Arah Kebijakan:</p> <p>a) penguatan sistem jaminan sosial dengan efektif dan tepat sasaran</p> <p>b) penguatan tata kelola dan kelembagaan data untuk penentuan sasaran penerima manfaat, termasuk tata kelola perencanaan dan pembiayaan untuk perlindungan sosial</p> <p>c) Kolaborasi pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat desa dalam</p>	<p>Arah Kebijakan:</p> <p>a) Pemerataan infrastruktur layanan dasar, ketahanan pangan, pemberdayaan dan perlindungan kaum marjinal</p> <p>b) Penguatan produktivitas desa dan ekonomi berkelanjutan</p> <p>c) penguatan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial secara inklusif baik secara sosial dan ekonomi terutama</p>	<p>Arah Kebijakan:</p> <p>a) Perwujudan pengentasan kemiskinan berbasis data yang valid dan relevan</p> <p>b) Perlindungan sosial masyarakat dengan basis data tunggal yang integratif</p> <p>c) Implementasi tata kelola kelembagaan dan digitalisasi program perlindungan sosial yang berkualitas</p>

Tujuan/Sasaran	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
	basis data tunggal yang integratif. d) Pengembangan sistem logistik daerah yang efisien untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok antarwilayah	dan kelompok marjinal lainnya	penyediaan fasilitas publik dan infrastruktur produktif berbasis potensi lokal	untuk kelompok anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya	
	Strategi 3.5. Percepatan Pemenuhan pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Strategi 3.5. Pengembangan pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik dasar maupun penunjang pembangunan ekonomi berbasis penataan ruang yang berkualitas	Strategi 3.5. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kinerja ASN dalam pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	Strategi 3.5. Penguatan pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas guna ekspansi perekonomian ramah lingkungan	Strategi 3.5. Perwujudan pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas
	Arah Kebijakan: a) Pemerataan akses air bersih, listrik, kesehatan, dan pendidikan di desa penghasil pangan b) Percepatan pemerataan pembangunan layanan dasar kewilayahan	Arah Kebijakan: a) penguatan pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak b) Peningkatan pembangunan permukiman dan infrastruktur publik yang menyediakan akses yang merata terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan serta pusat perekonomian	Arah Kebijakan: a) Penyediaan dan pemberian layanan fasilitas publik yang inklusif b) Penguatan integrasi rencana pembangunan sarana prasarana permukiman dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RDTR) sebagai acuan utama pembangunan c) Penguatan pengawasan dan penegakan aturan tata ruang	Arah Kebijakan: a) Pembangunan dan rehabilitasi jaringan air bersih, sanitasi, drainase lingkungan, dan jalan lingkungan b) Pemanfaatan teknologi bangunan hijau dan ramah lingkungan untuk meningkatkan kualitas hunian dan efisiensi energi c) Pemantapan kemitraan dengan swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana permukiman melalui skema pembiayaan kreatif.	Arah Kebijakan: a) Penataan kawasan permukiman sesuai RTRW/RDTR dan pencegahan pembangunan di zona rawan bencana b) Perwujudan penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang memenuhi standar kelayakan nasional (SNI) terkait kualitas konstruksi, kesehatan lingkungan, dan keamanan penghuni c) Perwujudan pembangunan infrastruktur publik mengacu pada standar

Tujuan/Sasaran	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
					pelayanan minimal (SPM)
Sasaran 4. Terwujudnya harmoni manusia dan lingkungan melalui peningkatan kewaspadaan serta mitigasi bencana	Strategi 4.1. Percepatan konektivitas dan sumber daya alam yang lestari serta pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan	Strategi 4.1. pengembangan konektivitas dan sumber daya alam yang lestari serta pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan	Strategi 4.1. Peningkatan konektivitas dan sumber daya alam yang lestari serta pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan	Strategi 4.1. penguatan konektivitas dan sumber daya alam yang lestari serta pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan	Strategi 4.1. Perwujudan konektivitas dan sumber daya alam yang lestari serta pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan
	Arah Kebijakan: a) Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan upaya adaptasi perubahan iklim b) Pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu dan ramah lingkungan	Arah Kebijakan: a) pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, dan pengelolaan sampah b) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara lestari	Arah Kebijakan: a) Pemanfaatan SDA secara bijak melalui penerapan sustainable resource management Pengelolaan sumber daya alam berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan sesuai hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Arah Kebijakan: a) Pelibatan masyarakat dalam pengawasan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan Percepatan pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan pada setiap aktivitas pembangunan	Arah Kebijakan: Perwujudan harmoni manusia dan lingkungan melalui a) Perwujudan pola pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui pengelolaan hutan, air, dan tanah secara bijak agar tetap terjaga untuk generasi mendatang. b) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan melalui pendidikan lingkungan hidup dan kampanye gaya hidup ramah lingkungan. c) Perwujudan tata ruang yang ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam setiap pembangunan. jd. Peningkatan kualitas udara, air, dan

Tujuan/Sasaran	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
					tanah melalui pengendalian pencemaran dan penguatan program penghijauan di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
	Strategi 4.2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana ketahanan sumber daya air maupun listrik yang ramah lingkungan serta ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Strategi 4.2. Pengembangan ketahanan sumber daya serta ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Strategi 4.2. Peningkatan ketahanan sumber daya serta ketangguhan dan tanggap bencana daerah berbasis inovasi teknologi hijau guna meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi emisi karbon	Strategi 4.2. Penguatan ketahanan sumber daya serta ketangguhan dan tanggap bencana daerah dalam rangka pengembangan ekonomi hijau berkelanjutan	Strategi 4.2. Perwujudan ketahanan sumber daya serta ketangguhan dan tanggap bencana daerah
	Arah Kebijakan: a) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Infrastruktur yang Tangguh Bencana	Arah Kebijakan: a) Pengembangan teknologi peringatan dini multi-bencana	Arah Kebijakan: a) Pengelolaan sumber daya air, energi, dan pangan secara berkelanjutan untuk mengantisipasi krisis akibat bencana	Arah Kebijakan: a) Peningkatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan Daerah	Arah Kebijakan: Peningkatan kewaspadaan serta mitigasi bencana melalui: a) Peningkatan sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi longsor, banjir, dan kekeringan di wilayah rawan bencana. b) Perwujudan edukasi dan sosialisasi mitigasi bencana melalui pelatihan dan simulasi c) Perwujudan Desa Tangguh Bencana dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana evakuasi dan pengelolaan risiko lokal.

Tujuan/Sasaran	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
					<p>d) Peningkatan rehabilitasi dan konservasi lingkungan melalui penghijauan, reboisasi, dan konservasi lahan kritis.</p> <p>e) Perwujudan infrastruktur penanggulangan bencana berupa jalur evakuasi, tempat pengungsian layak, dan bangunan vital tahan bencana.</p> <p>f) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan digital untuk menyediakan informasi cepat terkait bencana dan jalur evakuasi.</p>

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2026

Tahun 2026 menjadi tahap penting dalam “Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar berbasis kewilayahan untuk mendukung ketahanan pangan” di Kabupaten Wonogiri. Tema ini menegaskan pentingnya pembangunan yang inklusif, terintegrasi, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan kualitas infrastruktur dan percepatan konektivitas diharapkan memperlancar distribusi hasil pertanian sekaligus memperkuat hilirisasi, sehingga memberikan nilai tambah bagi petani dan memperluas akses pasar. Pada saat yang sama, percepatan layanan pendidikan dan kesehatan menjadi instrumen utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu, pembangunan infrastruktur dan layanan dasar berbasis kewilayahan juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap berbagai risiko, terutama bencana. Pembangunan yang tanggap bencana akan melindungi produktivitas pangan serta menjaga keberlanjutan ekonomi lokal. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai tidak hanya memudahkan mobilitas barang dan jasa, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar yang lebih berkualitas. Dengan demikian, percepatan pemerataan pembangunan di Wonogiri menjadi langkah strategis untuk memastikan ketahanan pangan tetap terjaga sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah.

Secara keseluruhan, arah pembangunan di tahun 2026 ini tidak hanya berdampak pada penguatan ketahanan pangan lokal, tetapi juga berkontribusi langsung dalam mendukung Jawa Tengah meneguhkan posisinya sebagai Lumbung Pangan Nasional. Adapun tema ini memiliki keterkaitan erat dengan sasaran pembangunan daerah, baik dari aspek peningkatan produktivitas pertanian, kualitas SDM, maupun pengurangan kemiskinan melalui pembangunan inklusif yang berkelanjutan.

Adapun tema ini memiliki keterkaitan dengan sasaran:

Sasaran 1. Terwujudnya ekonomi yang berdaya saing, dan berkelanjutan.

Sasaran ini dicapai dengan strategi “**Percepatan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di daerah, penguatan ekonomi kreatif, dan inisiasi penerapan ekonomi yang berdaya saing berbasis pemerataan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi daerah.**” Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:

- a) Penguatan koperasi tani, dan UMKM berbasis pangan lokal untuk memperluas rantai nilai pertanian.
- b) Pembangunan dan rehabilitasi irigasi, jalan usaha tani, serta embung desa untuk mendukung produktivitas lahan
- c) Penguatan Infrastruktur Pertanian
- d) Pengembangan kawasan sentra produksi terpadu yang dilengkapi dengan infrastruktur logistik, energi, dan digital

Sasaran 2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Adaptif.

Sasaran ini dicapai dengan strategi **“Percepatan pemenuhan sarana dan prasarana infarastuktur publik dalam rangka implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan”** Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:

- a) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi berbasis aplikasi bagi kemudahan pelayanan masyarakat
- b) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan publik, termasuk gedung layanan terpadu, fasilitas administrasi, dan sarana pendukung pelayanan masyarakat
- c) Penetapan standar sarana dan prasarana pelayanan publik yang adaptif terhadap perubahan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan tuntutan kualitas layanan

Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang maju, produktif, dan berkualitas.

Sasaran ini dicapai dengan strategi:

1. **“Percepatan layanan Pendidikan untuk semua dan upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas”** Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:
 - a) pemerataan akses layanan pendidikan yang diarahkan untuk pencegahan putus sekolah dan penanganan anak tidak sekolah termasuk penguatan sekolah inklusi
 - b) Peningkatan pembangunan sarana prasarana olahraga yang berstandar nasional dan pembinaan atlet daerah
 - c) Pengembangan infrastruktur digital pendidikan yang terintegrasi

- d) Pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan sarana pendidikan nonformal
- e) Akselerasi pembangunan infrastruktur pendidikan dengan program peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan

2. “Percepatan kesehatan untuk semua dengan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang berkualitas pelayanan prima serta penguatan promotif dan preventif bagi masyarakat.” Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:

- a) Peningkatan kualitas dan kemudahan akses layanan kesehatan dan perluasan keterjangkauan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah
- b) Pemenuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga kesehatan yang profesional
- c) Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan

3. “Percepatan pemenuhan sarana dan prasarana serta fasilitasi pembangunan kualitas keluarga yang sejahtera berbasis norma budaya yang berlaku dan inklusi sosial yang berkeadilan”. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:

- a) Pengembangan sarana prasarana ramah keluarga dan inklusif yang memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, lansia, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas sesuai norma budaya setempat
- b) Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pelayanan dasar keluarga seperti sekolah, puskesmas, rumah sakit, posyandu, sarana air bersih, sanitasi layak, dan perumahan sehat

4. “Percepatan pengentasan kemiskinan yang terstruktur dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat.” Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:

- a) Digitalisasi sistem distribusi pangan, informasi harga, dan pemetaan lahan produktif berbasis kewilayahan
- b) Pemerataan infrastruktur dasar di seluruh wilayah, terutama desa tertinggal dan kantong kemiskinan
- c) Penguatan perlindungan sosial masyarakat dengan basis data tunggal yang integratif.

d) Pengembangan sistem logistik daerah yang efisien untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok antarwilayah

- 5. “Percepatan Pemenuhan pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas.”** Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:
- a) Pemerataan akses air bersih, listrik, kesehatan, dan pendidikan di desa penghasil pangan
 - b) Percepatan pemerataan pembangunan layanan dasar kewilayahan

Sasaran 4. Terwujudnya harmoni manusia dan lingkungan melalui peningkatan kewaspadaan serta mitigasi bencana.

Sasaran ini dicapai dengan strategi:

- 1. “Percepatan konektivitas dan sumber daya alam yang lestari serta pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.”** Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:
 - a) Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan upaya adaptasi perubahan iklim
 - b) Pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu dan ramah lingkungan
- 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana ketahanan sumber daya air maupun listrik yang ramah lingkungan serta ketangguhan dan tanggap bencana daerah.** Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:
 - a) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Infrastruktur yang Tangguh Bencana

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2027

Tahun 2027 merupakan tahap **“Pengembangan SDM yang Unggul berlandaskan Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Sarana Prasarana Memadai dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan ekonomi kreatif.”** Tema ini menekankan pentingnya membangun manusia yang berkualitas melalui penguatan tata kelola pemerintahan serta penyediaan layanan dasar yang merata. Pengembangan kapasitas ASN yang profesional, penyediaan layanan pendidikan yang merata, serta sarana dan prasarana kesehatan yang memadai menjadi pondasi untuk melahirkan SDM unggul. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas

keluarga, memperkuat inklusi sosial, serta mempercepat pengentasan kemiskinan melalui layanan publik yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pembangunan sarana prasarana yang terintegrasi dengan pengembangan potensi sumber daya alam berperan besar dalam mendukung keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Dengan demikian, Wonogiri tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas melalui hilirisasi sektor-sektor unggulan, tetapi juga menyeimbangkannya dengan keberlanjutan lingkungan. Dukungan infrastruktur yang memadai akan mendorong pengembangan pariwisata, membuka ruang tumbuhnya ekonomi kreatif, serta memperkuat daya tarik daerah sebagai destinasi yang ramah dan berdaya saing tinggi.

Secara keseluruhan, arah pembangunan ini berkontribusi langsung terhadap tema pembangunan Jawa Tengah yaitu “Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi”. Melalui penguatan SDM unggul, penataan kelembagaan, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung hilirisasi serta keberlanjutan, Kabupaten Wonogiri dapat menjadi bagian penting dari penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif Jawa Tengah.

Adapun tema ini memiliki keterkaitan dengan sasaran:

Sasaran 1. Terwujudnya ekonomi yang berdayasaing, dan berkelanjutan.

Sasaran ini dicapai dengan strategi :

- 1. Pengembangan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di daerah, penguatan ekonomi kreatif, dan inisiasi penerapan ekonomi yang berdaya saing.** Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:
 - a) Mendorong sertifikasi kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pertanian modern.
 - b) Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata (jalan akses, sanitasi, transportasi, dan jaringan internet).
 - c) Revitalisasi pusat ekonomi kreatif desa dan fasilitas pendukung UMKM.
 - d) Penguatan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
 - e) Fasilitasi promosi wisata dan produk lokal melalui platform digital.
 - f) Mendorong terbentuknya klaster ekonomi kreatif berbasis potensi lokal (kuliner, kerajinan, seni budaya).

Sasaran 2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Adaptif.

Strategi untuk mencapai sasaran ini ialah:

1. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:

- a) Mengembangkan jaringan kemitraan dan Inovasi
- b) penguatan pelayanan publik yang cepat, tepat, berbasis digital, serta keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat (*open government*)
- c) Peningkatan profesionalitas ASN berbasis fungsi dan kinerja
- d) Peningkatan kapasitas SDM pengelola layanan publik
- e) Penguatan kompetensi digital ASN, kompetensi ASN di bidang perencanaan, penganggaran, dan evaluasi berbasis evidence-based policy, serta manajerial

Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang maju, produktif, dan berkualitas

Strategi untuk mencapai sasaran ini meliputi :

1. Pengembangan layanan Pendidikan untuk semua dan upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:

- a) Pemenuhan kelengkapan fasilitas penunjang pembelajaran seperti laboratorium, perpustakaan, ruang keterampilan, dan sarana olahraga
- b) Mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah, serta optimalisasi pendidikan non formal
- c) Revitalisasi sarana dan prasaran Pendidikan serta peningkatan digitalisasi Pendidikan
- d) Meningkatkan sekolah unggulan dan sekolah inklusif khususnya Tingkat sekolah dasar
- e) Menyelenggarakan pelatihan vokasi, literasi digital, dan kewirausahaan
- f) Peningkatan pelatihan berkelanjutan (*continuous professional development*) bagi guru untuk penguasaan kurikulum, pembelajaran berbasis digital, dan inovasi pembelajaran.

2. Pengembangan kesehatan untuk semua dengan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang berkualitas pelayanan prima serta penguatan promotif dan preventif bagi masyarakat. Selanjutnya tujuan

dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:

- a) peningkatan kualitas, kapasitas, kompetensi, dan ketersediaan tenaga Kesehatan
- b) perluasan upaya promotif dan preventif dalam upaya
- c) peningkatan kesehatan masyarakat antara lain dengan pembudayaan perilaku hidup sehat, penyehatan lingkungan didukung dengan prasarana sarana antara lain konektivitas transportasi, ruang terbuka, fasilitas aktivitas fisik dan olahraga, akses air minum layak dan aman, sanitasi layak, serta permukiman sehat

3. Pengembangan Pembangunan kualitas keluarga yang sejahtera berbasis norma budaya yang berlaku dan inklusi sosial yang berkeadilan.

Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:

- a) Fasilitasi layanan terpadu keluarga sejahtera berbasis digital
- b) Peningkatan pendidikan karakter anak dan remaja berbasis norma agama, adat istiadat, dan budaya lokal
- c) Penguatan identitas keluarga dan mencegah degradasi moral
- d) Pengembangan kader masyarakat (kader PKK, kader posyandu, penyuluh keluarga) dengan pelatihan teknis dan soft skills yang relevan untuk pemberdayaan keluarga

4. Pengembangan pengentasan kemiskinan yang terstruktur. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:

- a) Mengembangkan ekosistem inovasi desa berbasis digital dan ramah lingkungan.
- b) Pemantapan perlindungan sosial masyarakat dengan basis data tunggal yang integratif.
- c) Penguatan perlindungan, pemberdayaan dan peningkatan kemandirian perempuan dan kelompok marjinal lainnya

5. Pengembangan pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik dasar maupun penunjang pembangunan ekonomi berbasis penataan ruang yang berkualitas. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:

- a) Penguatan pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak

- b) Peningkatan pembangunan permukiman dan infrastruktur publik yang menyediakan akses yang merata terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan serta pusat perekonomian

Sasaran 4. Terwujudnya harmoni manusia dan lingkungan melalui peningkatan kewaspadaan serta mitigasi bencana.

Sasaran ini dicapai dengan strategi :

- 1. Pengembangan konektivitas dan sumber daya alam yang lestari serta pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.** Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:
 - a) pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, dan pengelolaan sampah
 - b) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara lestari
- 2. Pengembangan ketahanan sumber daya serta ketangguhan dan tanggap bencana daerah.** Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:
 - a) Pengembangan teknologi peringatan dini multi-bencana

Arah Kebijakan Tahun 2028

Tahun 2028 merupakan tahap “**Peningkatan tata kelola pemerintahan menuju kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan modern, serta pemantapan perekonomian masyarakat melalui optimalisasi potensi desa**”

Tema ini menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang mampu mendorong pembangunan daerah secara inklusif. Tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjadi pendukung tercapainya iklim investasi yang sehat. Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan juga akan memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks pembangunan wilayah, tata kelola pemerintahan yang modern sangat dibutuhkan untuk mengintegrasikan layanan publik dengan peningkatan konektivitas, baik antarwilayah maupun antar-sektor.

Pemantapan perekonomian masyarakat Wonogiri diwujudkan melalui optimalisasi potensi desa yang beragam. Desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi lokal perlu diarahkan menjadi pusat kegiatan produktif, baik melalui

pengembangan pertanian, pariwisata, maupun ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal. Upaya ini membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai agar konektivitas desa ke pasar semakin terbuka dan kegiatan ekonomi dapat berkembang lebih cepat. Dengan pengelolaan yang terarah, potensi desa tidak hanya memberikan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian masyarakat serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Secara keseluruhan, tema pembangunan Kabupaten Wonogiri ini sejalan dan berkontribusi langsung terhadap tema pembangunan Jawa Tengah, yaitu “Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau.” Melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta optimalisasi potensi desa yang berkelanjutan, Wonogiri dapat memperkuat perannya dalam mendorong pemerataan ekonomi yang berkeadilan sekaligus mendukung arah pembangunan berwawasan lingkungan di Jawa Tengah.

Adapun tema ini memiliki keterkaitan dengan sasaran:

Sasaran 1. Terwujudnya ekonomi yang berdayasaing, dan berkelanjutan.

Sasaran ini dicapai dengan strategi:

1. Peningkatan tata kelola kelembagaan pendukung capaian investasi guna pengembangan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di daerah, penguatan ekonomi kreatif, dan inisiasi penerapan ekonomi yang berdaya saing. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:

- a) Meningkatkan kemandirian desa dengan peningkatan produktivitas ekonomi
- b) Penguatan kreatifitas desa
- c) Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan dengan membentuk klaster industri hilirisasi yang melibatkan UMKM, koperasi, BUMDes, serta pelaku usaha swasta.
- d) Menjalin kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan komunitas lokal.
- e) Penguatan Regulasi dan Perlindungan Produk Lokal/daerah yang mendukung perlindungan produk hilirisasi dari persaingan tidak sehat.

Sasaran 2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Adaptif. Sasaran ini dicapai dengan strategi :

1. Peningkatan Implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:

- a) Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintah daerah
- b) Reformasi birokrasi berbasis digital (e-government) untuk mempercepat pelayanan publik.
- c) Optimalisasi sinergi antar Perangkat Daerah dalam peningkatan perekonomian masyarakat
- d) Peningkatan tata kelola data dan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif.
- e) Penguatan BUMDes dan Pemberdayaan Ekonomi Desa
- f) Peningkatan Kerjasama antar desa dan pihak lainnya.
- g) Mendorong budaya kerja kolaboratif lintas perangkat daerah guna mempercepat penyelesaian program dan pelayanan kepada masyarakat

Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang maju, produktif, dan berkualitas.

Sasaran ini dicapai dengan strategi:

- 1. Peningkatan tata kelola kelembagaan pendidikan dalam rangka optimalisasi layanan Pendidikan untuk semua.** Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:
 - a) peningkatan digitalisasi pendidikan, dengan mendorong metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi
 - b) Penguatan kapasitas manajemen sekolah dan madrasah melalui pelatihan kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi berbasis data
 - c) Optimalisasi peran dinas pendidikan, komite sekolah, dan forum masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan mutu pendidikan
- 2. Peningkatan kualitas layanan dan tata kelola kesehatan.** Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:
 - a) Penguatan dan pemerataan pelayanan dan prasarana sarana kesehatan, didukung dengan inovasi pelayanan Kesehatan
 - b) Pemantapan tata kelola kelembagaan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi
 - c) Penguatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan modernisasi fasilitas kesehatan secara berkala

- d) Integrasi pembangunan infrastruktur kesehatan dengan program peningkatan kapasitas SDM kesehatan, termasuk pelatihan tenaga medis dan paramedis

3. Peningkatan pembangunan kualitas keluarga yang sejahtera berbasis norma budaya yang berlaku dan inklusi sosial yang berkeadilan.

Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:

- a) Penguatan tata kelola pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kesejahteraan dan kualitas keluarga
- b) Integrasi antara indikator kesejahteraan keluarga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
- c) Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah dan kader masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan keluarga
- d) Pengembangan sistem layanan terpadu keluarga (one stop service) berbasis IT untuk akses bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan informasi peluang ekonomi.

4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan program perlindungan sosial guna pengentasan kemiskinan yang terstruktur.

Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:

- a) Penguatan sistem jaminan sosial dengan efektif dan tepat sasaran
- b) Penguatan tata kelola dan kelembagaan data untuk penentuan sasaran penerima manfaat, termasuk tata kelola perencanaan dan pembiayaan untuk perlindungan sosial
- c) Kolaborasi pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat desa dalam penyediaan fasilitas publik dan infrastruktur produktif berbasis potensi lokal

5. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kinerja ASN dalam pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas.

Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:

- a) Penyediaan dan pemberian layanan fasilitas publik yang inklusif
- b) Penguatan integrasi rencana pembangunan sarana prasarana permukiman dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RDTR) sebagai acuan utama pembangunan
- c) Penguatan pengawasan dan penegakan aturan tata ruang

Sasaran 4. Terwujudnya harmoni manusia dan lingkungan melalui peningkatan kewaspadaan serta mitigasi bencana. Sasaran ini dicapai dengan strategi :

- 1. Peningkatan konektivitas dan sumber daya alam yang lestari serta pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.** Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:
 - a) Pemanfaatan SDA secara bijak melalui penerapan sustainable resource management
 - b) Pengelolaan sumber daya alam berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan sesuai hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 2. Peningkatan ketahanan sumber daya serta ketangguhan dan tanggap bencana daerah berbasis inovasi teknologi hijau guna meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi emisi karbon.** Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:
 - a) Pengelolaan sumber daya air, energi, dan pangan secara berkelanjutan untuk mengantisipasi krisis akibat bencana

Arah Kebijakan Tahun 2029

Tahun 2029 merupakan tahap **“Penguatan daya saing sumber pertumbuhan ekonomi baru berbasis hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) unggulan dan SDM berkarakter”**

Tema “Penguatan daya saing sumber pertumbuhan ekonomi baru berbasis hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) unggulan dan SDM berkarakter” di Kabupaten Wonogiri menjadi langkah strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah. Hilirisasi SDA unggulan diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, tetapi juga untuk memperkuat produksi yang ramah lingkungan sehingga pertumbuhan ekonomi tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan. Dalam mendukung hal tersebut, pembangunan sarana dan prasarana diarahkan pada sistem yang ramah lingkungan, efisien, dan mampu mendukung kegiatan perekonomian masyarakat secara merata.

Selain aspek pengelolaan SDA, pembangunan SDM menjadi fokus penting melalui layanan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan diarahkan untuk melahirkan generasi yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter, sehingga mampu mengisi ruang-ruang produktif di sektor ekonomi baru. Reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi juga menjadi prasyarat untuk menciptakan

tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan mampu memberikan pelayanan publik yang mendorong tumbuhnya iklim usaha. Lebih jauh, perhatian terhadap perekonomian kaum marjinal menjadi bagian penting dari strategi ini agar pertumbuhan ekonomi yang tercipta tidak hanya dinikmati sebagian kalangan, melainkan benar-benar menghadirkan pemerataan kesejahteraan.

Dengan demikian, arah pembangunan ini memperkuat daya saing Wonogiri sekaligus mendukung tema pembangunan Jawa Tengah yaitu “Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan.” Melalui hilirisasi SDA unggulan, pengembangan SDM, reformasi birokrasi berbasis IT, serta pembangunan sarpras ramah lingkungan, Kabupaten Wonogiri dapat mengambil peran strategis dalam menumbuhkan ekonomi daerah yang lebih kompetitif sekaligus berkelanjutan.

Adapun tema ini memiliki keterkaitan dengan sasaran :

Sasaran 1. Terwujudnya ekonomi yang berdayasaing, dan berkelanjutan.

Sasaran ini dicapai dengan strategi:

- 1. Penguatan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di daerah, penguatan ekonomi kreatif, serta inisiasi penerapan ekonomi yang berdaya saing dan ramah lingkungan.** Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:
 - a) Penguatan Industri Pengolahan Sumber Daya Alam unggulan dengan Mendorong berdirinya industri kecil, menengah, dan besar yang mengolah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan menjadi produk bernilai tambah.
 - b) Menyediakan insentif bagi pelaku usaha yang mengembangkan hilirisasi, seperti kemudahan perizinan dan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah.
 - c) Peningkatan Infrastruktur Pendukung Hilirisasi, membangun dan memperbaiki akses jalan produksi, jaringan listrik, air baku, serta fasilitas logistik yang menunjang distribusi hasil produksi.
 - d) Mengembangkan sentra industri dan kawasan ekonomi berbasis komoditas unggulan Wonogiri.
 - e) Mendorong kemitraan antara petani/peternak dengan investor melalui pola inti-plasma atau contract farming.
 - f) Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi yang tepat guna untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk.
 - g) Mengembangkan ekosistem digital marketing dan e-commerce untuk memperluas pasar produk hilirisasi lokal.

- h) Meningkatkan promosi dan branding produk unggulan Wonogiri di tingkat nasional maupun internasional.
- i) Mengembangkan ekosistem inovasi desa berbasis digital dan ramah lingkungan.

Sasaran 2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Adaptif. Sasaran ini dicapai dengan strategi:

1. Penguatan implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan berbasis IT guna integrasi program pemberdayaan perekonomian dan keberlanjutan. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:

- a) Penguatan manajemen sumber daya aparatur agar lebih efektif dan efisien, termasuk akselerasi peningkatan kualifikasi dan kompetensi ASN
- b) Penguatan kolaborasi dan kerja sama antardaerah, antara daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka perwujudan cita-cita pembangunan daerah
- c) Optimalisasi keterbukaan data dan kemudahan akses informasi regulasi investasi untuk mendorong transparansi dan kepastian hukum
- d) Kolaborasi digital antara pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas lokal untuk mempercepat inovasi dan pengembangan ekonomi berkelanjutan

Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang maju, produktif, dan berkualitas. Sasaran ini dicapai dengan strategi:

1. Penguatan layanan Pendidikan untuk semua menuju SDM unggul dan berdaya saing. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:

- a) Peningkatan Kapasitas SDM dengan memberikan pelatihan vokasi dan sertifikasi bagi tenaga kerja lokal di sektor pengolahan hasil Sumber Daya Alam
- b) Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk inovasi produk berbasis Sumber Daya Alam unggulan
- c) Penguatan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan literasi digital tenaga kerja masa depan

- d) Integrasi pendidikan karakter, nilai budaya lokal, dan norma agama ke dalam kurikulum formal dan nonformal
 - e) Penguatan kolaborasi dengan tokoh adat, pemuka agama, dan komunitas budaya untuk terlibat aktif dalam pembinaan karakter generasi muda
- 2. Penguatan kualitas layanan kesehatan untuk semua.** Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:
- a) penanggulangan permasalahan gizi makro dan gizi mikro, percepatan penuntasan permasalahan stunting dan kelebihan gizi
 - b) Pembangunan fasilitas kesehatan ramah disabilitas dan ramah anak dengan desain inklusif dan aksesibilitas yang memadai
- 3. Penguatan kualitas keluarga yang sejahtera berbasis norma budaya yang berlaku dan inklusi sosial yang berkeadilan guna peningkatan ekonomi rumah tangga.** Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:
- a) Penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga adat, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan kualitas keluarga
 - b) Peningkatan akses permodalan, keterampilan ekonomi produktif, dan literasi keuangan keluarga
 - c) Pemberdayaan kelompok usaha keluarga
- 4. Penguatan pengentasan kemiskinan yang terstruktur berbasis pemberdayaan perekonomian kaum marjinal.** Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:
- a) Pemerataan infrastruktur layanan dasar, ketahanan pangan, pemberdayaan dan perlindungan kaum marjinal
 - b) Penguatan produktivitas desa dan ekonomi berkelanjutan
 - c) penguatan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial secara inklusif baik secara sosial dan ekonomi terutama untuk kelompok anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya
- 5. Penguatan pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas guna ekspansi perekonomian ramah lingkungan.** Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:

- a) Pembangunan dan rehabilitasi jaringan air bersih, sanitasi, drainase lingkungan, dan jalan lingkungan
- b) Pemanfaatan teknologi bangunan hijau dan ramah lingkungan untuk meningkatkan kualitas hunian dan efisiensi energi
- c) Pemantapan kemitraan dengan swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana permukiman melalui skema pembiayaan kreatif.

Sasaran 4. Terwujudnya harmoni manusia dan lingkungan melalui peningkatan kewaspadaan serta mitigasi bencana. Sasaran ini dicapai dengan strategi:

1. Penguatan konektivitas dan sumber daya alam yang lestari serta pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:

- a) Pelibatan masyarakat dalam pengawasan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan
- b) Percepatan pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan pada setiap akhivitas pembangunan

2. Penguatan ketahanan sumber daya serta ketangguhan dan tanggap bencana daerah dalam rangka pengembangan ekonomi hijau berkelanjutan. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:

- a) Peningkatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan Daerah

Arah Kebijakan Tahun 2030

Tahun 2030 merupakan tahap **“Perwujudan Wonogiri yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**

Tema ini mencerminkan arah pembangunan daerah yang menyeluruh dengan menitikberatkan pada optimalisasi potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penguatan daya saing diwujudkan melalui optimalisasi produksi dan hilirisasi berbagai sektor unggulan, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian daerah. Hilirisasi ini sekaligus mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang lebih inklusif dan ramah lingkungan, serta memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.

Untuk mendukung hal tersebut, implementasi reformasi birokrasi menjadi kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Tata kelola yang modern akan memastikan pelayanan publik yang lebih responsif sekaligus memperkuat perwujudan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan sarana dan prasarana yang efektif. Konektivitas yang baik akan membuka akses pasar, mempercepat mobilitas orang dan barang, serta memperkuat keterhubungan ekonomi antar desa dan kota.

Selain itu, tema ini juga menekankan pentingnya perwujudan ketahanan masyarakat yang tanggap terhadap bencana. Sebagai daerah yang memiliki kerentanan terhadap risiko alam, pembangunan yang memperhatikan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana akan melindungi produktivitas serta menjaga kesinambungan pembangunan. Dengan demikian, perwujudan Wonogiri yang berdaya saing, maju, sejahtera, dan berkelanjutan sejalan serta berkontribusi langsung terhadap tema pembangunan Jawa Tengah, yaitu “Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan.”

Adapun tema ini memiliki keterkaitan dengan sasaran

Sasaran 1. Terwujudnya ekonomi yang berdayasaing, dan berkelanjutan.

Sasaran ini dicapai dengan strategi:

- 1. Perwujudan optimalisasi produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di daerah, penguatan ekonomi kreatif, inisiasi penerapan ekonomi yang berdaya saing.** Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:
 - a) Perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui Hilirisasi sektor unggulan daerah;
 - b) Pemantapan Kelembagaan dan Kolaborasi peran BUMDes sebagai motor ekonomi desa dengan dukungan modal dan pendampingan
 - c) Perwujudan sentra industri pangan lokal dengan dukungan teknologi tepat guna dan standardisasi mutu produk.
 - d) Perwujudan platform e-commerce lokal untuk memasarkan produk unggulan Wonogiri
 - e) Peningkatan jalan produksi, pasar modern berbasis desa, serta pusat distribusi logistik
 - f) Pemantapan akses listrik dan internet merata sampai tingkat desa untuk menunjang produktivitas ekonomi.
 - g) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Petani dan Nelayan
 - h) Penguatan dalam Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan

- i) Peningkatan penggunaan energi terbarukan (PLTS, mikrohidro) di sektor industri dan rumah tangga.
- j) Penguatan Kelembagaan koperasi sebagai wadah kolektif UMKM.
- k) Penguatan Brand dan Promosi Produk Lokal untuk meningkatkan konsumsi produk lokal.

Sasaran 2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Adaptif. Sasaran ini dicapai dengan strategi:

1. **Perwujudan Implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.** Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:
 - a) Perwujudan kualitas pelayanan masyarakat yang terpadu dan efektif
 - b) Perwujudan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan kompeten
 - c) Perwujudan digitalisasi pelayanan publik
 - d) Penguatan kelembagaan pemerintah yang profesional dan efisien
 - e) Perwujudan kualitas perencanaan berorientasi pada data, riset dan manajemen risiko
 - f) Penguatan regulasi daerah yang responsive dan berpihak pada kepentingan masyarakat
 - g) Perwujudan pemerintahan yang akuntabel dengan penguatan integritas aparatur, efisiensi birokrasi, dan pengawasan berbasis teknologi
 - h) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang adaptif melalui inovasi digital, transparansi, dan partisipasi masyarakat
 - i) Penguatan pemerintahan yang adaptif, responsif, efisien, dan berkelanjutan.

Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang maju, produktif, dan berkualitas. Sasaran ini dicapai dengan strategi:

1. **Perwujudan layanan Pendidikan untuk semua berbasis pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas.** Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:
 - a) Perwujudan pemerataan akses pendidikan berkualitas
 - b) Perwujudan pendidikan vokasi dan keterampilan kerja berbasis kebutuhan industri lokal;
 - c) Perwujudan Pemuda yang produktif melalui program pemberdayaan
 - d) Penguatan karakter dan ketahanan sosial melalui pengembangan program pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, serta nilai budaya dan kearifan lokal.

2. Perwujudan kesehatan untuk semua menuju Wonogiri Sejahtera.

Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:

- a) Perwujudan kesehatan masyarakat yang berkualitas dengan memperluas layanan kesehatan preventif dan promotif;
- b) Peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan angka stunting dan kematian ibu melahirkan.
- c) Perwujudan sistem layanan kesehatan berbasis digital agar masyarakat mudah mengakses informasi dan pelayanan medis.
- d) Perwujudan ketahanan kesehatan masyarakat melalui pengendalian penyakit menular dan penguatan layanan kesehatan lingkungan.

3. Perwujudan Pembangunan kualitas keluarga yang sejahtera berbasis norma budaya yang berlaku dan inklusi sosial yang berkeadilan.

Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:

- a) Perwujudan keluarga sejahtera dan bahagia
- b) Perwujudan partisipasi aktif lembaga adat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat dalam perumusan dan pengawasan kebijakan keluarga
- c) Perwujudan usaha berbasis rumah tangga ramah lingkungan

4. Perwujudan pengentasan kemiskinan yang terstruktur. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:

- a) Perwujudan pengentasan kemiskinan berbasis data yang valid dan relevan
- b) Perlindungan sosial masyarakat dengan basis data tunggal yang integratif
- c) Implementasi tata kelola kelembagaan dan digitalisasi program perlindungan sosial yang berkualitas

5. Perwujudan pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas.

Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:

- a) Penataan kawasan permukiman sesuai RTRW/RDTR dan pencegahan pembangunan di zona rawan bencana
- b) Perwujudan penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang memenuhi standar kelayakan nasional (SNI) terkait kualitas konstruksi, kesehatan lingkungan, dan keamanan penghuni

- c) Perwujudan pembangunan infrastruktur publik mengacu pada standar pelayanan minimal (SPM)

Sasaran 4. Terwujudnya harmoni manusia dan lingkungan melalui peningkatan kewaspadaan serta mitigasi bencana. Sasaran ini dicapai dengan strategi:

a. Perwujudan konektivitas dan sumber daya alam yang lestari serta pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:

- a) Perwujudan pola pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui pengelolaan hutan, air, dan tanah secara bijak agar tetap terjaga untuk generasi mendatang.
- b) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan melalui pendidikan lingkungan hidup dan kampanye gaya hidup ramah lingkungan.
- c) Perwujudan tata ruang yang ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam setiap pembangunan.
- jd. Peningkatan kualitas udara, air, dan tanah melalui pengendalian pencemaran dan penguatan program penghijauan di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

b. Perwujudan ketahanan sumber daya serta ketangguhan dan tanggap bencana daerah.

Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama ini dicapai melalui arah kebijakan:

- a) Peningkatan sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi longsor, banjir, dan kekeringan di wilayah rawan bencana.
- b) Perwujudan edukasi dan sosialisasi mitigasi bencana melalui pelatihan dan simulasi
- c) Perwujudan Desa Tangguh Bencana dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana evakuasi dan pengelolaan risiko lokal.
- d) Peningkatan rehabilitasi dan konservasi lingkungan melalui penghijauan, reboisasi, dan konservasi lahan kritis.
- e) Perwujudan infrastruktur penanggulangan bencana berupa jalur evakuasi, tempat pengungsian layak, dan bangunan vital tahan bencana.
- f) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan digital untuk menyediakan informasi cepat terkait bencana dan jalur evakuasi.

3.5. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program dalam mencapai strategi pembangunan jangka menengah daerah merupakan rangkaian langkah konkret yang dirancang untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan. Program-program ini disusun berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, dengan fokus pada berbagai sektor prioritas seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan. Setiap program dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data guna memastikan efektivitas pelaksanaannya serta dampak yang maksimal bagi masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program pembangunan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta memperkuat daya saing daerah Kabupaten Wonogiri.

Tabel 3. 4. Rencana Implementasi 7 Program Prioritas Daerah Kabupaten Wonogiri 2026-2030

NO	PROGRAM PRIORITAS BUPATI	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	IMPLEMENTASI PRIORITAS BUPATI
1	MENCIPTAKAN PERTUMBUHAN EKONOMI BARU	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Selatan Pengembangan Kawasan Geopark Gunung Sewu Pengembangan Kawasan Selomoyoz
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian
2	MEMBANGUN EKONOMI KREATIF	a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
		b. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekonomi Kreatif Wonogiri meliputi ; Arsitektur, film, fotografi, kriya, kuliner, seni rupa, produk aplikasi, game, televisi dan radio, fashion, pertunjukan design, interior, periklanan, penerbitan DKV (Design Komunikasi Visual), musik.
		c. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengembangan BLK
3	MEMBANGUN LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BERORIENTASI KEBUTUHAN MASYARAKAT	a. Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberian beasiswa bagi pemuda berprestasi
		c. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemeriksaan Kesehatan Gratis Pembayaran JKN PBI Pembangunan RSUD Purwantoro

NO	PROGRAM PRIORITAS BUPATI	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	IMPLEMENTASI PRIORITAS BUPATI
			Pembangunan RSUD Baturetno
4	MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
5	PENGUATAN BIROKRASI YANG DINAMIS	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pembangunan Command Center
6	MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL BERBASIS RISET DAN INOVASI	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Invensi dan Inovasi
7	PENINGKATAN SUMBER DAYA ALAM YANG LESTARI	a. Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional
		b. Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan Mitigasi Kebencanaan

Tabel 3. 5. Program Prioritas RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
<p>VISI “WONOGIRI YANG BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”</p> <p>MISI 1: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing dan berkelanjutan</p> <p>MISI 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Didukung Lingkungan Sosial dan Budaya Masyarakat Maju</p> <p>MISI 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</p> <p>MISI 4: Mewujudkan Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana</p>	<p>MEWUJUDKAN WONOGIRI YANG BERDAYASAING, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN</p>	<p>Terwujudnya ekonomi yang berdayasaing, dan berkelanjutan.</p>		Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten/Kota**	
				Pertumbuhan Ekonomi	
				Kontribusi PDRB Kabupaten Wonogiri Terhadap Provinsi Jawa Tengah	
				Tingkat Pengangguran Terbuka**	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah pengunjung tempat bersejarah (Orang)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				Jumlah wisatawan mancanegara (Orang)	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang, efisien merata dan terintegrasi	Jumlah Sarana Perdagangan Berkondisi Layak (Unit)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro (%)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Rasio bantuan ketersediaan sarana produksi terhadap kebutuhan (Rasio)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
	MEWUJUDKAN WONOGIRI YANG BERDAYASAING, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Adaptif		Indeks Reformasi Birokrasi*	
					Nilai SAKIP	
					Indeks Integritas Nasional**	
					Indeks Pelayanan Publik*	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informasi	Persentase tingkat integrasi antar aplikasi di pemerintah kabupaten (%)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
				Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
	MEWUJUDKAN WONOGIRI YANG BERDAYASAING, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN			Tingkat Kemiskinan*		
			Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang maju, produktif, dan berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia	
				Meningkatkannya partisipasi anak usia sekolah	APK SD/MI Paket A (%)	a. Program Pengelolaan Pendidikan
					APM SD/MI/Paket A (%)	
					APK SMP/MTs/Paket B (%)	
					APM SMP/MTs/Paket B (%)	
					Prosentase Prasarana dan Fasilitas Penunjang Pembelajaran sesuai SPM (%)	
					Prosentase Ketersediaan Alat Peraga/Praktik Pembelajaran (%)	
					Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	
					Prosentase Ketersediaan Perabot/Meubelair Prasarana Pembelajaran (%)	
			Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia			

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Dini Terakreditasi (Angka)	
				Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	
				Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi (Angka)	
				Prosentase Guru yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi (%)	
				Literasi Membaca SD/Sederajat (%)	
				Numerasi SD/Sederajat (%)	
				Literasi Membaca SMP/Sederajat (%)	
				Numerasi SMP/Sederajat (%)	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				pertama (%)	
				Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	
			Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Meningkatkan Kualitas Kesehatan perorangan dan masyarakat - RSUD Soediran Mangun Sumarso	Persentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Kasus Kematian Ibu (Kasus)	
				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	
				Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	
				Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (%)	
				Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	
				Proporsi Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)	
				Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	
				Proporsi fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	
				Proporsi fasyankes terakreditasi paripurna (%)	
				Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	
			Meningkatnya Rasio Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni (%)	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
	MEWUJUDKAN WONOGIRI YANG			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca*	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
	BERDAYASAING, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN				
		Terwujudnya harmoni manusia dan lingkungan melalui peningkatan kewaspadaan serta mitigasi bencana		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**	
				Indeks Risiko Bencana**	
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Program Pengelolaan Persampahan
			Meningkatnya Pelayanan Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang mendapatkan pelayanan penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana



BAB IV

**PROGRAM PERANGKAT DAERAH
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH**

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat program perangkat daerah tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2025-2029 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 19 (sembilan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan dan 1 (satu) fungsi lainnya.

Program Program yang akan dilaksanakan dalam Periode 2025-2029 dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah :

4.1. Program Perangkat Daerah

A. Program Penunjang Pemerintah Daerah

Program ini dilakukan melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; dan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan ini diarahkan diantaranya guna merealisasikan indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Organisasi, Indeks Profesionalitas ASN, Jumlah ASN yang menjadi Agen Perubahan, Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Jumlah Inovasi.

B. Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas wajib belajar 13 tahun dimulai Pendidikan Anak Usia Dini melalui Program PAUD dan Seragam gratis, yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Kegiatan ini diarahkan untuk mencapai Pemenuhan sarana prasarana dan pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pemenuhan sarana prasarana dan pembiayaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pemenuhan sarana prasarana dan pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pemenuhan sarana

prasarana dan pembiayaan Pendidikan Kesetaraan.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini dilakukan melalui kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, dan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Kegiatan ini untuk mencapai Jumlah dokumen pengembangan kurikulum muatan local, dan Persentase analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

c. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini dilakukan melalui kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar, dan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat. Kegiatan ini untuk mencapai indikator Jumlah izin pendirian pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat, dan Jumlah izin Pendirian PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, 3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi, 4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini untuk mencapai indikator: 1. Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP, 2. Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan UKM dan UKP, 3. Prosentase tersedianya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan puskesmas, 4. Prosentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota, 2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, 3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini untuk mencapai indikator: 1. Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten, 2. Rasio terpenuhinya tenaga kesehatan dan tenagamedis, 3. Prosentase tenaga kesehatan yang lolos uji kredensial dan uji kompetensi.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), 2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, 3. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), 4. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.

Kegiatan ini untuk mencapai indikator: 1. Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, umot, yang direkomendasi ijinnya, 2. Prosentase Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, 3. Prosentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), 4. Prosentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, 2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, 3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini untuk mencapai indikator: 1. Persentase puskesmas melaksanakan pembinaan desa siaga sehat desa siaga sehat, 2. Persentase strata PHBS Rumah Tangga minimal paripurna, 3. Persentase puskesmas yang melaksanakan pembinaan posyandu.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. Kegiatan ini untuk mencapai indikator Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten. Kegiatan ini untuk mencapai indikator Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di Daerah Kabupaten. Kegiatan ini untuk mencapai indikator indikator: 1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic, 2. Volume lumpur tinja yang terolah.

d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten, Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Panjang saluran drainase yang dibangun.

e. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini dilakukan melalui kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Kegiatan

ini untuk mencapai indikator kinerja yaitu Jumlah pengesahan gambar, Jumlah SLF, dan Jumlah Pengawasan

f. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Program ini dilakukan melalui kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah pengawasan, penataan bangunan dan lingkungan.

g. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini dilakukan melalui kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini untuk mencapai indikator Jumlah jalan yang ditangani

h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini dilakukan melalui kegiatan Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, Kegiatan ini untuk mencapai indikator Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang terlatih.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten, Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Kegiatan ini untuk mencapai indikator Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemda kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni, dan Persentase unit rumah korban bencana yang tertangani

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini dilakukan melalui kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Kegiatan ini untuk mencapai indikator Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan, Jumlah luasan kawasan rencana penanganan kumuh

c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini untuk mencapai indikator Persentase RTLH yang tertangani pada tahun n

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini dilakukan melalui kegiatan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah PSU Perumahan yang dibangun.

e. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini dilakukan melalui kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan melalui kegiatan pencapaian indikator Persentase dokumen penyusunan peraturan penataan ruang, Persentase jumlah rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang, dan Jumlah pemohon tertib penggunaan ruang sesuai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

f. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini melalui kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota. Kegiatan ini untuk mencapai indikator Jumlah Sengketa Tanah Aset Pemkab Yang Telah Tertangani

g. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Program ini melalui kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini untuk mencapai indikator Jumlah bidang tanah untuk penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah

h. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Program ini dilakukan melalui kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini untuk mencapai indikator Jumlah lokasi objek tanah yang dalam proses redistribusi.

i. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Program ini melalui kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong. Kegiatan ini untuk mencapai indikator Persentase capaian pendapatan dari retribusi pemakaian kekayaan dari sewa tanah eks bondo desa

j. Program Penatagunaan Tanah

Program ini melalui kegiatan Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten / Kota. Kegiatan ini untuk mencapai indikator Jumlah bidang tanah yang tersertifikatkan pada tahun n

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Program ini dilakukan melalui kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati, Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota, Jumlah Penegakan Peraturan Bupati/Wali Kota, dan Persentase Pengembangan PPNS atas Perda dan Perbup

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Persentase Kejadian Kebakaran yang tertangani.

c. Program Penanggulangan Bencana

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, persentase Jumlah

Warga Negara yang Memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, persentase jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Jumlah Dokumen Penanggulangan Bencana

6. Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini dilakukan melalui kegiatan 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. 2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosia. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai lindikator : 1. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabsos dasar di luar panti, 2. Jumlah PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan rehabsos di luar panti

b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, 2. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator: 1. Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang tervalidasi, 2. Jumlah Anak-Anak Terlantar Yang Terpelihara.

c. Program Penanganan Bencana

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, 2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator : 1. Persentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani, 2. Persentase Relawan Bencana Yang Memahami Kesiap Siagaan Bencana.

d. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator Jumlah jenis PSKS yang mendapatkan

peningkatan kapasitas

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dipelihara

C. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini dilakukan melalui kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator Jumlah jenis dokumen RTK yang disusun

b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini dilakukan melalui kegiatan : 1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, 2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, 3. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator : 1. Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi, 2. Jumlah program pelatihan yang sudah link and match dengan Perusahaan, 3. Persentase LPK yang Memiliki Perizinan.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini dilakukan melalui kegiatan : 1. Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota, 2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, 3. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kabupaten/kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator : 1. Jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan, 2. Jumlah Lowongan Kerja yang Bisa Dibangun Link and Match nya, 3. Jumlah Pencari Kerja Migran yang Ditempatkan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan untuk kegiatan pelembeagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator Persentase lembaga

pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak.

b. Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator Persentase OPD yang Mempunyai Data Gender dan Anak.

3. Pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, 2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, 3. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator: 1. Ketersediaan Pangan Utama (padi), 2. Prosentase Ketersediaan Cadangan Pangan dan ketentuan cadangan pangan kabupaten, 3. Persentase Angka Kecukupan Energi.

b. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan untuk kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan kabupaten. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Prosentase ketersediaan Infrastruktur Sarana Pendukung kemandirian Pangan.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, 2. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator: 1. jumlah Dokumen (Peta) kerentanan dan ketahanan pangan, 2. Jumlah kecamatan daerah rawan pangan yang difasilitasi.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini dilakukan melalui kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.

4. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Program ini diarahkan untuk kegiatan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Jumlah Luasan Tanah Aset Pemkab dari Eks Bondo Desa.

b. Program Penatagunaan Tanah

Program ini diarahkan untuk kegiatan pada penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu kabupaten. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Persentase Jumlah tanah Aset Pemkab Yang belum Terlegalisasi.

c. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan untuk kegiatan pada penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu kabupaten. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Persentase Sengketa Tanah Aset yang Tertangani.

d. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program ini dilakukan melalui kegiatan Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah bidang tanah untuk kepentingan umum skala kecil

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini diarahkan untuk kegiatan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Cakupan Pelayanan Persampahan.

b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan untuk kegiatan: 1. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten, 2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator: 1. Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, 2. Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS Kabupaten/Kota yang Tersusun.

c. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, 2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, 3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator: 1. Jumlah titik pengujian atau pemantauan kualitas lingkungan, 2. Jumlah Dokumen Informasi Lingkungan Hidup yang Tersusun, 3. Jumlah Titik Konservasi dan Pemulihan Pada Lahan Kritis, Daerah Tangkapan Air, DAS, Telaga dan Sumber Air.

d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan untuk kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah RTH Kota (Hutan Kota, Taman, Alun-alun dan RTH Publik Lainnya) yang dikelola Kabupaten.

e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan untuk kegiatan: 1. Penyimpanan Sementara Limbah B3, 2. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator: 1. Jumlah Limbah B3 dari Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang dilaporkan, 2. Persentase Fasilitasi Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten. Kegiatan ini dilakukan

untuk mencapai indikator Persentase Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan.

g. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

Program ini diarahkan untuk kegiatan: 1. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH. 2. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator: 1. Jumlah Pelaksanaan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH. 2. Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

h. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah Lembaga peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dinilai.

h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan untuk kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah Pelaksanaan Penghargaan Lingkungan Yang Diikuti.

i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan untuk kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Penanganan Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

j. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan untuk kegiatan pengelolaan sampah. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah Bank Sampah yang Terbentuk dan Dilakukan Pembinaan

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan untuk kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah orang yang tertib administrasi kependudukan.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan untuk kegiatan pelayanan pencatatan sipil. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah pelayanan pencatatan sipil.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan untuk kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah ketersediaan informasi administrasi kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini dilakukan melalui kegiatan Penyelenggaraan penataan desa. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator Jumlah Desa yang difasilitasi Sarana Prasarana Desa.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini dilakukan melalui kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator Jumlah kemitraan antar Desa yang terbangun.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator Jumlah Desa yang dibina secara Administratif

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan

lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator Jumlah Lembaga Desa yang difasilitasi Peningkatan Kapasitas.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini dilakukan melalui kegiatan :1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam daerah kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator : 1. Jumlah Penerima Informasi dan Edukasi KG dan PA bagi Keluarga, 2. Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Berperan aktif.

b. Program Pengendalian Penduduk

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator Jumlah Penerima Implementasi Pendidikan Kependudukan.

c. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator: 1. Jumlah Promosi dan KIE serta sosialisasi Program KKBPK, 2. Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD, 3. Persentase Pelayanan KB di Daerah, 4. Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Bangsa Kencana.

d. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, 2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator: 1. Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, 2. Cakupan Pemantauan dan Pendampingan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, 2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, 3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, 4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 5. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, 6. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, 7. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, 8. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, 9. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator: 1. Jumlah Perlengkapan Jalan Diluar Bahu Jalan, 2. Jumlah Terminal Tipe C, 3. Jumlah Fasilitas Parkir untuk Umum, 4. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum, 5. Jumlah Laporan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, 6. Jumlah Dokumen Andalalin, 7. Laporan Hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan, 8. Jumlah Layanan Angkutan Umum, 9. Jumlah Izin Trayek.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator jumlah dermaga.

c. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini dilakukan melalui kegiatan Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator jumlah perlintasan sebidang resmi.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten, 2. Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator: 1. Persentase domain dan sub domain yang di kelola pemerintah daerah, 2. Persentase pengembangan dan integrasi teknologi informasi dan komunikasi.

b. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Persentase informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Wonogiri yg terlayani.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah Koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan

b. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikat.

c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah usaha mikro yang diberdayakan.

d. Program Pengembangan UMKM

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah usaha mikro yang berkembang skala usahanya

e. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini dilakukan melalui kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan.

12. Penanaman Modal

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini dilakukan melalui kegiatan : 1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, 2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator: 1. Jumlah Dokumen Kebijakan/Kesepakatan/Rekomendasi Kebijakan tentang Penanaman Modal. 2. Jumlah Dokumen Kebijakan/Dokumen Peta Potensi dan Peluang Penanaman Modal.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini dilakukan melalui kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah Investor Skala Mikro dan Kecil Terfasilitasi NIB (Nomor Induk Berusaha).

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten. Kegiatan ini

dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah Perizinan dan Non perizinan di Bidang Penanaman Modal dalam Kewenangan Daerah Kabupaten yang Dilayani.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah Investor yang Tertib LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)

e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota. 2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator: 1. Jumlah pemuda yang mendapat pembinaan. 2. Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina.

b. Program pengembangan kapasitas daya saing Keolahragaan

Program ini dilakukan melalui kegiatan 1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. 3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi. 4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga. 5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator: 1. jumlah club cabang olahraga yang terfasilitasi. 2. Jumlah event kejuaraan tingkat daerah yang terselenggara. 3. Jumlah

atlet cabang olahraga Prestasi yang difasilitasi. 4. Jumlah organisasi olahraga yang dikembangkan. 5. Jumlah cabor olahraga rekreasi yang terselenggara.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator jumlah fasilitasi kegiatan kepanduan.

14. Statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini dilakukan melalui kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah pengumpulan pengelolaan dan analisa data statistik daerah Kabupaten Wonogiri

15. Persandian

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator: 1. Jumlah OPD yang melaksanakan kegiatan Persandian dan pelaksanaan keamanan digital. 2. Jumlah pelayanan keamanan informasi persandian.

16. Kebudayaan

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, 2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, 3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator: 1. Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, 2. Jumlah pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, 3. Jumlah

Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Jumlah Pelaku seni yang dibina.

c. Program Pembinaan Sejarah

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Dalam Satu daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator jumlah Pembinaan Sejarah lokal

d. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini dilakukan melalui kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator Jumlah cagar budaya yang ditetapkan.

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Permuseuman Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah Museum yang dikelola.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, 2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator

18. Kearsipan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, 2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, 3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk

mencapai indikator

b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun, 2. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota, 3. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, 4. Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota Yang Dinyatakan Hilang. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator 1. Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun, 2. Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana, 3. Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, 4. Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) Yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman

D. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten, 2. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, 2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota. Kegiatan ini

dilakukan untuk mencapai indikator Presentase Pelaku Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang di awasi.

d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini dilakukan melalui kegiatan Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator Persentase Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang diintervensi pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota. 2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. 3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata, 4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota, 5. Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator: 1. Jumlah daya tarik wisata yang terkelola oleh Pemda, 2. Jumlah daya tarik unggulan di kawasan strategis, 3. Jumlah destinasi wisata potensial, 4. Jumlah rekomendasi ijin prinsip usaha pariwisata yang dikeluarkan, 5. Jumlah dokumen Riparkab yang tersusun.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah kegiatan promosi wisata yang dilaksanakan.

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator jumlah SDM parekraf yang dibina.

d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini dilakukan melalui kegiatan 1. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kota Kreatif; 2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator 1. Jumlah Sarana dan prasarana kota kreatif yang memadai, 2. Jumlah ekosistem ekonomi kreatif

3. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan melalui kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator: 1. Rasio luas serangan OPT terhadap luas tanam, 2. Jumlah ternak yang teridentifikasi pasca bencana.

b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Pembangunan Prasarana Pertanian, 2. Pengembangan Prasarana Pertanian, 3. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator: 1. Prosentase Prasarana yang digunakan, 2. Luas Lahan yang Mendapatkan Fasilitas Penerapan Optimalisasi Lahan, 3. Jumlah pengawasan gaduhan ternak pemerintah, 4. Fasilitas Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan Rumah Potong Hewan (RPH)

c. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, 2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten, 3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, 4. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator: 1. Presentase Gapoktan / kelompok tani yang dibina dan difasilitasi, 2. Jumlah Gapoktan / kelompok tani yang dibina dan difasilitasi, 3. Jumlah sampel bahan/pakan yang memenuhi standar, 4.

Jumlah asektor ternak sapi betina, 5 Peningkatan produksi daging, telur dan susu, dan peningkatan Populasi ternak ruminansia dan non ruminansia

d. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan untuk kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator: 1. Persentase kenaikan nilai kelas kelompok, 2. Jumlah kualitas SDM Kelompok Tani Ternak

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini dilakukan melalui kegiatan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah pelaku peternakan yang memiliki izin usaha

f. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan, 2. Usahanya dalam Daerah Kabupaten Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota, 3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, 4. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator: 1. Jumlah hewan ternak yang sehat, 2. Jumlah sarpas untuk pemeriksaan keswan dan produk hewan di perbatasan, 3. Persentase pembinaan dan pengawasan kesmavet, 4. Jumlah pelayanan jasa medik veteriner.

4. Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah pasar rakyat yang dibangun, direvitalisasi dan direnovasi

b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Pengendalian Harga dan Stok

Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota. 2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah kabupaten/ Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator : 1. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah kabupaten/ Kota. 2. Cakupan wilayah pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.

c. Program Pengembangan Ekspor

Program ini dilakukan melalui kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor.

d. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Cakupan wilayah pelayanan dan pengawasan.

5. Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Hubungan Industrial

Program ini dilakukan melalui kegiatan : 1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, 2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator : 1. Jumlah Perusahaan yang mempunyai sarana HI, 2. Jumlah Perusahaan yang menindaklanjuti pembinaan ketenagakerjaan.

b. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini dilakukan melalui kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator Persentase IKM yang diberdayakan.

c. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini dilakukan melalui kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan

Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator Jumlah IUI yang diterbitkan.

d. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini dilakukan melalui kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator Cakupan wilayah informasi industri.

E. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Unsur Sekretariat Daerah

Unsur sekretariat daerah dilaksanakan melalui program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan Program Perekonomian dan Pembangunan.

a. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini dilakukan melalui kegiatan : 1. Administrasi Tata Pemerintahan, 2. Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, 3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, 4. Fasilitasi Kerjasama Daerah. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator: 1. Jumlah dokumen pelaporan tata pemerintahan, 2. Jumlah pelaksanaan evaluasi Kebijakan Kegiatan bidang kesejahteraan Rakyat, 3. Jumlah fasilitasi dan koordinasi layanan kebijakan hukum, 4. Jumlah fasilitasi kerjasama daerah.

b. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Program ini dilakukan melalui kegiatan : 1. Evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian, 2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, 3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, 4. Pemantauan kebijakan terkait Sumber Daya Alam. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator: 1. Jumlah pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan, 2. Persentase dokumen administrasi pembangunan yang terfasilitasi, 3. Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang terlaksana, 4. Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam pemantauan kebijakan terkait SDA.

2. Unsur Sekretariat DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini dilakukan melalui kegiatan : 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran, 3.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan. 4. Peningkatan Kapasitas DPRD, 5. Orientasi DPRD, 6. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, 7. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, 8. Fasilitasi Tugas DPRD. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator: 1. Jumlah fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, 2. Jumlah fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran, 3. Jumlah fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, 4. Jumlah fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD, 5. Jumlah Dokumen Hasil Orinetasi DPRD, 6. Jumlah fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, 7. Jumlah fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, 8. Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD

F. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini dilakukan melalui kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator Persentase Ketercapaian target pembangunan daerah.

b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam). Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Indikator: 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 2. Jumlah Dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, 3. Jumlah Dokumen perencanaan Bidang Perekonomian Sumber Daya alam.

2. Keuangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, 4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, 5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator: 1. Persentase Dokumen Penganggaran Daerah yang Disahkan Tepat Waktu, 2. Persentase Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi, 3. Tingkat entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP, 4. Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah yang dilaksanakan, 5. Tingkat ketersediaan informasi keuangan daerah/ jumlah informasi keuangan daerah yang disajikan secara real time.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan pendapatan daerah. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Persentase realisasi pajak daerah dan retribusi daerah

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Kepegawaian Daerah

Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, 2. Mutasi dan Promosi ASN, 3. Pengembangan Kompetensi ASN, 4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator: 1. Persentase layanan kepegawaian yang terukur dan berbasis data, 2. Rasio Mutasi ASN

Fungsional dan Non Fungsional, 3. Rasio Pegawai dengan Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%), 4. Persentase ASN yang dinilai kinerjanya sesuai tenggat waktu.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Pengembangan Kompetensi Teknis, 2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator: 1. Jumlah ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Teknis, 2. Persentase ASN yang lulus sertifikasi kompetensi, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional

5. Penelitian dan Pengembangan

Program Riset dan Inovasi Daerah

Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Inovasi dan Inovasi, 2. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator: 1. Jumlah temuan / hasil inovasi baru, 2. Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan.

G. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator: 1. Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan, 2. Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, 2. Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator: 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, 2. Persentase kegiatan

pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan.

H. Unsur Kewilayahan

Unsur kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan melalui program :

a. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini dilakukan melalui kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, 2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator: 1. Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, 2. Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan

c. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini dilakukan melalui kegiatan: 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator: 1. Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan, 2. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, 3. Persentase Pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan.

I. Unsur Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik

Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan melalui program :

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Program ini dilakukan melalui kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter

Kebangsaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah jenis pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini dilakukan melalui kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah jenis lembaga dan kegiatan masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik..

c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini dilakukan melalui kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah jenis kegiatan masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.

d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini dilakukan melalui kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah jenis pemenuhan fasilitasi kegiatan P4GN, pengelolaan rekomendasi penelitian, hibah FKUB, MUI dan pemantauan kegiatan kesbak dan KKN untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini dilakukan melalui kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah jenis kegiatan penanganan potensi konflik sosial.

Sedangkan penjabaran program prioritas seluruh perangkat daerah Kabupaten Wonogiri sesuai dengan tabel berikut ini.

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					597.297.716.313		605.762.935.996		605.904.560.996		605.904.560.996		605.904.560.996	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					552.107.846.100		552.107.846.100		552.107.846.100		552.107.846.100		552.107.846.100	
Meningkatnya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	552.107.846.100	100	552.107.846.100	100	552.107.846.100	100	552.107.846.100	100	552.107.846.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	76,8	76,81	76,82		76,83		76,84		76,85		76,86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	2		2		3		3		3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	45	46	47		48		49		50		51		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					45.042.246.313		53.507.465.996		53.649.090.996		53.649.090.996		53.649.090.996	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	APK SD/MI Paket A (%)	100	100	100	45.042.246.313	100	53.507.465.996	100	53.649.090.996	100	53.649.090.996	100	53.649.090.996	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	APM SD/MI/Paket A (%)	97,25	97,26	97,27		97,28		97,29		97,3		97,31		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	APK SMP/MTs/Paket B (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	APM SMP/MTs/Paket B (%)	84,32	84,33	84,34		84,35		84,36		84,37		84,38		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Prosentase Prasarana dan Fasilitas Penunjang Pembelajaran sesuai SPM (%)	0	0	84,11		84,53		84,95		85,8		86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Prosentasi Ketersediaan Alat Peraga/Praktik Pembelajaran (%)	0	0	78,32		79,49		80,69		81,69		82		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD (%)	77,37	77,38	77,39		77,4		77,41		77,42		77,43		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Prosentase ketersediaan perabot/meubelair prasarana pembelajaran (%)	0	0	82,17		82,99		83,41		83,83		84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Tingkat Partisipasi warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	22,34	22,39	22,44		22,49		22,54		22,59		22,64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Prosentase guru yang mengikuti peningkatan kompetensi (%)	79	79,5	80		81		82		83		84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Literasi Membaca SD/Sederajat (%)	88,84	88,89	88,94		88,99		89,04		89,09		89,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Numerasi SD/Sederajat (%)	88,62	88,67	88,72		88,77		88,82		88,87		88,92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Literasi Membaca SMP/Sederajat (%)	87,85	87,9	87,95		88		88,05		88,1		88,15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Numerasi SMP/Sederajat (%)	87,98	88	88,05		88,1		88,13		88,15		88,18		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	66,84	66,9	66,96		67,02		67,08		67,14		67,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	99,81	99,82	99,83		99,84		99,85		99,86		99,87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	61,99	62,05	62,11		62,17		62,23		62,26		62,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	97,03	97,1	97,2		97,25		97,5		97,75		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	85,04	86	87		88		89		90		91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Keamanan SD (Nilai)	82,53	82,58	82,63		82,68		82,73		82,78		82,83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Keamanan SMP (Nilai)	74,18	74,29	74,34		74,39		74,44		74,49		74,54		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	77,8	77,84	77,89		77,94		77,99		78,04		78,09		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	74,18	74,24	74,3		74,36		74,41		74,45		74,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	86,96	87,38	87,79		88,2		88,61		89,02		89,43		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					4.995.900		4.995.900		4.995.900		4.995.900		4.995.900	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100	100	100	4.995.900	100	4.995.900	100	4.995.900	100	4.995.900	100	4.995.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Prosentase sekolah menyusun Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar (%)	0	0	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					120.128.000		120.128.000		120.128.000		120.128.000		120.128.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan linier (%)	96	96,5	97	120.128.000	97,25	120.128.000	97,5	120.128.000	98	120.128.000	98,25	120.128.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000	
Terselenggaranya izin Pendirian Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal	Jumlah izin Pendirian Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat (Lokasi)	3	3	4	22.500.000	4	22.500.000	4	22.500.000	4	22.500.000	4	22.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					471.706.212.446		505.154.013.222		490.558.129.374		535.414.587.460		517.382.606.796	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					257.351.159.211		257.351.159.211		257.351.159.211		257.351.159.211		257.351.159.211	
Meningkatnya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (DINAS KESEHATAN)	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	208.904.169.211	100	208.904.169.211	100	208.904.169.211	100	208.904.169.211	100	208.904.169.211	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	43	44	44		45		45		46		46		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,6	76,1	76,6		77,1		77,6		78,1		78,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (RSUD SOEDIRAN MANGUN SUMARSO))	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	48.446.990.000	100	48.446.990.000	100	48.446.990.000	100	48.446.990.000	100	48.446.990.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	49	50	50		50		51		51		51		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	77,25	77	77,5		78		78,5		79		79,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	3	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					214.021.290.235		247.469.091.011		232.873.207.163		277.729.665.249		259.697.684.585	
Meningkatkan Kualitas Kesehatan perorangan dan masyarakat - RSUD SOEDIRAN MANGUN SUMARSO	Persentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	128.423.605.650	100	135.100.000.000	100	145.100.000.000	100	158.100.000.000	100	174.100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (DINAS KESEHATAN)	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100	85.597.684.585	100	112.369.091.011	100	87.773.207.163	100	119.629.665.249	100	85.597.684.585	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan D/S (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	-	88	89		90		91		92		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	-	80	81		82		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30	40		50		60		70		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	-	60	63		67		69		71		73		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	-	53,13	58,33		63,54		68,75		75		80,21		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-	83	85		88		92		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)	-	69,85	69,85		69,95		70		70,05		70,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					150.991.000		150.991.000		150.991.000		150.991.000		150.991.000	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000 Penduduk)	-	3	3	150.991.000	3	150.991.000	3	150.991.000	3	150.991.000	3	150.991.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					77.726.000		77.726.000		77.726.000		77.726.000		77.726.000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	-	80	81	77.726.000	82	77.726.000	83	77.726.000	84	77.726.000	85	77.726.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					105.046.000		105.046.000		105.046.000		105.046.000		105.046.000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	105.046.000	100	105.046.000	100	105.046.000	100	105.046.000	100	105.046.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					46.212.191.600		46.212.191.600		56.214.191.600		70.712.191.600		121.610.910.130	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.284.898.000		14.284.898.000		14.284.898.000		14.284.898.000		14.284.898.000	
Meningkatnya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	14.284.898.000	100	14.284.898.000	100	14.284.898.000	100	14.284.898.000	100	14.284.898.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	40	41	41		41		42		42		42		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	79,11	79,21	79,55		79,7		79,85		80		80,15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	2	3	4		5		6		7		8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					320.000.000		320.000.000		320.000.000		320.000.000		320.000.000	
Meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	72,86	72,86	72,86	320.000.000	72,86	320.000.000	72,86	320.000.000	72,86	320.000.000	72,86	320.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tinggal yang terfasilitasi sistem penyediaan air minum (%)	86,94	86,94	86,94	50.000.000	86,94	50.000.000	86,94	50.000.000	86,94	50.000.000	86,94	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					1.459.368.000		1.459.368.000		1.459.368.000		1.459.368.000		1.459.368.000	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	25,02	25,02	26,5	1.459.368.000	27,5	1.459.368.000	28,5	1.459.368.000	29,5	1.459.368.000	30,5	1.459.368.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					370.448.700		370.448.700		370.448.700		370.448.700		370.448.700	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan pelayanan IPLT (%)	1,5	1,5	1,5	125.000.000	2	125.000.000	2,5	125.000.000	3	125.000.000	3,5	125.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah - DINAS PEKERJAAN UMUM	Persentase rumah tinggal yang terfasilitasi sistem pengelolaan air limbah (%)	95,92	96	96	245.448.700	96	245.448.700	96	245.448.700	96	245.448.700	96	245.448.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					201.000.000		201.000.000		201.000.000		201.000.000		201.000.000	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	77,19	77,29	77,3	201.000.000	77,31	201.000.000	77,32	201.000.000	77,33	201.000.000	77,34	201.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					102.000.000		102.000.000		10.104.000.000		15.102.000.000		102.000.000	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Proporsi Penataan Bangunan Gedung Kantor (%)	7,025	7,075	7,125	102.000.000	7,175	102.000.000	7,225	10.104.000.000	7,275	15.102.000.000	7,325	102.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Proporsi Penataan Bangunan non gedung dan Lingkungannya (%)	7,025	7,075	7,125	3.000.000	7,175	3.000.000	7,225	3.000.000	7,275	3.000.000	7,325	3.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					29.129.630.900		29.129.630.900		29.129.630.900		38.629.630.900		104.528.349.430	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (%)	89,2	89,6	90	29.129.630.900	90,4	29.129.630.900	90,8	29.129.630.900	91,2	38.629.630.900	91,6	104.528.349.430	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
Meningkatnya tenaga operator/teknisi/analisis yang kompeten	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	0	0	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					289.846.000		289.846.000		289.846.000		289.846.000		289.846.000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah Peraturan Penataan ruang (Angka)	3	5	6	289.846.000	6	289.846.000	7	289.846.000	7	289.846.000	7	289.846.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					6.963.058.000		6.943.058.000		6.943.058.000		6.943.058.000		11.943.058.000	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.482.540.000		5.462.540.000		5.462.540.000		5.462.540.000		5.462.540.000	
Meningkatnya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	5.482.540.000	100	5.462.540.000	100	5.462.540.000	100	5.462.540.000	100	5.462.540.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	44	44	45		45		45		46		46		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	79,4	79,5	79,55		79,65		79,75		79,85		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	2	2	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					53.978.000		53.978.000		53.978.000		53.978.000		53.978.000	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase rumah korban bencana yang tertangani (%)	60	100	100	53.978.000	100	53.978.000	100	53.978.000	100	53.978.000	100	53.978.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					52.877.000		52.877.000		52.877.000		52.877.000		52.877.000	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh (%)	11,86	10,32	20,64	52.877.000	30,95	52.877.000	41,27	52.877.000	51,59	52.877.000	61,91	52.877.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					1.353.388.000		1.353.388.000		1.353.388.000		1.353.388.000		6.353.388.000	
meningkatnya rasio rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni (%)	-	25,1	25,2	1.353.388.000	25,29	1.353.388.000	25,39	1.353.388.000	25,48	1.353.388.000	25,58	6.353.388.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					20.275.000		20.275.000		20.275.000		20.275.000		20.275.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase ketersediaan PSU perumahan (%)	42,55	85,11	100	20.275.000	100	20.275.000	100	20.275.000	100	20.275.000	100	20.275.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					12.930.137.921		12.730.137.921		12.730.137.921		14.730.137.921		14.730.137.921	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.176.401.625		11.176.401.625		11.176.401.625		11.176.401.625		11.176.401.625	
Meningkatnya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	7.585.109.000	100	7.585.109.000	100	7.585.109.000	100	7.585.109.000	100	7.585.109.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	38	38	38		38		39		39		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	78,05	78,05	78,5		78,75		79		79,25		79,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.591.292.625	100	3.591.292.625	100	3.591.292.625	100	3.591.292.625	100	3.591.292.625	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	77,45	77,5	77,5		78		78,5		79		79,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	44	44	44		44		45		45		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.253.858.721		1.053.858.721		1.053.858.721		3.053.858.721		3.053.858.721	
Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	819.014.000	100	619.014.000	100	619.014.000	100	619.014.000	100	619.014.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Persentase Penegakan Perda (%)	100	100	100	433.190.721	100	433.190.721	100	433.190.721	100	2.433.190.721	100	2.433.190.721	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	1.654.000	100	1.654.000	100	1.654.000	100	1.654.000	100	1.654.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					295.524.375		295.524.375		295.524.375		295.524.375		295.524.375	
Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1	2	3	70.258.000	4	70.258.000	5	70.258.000	6	70.258.000	7	70.258.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	1	2	3	216.292.375	3	216.292.375	4	216.292.375	5	216.292.375	6	216.292.375	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1	3	3	8.974.000	5	8.974.000	6	8.974.000	7	8.974.000	7	8.974.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					204.353.200		204.353.200		204.353.200		204.353.200		204.353.200	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100	100	100	204.353.200	100	204.353.200	100	204.353.200	100	204.353.200	100	204.353.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					9.542.579.200		9.492.579.200		9.542.579.200		9.542.579.200		9.542.579.200	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.717.191.801		5.717.191.801		5.717.191.801		5.717.191.801		5.717.191.801	
Meningkatnya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (%)	100	100	100	5.717.191.801	100	5.717.191.801	100	5.717.191.801	100	5.717.191.801	100	5.717.191.801	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	44	44	44		45		45		46		46		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,95	78,5	79		79,5		80		80,5		81		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					460.000.000		460.000.000		460.000.000		460.000.000		460.000.000	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas (%)	100	100	100	460.000.000	100	460.000.000	100	460.000.000	100	460.000.000	100	460.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					797.900.200		747.900.200		797.900.200		797.900.200		797.900.200	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase PPKS di Luar Panti yang Mendapatkan Pelayanan Program Rehabilitasi Sosial (%)	100	100	100	797.900.200	100	747.900.200	100	797.900.200	100	797.900.200	100	797.900.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					2.320.687.199		2.320.687.199		2.320.687.199		2.320.687.199		2.320.687.199	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat Program Perlindungan Jaminan Sosial yang Produktif (%)	100	100	100	2.320.687.199	100	2.320.687.199	100	2.320.687.199	100	2.320.687.199	100	2.320.687.199	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					229.800.000		229.800.000		229.800.000		229.800.000		229.800.000	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Penanganan (%)	100	100	100	229.800.000	100	229.800.000	100	229.800.000	100	229.800.000	100	229.800.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola (%)	100	100	100	17.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					8.073.152.000		8.073.152.000		8.073.152.000		8.073.152.000		8.073.152.000	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.193.910.000		7.193.910.000		7.193.910.000		7.193.910.000		7.193.910.000	
Meningkatnya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	37	46	40	7.193.910.000	41	7.193.910.000	41	7.193.910.000	42	7.193.910.000	42	7.193.910.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	78,3	77,5	78,6		79		79,3		79,7		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	2	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					4.159.000		4.159.000		4.159.000		4.159.000		4.159.000	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	77,78	77,78	77,78	4.159.000	77,78	4.159.000	77,78	4.159.000	77,78	4.159.000	77,78	4.159.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					716.770.000		716.770.000		716.770.000		716.770.000		716.770.000	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	40,14	1,24	1,8	716.770.000	1,92	716.770.000	2	716.770.000	2,05	716.770.000	2,1	716.770.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					133.441.000		133.441.000		133.441.000		133.441.000		133.441.000	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	78,72	58,03	79,25	133.441.000	79,5	133.441.000	79,75	133.441.000	80	133.441.000	80,25	133.441.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					24.872.000		24.872.000		24.872.000		24.872.000		24.872.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pekerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	18,5	13	18,7	24.872.000	18,9	24.872.000	19,1	24.872.000	19,3	24.872.000	19,5	24.872.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					101.649.000		101.649.000		101.649.000		101.649.000		101.649.000	
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					51.018.000		51.018.000		51.018.000		51.018.000		51.018.000	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Rasio KDRT (%)	0,007	0,0055	0,005	51.018.000	0,0045	51.018.000	0,004	51.018.000	0,0035	51.018.000	0,003	51.018.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					18.036.000		18.036.000		18.036.000		18.036.000		18.036.000	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase ketersediaan data Gender dan Anak (%)	41,3	43,1	43,1	18.036.000	43,1	18.036.000	43,1	18.036.000	43,1	18.036.000	43,1	18.036.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					32.595.000		32.595.000		32.595.000		32.595.000		32.595.000	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase Pemenuhan Haka Anak (%)	30	35	35	32.595.000	35	32.595.000	35	32.595.000	35	32.595.000	35	32.595.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					431.998.000		271.998.000		271.998.000		271.998.000		271.998.000	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					4.140.000		4.140.000		4.140.000		4.140.000		4.140.000	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Rata - rata kemampuan lumbung pangan di kabupaten wonogiri dalam menyerap gabah (%)	35	40	50	4.140.000	50	4.140.000	60	4.140.000	60	4.140.000	60	4.140.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					321.782.000		161.782.000		161.782.000		161.782.000		161.782.000	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Capaian Konsumsi Energi per Kapita per Hari (Kkal/Kapita/Hari)	2.047	2.052	2.064	321.782.000	2.073	161.782.000	2.082	161.782.000	2.091	161.782.000	2.091	161.782.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					69.334.000		69.334.000		69.334.000		69.334.000		69.334.000	
Meningkatnya penanganan kerawanan daerah rawan pangan pertanian (%)	Prosentasi penanganan daerah rawan pangan pertanian (%)	30	30	30	69.334.000	30	69.334.000	30	69.334.000	30	69.334.000	30	69.334.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					36.742.000		36.742.000		36.742.000		36.742.000		36.742.000	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan Segar (%)	20	20	90	36.742.000	90	36.742.000	90	36.742.000	90	36.742.000	90	36.742.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					1.995.819.750		1.995.819.750		1.995.819.750		1.995.819.750		1.995.819.750	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase sengketa Tanah Aset yang tertangani (%)	100	100	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					1.191.010.000		1.191.010.000		1.191.010.000		1.191.010.000		1.191.010.000	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Jumlah bidang tanah untuk kepentingan umum skala kecil (Bidang Tanah)	-	1	1	1.191.010.000	1	1.191.010.000	1	1.191.010.000	1	1.191.010.000	1	1.191.010.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Terlaksananya proses redistribusi tanah	Persentase lokasi objek tanah dalam proses redistribusi (%)	-	-	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Jumlah luasan tanah aset Pemkab dari Eks Bondo Desa (Ha)	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					759.809.750		759.809.750		759.809.750		759.809.750		759.809.750	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase tanah aset Pemkab yang terlegalisasi/tersertifikat pada tahun N (%)	19,67	100	100	759.809.750	100	759.809.750	100	759.809.750	100	759.809.750	100	759.809.750	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					17.703.740.000		17.680.669.000		17.680.669.000		17.680.669.000		17.680.669.000	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.932.768.000		16.904.697.000		16.904.697.000		16.904.697.000		16.904.697.000	
Meningkatnya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	16.932.768.000	100	16.904.697.000	100	16.904.697.000	100	16.904.697.000	100	16.904.697.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup		
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	40	40	40		42		44		44		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup		
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	77,35	77,45	77,5		78		78,5		79		79,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					176.631.000		176.631.000		176.631.000		176.631.000		176.631.000	
Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)	100	100	100	176.631.000	100	176.631.000	100	176.631.000	100	176.631.000	100	176.631.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					487.718.000		487.718.000		487.718.000		487.718.000		487.718.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase peningkatan RTH publik kota (%)	-	100	100	487.718.000	100	487.718.000	100	487.718.000	100	487.718.000	100	487.718.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					6.340.000		6.340.000		6.340.000		6.340.000		6.340.000	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100	100	100	6.340.000	100	6.340.000	100	6.340.000	100	6.340.000	100	6.340.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					11.674.000		11.674.000		11.674.000		11.674.000		11.674.000	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	100	100	100	11.674.000	100	11.674.000	100	11.674.000	100	11.674.000	100	11.674.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	-	-	-	0	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					30.156.000		30.156.000		30.156.000		30.156.000		30.156.000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup (unit)	-	15	15	30.156.000	15	30.156.000	15	30.156.000	20	30.156.000	20	30.156.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					5.076.000		5.076.000		5.076.000		5.076.000		5.076.000	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	5.076.000	100	5.076.000	100	5.076.000	100	5.076.000	100	5.076.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					8.045.000		8.045.000		8.045.000		8.045.000		8.045.000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penegakan hukum lingkungan (%)	100	100	100	8.045.000	100	8.045.000	100	8.045.000	100	8.045.000	100	8.045.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					41.332.000		41.332.000		41.332.000		41.332.000		41.332.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (%)	44,9	44,9	44,9	41.332.000	45	41.332.000	45,1	41.332.000	45,2	41.332.000	45,3	41.332.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					6.636.100.750		6.636.100.750		6.636.100.750		6.636.100.750		6.636.100.750	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.490.639.450		5.490.639.450		5.490.639.450		5.490.639.450		5.490.639.450	
Meningkatnya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	5.490.639.450	100	5.490.639.450	100	5.490.639.450	100	5.490.639.450	100	5.490.639.450	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	77,5	78,5	82		82,5		83		83,5		84	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	46	46	46		46		46		46		46	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					330.983.800		330.983.800		330.983.800		330.983.800		330.983.800	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk (%)	92,21	92,21	93	330.983.800	93,5	330.983.800	94	330.983.800	94,5	330.983.800	95	330.983.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					361.816.000		361.816.000		361.816.000		361.816.000		361.816.000	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil (%)	100	100	100	361.816.000	100	361.816.000	100	361.816.000	100	361.816.000	100	361.816.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					452.661.500		452.661.500		452.661.500		452.661.500		452.661.500	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data (%)	100	100	100	452.661.500	100	452.661.500	100	452.661.500	100	452.661.500	100	452.661.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					11.664.242.715		11.664.242.715		11.664.242.715		11.664.242.715		11.664.242.715	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.317.242.895		5.317.242.895		5.317.242.895		5.317.242.895		5.317.242.895	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintah daerah (%)	100	100	100	5.317.242.895	100	5.317.242.895	100	5.317.242.895	100	5.317.242.895	100	5.317.242.895	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	39	40	40		41		41		42		42	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	79,5	79,5	79,7		79,9		80,1		80,3		80,5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	35,86	36,65	31,08	15.000.000	31,87	15.000.000	32,67	15.000.000	33,47	15.000.000	34,26	15.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					28.000.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000	
Meningkatnya efektivitas kerjasama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	2,39	3,19	3,19	28.000.000	5,18	28.000.000	7,17	28.000.000	9,16	28.000.000	11,16	28.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					3.958.500.000		3.958.500.000		3.958.500.000		3.958.500.000		3.958.500.000	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	16,73	17,83	17,83	3.958.500.000	18,73	3.958.500.000	19,52	3.958.500.000	19,92	3.958.500.000	20,72	3.958.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					2.345.499.820		2.345.499.820		2.345.499.820		2.345.499.820		2.345.499.820	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	60,16	80,08	46	2.345.499.820	54	2.345.499.820	61,6	2.345.499.820	69,2	2.345.499.820	76,8	2.345.499.820	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					4.836.135.250		4.836.135.250		4.836.135.250		4.836.135.250		4.836.135.250	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.563.200.000		4.563.200.000		4.563.200.000		4.563.200.000		4.563.200.000	
Meningkatnya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	4.563.200.000	100	4.563.200.000	100	4.563.200.000	100	4.563.200.000	100	4.563.200.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	37	40	41		42		43		44		45	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	77,25	77,5	78		78,5		79		79,5		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	3	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					59.672.250		59.672.250		59.672.250		59.672.250		59.672.250	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) (Angka)	20,9	20,9	21,2	59.672.250	21,5	59.672.250	21,7	59.672.250	21,9	59.672.250	22	59.672.250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					121.090.000		121.090.000		121.090.000		121.090.000		121.090.000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Peningkatan Peserta KB Aktif (%)	81,17	76,33	76,48	121.090.000	76,63	121.090.000	76,78	121.090.000	76,93	121.090.000	77,08	121.090.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/ cara KB modern (%)	90,7	90,7	90,7		90,7		90,7		90,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
	Angka kelahiran menurut usia tertentu/ Age Specific Fertlity Rate (ASFR) 15-19 tahun (Angka)	7,1	7,1	7,1		7,1		7,1		7,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
	Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP) (%)	0	0	0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					92.173.000		92.173.000		92.173.000		92.173.000		92.173.000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Peserta KB Aktif bagi Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKA (%)	85	85	85	92.173.000	85	92.173.000	85	92.173.000	85	92.173.000	85	92.173.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					28.944.835.200		28.944.835.200		28.944.835.200		28.944.835.200		28.944.835.200	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.565.471.000		9.565.471.000		9.565.471.000		9.565.471.000		9.565.471.000	
Meningkatnya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	9.565.471.000	100	9.565.471.000	100	9.565.471.000	100	9.565.471.000	100	9.565.471.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	79,1	79,6	80		80,5		81		81,5		82		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	41	41	41		41		41		41		41		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					19.289.303.200		19.289.303.200		19.289.303.200		19.289.303.200		19.289.303.200	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (%)	25	26	27	19.289.303.200	28	19.289.303.200	29	19.289.303.200	30	19.289.303.200	31	19.289.303.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Terminal berkondisi Layak (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Kendaraan Wajib KIR yang Melaksanakan Uji KIR (%)	80	78	76		74		72		70		68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					70.061.000		70.061.000		70.061.000		70.061.000		70.061.000	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase fasilitas pelabuhan (%)	60	60	62	70.061.000	64	70.061.000	66	70.061.000	68	70.061.000	70	70.061.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Jumlah orang/barang melalui stasiun kereta api (Orang)	52.612	60.000	60.000	20.000.000	60.000	20.000.000	60.000	20.000.000	60.000	20.000.000	60.000	20.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					7.433.644.500		7.433.644.500		8.433.644.500		7.433.644.500		10.433.644.500	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.894.900.000		5.894.900.000		5.894.900.000		5.894.900.000		5.894.900.000	
Meningkatnya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	5.894.900.000	100	5.894.900.000	100	5.894.900.000	100	5.894.900.000	100	5.894.900.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	44	43	43		43		43		44		44		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	77,25	76,5	77,5		78,5		79,5		80,5		81,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	4	1	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					97.380.000		97.380.000		97.380.000		97.380.000		97.380.000	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	97.380.000	100	97.380.000	100	97.380.000	100	97.380.000	100	97.380.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.441.364.500		1.441.364.500		2.441.364.500		1.441.364.500		4.441.364.500	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informasi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	100	1.441.364.500	100	1.441.364.500	100	2.441.364.500	100	1.441.364.500	100	4.441.364.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					18.024.915.510		18.024.915.510		18.024.915.510		19.524.915.510		18.024.915.510	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.228.951.010		17.228.951.010		17.228.951.010		17.228.951.010		17.228.951.010	
Meningkatnya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	17.228.951.010	100	17.228.951.010	100	17.228.951.010	100	17.228.951.010	100	17.228.951.010	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	42	42	42		43		43		44		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	78,65	76,5	79		79,5		80		80,5		81		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					23.474.000		23.474.000		23.474.000		23.474.000		23.474.000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	13,64	13,44	13,44	23.474.000	13,44	23.474.000	13,64	23.474.000	14,4	23.474.000	14,89	23.474.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					106.439.000		106.439.000		106.439.000		106.439.000		106.439.000	
Meningkatnya kualitas SDM pengkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	-	-	11,53	106.439.000	11,53	106.439.000	11,53	106.439.000	11,53	106.439.000	11,53	106.439.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					93.201.500		93.201.500		93.201.500		1.593.201.500		93.201.500	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro (%)	-	-	98,6	93.201.500	98,75	93.201.500	98,85	93.201.500	98,95	1.593.201.500	99	93.201.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					572.850.000		572.850.000		572.850.000		572.850.000		572.850.000	
Meningkatnya daya saing UMKM	Pertumbuhan Wirausaha (%)	-	-	1	572.850.000	1	572.850.000	1,25	572.850.000	1,25	572.850.000	1,25	572.850.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					4.345.267.000		4.345.267.000		4.345.267.000		4.345.267.000		4.345.267.000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.957.767.000		3.957.767.000		3.957.767.000		3.957.767.000		3.957.767.000	
Meningkatnya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	47	44	44	3.957.767.000	44	3.957.767.000	44	3.957.767.000	45	3.957.767.000	45	3.957.767.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	80,5	81	81,05		81,1		81,15		81,2		81,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Jumlah Kebijakan Daerah tentang Penanaman Modal (Dokumen)	2	2	5	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	-	-	7	85.000.000	6	85.000.000	6	85.000.000	6	85.000.000	5	85.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	-	-	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					62.500.000		62.500.000		62.500.000		62.500.000		62.500.000	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Realisasi Investasi Berdasarkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) (%)	-	-	100	62.500.000	100	62.500.000	100	62.500.000	100	62.500.000	100	62.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	-	-	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					18.542.676.000		18.442.676.000		18.442.676.000		18.442.676.000		18.442.676.000	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.158.877.000		8.158.877.000		8.158.877.000		8.158.877.000		8.158.877.000	
Meningkatnya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	8.158.877.000	100	8.158.877.000	100	8.158.877.000	100	8.158.877.000	100	8.158.877.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Nilai SAKIP (Angka)	75,5	76,5	79		79,5		80		80,25		80,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	35	38	39		39		40		40		41		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					7.638.799.000		7.638.799.000		7.638.799.000		7.638.799.000		7.638.799.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	0,028	0,028	0,055	7.638.799.000	0,083	7.638.799.000	0,11	7.638.799.000	0,138	7.638.799.000	0,165	7.638.799.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					2.420.000.000		2.420.000.000		2.420.000.000		2.420.000.000		2.420.000.000	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	0,33	0,33	0,4	2.420.000.000	0,4	2.420.000.000	0,47	2.420.000.000	0,47	2.420.000.000	0,53	2.420.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					325.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	0	0,03	0,032	325.000.000	0,034	225.000.000	0,036	225.000.000	0,038	225.000.000	0,04	225.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					51.233.000		51.233.000		51.233.000		51.233.000		51.233.000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					51.233.000		51.233.000		51.233.000		51.233.000		51.233.000	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100	51.233.000	100	51.233.000	100	51.233.000	100	51.233.000	100	51.233.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					69.145.000		69.145.000		69.145.000		69.145.000		69.145.000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					69.145.000		69.145.000		69.145.000		69.145.000		69.145.000	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi (%)	100	100	100	69.145.000	100	69.145.000	100	69.145.000	100	69.145.000	100	69.145.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					678.624.300		441.127.800		678.624.300		678.624.300		678.624.300	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					46.552.000		46.552.000		46.552.000		46.552.000		46.552.000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan pengembangan pelestarian budaya (Angka)	3	3	0	46.552.000	0	46.552.000	0	46.552.000	0	46.552.000	0	46.552.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	0	0	4,77		4,96		5,22		5,48		5,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					474.993.000		237.496.500		474.993.000		474.993.000		474.993.000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Jumlah kegiatan Pengembangan Kesenian Tradisional (Kegiatan)	5	5	0	474.993.000	0	237.496.500	0	474.993.000	0	474.993.000	0	474.993.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (%)	0	35,36	36,12		36,88		37,64		38,4		39,16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terpenuhinya informasi kesejarahan	Prosentase kegiatan pembinaan sejarah (%)	0	0	60	5.000.000	70	5.000.000	80	5.000.000	90	5.000.000	100	5.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					94.334.300		94.334.300		94.334.300		94.334.300		94.334.300	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Terlestarikannya cagar budaya (%)	100	100	100	94.334.300	100	94.334.300	100	94.334.300	100	94.334.300	100	94.334.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					57.745.000		57.745.000		57.745.000		57.745.000		57.745.000	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	0	0	6	57.745.000	7	57.745.000	8	57.745.000	9	57.745.000	10	57.745.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					60.617.000		60.617.000		2.060.617.000		4.310.617.000		6.560.617.000	
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					60.617.000		60.617.000		2.060.617.000		4.310.617.000		6.560.617.000	
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (%)	78,2	78,7	79,2	60.617.000	79,7	60.617.000	80,2	2.060.617.000	80,7	4.310.617.000	81,2	6.560.617.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					3.829.460.000		3.809.460.000		3.809.460.000		3.809.460.000		3.809.460.000	
2.24.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.725.364.000		3.725.364.000		3.725.364.000		3.725.364.000		3.725.364.000	
Meningkatnya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.725.364.000	100	3.725.364.000	100	3.725.364.000	100	3.725.364.000	100	3.725.364.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	39	40	40		41		42		43		43		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	77,5	77,5	80,1		80,75		81,7		82,6		82,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					73.584.000		53.584.000		53.584.000		53.584.000		53.584.000	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)	98,29	98,41	98,53	73.584.000	98,65	53.584.000	98,77	53.584.000	98,89	53.584.000	99	53.584.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					30.512.000		30.512.000		30.512.000		30.512.000		30.512.000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)	50	50,5	51	30.512.000	51,5	30.512.000	52	30.512.000	52,5	30.512.000	53	30.512.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					6.047.778.000		6.047.778.000		6.047.778.000		6.047.778.000		6.047.778.000	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.714.306.000		5.714.306.000		5.714.306.000		5.714.306.000		5.714.306.000	
Meningkatnya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	5.714.306.000	100	5.714.306.000	100	5.714.306.000	100	5.714.306.000	100	5.714.306.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,05	76	76		76,5		76,7		76,8		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	35	35	35		35		36		36		37		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	2	2	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					109.724.000		109.724.000		109.724.000		109.724.000		109.724.000	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase produksi perikanan tangkap (%)	80	100	100	109.724.000	100	109.724.000	100	109.724.000	100	109.724.000	100	109.724.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					204.757.000		204.757.000		204.757.000		204.757.000		204.757.000	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase produksi perikanan budidaya (%)	80	100	100	204.757.000	100	204.757.000	100	204.757.000	100	204.757.000	100	204.757.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					15.161.000		15.161.000		15.161.000		15.161.000		15.161.000	
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Persentase usaha perikanan/ nelayan tangkap yang berizin (%)	80	100	100	15.161.000	100	15.161.000	100	15.161.000	100	15.161.000	100	15.161.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					3.830.000		3.830.000		3.830.000		3.830.000		3.830.000	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Persentase usaha pengolahan ikan (%)	80	100	100	3.830.000	100	3.830.000	100	3.830.000	100	3.830.000	100	3.830.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					3.750.092.000		3.953.508.000		3.750.092.000		3.750.092.000		27.453.508.000	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.380.330.000		1.583.746.000		1.380.330.000		1.380.330.000		25.083.746.000	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah pengunjung tempat bersejarah (Orang)	187.525	203.433	220.135	1.380.330.000	239.110	1.583.746.000	260.750	1.380.330.000	285.521	1.380.330.000	313.988	25.083.746.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Jumlah wisatawan mancanegara (Orang)	128	130	133		135		138		140		143		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					125.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	10,18	11,95	13,72	125.000.000	15,49	115.000.000	17,26	115.000.000	19,03	115.000.000	20,8	115.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	2,55	2,55	2,55	0	2,55	10.000.000	2,63	10.000.000	2,63	10.000.000	2,7	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					2.244.762.000		2.244.762.000		2.244.762.000		2.244.762.000		2.244.762.000	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	20	25	25	2.244.762.000	30	2.244.762.000	35	2.244.762.000	40	2.244.762.000	45	2.244.762.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					40.637.724.000		40.637.724.000		40.637.724.000		40.637.724.000		40.637.724.000	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.802.034.520		23.802.034.520		23.802.034.520		23.802.034.520		23.802.034.520	
Meningkatnya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (%)	100	100	100	23.802.034.520	100	23.802.034.520	100	23.802.034.520	100	23.802.034.520	100	23.802.034.520	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	44	47	47		48		48		49		49		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	73,5	76,25	79		79,5		80		80,5		81		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					5.216.786.784		5.216.786.784		5.216.786.784		5.216.786.784		5.216.786.784	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Rasio bantuan ketersediaan sarana produksi terhadap kebutuhan (Rasio)	20:100	20:100	20:100	5.216.786.784	20:100	5.216.786.784	20:100	5.216.786.784	20:100	5.216.786.784	20:100	5.216.786.784	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					10.980.904.216		10.980.904.216		10.980.904.216		10.980.904.216		10.980.904.216	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Luas Tanam Padi (Ha)	106.332	70.524	70.595	10.980.904.216	70.595	10.980.904.216	70.595	10.980.904.216	70.595	10.980.904.216	70.595	10.980.904.216	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					238.998.480		238.998.480		238.998.480		238.998.480		238.998.480	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan jumlah kasus penyakit ternak (%)	16,48	100	15	238.998.480	17	238.998.480	19	238.998.480	21	238.998.480	23	238.998.480	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					94.000.000		94.000.000		94.000.000		94.000.000		94.000.000	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanggulangan bencana pertanian (%)	15	80	100	94.000.000	100	94.000.000	100	94.000.000	100	94.000.000	100	94.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase usaha peternakan yang berizin (%)	67	80	80	40.000.000	80	40.000.000	80	40.000.000	80	40.000.000	80	40.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					265.000.000		265.000.000		265.000.000		265.000.000		265.000.000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Prosentase Jumlah penyuluh dengan jumlah wilayah binaan (%)	60	60	100	265.000.000	100	265.000.000	100	265.000.000	100	265.000.000	100	265.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					2.219.345.250		719.345.250		719.345.250		719.345.250		719.345.250	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					77.239.000		77.239.000		77.239.000		77.239.000		77.239.000	
OUTCOME Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	-	-	80	77.239.000	82,5	77.239.000	85	77.239.000	90	77.239.000	95	77.239.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					1.883.201.250		383.201.250		383.201.250		383.201.250		383.201.250	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang, efisien merata dan terintegrasi	Jumlah Sarana Perdagangan Berkondisi Layak (Unit)	23	24	24	1.883.201.250	24	383.201.250	24	383.201.250	24	383.201.250	24	383.201.250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					36.646.000		36.646.000		36.646.000		36.646.000		36.646.000	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting (%)	8,91	12	12	36.646.000	12	36.646.000	12	36.646.000	12	36.646.000	12	36.646.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					174.738.000		174.738.000		174.738.000		174.738.000		174.738.000	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Daerah (Rp. Juta Per Tahun)	1.055.145,17	1.086.799,5	1.086.799,5	174.738.000	1.119.403,51	174.738.000	1.152.985,62	174.738.000	1.187.575,18	174.738.000	1.223.202,44	174.738.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					47.521.000		47.521.000		47.521.000		47.521.000		47.521.000	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	26,72	26	26,5	47.521.000	27	47.521.000	27,5	47.521.000	28	47.521.000	28,5	47.521.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					49.272.000		49.272.000		49.272.000		49.272.000		49.272.000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					23.775.000		23.775.000		23.775.000		23.775.000		23.775.000	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)	17,75	17,8	17,85	23.775.000	17,9	23.775.000	17,95	23.775.000	18	23.775.000	18,05	23.775.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					10.129.000		10.129.000		10.129.000		10.129.000		10.129.000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait (%)	44,44	5	48,45	10.129.000	50,45	10.129.000	52,45	10.129.000	54,45	10.129.000	56,45	10.129.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					15.368.000		15.368.000		15.368.000		15.368.000		15.368.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	100	0,56	100	15.368.000	100	15.368.000	100	15.368.000	100	15.368.000	100	15.368.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					36.652.337.941		36.652.337.941		36.652.337.941		36.652.337.941		36.652.337.941	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					33.644.457.441		33.644.457.441		33.644.457.441		33.644.457.441		33.644.457.441	
Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintahan Daerah	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	33.644.457.441	100	33.644.457.441	100	33.644.457.441	100	33.644.457.441	100	33.644.457.441	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					1.502.419.750		1.502.419.750		1.502.419.750		1.502.419.750		1.502.419.750	
Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi Penyusunan Kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra (%)	100	100	100	1.502.419.750	100	1.502.419.750	100	1.502.419.750	100	1.502.419.750	100	1.502.419.750	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.505.460.750		1.505.460.750		1.505.460.750		1.505.460.750		1.505.460.750	
Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Fasilitasi Penyusunan Kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan (%)	100	100	100	1.505.460.750	100	1.505.460.750	100	1.505.460.750	100	1.505.460.750	100	1.505.460.750	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					56.456.726.253		56.523.096.758		56.523.096.758		56.523.096.758		56.523.096.758	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					37.584.837.253		37.651.207.758		37.651.207.758		37.651.207.758		37.651.207.758	
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintah daerah (%)	100	100	100	37.584.837.253	100	37.651.207.758	100	37.651.207.758	100	37.651.207.758	100	37.651.207.758	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	37	40	40		41		41		42		42		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	74,25	77,5	78,5		78,6		78,7		78,8		78,9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					18.871.889.000		18.871.889.000		18.871.889.000		18.871.889.000		18.871.889.000	
Meningkatkan kualitas persidangan dan kajian perundang undangan	Persentase fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (%)	100	100	100	18.871.889.000	100	18.871.889.000	100	18.871.889.000	100	18.871.889.000	100	18.871.889.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					8.169.060.962		7.963.164.404		7.963.164.404		7.963.164.404		8.229.557.786	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.333.068.645		6.333.068.645		6.333.068.645		6.333.068.645		6.333.068.645	
Meningkatnya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	6.333.068.645	100	6.333.068.645	100	6.333.068.645	100	6.333.068.645	100	6.333.068.645	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	44	45	45		45		45		45		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	79,55	80,25	80,25		80,5		81,25		81,5		81,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.060.621.218		957.408.420		957.408.420		957.408.420		1.223.801.802	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100	1.060.621.218	100	957.408.420	100	957.408.420	100	957.408.420	100	1.223.801.802	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					775.371.099		672.687.339		672.687.339		672.687.339		672.687.339	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	272.789.024	100	272.789.024	100	272.789.024	100	272.789.024	100	272.789.024	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	208.466.075	100	129.899.123	100	129.899.123	100	129.899.123	100	129.899.123	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100	294.116.000	100	269.999.192	100	269.999.192	100	269.999.192	100	269.999.192	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					412.816.992.000		412.816.992.000		412.816.992.000		412.816.992.000		412.816.992.000	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.316.622.460		18.316.622.460		18.316.622.460		18.316.622.460		18.316.622.460	
Meningkatnya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	18.316.622.460	100	18.316.622.460	100	18.316.622.460	100	18.316.622.460	100	18.316.622.460	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	38	40	41		42		43		44		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	78,35	79,5	80,5		80,75		81		81,25		81,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					390.316.174.540		390.316.174.540		390.316.174.540		390.316.174.540		390.316.174.540	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase ketertiban penyusunan anggaran daerah tepat waktu (%)	100	100	100	1.142.870.000	100	1.142.870.000	100	1.142.870.000	100	1.142.870.000	100	1.142.870.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase realisasi anggaran belanja daerah (%)	90	90	90	311.906.000	90	311.906.000	90	311.906.000	90	311.906.000	90	311.906.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (%)	100	100	100	388.861.398.540	100	388.861.398.540	100	388.861.398.540	100	388.861.398.540	100	388.861.398.540	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.179.900.000		1.179.900.000		1.179.900.000		1.179.900.000		1.179.900.000	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap (%)	-1,38	2,8	1,21	1.179.900.000	1,2	1.179.900.000	1,18	1.179.900.000	1,17	1.179.900.000	1,15	1.179.900.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					3.004.295.000		3.004.295.000		3.004.295.000		3.004.295.000		3.004.295.000	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah (%)	12,51	6,78	10,53	3.004.295.000	10,81	3.004.295.000	11,07	3.004.295.000	11,35	3.004.295.000	11,61	3.004.295.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					7.000.521.000		7.000.521.000		7.000.521.000		7.000.521.000		7.000.521.000	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.955.103.000		5.955.103.000		5.955.103.000		5.955.103.000		5.955.103.000	
Meningkatnya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	5.955.103.000	100	5.955.103.000	100	5.955.103.000	100	5.955.103.000	100	5.955.103.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	43	43	43		43		43		43		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian		
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	81,95	81,95	81,95		82,25		83		83,5		84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.045.418.000		1.045.418.000		1.045.418.000		1.045.418.000		1.045.418.000	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	40	40	40,5	294.723.000	40,5	294.723.000	40,5	294.723.000	41	294.723.000	41	294.723.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	99	99	99	3.463.000	99	3.463.000	99	3.463.000	99	3.463.000	99	3.463.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	27,02	28	28	449.052.000	28	449.052.000	29	449.052.000	29	449.052.000	30	449.052.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	99,98	99,9	99,9	298.180.000	99,9	298.180.000	99,9	298.180.000	99,9	298.180.000	99,9	298.180.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					759.279.000		759.279.000		759.279.000		759.279.000		759.279.000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					759.279.000		759.279.000		759.279.000		759.279.000		759.279.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	1,57	6,67	6,67	447.779.000	6,67	447.779.000	6,67	447.779.000	6,67	447.779.000	6,67	447.779.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	7,01	1,4	1,4	311.500.000	1,4	311.500.000	1,4	311.500.000	1,4	311.500.000	1,4	311.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					701.399.000		550.380.000		550.380.000		550.380.000		550.380.000	
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					701.399.000		550.380.000		550.380.000		550.380.000		550.380.000	
Meningkatnya kajian yang dimanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	100	100	100	98.981.000	100	98.981.000	100	98.981.000	100	98.981.000	100	98.981.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	100	100	100	602.418.000	100	451.399.000	100	451.399.000	100	451.399.000	100	451.399.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					8.555.720.000		8.555.720.000		8.555.720.000		8.555.720.000		8.555.720.000	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.005.981.160		8.005.981.160		8.005.981.160		8.005.981.160		8.005.981.160	
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	8.005.981.160	100	8.005.981.160	100	8.005.981.160	100	8.005.981.160	100	8.005.981.160	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	38	38	39		40		40		41		41		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	80,25	80,25	81		81,5		82		82,5		82,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		0		1		0		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					289.915.512		289.915.512		289.915.512		289.915.512		289.915.512	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan (%)	78,99	85	86	289.915.512	87	289.915.512	89	289.915.512	90	289.915.512	90	289.915.512	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					259.823.328		259.823.328		259.823.328		259.823.328		259.823.328	
Meningkatnya Kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangkat daerah dan penguatan integritas (%)	100	100	100	259.823.328	100	259.823.328	100	259.823.328	100	259.823.328	100	259.823.328	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					114.350.470.207		114.350.470.207		114.350.470.207		114.350.470.207		114.350.470.207	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					85.877.192.954		85.877.192.954		85.877.192.954		85.877.192.954		85.877.192.954	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (KECAMATAN BATURETNO)	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.443.123.900	100	2.443.123.900	100	2.443.123.900	100	2.443.123.900	100	2.443.123.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	34	34	34		34		35		35		36	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
	Nilai SAKIP (Angka)	78	78	78,1		78,2		78,25		78,3		78,35	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	6	1	1		1		1		1		1	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (KECAMATAN BATUWARNO)	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.845.938.054	100	2.845.938.054	100	2.845.938.054	100	2.845.938.054	100	2.845.938.054	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,5	75,5	76,5		77		77,5		78		78,5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	3	3	3		3		3		3		3	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	43	43	43		44		44		45		46	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (KECAMATAN BULUKERTO)	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.892.231.000	100	2.892.231.000	100	2.892.231.000	100	2.892.231.000	100	2.892.231.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	31	37	37		37		38		38		38	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,9	74,5	76		76,5		77		77,5		78	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (KECAMATAN EROMOKO)	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.306.432.575	100	3.306.432.575	100	3.306.432.575	100	3.306.432.575	100	3.306.432.575	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	40	40	41		42		43		44		44	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,6	75,6	75,6		76		77		77,5		78	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (KECAMATAN GIRITONTRO)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	73,5	74,5	75,15	3.498.191.840	75,3	3.498.191.840	75,45	3.498.191.840	75,6	3.498.191.840	75,75	3.498.191.840	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	83	83	83,5		84		84,5		85		85,5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	27	27	35		35,5		36		36,5		37		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (KECAMATAN GIRIWOYO)	Nilai SAKIP (Angka)	73,9	76	76,5	3.392.042.000	77	3.392.042.000	77,5	3.392.042.000	78	3.392.042.000	78,5	3.392.042.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	5	3	3		4		4		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	42	42	33,34		34,23		34,74		35,38		36,17		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (KECAMATAN KARANGTENGAH)	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.031.904.000	100	2.031.904.000	100	2.031.904.000	100	2.031.904.000	100	2.031.904.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	76,5	76,5	76,5		77		77,5		78		78,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	30	30	35		36		37		38		39		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (KECAMATAN KISMANTORO)	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.315.383.187	100	3.315.383.187	100	3.315.383.187	100	3.315.383.187	100	3.315.383.187	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	76,8	76,8	77		77,25		77,5		77,75		78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	39	39	39		40		40		41		41		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (KECAMATAN MANYARAN)	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.916.735.339	100	3.916.735.339	100	3.916.735.339	100	3.916.735.339	100	3.916.735.339	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	40	40	41		42		43		44		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	77,85	77,9	78		78,5		79		79,5		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (KECAMATAN PRACIMANTORO)	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.438.931.000	100	3.438.931.000	100	3.438.931.000	100	3.438.931.000	100	3.438.931.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	30	30	44		44		44		44		44		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	76,8	76,8	77		77,2		77,5		77,7		78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (KECAMATAN PUHPELEM)	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.269.931.000	100	2.269.931.000	100	2.269.931.000	100	2.269.931.000	100	2.269.931.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	35	35	36		36		37		37		38		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	73,5	74,5	76,5		77		77,5		78		78,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (KECAMATAN TIRTOMOYO)	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.473.556.375	100	3.473.556.375	100	3.473.556.375	100	3.473.556.375	100	3.473.556.375	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,45	75,45	75,45		76		77		77,5		78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	41	42	42		42		42		42		42		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (KECAMATAN WURYANTORO)	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.906.102.000	100	3.906.102.000	100	3.906.102.000	100	3.906.102.000	100	3.906.102.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	29	30	31		32		33		35		35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	73,5	74,5	76,5		77		77,5		78		78,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (Kec. Paranggipito)	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.127.643.935	100	2.127.643.935	100	2.127.643.935	100	2.127.643.935	100	2.127.643.935	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai SAKIP (Angka)	73,5	80	81		82		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	2	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	36	40	43		44		45		46		47		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (KECAMATAN SELOGIRI)	Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (%)	100	100	100	2.938.042.000	100	2.938.042.000	100	2.938.042.000	100	2.938.042.000	100	2.938.042.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	31	30	30		31		32		33		35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,15	72,5	76,5		77		77,5		78		78,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (KECAMATAN WONOGIRI)	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	6.417.958.502	100	6.417.958.502	100	6.417.958.502	100	6.417.958.502	100	6.417.958.502	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	76,65	77	77,5		78		78,5		79		79,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	38	40	41		42		43		44		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (KECAMATAN NGADIROJO)	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.741.996.037	100	3.741.996.037	100	3.741.996.037	100	3.741.996.037	100	3.741.996.037	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	30	36	37		37		38		38		39		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	73,5	76,5	77		77		77,5		78		78,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (KECAMATAN NGUNTORONADI)	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.624.956.302	100	3.624.956.302	100	3.624.956.302	100	3.624.956.302	100	3.624.956.302	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	73,5	73,5	76,5		77		77,5		78		78,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	39	39	39		40		40		41		41		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (KECAMATAN SIDOHARJO)	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.829.191.965	100	3.829.191.965	100	3.829.191.965	100	3.829.191.965	100	3.829.191.965	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	30	41	42		42		43		43		44		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	73,5	74,5	78,85		79		79,15		79,3		79,45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (KECAMATAN JATISRONO)	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.711.571.455	100	3.711.571.455	100	3.711.571.455	100	3.711.571.455	100	3.711.571.455	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	40	42	43		44		45		46		47	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	76,5	77	77		77,5		78		78,5		79	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	2		2		2		2		2	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (KECAMATAN JATIPURNO)	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.496.198.865	100	3.496.198.865	100	3.496.198.865	100	3.496.198.865	100	3.496.198.865	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	73,5	74,5	76,5		77		77,5		78		78,5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	2		2		2		2		2	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	30	31	45		46		47		48		48	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (KECAMATAN JATIROTO)	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.770.128.000	100	3.770.128.000	100	3.770.128.000	100	3.770.128.000	100	3.770.128.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	76,45	76,5	76,5		77		77,5		78		78,5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	2	2	2		2		2		2		2	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	39	39	39		40		41		42		43	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (KECAMATAN GIRIMARTO)	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	4.201.490.325	100	4.201.490.325	100	4.201.490.325	100	4.201.490.325	100	4.201.490.325	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	31	31	37		37,5		38		38,5		39	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	71,5	73,5	74,5		75		75,5		76		76,5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	2		2		2		2		2	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (KECAMATAN PURWANTORO)	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.521.517.298	100	3.521.517.298	100	3.521.517.298	100	3.521.517.298	100	3.521.517.298	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	78,5	79,25	79,5		79,75		79,9		80		80,1	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	36	36	37		38		49		40		41		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah (KECAMATAN SLOGOHIMO)	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.765.996.000	100	3.765.996.000	100	3.765.996.000	100	3.765.996.000	100	3.765.996.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	30	30	31		31		32		33		33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	73,5	74,5	76,5		77		77,5		78		78,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.940.217.823		1.940.217.823		1.940.217.823		1.940.217.823		1.940.217.823	
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (KECAMATAN BATURETNO)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	133.609.800	100	133.609.800	100	133.609.800	100	133.609.800	100	133.609.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (KECAMATAN BATUWARNO)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	57.467.000	100	57.467.000	100	57.467.000	100	57.467.000	100	57.467.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (KECAMATAN BULUKERTO)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	79.416.000	100	79.416.000	100	79.416.000	100	79.416.000	100	79.416.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (KECAMATAN EROMOKO)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	50.689.800	100	50.689.800	100	50.689.800	100	50.689.800	100	50.689.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (KECAMATAN GIRIMARTO)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	102.569.250	100	102.569.250	100	102.569.250	100	102.569.250	100	102.569.250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (KECAMATAN GIRITONTRO)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	92.109.000	100	92.109.000	100	92.109.000	100	92.109.000	100	92.109.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (KECAMATAN GIRIWOYO)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	144.360.000	100	144.360.000	100	144.360.000	100	144.360.000	100	144.360.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (KECAMATAN JATIPURNO)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	66.479.000	100	66.479.000	100	66.479.000	100	66.479.000	100	66.479.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (KECAMATAN JATIROTO)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	29.976.000	100	29.976.000	100	29.976.000	100	29.976.000	100	29.976.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (KECAMATAN JATISRONO)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	106.100.140	100	106.100.140	100	106.100.140	100	106.100.140	100	106.100.140	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (KECAMATAN KARANGTENGAH)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	25.200.000	100	25.200.000	100	25.200.000	100	25.200.000	100	25.200.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (KECAMATAN KISMANTORO)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	89.483.813	100	89.483.813	100	89.483.813	100	89.483.813	100	89.483.813	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (KECAMATAN MANYARAN)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	72.229.750	100	72.229.750	100	72.229.750	100	72.229.750	100	72.229.750	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (KECAMATAN NGADIROJO)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	71.519.963	100	71.519.963	100	71.519.963	100	71.519.963	100	71.519.963	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (KECAMATAN NGUNTORONADI)	Indeks Pelayanan Publik (Angka)	100	100	100	46.380.190	100	46.380.190	100	46.380.190	100	46.380.190	100	46.380.190	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (KECAMATAN PARANGGUPITO)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	65.249.065	100	65.249.065	100	65.249.065	100	65.249.065	100	65.249.065	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (KECAMATAN PRACIMANTORO)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	89.999.000	100	89.999.000	100	89.999.000	100	89.999.000	100	89.999.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (KECAMATAN PUHPELEM)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	55.608.000	100	55.608.000	100	55.608.000	100	55.608.000	100	55.608.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (KECAMATAN PURWANTORO)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	95.626.572	100	95.626.572	100	95.626.572	100	95.626.572	100	95.626.572	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (KECAMATAN SELOGIRI)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	72.385.000	100	72.385.000	100	72.385.000	100	72.385.000	100	72.385.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (KECAMATAN SIDOHARJO)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	84.107.035	100	84.107.035	100	84.107.035	100	84.107.035	100	84.107.035	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (KECAMATAN SLOGOHIMO)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	87.600.000	100	87.600.000	100	87.600.000	100	87.600.000	100	87.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (KECAMATAN TIRTOMOYO)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	81.319.185	100	81.319.185	100	81.319.185	100	81.319.185	100	81.319.185	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (KECAMATAN WONOGIRI)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	106.234.260	100	106.234.260	100	106.234.260	100	106.234.260	100	106.234.260	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (KECAMATAN WURYANTORO)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	34.500.000	100	34.500.000	100	34.500.000	100	34.500.000	100	34.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					25.365.220.902		25.365.220.902		25.365.220.902		25.365.220.902		25.365.220.902	
Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (KECAMATAN WONOGIRI)	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	3.773.097.238	100	3.773.097.238	100	3.773.097.238	100	3.773.097.238	100	3.773.097.238	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (KECAMATAN SELOGIRI)	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	599.311.000	100	599.311.000	100	599.311.000	100	599.311.000	100	599.311.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (KECAMATAN NGADIROJO)	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	1.193.851.000	100	1.193.851.000	100	1.193.851.000	100	1.193.851.000	100	1.193.851.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (KECAMATAN NGUNTORONADI)	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	1.089.150.000	100	1.089.150.000	100	1.089.150.000	100	1.089.150.000	100	1.089.150.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (KECAMATAN SIDOHARJO)	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	1.172.500.000	100	1.172.500.000	100	1.172.500.000	100	1.172.500.000	100	1.172.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (KECAMATAN JATISRONO)	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	1.150.305.490	100	1.150.305.490	100	1.150.305.490	100	1.150.305.490	100	1.150.305.490	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (KECAMATAN JATIPURNO)	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	1.143.917.000	100	1.143.917.000	100	1.143.917.000	100	1.143.917.000	100	1.143.917.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (KECAMATAN JATIROTO)	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	1.163.958.000	100	1.163.958.000	100	1.163.958.000	100	1.163.958.000	100	1.163.958.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (KECAMATAN GIRIMARTO)	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	1.148.814.425	100	1.148.814.425	100	1.148.814.425	100	1.148.814.425	100	1.148.814.425	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (KECAMATAN PURWANTORO)	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	1.198.396.030	100	1.198.396.030	100	1.198.396.030	100	1.198.396.030	100	1.198.396.030	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat - KECAMATAN SLOGOHIMO	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	1.183.998.000	100	1.183.998.000	100	1.183.998.000	100	1.183.998.000	100	1.183.998.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (KECAMATAN BULUKERTO)	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	552.981.000	100	552.981.000	100	552.981.000	100	552.981.000	100	552.981.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (KECAMATAN KISMANTORO)	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	1.203.560.000	100	1.203.560.000	100	1.203.560.000	100	1.203.560.000	100	1.203.560.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (KECAMATAN PUHPELEM)	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	590.750.000	100	590.750.000	100	590.750.000	100	590.750.000	100	590.750.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (KECAMATAN BATURETNO)	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	4.289.500	100	4.289.500	100	4.289.500	100	4.289.500	100	4.289.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (KECAMATAN GIRIWOYO)	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	1.085.040.000	100	1.085.040.000	100	1.085.040.000	100	1.085.040.000	100	1.085.040.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (KECAMATAN BATUWARNO)	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	570.129.000	100	570.129.000	100	570.129.000	100	570.129.000	100	570.129.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (KECAMATAN KARANGTENGAH)	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (KECAMATAN GIRITONTRO)	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	1.082.899.000	100	1.082.899.000	100	1.082.899.000	100	1.082.899.000	100	1.082.899.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (KECAMATAN PARANGGUPITO)	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	2.750.000	100	2.750.000	100	2.750.000	100	2.750.000	100	2.750.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (KECAMATAN TIRTOMOYO)	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	1.265.999.940	100	1.265.999.940	100	1.265.999.940	100	1.265.999.940	100	1.265.999.940	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (KECAMATAN WURYANTORO)	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	1.140.737.000	100	1.140.737.000	100	1.140.737.000	100	1.140.737.000	100	1.140.737.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (KECAMATAN EROMOKO)	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	1.127.870.618	100	1.127.870.618	100	1.127.870.618	100	1.127.870.618	100	1.127.870.618	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (KECAMATAN MANYARAN)	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	1.288.030.661	100	1.288.030.661	100	1.288.030.661	100	1.288.030.661	100	1.288.030.661	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (KECAMATAN PRACIMANTORO)	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	628.886.000	100	628.886.000	100	628.886.000	100	628.886.000	100	628.886.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.167.838.528		1.167.838.528		1.167.838.528		1.167.838.528		1.167.838.528	
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (KECAMATAN BATURETNO)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	32.067.800	100	32.067.800	100	32.067.800	100	32.067.800	100	32.067.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (KECAMATAN BATUWARNO)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	44.941.000	100	44.941.000	100	44.941.000	100	44.941.000	100	44.941.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (KECAMATAN BULUKERTO)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	29.699.000	100	29.699.000	100	29.699.000	100	29.699.000	100	29.699.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (KECAMATAN EROMOKO)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	56.368.900	100	56.368.900	100	56.368.900	100	56.368.900	100	56.368.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (KECAMATAN GIRIMARTO)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	63.300.000	100	63.300.000	100	63.300.000	100	63.300.000	100	63.300.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (KECAMATAN GIRITONTRO)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	27.878.000	100	27.878.000	100	27.878.000	100	27.878.000	100	27.878.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (KECAMATAN GIRIWOYO)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	53.500.000	100	53.500.000	100	53.500.000	100	53.500.000	100	53.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (KECAMATAN JATIPURNO)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	58.195.000	100	58.195.000	100	58.195.000	100	58.195.000	100	58.195.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (KECAMATAN JATIROTO)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	93.272.000	100	93.272.000	100	93.272.000	100	93.272.000	100	93.272.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (KECAMATAN JATISRONO)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	33.485.470	100	33.485.470	100	33.485.470	100	33.485.470	100	33.485.470	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (KECAMATAN KARANGTENGAH)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	57.420.000	100	57.420.000	100	57.420.000	100	57.420.000	100	57.420.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (KECAMATAN KISMANTORO)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	43.243.000	100	43.243.000	100	43.243.000	100	43.243.000	100	43.243.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (KECAMATAN MANYARAN)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	47.052.250	100	47.052.250	100	47.052.250	100	47.052.250	100	47.052.250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (KECAMATAN NGADIROJO)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	38.508.000	100	38.508.000	100	38.508.000	100	38.508.000	100	38.508.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (KECAMATAN NGUNTORONADI)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	47.240.508	100	47.240.508	100	47.240.508	100	47.240.508	100	47.240.508	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (KECAMATAN PARANGGUPITO)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	31.797.000	100	31.797.000	100	31.797.000	100	31.797.000	100	31.797.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (KECAMATAN PRACIMANTORO)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	23.688.000	100	23.688.000	100	23.688.000	100	23.688.000	100	23.688.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (KECAMATAN PUHPELEM)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	32.799.000	100	32.799.000	100	32.799.000	100	32.799.000	100	32.799.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (KECAMATAN PURWANTORO)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	35.819.100	100	35.819.100	100	35.819.100	100	35.819.100	100	35.819.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (KECAMATAN SELOGIRI)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	58.598.000	100	58.598.000	100	58.598.000	100	58.598.000	100	58.598.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (KECAMATAN SIDOHARJO)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	59.365.000	100	59.365.000	100	59.365.000	100	59.365.000	100	59.365.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (KECAMATAN SLOGOHIMO)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	39.700.000	100	39.700.000	100	39.700.000	100	39.700.000	100	39.700.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (KECAMATAN TIRTOMOYO)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	53.787.500	100	53.787.500	100	53.787.500	100	53.787.500	100	53.787.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (KECAMATAN WONOGIRI)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	58.314.000	100	58.314.000	100	58.314.000	100	58.314.000	100	58.314.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (KECAMATAN WURYANTORO)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	47.800.000	100	47.800.000	100	47.800.000	100	47.800.000	100	47.800.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4.888.576.490		4.888.576.490		44.888.576.490		44.888.576.490		4.888.576.490	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.013.723.240		3.013.723.240		3.013.723.240		3.013.723.240		3.013.723.240	
Meningkatnya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	70	74,5	75,5	3.013.723.240	76,5	3.013.723.240	77,6	3.013.723.240	78,6	3.013.723.240	79,5	3.013.723.240	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik		
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	74,5	75,5		76,5		77,6		78,6		79,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					147.602.250		147.602.250		147.602.250		147.602.250		147.602.250	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (Angka)	100	100	100	147.602.250	100	147.602.250	100	147.602.250	100	147.602.250	100	147.602.250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.417.566.000		1.417.566.000		41.417.566.000		41.417.566.000		1.417.566.000	
Meningkatkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik (%)	100	100	100	1.417.566.000	100	1.417.566.000	100	41.417.566.000	100	41.417.566.000	100	1.417.566.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					35.201.250		35.201.250		35.201.250		35.201.250		35.201.250	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	35.201.250	100	35.201.250	100	35.201.250	100	35.201.250	100	35.201.250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					47.650.000		47.650.000		47.650.000		47.650.000		47.650.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan dibidang ketahanan eekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah yang dilaksnakan (%)	100	100	100	47.650.000	100	47.650.000	100	47.650.000	100	47.650.000	100	47.650.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					226.833.750		226.833.750		226.833.750		226.833.750		226.833.750	
Meningktanya penanganan konfliik sosial yang diselesaikan	Persentase konfliik sosial yan diselesaikan (%)	100	100	100	226.833.750	100	226.833.750	100	226.833.750	100	226.833.750	100	226.833.750	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1.981.130.444.558		2.020.645.768.464		2.059.277.590.116		2.123.382.048.202		2.148.968.595.450	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan Indikator Kinerja dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terbagi menjadi dua yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wonogiri. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator yang menentukan target penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan kinerja pembangunan periode saat ini.

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada pembangunan Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2029.

Tabel 4 2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2030

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline		Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita*	Juta Rp	39,76	40,61	41,59	43,67	45,85	48,14	50,55
2	Tingkat Kemiskinan*	%	10,71	9,72	9,25-9,18	9,17-8,78	8,78-8,30	8,30-7,83	7,83-7,36
3	Indeks Reformasi Birokrasi*	Indeks	87,3	88	88,5	89	89,5	90	90,5
4	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca*	TonCO2eq	192.526,04	2.008.609,00	2.542.532,97	3.076.456,94	3.610.380,90	4.144.304,87	4.678.228,84

* Indikator Kinerja Tujuan RPJMD

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Daerah. Penetapan Indikator

Kinerja Daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4 3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026-2030

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)**	Poin	88,91	75,74	77,95	78,13	81,94	84,15	86,93	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalance of Undernourishment</i>)	%	10,44*	9,85	8,7	7,4	6,53	5,4	5,3	
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	0	0	0	0	0	0	0	
4	Kapasitas air baku	M3	1.112,20	1.112,20	1.112,20	1.112,20	1.112,20	1.112,20	1.112,20	
5	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	27,61	30,16	35,25	40,23	45,61	55,30	55,30	
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	76,99	75,65	75,69	75,74	75,78	75,83	75,87	
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	0,79*	1,09	1,24	1,39	1,54	1,69	1,84	
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	36,96	36,96	39,61	42,27	44,92	47,57	48,5	
9	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca*	TonCO2eq	192.526,04	2.008.609	2.542.532,97	3.076.456,94	3.610.380,90	4.144.304,87	4.678.228,84	
10	Penurunan Emisi sektor Energi	TonCO2eq	NA	884.257,11	1.119.308,36	1.354.359,61	1.589.410,87	1.824.462,12	2.059.513,37	
11	Penurunan Emisi sektor Lahan	TonCO2eq	NA	1.095.801,88	1.387.085,49	3.076.456,94	1.969.652,72	2.260.936,33	2.552.219,94	
12	Penurunan Emisi sektor Limbah	TonCO2eq	NA	28.550,02	36.139,12	43.728,22	51.317,32	58.906,42	66.495,53	
13	Indeks Risiko Bencana	Angka	97,71*	95,27	94,05	92,83	91,61	90,39	89,17	
14	Jumlah Penduduk	Ribu Jiwa	1054,16	1057,05	1059,77	1062,27	1064,51	1066,55	1068,26	
15	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,29	0,27	0,26	0,24	0,21	0,19	0,16	
16	Rasio Penduduk	Poin	99,55	99,49	99,41	99,34	99,26	99,19	99,11	
17	Kepadatan Penduduk	Jiwa/km ²	554	555	557	558	559	560	561	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,93	5,00-6,40	5,36-6,00	6,50-7,25	6,90-7,75	7,40-8,24	8,00-8,60	
2	Tingkat Kemiskinan*	%	10,71	9,72	9,25-9,18	9,17-8,78	8,78-8,30	8,30-7,83	7,83-7,36	
3	Produk Domestik Regional Bruto per kapita	Juta Rp	39,76	40,61	41,59	43,67	45,85	48,14	50,55	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,4	1,82-1,52	2,20-1,98	1,74-1,44	1,69-1,39	1,65-1,35	1,61-1,31	
5	Indeks Gini	Poin	0,364	0,348	0,346	0,344	0,341	0,339	0,337	
6	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	NA	19,58	20,15	20,73	21,30	21,87	22,44	
7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,55	73,08	73,99	74,14	74,68	75,21	75,75	
8	Indeks Kesehatan	Poin	87,42	87,79	88,16	88,53	88,90	89,28	89,65	
9	Usia Harapan Hidup (UHH)**	Tahun	76,82	76,87	76,92	76,97	77,02	77,07	77,12	
10	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	8	8	7	6	5	5	5	
11	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita**	%	15,1	15,1	18	14,95	14,9	14,85	14,46	
12	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	56,13	90	90	90	90	90	90	
13	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	87,7	90	90	90	90	90	90	
14	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	Indeks Pendidikan	Poin	0,62	0,62	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	
16	Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	7,68	8,11	8,16	8,20	8,24	8,27	8,30	
17	Harapan Lama Sekolah**	Tahun	12,61	12,72	12,76	12,80	12,83	12,86	12,89	
18	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional									

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	a. Literasi Membaca SD	%	88,24	88,89	88,94	88,99	89,04	89,09	89,14	
	b. Literasi Membaca SMP	%	89,01	89,06	89,11	89,16	89,21	89,26	89,31	
	c. Numerasi SD	%	88,62	88,67	88,72	88,77	88,82	88,87	88,92	
	d. Numerasi SMP	%	87,85	87,09	87,95	88,00	88,05	88,10	88,15	
19	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	35,25	52,69	56,71	59,65	62,74	66,00	68,04	
20	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	NA	70	72	74	76	78	80	
21	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	N/A	70,00	70,25	70,50	70,75	71,00	71,25	
22	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	NA	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	
23	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	NA	3500	3840	3920	4050	4150	4250	
24	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	NA	35,36	36,12	36,88	37,64	38,40	39,16	
25	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,59	0,68	0,76	0,85	0,90	0,95	0,99	
26	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)**	Angka	63,39	63,40	63,45	63,50	63,55	63,60	63,65	
27	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**	(%) Indeks	0,351	0,341	0,336	0,331	0,326	0,321	0,316	
28	Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja	%	97,6	98,18	98,26	98,34	98,42	98,5	98,58	
29	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	83,41	84,60	86,19	87,60	88,58	89,52	90,36	
30	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Angka Ketergantungan	Poin	47,77	48,46	49,20	49,96	50,76	51,63	52,55	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	18,61*	19,32	19,53	19,74	19,95	20,16	20,37	
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,79	2,91	3,03	3,15	3,27	3,39	3,51	
4	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang	128	133	133	135	138	140	143	
5	Rasio Kewirausahaan	%	NA	2,88	3,06	3,17	3,39	3,48	3,63	
6	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,28	1,28	1,31	1,39	1,47	1,56	1,65	
7	Return on Aset (ROA) BUMD	%	2,08	2,08	2,32	2,41	2,52	2,64	2,77	
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	82,45*	82,61	82,69	82,76	82,84	82,92	83,00	
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	%	67,63	70,35	70,50	71,70	72,70	73,90	74,90	
10	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	90,20	91,50	92,00	92,50	93,00	93,20	93,50	
11	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)**	%	18,99	18,99	18,84	18,68	18,52	18,37	18,21	
12	Net Ekspor Barang dan Jasa	%	-1,15	-0,69	-0,40	-0,12	0,17	0,45	0,74	
13	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan**	%	99,12	96,92	97,69	98,46	99,23	100,00	100,00	
14	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	89,20	89,60	90,00	90,40	90,80	91,20	91,60	
15	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	24,00*	25,00	25,50	26,00	26,50	27,00	27,50	
16	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	NA	70,72	72,43	74,13	75,84	77,54	79,25	
17	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	62,23	62,91	63,59	64,27	64,95	65,63	66,31	
18	Rata-rata Nilai Indeks Desa Kabupaten Wonogiri	Angka	0,7983	0,7577	0,7691	0,7694	0,7730	0,7769	0,7808	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
19	Persentase Desa Mandiri	%	45,42	43,82	45,02	45,82	46,61	47,41	48,21	
20	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	NA	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	
21	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Per PDRB	%	88,87	88,87	88,97	89,07	89,17	89,27	89,37	
22	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Pada Bank Milik Kabupaten Per PDRB	%	64,89	64,89	64,99	65,09	65,19	65,29	65,39	
23	Tingkat Inflasi (%)	%	1,77	2 ± 1	2 ± 1	2 ± 1	2 ± 1	2 ± 1	2 ± 1	
24	Disparitas harga	%	NA	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	
25	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	0,86	1,38	1,91	2,43	2,95	3,48	4,00	
26	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	6,49	7,41	7,45	7,50	7,54	7,58	7,63	
27	Kontribusi PDRB Kabupaten Wonogiri Terhadap Provinsi Jawa Tengah	%	2,19	2,19	2,19	2,20	2,20	2,20	2,21	
28	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Harga Berlaku	%	27,19	27,46	27,74	28,01	28,29	28,58	28,86	
29	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian (%)	%	97,29	97,47	97,60	97,72	97,85	97,97	98,10	
30	Persentase konflik Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan Hak Asasi Manusia yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
31	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	3,023	3,050	3,090	3,120	3,170	3,200	3,250	
32	Indeks Akses Keuangan Daerah	Nilai	4,10	4,16	4,19	4,23	4,26	4,29	4,31	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Birokrasi*	Indeks	87,3	88	88,5	89	89,5	90	90,5	
2	Indeks Reformasi Hukum	Poin	NA	37,75	40,36	42,98	45,59	48,20	50,81	
3	Indeks Sistem Pemerintahan	Poin	4,2	4,24	4,28	4,31	4,35	4,39	4,43	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Berbasis Elektronik									
4	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,99*	4,08	4,13	4,17	4,22	4,26	4,31	
5	Indeks Integritas Nasional	Angka	75,89	77	78	79	80	81	82	
6	Kapabilitas inovasi	Angka	NA	2,50	2,55	2,60	2,65	2,70	2,75	
7	Persentase Penegakan Perda	%	70,15*	100	100	100	100	100	100	
8	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,77	3,85	3,93	4,01	4,09	4,17	4,25	
9	Nilai SAKIP	Angka	77,69	78,69	79,69	80,69	81,5	82	82,5	
10	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	3,023	3,050	3,090	3,120	3,170	3,200	3,250	
V	INDIKATOR KINERJA URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH									
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar									
A	Pendidikan									
1	Indeks Pendidikan	Poin	0,62	0,62	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	
2	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	7,68	8,11	8,16	8,20	8,24	8,27	8,30	
3	Harapan Lama Sekolah**	Tahun	12,61	12,72	12,76	12,80	12,83	12,86	12,89	
4	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun**	%	98,77	98,82	98,87	98,92	98,97	99,02	99,07	
5	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun**	%	83,41	84,60	86,19	87,60	88,58	89,52	90,36	
B	Kesehatan									
1	Usia Harapan Hidup (UHH)**	Tahun	76,82	76,87	76,92	76,97	77,02	77,07	77,12	
2	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	8	8	7	6	5	5	5	
3	Jumlah Kasus Kematian Balita	Kasus	131	110	107	104	102	100	98	
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita**	%	15,1	15,1	18	14,95	14,9	14,85	14,46	
5	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional**	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	%	N/A	2,9	5,9	8,8	14,7	29,4	44,1	
7	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	%	N/A	80	82	84	86	88	90	
8	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	N/A	47,65	47,65	47,65	51,76	51,76	56,47	
C	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang									
1	Rasio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah Kabupaten Wonogiri	%	81,99	82,1	82,3	82,5	82,7	82,9	83,1	
2	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	82,23	82,63	83,03	83,43	83,83	84,23	84,63	
3	Kapasitas air baku	M3	1.112,20	1.112,20	1.112,20	1.112,20	1.112,20	1.112,20	1.112,20	
4	Persentase sumber air baku dalam kondisi baik	%	77,81	77,81	77,81	77,81	77,81	77,81	77,81	
5	Persentase jaringan irigasi primer dan sekunder kabupaten dalam kondisi baik	%	66,68	66,68	66,68	66,68	66,68	66,68	66,68	
6	Persentase penduduk berakses air minum aman	%	19,66	19,66	19,66	19,66	19,66	19,66	19,56	
7	Persentase penduduk berakses air minum layak	%	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	
8	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan**	%	0	0	0	0	0	0	0	
9	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	0,79*	1,09	1,24	1,39	1,54	1,69	1,84	
10	Persentase RDTR yang terintegrasi dengan OSS	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
D	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman									

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan**	%	N/A	95,41	95,77	96,13	96,49	96,85	97,21	
2	Persentase penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	N/A	7,83	8,5	9,28	10,23	11,40	12,87	
E	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3)	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase penegakan Peraturan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase penegakan Peraturan Bupati	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Angka	10,17	10,16	10,15	10,14	10,13	10,12	10,11	
5	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,75	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72	
7	Persentase kelurahan / desa tangguh bencana kategori madya	%	N/A	N/A	10	20	30	40	50	
8	Persentase bencana yang tertangani dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
F	Sosial									
1	Persentase PPKS Yang Mandiri	%	50	50	50	50	50	50	50	
2	Persentase Keberfungsian PSKS	%	50	50	50	50	50	50	50	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase PPKS yang tergraduasi	%	N/A	2	2	2	2	2	2	
	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar									
A	Tenaga Kerja									
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	37,53	37,75	38,00	38,25	38,40	38,64	38,82	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	%	67,63	70,35	70,50	71,70	72,70	73,90	74,90	
3	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	97,60	96,70	97,65	97,68	97,70	97,73	97,75	
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	35,25	52,69	56,71	59,65	62,74	66,00	n/a	
B	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak									
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**	Indeks	0,351	0,341	0,336	0,331	0,326	0,321	0,316	
2	Indeks Pembangunan Gender	Angka	92,38	92,41	92,51	92,61	92,71	92,81	92,91	
3	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Kategori	2	3	3	3	3	4	4	
C	Pangan									
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)**	Nilai	N/A	75,74	77,95	78,13	81,94	84,15	86,93	
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)**	%	N/A	9,85	8,7	7,4	6,53	5,4	5,3	
3	Kualitas Konsumsi Pangan yang diindikasikan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	92,8	93,3	93,8	94,3	94,8	95,3	95,8	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
D	Pertanahan									
1	Persentase tertib administrasi pertanahan	%	85,69	87,32	88,96	90,6	92,24	93,87	95,51	
E	Lingkungan Hidup									
1	Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
2	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	36,96	36,96	39,61	42,27	44,92	47,57	48,5	
3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,76	86,13	86,14	86,15	86,16	86,17	86,18	
4	Indeks Kualitas Air	Indeks	80	73,81	73,91	74,01	74,11	74,21	74,31	
5	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	42.63	59,43	59,44	59,45	59,46	59,47	59,48	
6	Rasio Ruang Terbuka Hijau	%	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	
F	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil									
1	Indeks pelayanan Publik bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil	Angka	4,39	4,463	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	
2	Persentase kepemilikan dokumen KTP el	%	99,41	99,41	99,46	99,50	99,55	99,60	99,65	
3	Persentase kepemilikan dokumen KK	%	99.41	99,41	99,46	99,50	99,55	99,60	99,65	
4	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	86	88	90	95.60	95.65	95.70	95.70	
5	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 tahun)	%	96.99	97.70	98.41	99	99.50	99.70	99.80	
6	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	%	50	51	52	53	53.5	54	54.50	
7	Persentase kepemilikan Akta Kematian	%	87.75	89.50	90	100	100	100	100	
8	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan	%	86,64	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
G	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa									
1	Rata-rata Nilai Indeks Desa Kabupaten Wonogiri	Angka	0,7983	0,7577	0,7691	0,7694	0,7730	0,7769	0,7808	
2	Persentase Desa Mandiri	%	45,42	43,82	45,02	45,82	46,61	47,41	48,21	
H	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana									
1	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)**	Angka	63,39	63,40	63,45	63,50	63,55	63,60	63,65	
2	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	-0,81	0,250	0,245	0,240	0,235	0,230	0,225	
3	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Nilai	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	
I	Perhubungan									
1	Indeks Keselamatan Lalu Lintas	Nilai	150,47	150,17	149,87	149,57	149,2	149	148,7	
2	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	73	74	75	76	77	78	79	
3	Rasio Konektivitas	Indeks	1,93	1,9	1,87	1,84	1,81	1,78	1,75	
J	Komunikasi Dan Informatika									
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemerintah Digital	Poin	4,2	4,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Predikat	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
K	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah									
1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,28	1,28	1,31	1,39	1,47	1,56	1,65	
2	Persentase Koperasi Sehat	%	31,21	12,68	13.00	13.25	13.50	13.75	14.00	
3	Rasio penduduk yang berwirausaha	%	5,65	4,15	5	5,05	5,15	5,25	5,35	
4	Disparitas Harga**	%	NA	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	
L	Penanaman Modal									
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)**	%	N/A	18,99	18,84	18,68	18,52	18,37	18,21	
2	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	N/A	7	7,2	7,4	7,6	7,8	8	
M	Kepemudaan Dan Olah Raga									
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	89.76	89.80	89.84	89.89	89.94	89.98	90.03	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	8.9	8.9	9.1	9.3	9.6	9.8	10	
3	Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	%	0	4.63	5.56	5.56	6.48	6.48	7.41	
4	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	0.73	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
N	Statistik									
1	Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
O	Persandian									

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	72,56	72,75	73	73,25	73,5	73,75	74	
P	Kebudayaan									
1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekskul kesenian	%	0	70	70,25	70,5	70,75	71	71,25	
2	Prosentase Objek Pemajuan Kebudayaan	%	NA	Na	45,45	54,55	63,64	72,73	81,82	
3	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	
4	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Benda (WBB) yang dilestarikan	%	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	
Q	Perpustakaan									
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	45,57	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	
2	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%	0,59	0,66	0,76	0,85	0,90	0,95	0,99	
R	Kearsipan									
1	Indeks Kearsipan Kabupaten	Indeks	76,32	76,5	76,75	77,25	77,5	78	78	
2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal	Angka	73,91	74	74,25	74,5	74,75	75	75	
3	Presentse Nilai Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah Benilai Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Urusan Pilihan									

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A	Kelautan Dan Perikanan									
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota	Ton	11.158,52	9.656	9.682	9.704	9.719	9.732	9.741	
B	Pariwisata									
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2.89	2,89	2,99	3,09	3,19	3,29	3,39	
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1.79	2.91	3.03	3.15	3.27	3.39	3.51	
3	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota	%	7.43	7.82	8.21	8.62	9.05	9.50	9.97	
C	Pertanian									
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Nilai	585,24	588,5	590	596,5	602	606,5	616,5	
2	Pertumbuhan sektor Komoditas Pertanian Strategis Tanaman Pangan	%	1,67	1,67	1,68	1,7	1,71	1,72	1,73	
3	Pertumbuhan sektor Komoditas Pertanian Strategis Tanaman Hortikultura	%	2.74	2.74	2.9	03.05	3.15	3.30	3.45	
4	Pertumbuhan sektor Komoditas Pertanian Strategis Tanaman Perkebunan	%	3,33	3,33	3,4	3.50	3.55	3.60	3.65	
5	Pertumbuhan populasi ternak	%	1,24	1,85	2,23	2,43	2,64	2,73	2,95	
D	Perdagangan									
1	UMKM Naik Kelas	Unit Usaha	2	2	2	2	2	2	2	
2	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	
E	Perindustrian									

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	17,75	17,80	17,85	17,90	17,95	18,00	18,05	
2	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang aktif	%	n/a	49,5	50,72	51,45	53,58	55,38	57,54	
3	Tingkat pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	3,77	1,50	4,50	5,20	6,00	6,90	7,90	
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
A	Sekretariat Daerah									
1	Nilai LPPD	angka	3,6718	3,6718	3,6918	3,7068	3,7218	3,7368	3,7518	
2	Indeks Harga Konsumen (IHK)	%	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
3	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	64,89	64,89	64,99	65,09	65,19	65,29	65,39	
4	Total Kredit/PDRB	%	88,87	88,87	88,97	89,07	89,17	89,27	89,37	
5	Return on Asset (ROA) BUMD	%	2,08	2,08	2,32	2,41	2,52	2,64	2,77	
6	Persentase capaian data IKK	%	75	75	75	75	75	75	75	
7	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	37,75	37,75	40,36	42,98	45,59	48,20	50,81	
8	Nilai kematangan organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45	46	42	42	43	43	44	
9	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,05	81,10	81,15	81,35	81,35	81,55	81,65	81,65	
10	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Nilai	1	1	1	1	1	1	1	
B	Sekretariat DPRD									
1	Indeks Kepuasan DPRD	Angka	83	83	83	83,5	83,6	83,7	83,8	
2	Persentase agenda prolegda yang telah dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A	Perencanaan									
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	%	71,31	73	74	75,5	76	76,5	77	
2	Persentase kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Capaian Prioritas Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
B	Keuangan									
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	12,67	12,85	13,00	13,15	13,35	13,50	13,75	
3	Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset	%	100	89	90	90	90	90	90	
4	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	N/A	N/A	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	
C	Kepegawaian									
1	Indeks Merit Sistem	Angka	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	
2	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN (Indeks NSPK)	Angka	95.10	95,10	95,10	95,10	95,15	95,15	95,15	
D	Penelitian Dan Pengembangan									
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	90,20	91,50	92,00	92,50	93,00	93,20	93,50	
2	Kapabilitas inovasi	Angka	NA	2,50	2,55	2,60	2,65	2,70	2,75	
	Unsur Pengawasan									
	Inspektorat									
1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3	3	3	
2	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Unsur Kewilayahan									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83	83,5	83,5	84	84,2	84,5	84,7	
	Unsur Pemerintahan Umum									
1	Persentase konflik Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan Hak Asasi Manusia yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan politik	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase penyelesaian penanganan konflik	%	100	100	100	100	100	100	100	
VI INDIKATOR KINERJA KUNCI										
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar									
A	PENDIDIKAN									
1	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	82,09	82	83	84	85	86	87	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98,47	99	100	100	100	100	100	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	101,1	100	100	100	100	100	100	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang	%	95,15	95	95	95	95	95	95	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan									
B	KESEHATAN									
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	%	1,02	1,03	1,03	1,15	1,16	1,21	1,23	
2	Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	91,06	92	93	94	95	96	97	
8	Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	99,16	100	100	100	100	100	100	
9	Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	82,7	84	85	86	87	88	89	
10	Presentase Penderita hipertensi yang mendapatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	elayanan kesehatan sesuai standar									
11	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	
13	Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
C	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kab/Kota	%	0 (Tidak Ada Kawasan Permukiman di Wilayah Sungai)	0 (Tidak Ada Kawasan Permukiman di Wilayah Sungai)	0 (Tidak Ada Kawasan Permukiman di Wilayah Sungai)	0 (Tidak Ada Kawasan Permukiman di Wilayah Sungai)	0 (Tidak Ada Kawasan Permukiman di Wilayah Sungai)	0 (Tidak Ada Kawasan Permukiman di Wilayah Sungai)	0 (Tidak Ada Kawasan Permukiman di Wilayah Sungai)	0 (Tidak Ada Kawasan Permukiman di Wilayah Sungai)
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0 (Tidak ada Kawasan Permukiman di Sepanjang Pantai)	0 (Tidak ada Kawasan Permukiman di Sepanjang Pantai)	0 (Tidak ada Kawasan Permukiman di Sepanjang Pantai)	0 (Tidak ada Kawasan Permukiman di Sepanjang Pantai)	0 (Tidak ada Kawasan Permukiman di Sepanjang Pantai)	0 (Tidak ada Kawasan Permukiman di Sepanjang Pantai)	0 (Tidak ada Kawasan Permukiman di Sepanjang Pantai)	0 (Tidak ada Kawasan Permukiman di Sepanjang Pantai)
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	82,36	82,36	82,56	82,76	82,96	83,16	83,36	
4	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	%	87,37	87,37	87,57	87,77	87,97	88,17	88,37	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota									
5	Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	95,02	95,12	95,22	95,32	95,42	95,52	95,62	
6	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	%	89,2	89,6	90	90,4	90,8	91,2	91,6	
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	
D	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN									
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	54,36	61,96	69,57	77,18	84,79	92,40	100	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		0,042	0,036	0,029	0,022	0,016	0,007	0,0	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	100	100	100	100	
E	TRANTIBUMLINMAS									
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100	100	100	100	100	100	100	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	10,17	10,16	10,15	10,14	10,13	10,12	10,11	
F	SOSIAL									
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)									
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar									
A	TENAGA KERJA									
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	40,14	43,16	46,18	49,2	52,22	55,24	58,26	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	37,53	37,75	38,00	38,25	38,40	38,64	38,82	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	18,5	20,67	22,84	25,01	27,18	29,35	31,52	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	78,72	80,16	81,5	82,32	83,27	84,18	85,2	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
B	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	9,12	9,14	9,16	9,18	9,2	9,24	9,25	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	1,47	1,45	1,43	1,41	1,39	1,38	1,37	
C	PANGAN									
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	79,64	5,8	12	18	24	24	25	
D	PERTANAHAN									
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	21,99	80	80	80	80	80	80	
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal	%	0 (bukan	0 (bukan	0 (bukan kewenangan)	0 (bukan	0 (bukan	0 (bukan	0 (bukan	0 (bukan

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		kewenangan)	kewenangan)		kewenangan)	kewenangan)	kewenangan)	kewenangan)	
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	kasus	0	0	0	0	0	0	0	
E	LINGKUNGAN HIDUP									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	65,60	75,65	75,69	75,74	75,78	75,83	75,87	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota		56,74	57	57,5	58	58,5	59	60	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	42,86	30	25	20	15	10	5	
F	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Perekaman KTP elektronik	%	99,79	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	94,73	100	100	100	100	100	100	
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,79	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
G	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	100,00	23,11	25,10	26,69	29,08	31,08	33,07	
H	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB									
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	81,17	81,17	81,17	81,17	81,18	81,19	81,2	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	5,93	5,92	5,9	5,89	5,87	5,86	6,85	
I	PERHUBUNGAN									
1	Rasio konektivitas	Indeks		1,93	1,9	1,87	1,84	1,81	1,78	
2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota (V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota)	Nilai	0,091	0,091	0,09	0,089	0,088	0,087	0,086	
J	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
K	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	46,34	47,04	47,75	48,94	49,88	51,06		
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	100	100	100	100	100	100	100	
L	PENANAMAN MODAL									
1	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota	%	21,2	7	7,2	7,4	7,6	7,8	8	
M	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA									
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Angka	8,7	8,9	9,1	9,3	9,6	9,8	10,0	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	89,76	89,80	89,85	89,90	89,94	89,99	90,03	
3	Peningkatan prestasi olahraga	%	0,73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
N	STATISTIK									
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
O	PERSANDIAN									
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Nilai	72,56	72,75	73	73,25	73,5	73,75	74	
P	KEBUDAYAAN									
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	100	100	100	100	100	
Q	PERPUSTAKAAN									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	78,2	78,7	79,2	79,7	80,2	80,7	81,2	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	45,57	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	
R	KEARSIPAN									

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	98,29	98.41	98.53	98.65	98.77	98.89	99	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	50	50.5	51	51.5	52	52.5	53	
	Urusan Pilihan									
A	KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	%	100,01	90%	90,50%	91%	91,50%	92%	92,50%	
B	PARIWISATA									
1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	7,45	7,82	8,21	8,62	9,05	9,5	9,97	
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2.79	2,89	2,99	3,09	3,19	3,29	3,39	
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	4,07	4,11	4,15	4,19	4,23	4,27	4,31	
5	Tingkat hunian akomodasi		15,17	15,32	15,47	15,59	15,74	15,89	16,04	
C	PERTANIAN									
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Nilai	585,24	588,5	590	596,5	602	606,5	616,5	
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-16,48	-5	-5	-5	-5	-5	-5	
D	KEHUTANAN	%	100 (Tidak ada kewenangan)	100 (Tidak ada kewenangan)	100 (Tidak ada kewenangan)	100 (Tidak ada kewenangan)	100 (Tidak ada kewenangan)	100 (Tidak ada kewenangan)	100 (Tidak ada kewenangan)	
E	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	%	0 (Tidak ada sumber panas bumi di Kabupaten Wonogiri yang dimanfaatkan langsung)	0 (Tidak ada sumber panas bumi di Kabupaten Wonogiri yang dimanfaatkan langsung)	0 (Tidak ada sumber panas bumi di Kabupaten Wonogiri yang dimanfaatkan langsung)	0 (Tidak ada sumber panas bumi di Kabupaten Wonogiri yang dimanfaatkan langsung)	0 (Tidak ada sumber panas bumi di Kabupaten Wonogiri yang dimanfaatkan langsung)	0 (Tidak ada sumber panas bumi di Kabupaten Wonogiri yang dimanfaatkan langsung)	0 (Tidak ada sumber panas bumi di Kabupaten Wonogiri yang dimanfaatkan langsung)	
F	PERDAGANGAN									
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)									
2	Persentase Kinerja realisasi Pupuk	%	50,47	50	50	50	50	50	50	
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	26,72	26	26,5	27	27,5	28	28,5	
G	PERINDUSTRIAN									
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	%	4,50	4,87	5,80	6,60	7,75	8,60	9,54	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	44,44	45,11	45,68	46,02	46,43	46,77	47,11	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan	%	0 (Belum ada kawasan Industri di Kab.	0 (Belum ada kawasan Industri di Kab.	0 (Belum ada kawasan Industri di Kab. Wonogiri)	0 (Belum ada kawasan Industri di Kab. Wonogiri)	0 (Belum ada kawasan Industri di Kab. Wonogiri)	0 (Belum ada kawasan Industri di Kab. Wonogiri)	0 (Belum ada kawasan Industri di Kab. Wonogiri)	0 (Belum ada kawasan Industri di Kab.

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota		Wonogiri)	Wonogiri)					Wonogiri)	
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100	100	100	100	
H	TRANSMIGRASI		100	100	100	100	100	100	100	
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									
A	PERENCANAAN DAN KEUANGAN									
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	8,97	8,98	8,99	9,00	9,01	9,02	9,03	
2	Rasio PAD	%	12,51	6,78	10,53	10,81	11,07	11,39	11,61	
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum(dikurangi transfer expenditures)	%	70,46	70,47	70,48	70,49	70,50	70,51	70,52	
6	Opini Laporan Keuangan	Predikat	9 (2014= WDP 2015- 2023=WTP)	10 (10 tahun WTP)	10 (10 tahun WTP)	10 (10 tahun WTP)	10 (10 tahun WTP)	10 (10 tahun WTP)	10 (10 tahun WTP)	
B	PENGADAAN									
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang	%	0	0	0	0	0	0	0	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama									
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	50,90	60,00	69,00	74,00	77,00	80,00	82,00	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	42,59	45,00	48,00	50,00	52,00	54,00	56,00	
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	14,10	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	
C	KEPEGAWAIAN									
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	62,45	63,50	64,50	65,50	66,50	67,50	67,50	
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	15,58	15,58	15,75	15,75	15,95	16,10	16,10	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100	100	100	100	
D	MANAJEMEN KEUANGAN									
1	Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	7,38	7,35	7,33	7,29	7,27	7,26	7,25	
2	Revenue Mobilization : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	28,48	28,48	28,55	28,75	28,96	29,50	30,00	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Manajemen Aset	Nilai	4 (4 YA)	4 (4 YA)	4 (4 YA)	4 (4 YA)	4 (4 YA)	4 (4 YA)	4 (4 YA)	
4	Cash Management : Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	6,62	6,63	6,64	6,65	6,65	6,67	6,68	
E	TRANSPARASI DAN PARTISIPASI PUBLIK									
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	93,73	94	94	94	94	94	94	
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP



BAB V PENUTUP

Penyusunan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, selain itu juga mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sebagai wujud dari keterpaduan dalam perencanaan pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Wonogiri yang akan diwujudkan dalam waktu 5 tahun mendatang.

Perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 ini dapat diwujudkan dengan baik dengan didukung komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan, peran serta para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan, kondusivitas nasional dan global yang menjamin stabilitas ekonomi dan pembangunan, kemampuan adaptasi terhadap situasi disruptif dan peran serta masyarakat.

5.1 Manajemen Risiko

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis yang penuh ketidakpastian, kompleksitas, dan risiko multidimensional. Oleh karena itu, pendekatan **manajemen risiko** menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya aspiratif tetapi juga realistis, adaptif, dan responsif terhadap berbagai tantangan.

Manajemen risiko dalam RPJMD dimaksudkan sebagai upaya sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan memitigasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, serta program pembangunan daerah. Risiko yang dimaksud meliputi risiko sosial, ekonomi, lingkungan, kebencanaan, politik, hingga risiko teknologi dan digitalisasi.

Tabel 5. 1. Manajemen Risiko

NO	POKOK VISI	MISI	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	BERDAYASAING	MISI 1: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing dan berkelanjutan	TUJUAN : Mewujudkan Wonogiri Yang Berdayasaing, Maju, Sejahtera, Dan Berkelanjutan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota**					
			SASARAN : Terwujudnya ekonomi yang berdayasaing, dan berkelanjutan.	Pertumbuhan Ekonomi	UMKM tidak berkembang maksimal	Pembinaan kepada pelaku UMKM belum dilakukan secara optimal	Pendapatan yang dihasilkan dari UMKM rendah	Mengadakan pembinaan dan pelatihan kerja untuk pelaku UMKM	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Usaha Kecil dan Menengah
					UMKM masih enggan mengurus izin usaha	Ketidaktahuan pelaku UMKM akan akses perizinan	Banyaknya UMKM yang mengalami kesulitan permodalan karena tidak berizin	Sosialisasi dari Dinas PMPTSP melalui desa tentang mekanisme perizinan usaha	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Kontribusi PDRB Kabupaten Wonogiri Terhadap Provinsi Jawa Tengah	Ketimpangan ekonomi antar-Kabupaten	Tidak meratanya kontribusi yang diberikan masing-masing kabupaten kepada Provinsi	Kabupaten dengan kontribusi rendah mungkin tidak mendapatkan alokasi anggaran yang memadai untuk membangun daerahnya	Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keuangan
Tingkat Pengangguran Terbuka**	Pungutan liar	SDM pelayanan perizinan tidak berintegritas	Investor tidak mau masuk	Memaksimalkan pelayanan perizinan berbasis aplikasi	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman				

NO	POKOK VISI	MISI	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB
									Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	MAJU	MISI 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	TUJUAN : Mewujudkan Wonogiri Yang Berdayasaing, Maju, Sejahtera, Dan Berkelanjutan	Indeks Reformasi Birokrasi*					
			SASARAN : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Adaptif	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP turun	Perubahan indikator menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru	Akuntabilitas kinerja dinilai kurang baik	Memperbaiki penetapan indikator kinerja, sehingga tetap terukur dan realistis	Sekretariat Daerah
				Indeks Integritas Nasional**	Manipulasi penilaian indeks	Untuk menjaga citra positif pemerintah daerah	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah menurun	Memakai sumber data penilaian dari berbagai pihak, internal (pemd), dan masyarakat (kuesioner)	Inspektorat
				Indeks Pelayanan Publik*	Inovasi pelayanan publik belum optimal	Koordinasi dan kolaborasi antar unit pelayanan publik belum optimal	Kualitas pelayanan publik menurun karena kurangnya profesionalitas ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya	Meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administtrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	SEJAHTERA	MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Didukung	TUJUAN : Mewujudkan Wonogiri Yang Berdayasaing, Maju, Sejahtera, Dan Berkelanjutan	Tingkat Kemiskinan*					

NO	POKOK VISI	MISI	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB
		Lingkungan Sosial dan Budaya Masyarakat Maju	SASARAN : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang maju, produktif, dan berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Manipulasi penilaian indeks	Untuk menjaga citra positif pemerintah daerah	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah menurun	Memakai sumber data penilaian dari berbagai pihak, internal (pemda), dan masyarakat (kuesioner)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan, Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
4	BERKELANJUTAN	MISI 4: Mewujudkan Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana	TUJUAN : Mewujudkan Wonogiri Yang Berdayasaing, Maju, Sejahtera, Dan Berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca*		Perbedaan pendapatan yang cukup tinggi	Meningkatkan potensi ketegangan sosial	Pemerataan pendidikan yang berkualitas dengan memfasilitasi sekolah gratis minimal 13 tahun	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
			SASARAN :Terwujudnya harmoni manusia dan lingkungan melalui peningkatan kewaspadaan serta mitigasi bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**	Penurunan kualitas lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, industri kecil/menengah/besar	Pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan yang masih rendah	Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Memperbaiki regulasi yang ada dengan mempertegas punishment	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
				Indeks Resiko Bencana	Kesadaran masyarakat dalam memahami resiko bencana masih kurang	Edukasi tentang pemahaman resiko bencana kurang optimal	Upaya mitigasi bencana kurang optimal	Melakukan kampanye dan simulasi mitigasi bencana terutama pada daerah yang memiliki resiko bencana tinggi	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

5.2 Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan dan kontinuitas kebijakan pembangunan daerah. Dalam upaya mencegah kekosongan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah mendatang maka Penyusunan Ranwal RPJMD Kabupaten Wonogiri periode mendatang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJMD periode sebelumnya berakhir. Kurun waktu RPJMD Kabupaten Wonogiri periode berikutnya adalah sesuai dengan kurun waktu RPJMN yang akan datang.

Perubahan RPJMD Kabupaten Wonogiri 2025 – 2029 ini dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan yang berlaku;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
3. Terjadi perubahan yang mendasar dalam kebijakan pembangunan nasional.

5.3 Kaidah Pelaksanaan.

Penyusunan kaidah pelaksanaan bermakna sebagai pedoman dalam pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025–2029. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga dapat mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pendanaan dan waktu pelaksanaan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025–2029, adalah sebagai berikut :

1. Konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai manajemen risiko terhadap tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran, untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas
2. Kerangka pengendalian dan evaluasi yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, dengan ruang lingkup meliputi:
 - a. Pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan,

- b. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko,
3. Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri agar melaksanakan arah kebijakan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 sebaik-baiknya;
4. Semua perangkat daerah Kabupaten Wonogiri dalam menyusun dokumen perencanaan berkewajiban memedomani RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029.
5. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Penjabaran dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 yang memuat visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih kedalam RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029.
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029, maka Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Wonogiri menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 secara periodik;

7. Selanjutnya agar dapat menjamin pencapaian visi dan misi yang telah disusun, maka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI WONOGIRI,
ttd
SETYO SUKARNO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
ttd
F.X.PRANATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA
TENGAH: (2-141/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

F. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007